

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II
PERENCANAAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

(4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan:
   a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
   b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Daerah;
   c. pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD;
   d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta, dan masyarakat terhadap program pembangunan Daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni "Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya".

BAB IV

RPJM DAERAH

Pasal 5

(1) RPJM Daerah Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, strategi, dan arah pembangunan serta program prioritas Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.

(2) RPJM Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ;
d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan
i. BAB IX PENUTUP.

(3) Isi dan uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan Strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH

Pasal 7

(1) Bapelitbangda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan persepakatan rancangan awal RPJM Daerah.

(3) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

(4) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 8

(1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ini, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri maupun pihak yang berkepentingan.

(2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.

(3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.

(5) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 13

(1) Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada DPRD dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJM DAERAH

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 14

(1) Dalam hal tertentu rencana pembangunan Daerah dapat diubah dengan alasan:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

c. merugikan kepentingan nasional.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

(1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program pembangunan jangka menengah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bapelitbangda.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 27 September 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.11.111.21

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Rasionalisasinya, perencanan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu sama lain. Perencanan Pembangunan daerah merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program pembangunan daerah, wajib mengacu pada perencanaan pembangunan, baik Provinsi maupun Nasional, serta perencanaan pembangunan jangka panjang maupun menengah.

Untuk menjamin berjalannya sistem perencanaan pembangunan, dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan dilantiknya **Drs. H. Budiman.,M.Pd** sebagai Bupati Luwu Timur pada tanggal 5 April 2021, maka Kabupaten Luwu Timur berkewajiban menyusun RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang disusun oleh Pemerintah kabupaten dengan melibatkan stakeholder serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan meliputi :

a. ***Politik***, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana,karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu,rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

b. ***Teknokratik*,** pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.

c. ***Partisipatif*,** pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

d. ***Atas-bawah* (*top-down*)** dan **Bawah-atas (*bottom-up*),** Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas- bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Luwu Timur serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk di bahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dari hasil pengolahan data, indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Kab. Luwu Timur telah dilaksanakan dan mencapai target sebesar 35,53 % atau sebanyak 70 indikator dari total 197 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Luwu Timur, sebanyak 28,43 % atau 56 indikator telah dilaksanakan, namun belum mencapai target, sebanyak 8,12 % atau 16 indikator belum terlaksana dan mencapai target serta sebanyak 27,92 % atau 55 indikator belum/tidak memiliki data. Selanjutnya capaian indikator Makro pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 %, tingkat kemiskinan sebesar 6,85 %, PDRB perkapita 70,49 juta, angka penganggura terbuka sebesar 4,46 %, dan Gini Ratio sebesar 0,405 % serta IPM sebesar 73,22.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 diwujudkan melalui penetapan program prioritas daerah sebagai bentuk respon terhadap janji politik kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan. Dengan demikian akan tercipta keselarasan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dengan rencana strategis Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian LIngkungan Hidup Strategis (Lenabaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulwesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik pada skala Lokal, Regional maupun Nasional dan dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya secara vertical berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Keterkaitan secara horizontal berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, yang kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA-PD dan RKPD sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD

dan dijadikan dasar pennyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hubungan keterkaitan antara Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan Visi RPJM Provinsi dan RPJMN dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.
Keterkaitan antara Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan Visi RPJM Provinsi dan RPJMN

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Visi RPJMN
Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Selanjutnya untuk melihat secara komprehensif hubungan antar dokumen dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.1
Hubungan antar dokumen

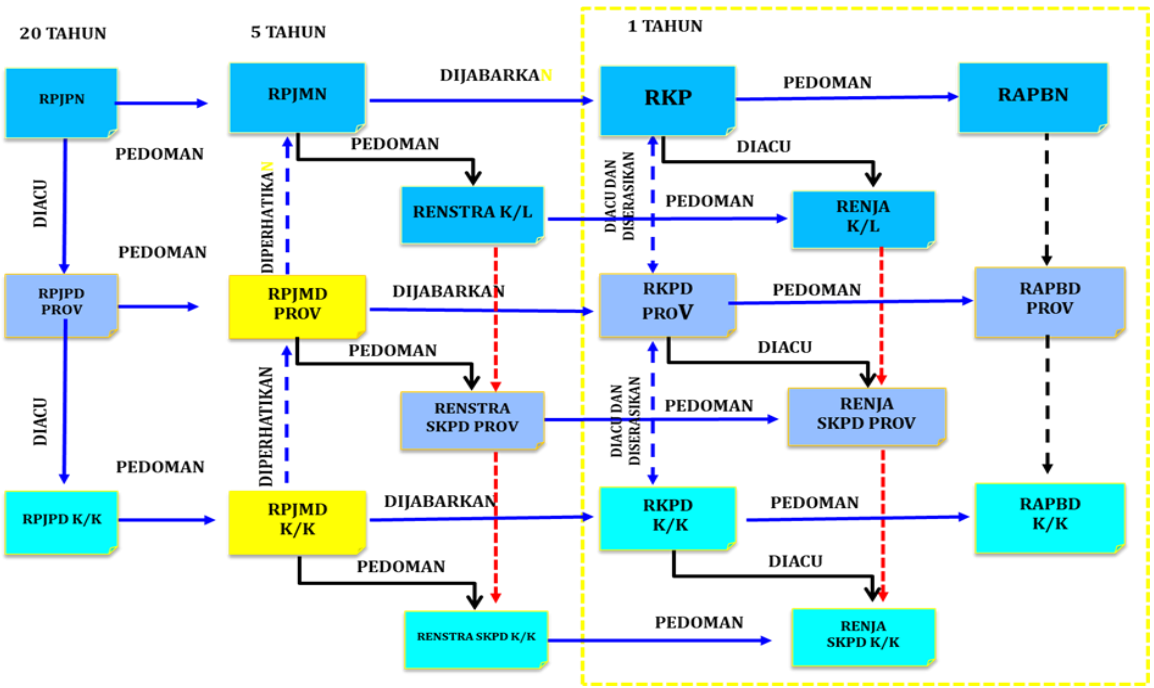

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dimaksudkan untuk;

a) Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Luwu Timur Khususnya Periode Tahun 2021-2026 dan periode selanjutnya dalam masa transisi.

b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

c) Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur;

d) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;

e) Mewujudkan komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD;

f) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat;

g) Menjadi landasan dalam penyusunan rancangan awal RencanavStrategis (Renstra) perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Maksud lain dari penyusunan Recana Pembangunan Jangka Menengah ini adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2026 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
2. Menjadi rujukan resmi bagi seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Menjadi tolokukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
4. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
5. Menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
6. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelengaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

7. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
8. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi sertaseluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah

dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD sampai saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km^2 atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur

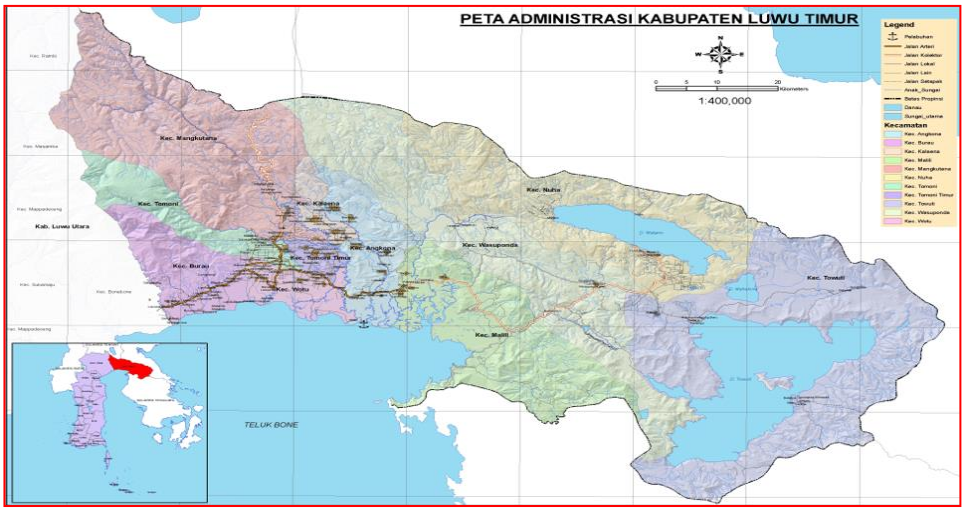

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur, 2020

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km2 atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan

darat (±12 jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1.	Burau	256,23	3,69%
2.	Wotu	130,52	1,88%
3.	Tomoni	230,09	3,31%
4.	Tomoni Timur	43,91	0,63%
5.	Angkona	147,24	2,12%
6.	Malili	921,2	13,26%
7.	Towuti	1.820,48	26,21%
8.	Nuha	808,27	11,64%
9.	Wasuponda	1244	17,91%
10.	Mangkutana	1.300,96	18,73%
11.	Kalaena	41,98	18,73%
	Kabupaten Luwu Timur	**6.944,88**	**100,00**

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Luwu Timur ,2021

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km^2 – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km^2 kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km^2 kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luas 243,1 Ha), dan Lontoa (luas 171,5 Ha).

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara $2^0$03’00”-$3^0$03’25” LS dan $119^0$28’56”-$121^0$47’27” BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah Selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah Barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan berada di

wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut.

Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian, wisata perairan dan sebagai sumber energi.

2.1.1.3 Topografis

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan dimana berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl). Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian Utara dan Barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian Selatan dan Barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

2.1.1.4 Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.

a. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni : Daerah pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran.

a. Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta, Ballawai, Ledu-Ledu dan Tapara Masapi. Pada bagian tenggara lembar peta terdapat Pegunungan Verbeck dengan ketinggian 800-1346 mdpl, dibentuk oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tara Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G. Tambake (1838 m), Bulu Nowinokel (1700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu Taipa (1346 m), Bulu Ladu (1274 m), Bulu Burangga (1032 m) dan Bulu Lingke (1209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu Sungai Kalaena, Sungai Pincara, Sungai Larona dan Sungai Malili merupakan sungai utama. Pola aliran sungai umumnya *dendritik*.

b. Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone, Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana (477 m) dan Bulu Bukila (645 m).

c. Daerah karst menempati bagian Timur Laut pada peta lembar Matano dengan ketinggian antara 800-1700 mdpl dan dibentuk oleh batugamping. Daerah ini dicirikan oleh adanya *dolina*, "*sinkhole*" dan sungai bawah permukaan. Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1185 m).

d. Daerah pedataran menempati daerah Selatan semua lembar peta, menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili, menunjukkan proses berkelok.

e. Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone. Pola alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendritit dengan air terjun di beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan morfologi dewasa.

b. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara

regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur hampir utara – selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi dua jalur (*belt*) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri dari batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparan Sunda).

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batuannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

a. *Batuan Ofiolit;* Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafik termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrlit dan serpentinit, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur – Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).

b. *Lajur metamorfik, kompleks pompangeo;* Terdiri dari berbagai jenis sekis hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukopan, filit, batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi. Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilutit, rijang radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah tediri dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilutit yang semakin banyak ke bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur Kapur.

c. *Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda);* Terdiri dari bongkahan asing batuan mafik, serpentinit, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan, sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).

d. Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesa Neogen (kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat. Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

c. Struktur Geologi

Struktur utama yang berkembang di daerah ini berupa lipatan, sesar dan kekar. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser dan sesar naik. Daerah ini memiliki tektonik yang cukup kompleks dengan pengaruh dua sesar besar yaitu Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano. Sesar Palu-Koro berarah relatif Utara-Selatan, sedangkan sesar Matano berarah Barat Laut – Tenggara.

Ditinjau dari arah sumbunya pelipatan di wilayah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perlipatan yang berarah barat daya-timur laut dan perlipatan yang berarah barat laut –tenggara. Jenis perlipatan yang teridentifikasi melalui kedudukan batuan adalah jenis antiklin.

Kekar terdapat dalam hampir semua satuan batuan. Terjadinya mungkin dalam beberapa periode, sejalan dengan perkembangan tektonik di daerah ini. Tegasan utama berarah N330^{o}E, hasil pengukuran pada satuan sekis di Sungai Laimbo dan satuan metagamping di Sungai Kalaena kemungkinan merupakan arah sesar Regional Palu-Koro. Arah tegasan relatif timur barat N270^{O}E dihasilkan dari pengukuran pada satuan peridotit di daerah Bonepute. Arah tegasan tersebut ditafsirkan sebagai arah Sesar Matano, kemungkinan arah ini adalah arah Sesar matano Bawah. Tegasan utama berarah N20^{o}E, hasil pengukuran pada satuan peridotit di daerah Karebbe diperkirakan sebagai arah tegasan utama yang mengotrol Sesar Geser Lampea dan Sesar Naik Tabarano. Tegasan utama berarah N345^{o}E, hasil pengukuran pada satuan batupasir sedang di Sungai Bungadidi ditafsirkan sebagai arah tegasan yang mempengaruhi pembentukan Perlipatan dan Sesar Naik Balease. Di tempat ini pula dilakukan pengukuran kekar tarik yang menghasilkan arah N45^{O}E, arah tersebut akan memberikan dukungan terhadap keberadaan struktur sesar turun di wilayah ini.

2.1.1.5 Hidrologi

Dari data historis yang tersedia diperoleh bentuk pola curah hujan secara umum untuk seluruh daerah pengamatan terjadi pola dengan 2 puncak musim hujan yaitu pada sekitar bulan April dan Oktober. Pengaruh monsun Barat yang kaya uap air dan bertiup dari benua Asia dan Samudera Pasifik selama periode Desember, Januari, dan Februari tidak menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam bulan-bulan ini. Jumlah curah hujan yang lebih tinggi justru terjadi pada bulan April, hingga Mei yang mana di beberapa tempat di Indonesia merupakan bulan transisi I yang juga dikenal sebagai bulan-bulan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau.

Peningkatan jumlah curah hujan juga terjadi pada bulan Oktober, yaitu setelah periode JJA, di mana merupakan transisi kedua atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada bulan Oktober menuju bulan Desember perlahan jumlah curah hujan untuk seluruh stasiun mengalami kenaikan hingga mencapai 100-200 mm/bulan. Walaupun demikian jumlah curah hujan ini jauh lebih rendah dibanding

jumlah curah hujan yang terjadi pada periode Maret, April, dan Mei yang mencapai nilai 300 mm/bulan hingga 400 mm/bulan.

Adanya 2 puncak hujan yang terjadi di Sorowako dan wilayah sekitarnya menandakan daerah ini merupakan daerah dengan pola hujan ekuatorial. Pola hujan ekuatorial adalah suatu pola hujan dengan dua puncak musim hujan. Puncak-puncak ini terjadi setelah ekuinoks (waktu ketika matahari berada di atas khatulistiwa). Ekuinoks terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23 September, puncak-puncak hujan untuk daerah Sorowako terjadi di bulan April dan Oktober yakni ketika matahari berada dekat dengan khatulistiwa. Pada saat matahari berada pada posisi yang demikian, maka daerah-daerah yang dekat dengan ekuator akan mendapatkan suplai radiasi yang besar yang akan membantu terjadinya evaporasi yang pada akhirnya menyebabkan kondensasi awan dan melahirkan endapan hujan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, yaitu hasil perhitungan rata-rata curah hujan bulanan dan maksimum rata-rata curah hujan bulanan menunjukkan jika Maret, April dan Mei merupakan bulan–bulan dengan curah hujan tinggi dan secara tidak langsung menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan basah. Sementara Agustus dan September dengan curah hujan yang lebih rendah dianggap sebagai bulan-bulan kering. Dari nilai curah hujan yang turun ke permukaan dapat dilihat jika secara umum distribusi curah hujan mengikuti pola pergerakan angin. Pola distribusi curah hujan bulan Januari, Februari, Maret memiliki tendensi yang besar ke arah timur. Ini disebabkan karena proses penguapan lebih banyak terjadi pada daerah tubuh air seperti danau, dan sungai yang terletak di sekitar stasiun 3, dan 4. Sedangkan pada bulan April endapan hujan yang terjadi cukup seimbang antara dataran tinggi di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur. Ini disebabkan karena pada bulan ini kecepatan angin dari arah barat melemah dan arah angin pada bulan ini tidak stabil mengingat bulan ini adalah bulan peralihan dari muson barat ke muson timur. Disamping itu pada bulan ini matahari masih berada dekat dengan khatulistiwa, sehingga daerah rendah di sebelah timur dengan bentangan tubuh air akan mengalami penguapan yang besar.

Pada bulan Juni, Juli, Agustus distribusi lebih dominan ke arah barat laut, utara, dan timur laut, sebab pada bulan ini matahari berada di Belahan Bumi Utara (BBU), akibatnya daerah pada sebelah barat laut, utara dan timur laut mendapat radiasi matahari yang besar dan menyebabkan suhu tinggi serta tekanan yang rendah dibanding di sebelah selatan. Sehingga angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi disebelah selatan menuju ke arah daerah yang bertekanan rendah.

Pada bulan September pola sebaran hujan membesar ke arah tenggara dan endapan hujan lebih besar pada dataran rendah daripada dataran tinggi. Hal ini terjadi sebab pada bulan ini matahari kembali berada di khatulistiwa sehingga daerah danau yang berada di sebelah tenggara mengalami penguapan dan akumulasi awan hujan yang besar dibanding daerah pegunungan di sebelah timur.

Di bulan Oktober, November, dan Desember endapan justru lebih kecil di

sebelah tenggara. Pada bulan ini angin muson timur yang bertiup melemah dan berangsur digantikan oleh muson barat yang lembab, mengakibatkan daerah dataran tinggi di bagian barat memperoleh curah hujan yang besar.

Secara umum pola distribusi curah hujan tahunan menunjukkan arah yang semakin besar ke arah dataran tinggi disebelah barat laut. Ini disebabkan karena daerah di sebelah barat adalah daerah dengan bentangan pegunungan. Pada daerah dataran tinggi suhu udara lebih rendah dibandingkan dataran rendah. Daerah sebelah barat merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut. Sedangkan daerah sebelah timur merupakan dataran rendah yang < 500 m dari permukaan laut. Sepanjang tahun pola pergerakan angin bergerak dari dataran tinggi yang memiliki gradien tekanan yang tinggi menuju ke arah dataran rendah dengan gradien tekanan yang lebih rendah.

2.1.1.6 Klimatologi

a. Temperatur Udara

Temperatur rata-rata bulanan berkisar pada 24,0-26,1^{o}C. Temperatur tertinggi tercatat pada bulan November, sedangkan temperatur terendah pada bulan Juli. Temperatur rata-rata bulanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Variasi tempertur rata-rata bulanan diperlihatkan pada gambar berikut:

Grafik 2. 1 Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan

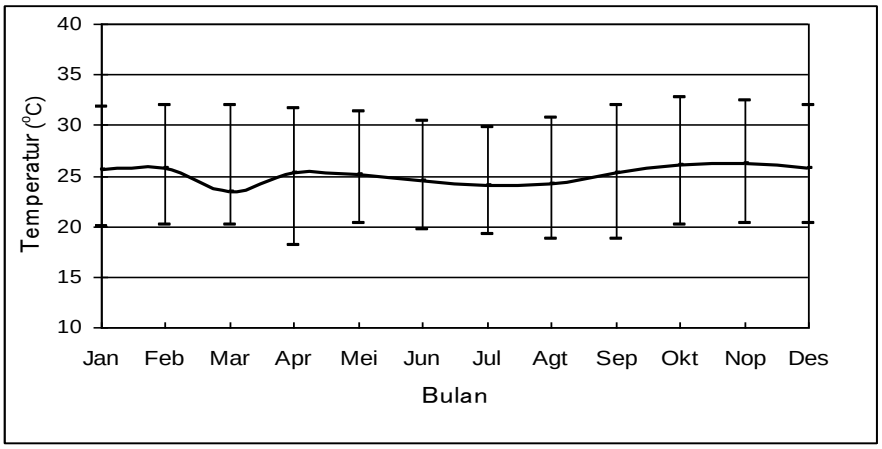

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2011-2031, Tahun 2020

b. Kelembaban Udara

Kelembaban (relatif) bulanan rata-rata berkisar pada 88,4-93,8%. Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada hampir semua bulan (100%) terutama pada bulan Juli, dan terendah pada bulan September (80,8%). Variasi kelembaban relatif rata-rata bulanan diperlihatkan pada gambar berikut.

Grafik 2. 2 Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan

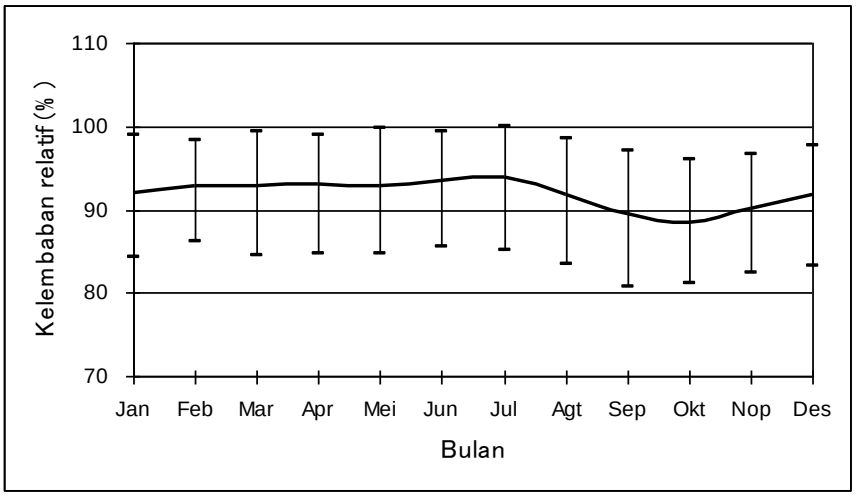

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2011-2031, Tahun 2020

c. Penguapan

Penguapan yang terjadi cukup tinggi dengan nilai rata-rata bulanan sekitar 2,7 - 4,3 mm, walaupun demikian diimbangi oleh curah hujan harian yang tinggi pula. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (4,3 mm/hari), sedangkan penguapan terendah teramati pada Bulan Juni (2,7 mm/hari). Periode dengan tingkat penguapan tinggi terjadi mulai bulan Agustus sampai April (>3 mm/hari), sedangkan periode dengan penguapan rendah mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli (≤3 mm/hari). Profil penguapan di daerah studi diperlihatkan pada gambar berikut:

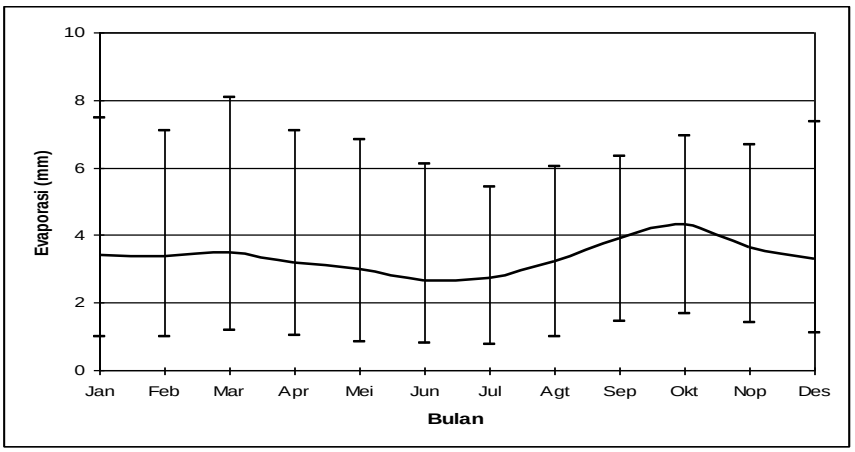

Grafik 2. 3 Variasi evaporasi rata-rata bulanan

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2011-2031, Tahun 2020

d. Curah Hujan

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2020, rata-rata hari hujan per bulan sebanyak 16 hari. Bulan Juni memiliki jumlah hari hujan tertinggi hingga 22

hari dalam sebulan. Jumlah rata-rata hari hujan setiap bulan antara 12-25 hari. Periode dengan tingkat curah hujan tinggi terjadi mulai bulan Maret sampai Mei (> 300 mm), sedangkan periode dengan curah hujan rendah mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober (< 200 mm). Periode dengan tingkat curah hujan sedang terjadi dari bulan November sampai Februari (200 – 300 mm). Variasi curah hujan bulanan diperlihatkan pada gambar berikut.

Grafik 2. 4 Grafik Curah hujan rata-rata Tahun 2020

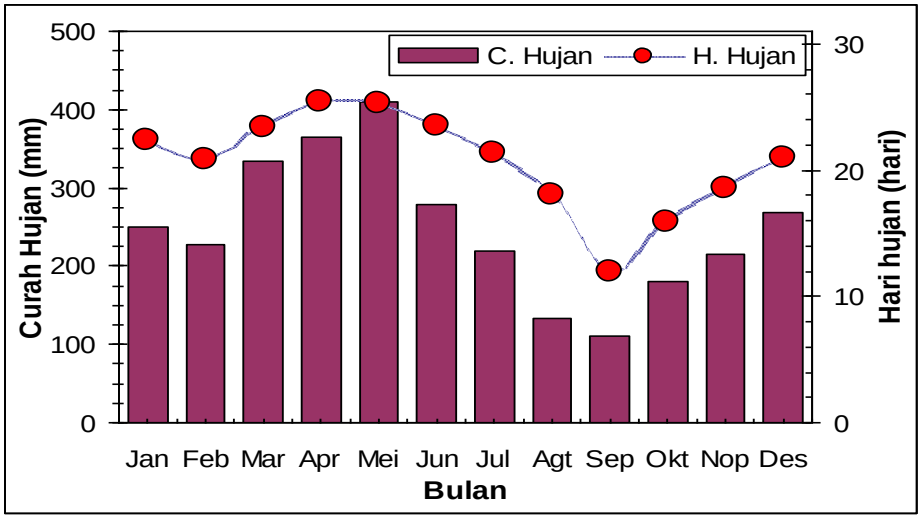

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2011-2031, Tahun 2020

d. Angin

Dalam penelitian ini data kecepatan dan arah angin setiap jam selama 7 tahun terakhir diperoleh dari Stasiun Meteorologi PT. Vale, Tbk. Data angin selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa antara pukul 07.00 sampai 18.00 (siang) arah angin dominan dari arah tenggara (24,8 %) dan dari utara (24,13 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 (malam) arah angin dominan dari arah utara (36,8 %) dan dari arah tenggara (19,1 %). Kecepatan angin selama 7 tahun terakhir antara pukul 07.00 sampai 18.00 sebagian besar berkisar 0 sampai 2 m/s (69,1 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 besar berkisar 0 sampai 2 m/s (73.16 %).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur terbagi 2 (dua) yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

a. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan,

dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memberikan arahan dalam menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan.
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, perkebunan, pertanian padi sawah dan padi ladang, permukiman (termasuk kawasan pemerintahan) dan kawasan pertambangan.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi:
   a. Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.
   b. Dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
2. Kelestarian lingkungan, meliputi:
   a. Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam waktu panjang.
   b. Jaminan terhadap kualitas lingkungan.
3. Tanggap terhadap dinamika perkembangan, meliputi:
   a. Peningkatan pendapatan masyarakat.
   b. Peningkatan pendapatan daerah dan nasional.
   c. Peningkatan kesempatan kerja.
   d. Peningkatan ekspor.
   e. Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
2. Kawasan budidaya pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
3. Kawasan budidaya non pertanian, meliputi kawasan permukiman, pertambangan, industri, pariwisata dan sebagainya.

b. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestaian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung

lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur dari fungsinya, meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung
2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari;

- Kawasan sempadan pantai
- Kawasan sempadan sungai
- Kawasan sempadan danau

3. Kawasan suaka alam, terdiri dari;

- Kawasan cagar alam
- Kawasan konservasi perairan

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan klasifikasi kriteria serta urutan prioritas penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Luwu Timur

Fungsi Kawasan	Peruntukan Ruang	Rencana Pengelolaan	Lokasi
Kawasan yang memberikan perindungan kawasan bawahannya	Hutan Lindung	1. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung. 2. Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung. 3. Beberapa kawasan tertentu, terutama hutan produksi (terbatas dan tetap) yang memenuhi kriteria hutan lindung agar diproses secara cermat sesuai prosedur yang berlaku menjadi kawasan hutan lindung. 4. Mengukuhkan kawasan sebagai hutan lindung apabila kawasan tersebut belum dikukuhkan. 5. Bagi kawasan non hutan (perkebunan) yang mempunyai kriteria lindung agar dikaji dan dipertimbangkan fungsinya sebagai hutan lindung atau kawasan resapan air atau dialihfungsikan secara bertahap (terutama bagi HGU-nya telah habis atau dihapuskan) secara cermat dan tepat sehingga menjadi bagian dari kawasan yang berfungsi lindung. 6. Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan. 7. Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan. 8. Wilayah-wilayah perkampungan/penduduk asli/setempat yang berada di kawasan ini diupayakan mendapat perlakuan khusus, antara lain:	Rencana alokasi hutan lindung seluas 238.589,42 hektar. Lokasi hutan lindung tersebar di Kecamatan Towuti, Nuha, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Mangkutana, Wotu, dan Kecamatan Burau.

Fungsi Kawasan	Peruntukan Ruang	Rencana Pengelolaan	Lokasi
		9. Pemanfaatannya harus tetap mengacu pada fungsi lindung. 10. Luasnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh diperjualbelikan. 11. Tidak diperkenankan mengubah bentang alam, kecuali untuk meningkatkan sistem konservasi tanah dan air. 12. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok. 13. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi dengan tutupan vegetasi tetap, terutama pada lahan-lahan yang saat ini kritis. 14. Menjaga dan melindungi flora dan fauna yang ada. 15. Monitoring secara kontinu, khususnya pada kegiatan/pemanfaatan lahan yang saat ini tidak sesuai dengan peruntukan fungsi hutan lindung. 16. Dilakukan pola-pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan. 17. Dilakukan studi-studi terhadap potensi ekonomi hutan lindung untuk sumberdaya non kayu.	
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	Cagar Alam	1. Memperhatikan keberadaan kawasan baik fungsi dan kualitasnya. 2. Dapat dikembangkan sebagai daerah ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan. 3. Rehabilitasi dan reboisasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan. 4. Melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan terhadap gangguan dan kegiatan pariwisata.	Luas rencana kawasan cagar alam adalah 101. 453, 89 hektar. Kawasan cagar alam tersebar di Kecamatan Angkona, Kalaena, Mangkutana, Nuha, Towuti, dan Kecamatan Wasuponda
	1. Konservasi Perairan	1. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air. 2. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan selama tidak mengganggu ekosistem kawasan 3. Kawasan ini dikategorikan sebagai wilayah limitasi bagi pembangunan fisik dan diperlukan bagi kelestarian lingkungan.	Luas rencana kawasan konservasi perairan adalah 73.445,47 hektar. Kawasan konservasi ini tersebar di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha.
Kawasan Perlindungan	(a) Sempadan Sungai	1. Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah	Luas sempadan sungai adalah

Fungsi Kawasan	Peruntukan Ruang	Rencana Pengelolaan	Lokasi
Setempat		sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan. 2. Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai. 3. Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai. 4. Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.	36.083,21 hektar. Kawasan sempadan sungai tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Timur.
	(b) Sempadan Pantai	1. Pemanfaatan lahan pada kawasan ini baik melalui rekayasa teknis maupun non teknis harus dilakukan melalui kajian AMDAL yang cermat dan tidak diperkenankan memberi dampak negatif terhadap lingkungan pantai. 2. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan keindahannya. 3. Menyusun pengelolaan terpadu kawasan pesisir terutama untuk pengembangan kegiatan budidaya.	Luas sempadan pantai adalah 5.542,97 hektar. Lokasi kawasan sempadan pantai berada di Kec. Angkona, Burau, Malili dan Kecamatan Wotu.
	(c) Kawasan Sekitar Danau	1. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau. 2. Menata ulang kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan 3. Kegiatan budidaya dapat dilakukan selama tidak mengganggu kualitas dan fungsi danau 4. Memasang rambu/tanda perungatan di wilayah radius kawasan	Kawasan sekitar danau memiliki luas 6.575,38 hektar. Lokasi kawasan sekitar danau terdapat di Kecamatan Towuti, Nuha dan Kecamatan Wasuponda.

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran dan berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan daerah menyimpan potensi kandungan sumberdaya alam yang melimpah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Aset pengembangan di masa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai

pengembangan kegiatan perekonomian.

b) Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan, dimana kondisi eksisting menunjukan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46% dari total luas Kabupaten Luwu Timur.

c) Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.

d) Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :

   i. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha
   ii. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.
   iii. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margolembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
   iv. Tanah liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
   v. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
   vi. Pasir kuarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

e) Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb.

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi;

   Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat luas kawasan hutan seluas 690.805,31 Ha, hutan lindung 216.289,84 Ha selain sebagai pengatur tata air hutan lindung dapat dimanfaatkan penghasil nonkayu seperti rotan, damar dll. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.797,15 Ha juga dapat berfungsi sebagai jasa wisata, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari:

(1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Towuti, Nuha dan Wasuponda dengan luas 114.264,71 Ha;
(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Burau, Angkona, Malili, Mangkutana, Kalaena, Nuha, Towuti, Wotu, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 19.038,99 Ha; dan
(3) Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 11.550,04 Ha.

2. Kawasan peruntukan pertanian;

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan seluas 27.709,50 Ha, meliputi; Kecamatan Angkona , Kecamatan Burau, Kalena, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni Timur, Towuti, Wasuponda dan Wotu.

Tabel 2. 3 Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	4.609,23	16,63
2	Kecamatan Burau	3.000,00	10,83
3	Kecamatan Kalaena	2.900,00	10,47
4	Kecamatan Malili	880,88	3,18
5	Kecamatan Mangkutana	2.218,51	8,01
6	Kecamatan Nuha	109,13	0,39
7	Kecamatan Tomoni	1.400,00	5,05
8	Kecamatan Tomoni Timur	3.000,00	10,83
9	Kecamatan Towuti	4.012,73	14,48
10	Kecamatan Wasuponda	979,02	3,53
11	Kecamatan Wotu	4.600,00	16,60
Jumlah		**27.709,50**	**100,00**

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Adapun rencana pengembangan KP2B di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan sawah baru. Luas lahan yang akan dikembangkan untuk KP2B di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih seluas 27.243,78 Ha., sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kurang lebih seluas 465,72 Ha.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Secara khusus pengembangan kawasan perekebunan di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk:

i. Mendorong pengembangan perekonomian masyarakat;
ii. Merehabilitasi ruang pasca tambang; dan
iii. Menyediakan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuain lahan untuk pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan lada, dan perkebunan sagu.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur meliputi areal seluas kurang lebih 66.564,40 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan lihat uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	8.247,95	12,39
2	Kecamatan Burau	8.329,38	12,51
3	Kecamatan Kalaena	2.606,89	3,92
4	Kecamatan Malili	7.525,95	11,31
5	Kecamatan Mangkutan	6.225,62	9,35
6	Kecamatan Nuha	4.329,96	6,50
7	Kecamatan Tomoni	3.993,42	6,00
8	Kecamatan Tomoni Timur	949,3	1,43
9	Kecamatan Towuti	12.831,28	19,28
10	Kecamatan Wasuponda	6.531,02	9,81
11	Kecamatan Wotu	4.993,63	7,50
Jumlah		**66.564,40**	**100,00**

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang dan sagu. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta di lapangan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 14.939,90 Ha dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kawasan Hortikultura Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Hortikultura	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Burau	3.300,00	22,09
2	Kecamatan Malili	1.769,95	11,85
3	Kecamatan Mangkutana	3.500,00	23,43
4	Kecamatan Nuha	4.329,96	28,98
5	Kecamatan Tomoni	1.400,00	9,37
6	Kecamatan Towuti	14,25	0,10
7	Kecamatan Wotu	625,74	4,19
Jumlah		**14.939,90**	**100,00**

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

3. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan perikanan di Kabupaten Luwu Timur berupa kawasan perikanan budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Pengolahan ikan atau industri perikanan (*added value*) terhadap hasil tangkapan/budidaya ikan masih berlum berkembang di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat potensi perikanan tangkap/budidaya yang sangat besar (terutama laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten terutama di kawasan pesisir Kabupaten Luwu Timur.

kawasan Minapolitan di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga didorong pengembangan pada kawasan sebagai berikut:

a. Perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada wilayah pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili;
b. Perairan umum 3 (tiga) Danau sebanyak 589,20 ton yang meliputi Kecamatan Towuti dan Nuha.

2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya darat di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 13.920,40 Ha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2. 6 Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perikanan Budidaya	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	2.900,00	20,83
2	Kecamatan Burau	420,4	3,02
3	Kecamatan Malili	8.100,00	58,19
4	Kecamatan Wotu	2.500,00	17,96
Jumlah		**13.920,40**	**100,00**

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

3) Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan

Jangka Panjang, pengembangan PPI/TPI Malili akan didorong sebagai embrio untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap dan budidaya. Dengan demikian, untuk mengembangkan Kecamatan Malili, Wotu, Angkona, dan Burau sebagai kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap, maka akan dikembangkan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha, serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Untuk maksimalkan hasil pemasaran hasil perikanan tangkapan, Arahan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) di Kecamatan Malili dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Wotu perlu untuk diperhatikan.

4. Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi kandungan mineral logam dan bukan logam (batuan). Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pertambangan mineral yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten.

a. Potensi Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 325.717,83 Ha atau 46,67 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

b. Kawasan Pertambangan Batuan

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral dengan potensi mineral bukan logam logan/batuan dengan luas 159.458,17 Ha atau 22,85 persen dari luas Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 7 Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)
WPN	205.823,72	29,49
WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	159.458,17	22,85
WUP Mineral Logam	325.717,83	46,67
WUPK	6.991,86	1,00
Grand Total	**697.991,58**	100,00

Sumber; Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Wilayah usaha pertambangan (WUP) di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari wilayah pencadangan negara (WPN) dengan luas 20.823,72 Ha, WUP mineral bukan logam sebanyak 159.458,17 Ha, WUP mineral logal sebanyak 6.991,86 Ha. Dari total WUP sebanyak 697.991,58 Ha.

Tabel 2. 8 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	**Billy Indonesia**	**7521**	
	Nikel	7521	17,24
2	**Citra Lampia Mandiri**	**9879,44**	
	Nikel	9879,44	22,65
3	**Mahkota Nikel Indonesia**	**9997,75**	
	Nikel dmp	9997,75	22,92
4	**Prima Utama Lestari**	**1539,63**	
	Nikel	1006,11	2,31
	Nikel Laterit	533,52	1,22
5	**Sumber Wahau Jaya**	**1676,23**	
	Nikel dmp	1676,23	3,84
6	**Tiga Samudra Nikel**	**9964,65**	
	Nikel dmp	9964,65	22,85
7	**Tiga Samudra Perkasa**	**3039,07**	
	Bijih Nikel	3039,07	6,97
Total		**43617,77**	**100,00**

Sumber; Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Tahun 2019

Kegiatan pertambangan dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai:

a. kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.
b. kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.
c. kawasan cagar budaya.
d. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
e. kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budidaya selain yang

tersebut di atas, dengan ketentuan:

a. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. 9 Kawasan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Pertambangan &Energi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Kalaena	1,1	0,01
2	Kecamatan Malili	795,61	6,89
3	Kecamatan Mangkutana	6,17	0,05
4	Kecamatan Nuha	4.895,11	42,37
5	Kecamatan Towuti	5.600,00	48,47
6	Kecamatan Wasuponda	256,59	2,22
Jumlah		**11.554,58**	**100**

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan jik kawasan pertambangan di Luwu Timur tersebar pada 6 (enam) wilayah kecamatan. Terluas terletak di Kecamatan Towuti yakni 5.600 Ha atau 48,7 persen, kemudian di Kecamatan Nuha yakni 4.895,11 Ha atau 42,37 persen, serta di Kecamatan malili yakni 795,61 Ha atau 6,89 persen.

5. Kawasan Peruntukan Industri;

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan perindustrian yakni sebagai berikut :

- Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- Tersedia sistem air baku yang cukup;
- Adanya sistem pembuangan limbah;
- Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat; dan
- Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Tujuan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya;

2. Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah.

a. Kawasan Industri

Rencana kawasan industri lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan mencapai 36,33 Ha. Kawasan Industri Lampia merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur.

b. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan 10 kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, sesuai karakteristik dan komoditas unggulan di wilayahnya seperti pertanian, pariwisata, industri, UMKM, hingga peternakan.

1. Kecamatan Nuha, pengembangan Kawasan Wisata yang terdiri 4 desa yaitu Desa Nuha, Desa Sorowako, Desa Nikkel dan Kelurahan Magani.
2. Kecamatan Towuti, Kawasan Pertanian Terpadu yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, Desa Tole, dan Desa Buangin.
3. Kawasan Agro Industri, Perkebunan Lada yang terdiri 5 desa yaitu Desa Tokalimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantilang, dan Desa Masiku.
4. Kawasan Perdagangan, dan Industri Olahan Komoditas, terdiri dari 5 desa yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga dan Desa Langkea Raya.
5. Kawasan Peternakan dan Penunjang, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pekaloa, Desa Matompi, Desa Timampu, Kecamatan Wasuponda.
6. Kawasan Peternakan dan Pengolahan, hasil Hutan Non-Kayu terdiri dari 3 desa yaitu Desa Kawata, Desa Parumpanai, dan Desa Matano (Kec. Nuha).
7. Kawasan Agrowisata 4 desa meliputi: Desa Wasuponda, Desa Ledu-Ledu, Desa Balambano, Desa Tabarano, Kecamatan Malili.
8. Kawasan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut teridiri dari 4 desa yaitu Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi, Desa Wewangriu, Desa Balantang.
9. Kawasan Layanan Jasa dan Perkotaan terdiri dari 3 desa yaitu Desa Baruga, Desa Puncak Indah dan Kelurahan Malili.
10. Kawasan Penunjang pengolahan hasil laut, terdiri dari 2 desa yaitu Desa Laskap dan Desa Pongkeru.

6. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

a. Keindahan alam dan keindahan panorama.
b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
c. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
d. Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 2 (dua) Pengembangan Kawasan Wisata, yaitu:

a. Kawasan Wisata 3 Danau, memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam, wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori Global Ecoregions. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-kupu dan Pantai Salonsa.
b. Kawasan Wisata Alam dan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran potensi wisata alam dan wisata bahari di Kecamatan Malili Pulau Bulupoloe, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Tomoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan wisata dapat dikembangkan pada kawasan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan wisata seperti kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan sempadan pantai dan sebagainya.

Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur pada masa yang akan datang kurang lebih seluas 58,02 Ha di Kecamatan Nuha. Pengembangan kawasan wisata dan fasilitas pendukungnnya secara khusus akan dikembangkan berdasarkan potensi wisata yang meliputi:

Tabel 2. 10 Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Objek	Lokasi
Objek Wisata Alam		
1	Danau Matano	Desa Matano Kec. Nuha
2	Cagar Alam Perburuan	Desa Matano Kec. Nuha
3	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Desa Matano Kec. Nuha
4	Pantai Ide	Desa Magani Kec. Nuha
5	Pantai Pomua Dahu-Solonsa	Desa Magani Kec. Nuha
6	Bumi Perkemahan Sawerigading	Desa Magani Kec. Nuha
7	Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole	Desa Magani Kec. Nuha
8	Pantai Molino Topundau	Desa Magani Kec. Nuha
9	Pantai Impian-Old Camp	Desa Sorowako Kec. Nuha

No	Nama Objek	Lokasi
10	Danau Towuti	Desa Timampu Kec. Towuti
11	Danau Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
12	Danau Tapparang Masapi	Desa Mahalona Kec. Towuti
13	Air Terjun Mata Buntu	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
14	Kali Dingin (Wasuponda)	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
15	Air Terjun Atue	Desa Atue Kec. Malili
16	Sungai Malili	Desa Malili Kec. Malili
17	Hutan Mangrove	Kec. Malili/Wotu/Burau
18	Sumur Sawerigading	Desa Baruga Kec. Malili
19	Permandian Alam Mantadulu	Desa Mantadulu Kec. Angkona
20	Air Terjun Tokio	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
21	Sungai Uelanti	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
22	Permandian Lopi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana
23	Air Terjun Saloanuang	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
24	Banua Pangka	Desa Bawalipu Kec. Wotu
25	Gua Batu Putih	Desa Batu Putih Kec. Burau
26	Permandian Air Panas	Desa Cendana Kec. Burau
27	Air Terjun Bonepute	Desa Bonepute, Kec. Burau
28	Batu Papan	Desa Rantemario, Kec. Tomoni
Objek Wisata Sejarah		
1	Makam Mokole Lakamandiu	Desa Matano Kec. Nuha
2	Makam Puang Sanro	Desa Lampenai Kec. Wotu
3	Kuburan Tua	Desa Mabonta Kec. Burau
Objek Wisata Bahari		
1	Pantai Balo-Balo	Desa Lera Kec. Wotu
2	Pantai Lemo	Desa Mabonta Kec. Burau
3	Pantai Ujung Suso	Desa Mabonta Kec. Burau
Objek Wisata Buatan		
1	Bukit Agro (Tabarano)	Desa Tabarano Kec. Wasupona
2	Semoga Lestari Water Park	Desa Lestari, Kec. Tomoni

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olaharaga Kab. Lutim Tahun 2019

Data di atas menunjukkan jika objek wisata di Luwu Timur tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Objek wisata yang terbanyak jumlahnya terletak di Kecamatan Nuha. Kemudian di Kecamatan Burau serta di Kecamatan Mangkutana.

2.1.3 Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

2.1.3.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur

No	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-aki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan	
1	2016	151.787	142.191	293,978	0,87	81.122
2	2017	152.623	143.281	295,904	0,65	82.259
3	2018	154.391	145.584	299,975	1,36	85.028
4	2019	154.978	145.396	300,374	0,13	87.534
5	2020	155.726	146.313	302,039	0,55	89.380

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa daari tahun 2016 sampai dengan 2020 penduduk Luwu Timur meningkat sebanyak 8.061 jiwa atau 2,74 persen. Ini berarti pertumbuhan penduduk Luwu Timur rata-rata per tahun sebesar 0,68 persen.

Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan setiap tahunnya, seiiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan jumlah Kepala Keluarga juga mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah di setiap tahun sehingga angka pertumbuhan penduduk juga bernilai positif. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil di setiap tahunnnya sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagai.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0 –4	24.768	24.417	25.692	25.568	26.226
2	5 –9	30.420	29.848	30.113	29.793	29.869
3	10– 14	30.961	31.065	31.155	30.454	30.423
4	15– 19	29.196	29.833	30.534	30.681	28.471
5	20– 24	25.774	25.846	26.216	27.005	27.425
6	25– 29	24.35	23.968	22.838	22.668	23.386
7	30– 34	25.933	24.802	23.739	22.437	22.342
8	35– 39	24.587	25.206	25.093	24.48	24.027
9	40– 44	20.62	21.25	21.259	22.461	23.047
10	45– 49	16.257	17.621	18.486	18.452	19.128
11	50– 54	11.759	12.058	12.844	13.887	14.404
12	55– 59	9.302	9.652	9.748	9.94	10.212
13	60– 64	7.333	7.148	7.609	7.687	8.285
14	>65	12.718	13.19	14.379	14.861	14.794

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Jika data tersebut di atas dicermati, maka terbaca bahwa berdasarkan kelompok

umur jumlah terbesar penduduk Luwu Timur adalah mereka yang berada pada usia 10 – 14 tahun. Pada tahun 2020 jumlahnya yakni 30.423 jiwa atau 10,07 persen atas keselurahan penduduk daerah ini. Kemudian menyusul mereka yang berada pada umur 5 – 9 tahun, dimana tahun 2020 jumlahnya 29.869 jiwa atau 9,89 persen terhadap jumlah penduduk Luwu Timur, serta mereka yang berada pada usia 15 – 19 tahun dengan jumlah 28.471 jiwa atau 9,43 persen. Justru ketiga kelompok umur tersebut yang dalam 5 (lima) tahun ke depan akan memasuki usia emas atau usia produktif dan sangat produktif.

Karakteristik penduduk menurut kelompok umur berguna dalam membantu penyusunan, perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Dengan memperhatikan tabel di atas Secara umum terjadi pertambahan penduduk setiap tahunnya. Adapun beberapa kelompok usia terjadi pengurangan penduduk. Ini terlihat pada kelompok usia 5-19 tahun (usia belum produktif) dan kelompok usia 25-34 tahun (usia produktif) Kondisi ini disebabkan antara lain karena terjadinya mutasi penduduk dengan alasan mengikuti Kepala Keluarga, Mencari Pekerjaan, Bekerja atau menuntut ilmu diluar kabupaten Luwu Timur yang mengharuskan melakukan proses pindah keluar dari kabupaten Luwu Timur. Untuk kelompok usia = >65 tahun (usia tidak produktif) tahun terjadi penambahan penduduk setiap tahunnya ini menandakan angka harapan hidup di Kabupaten Luwu Timur cukup tinggi.

Tabel 2. 13 Data *Sex Ratio* Kabupaten Luwu Timur Keadaan per 31 Desember 2020

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2016	151.787	142.191	293.978	106.75
2017	152.623	143.281	295.904	106.52
2018	154.391	145.584	299.975	106,05
2019	154.978	145.396	300.372	106,59
2020	155.726	146.313	302.039	106,43

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Data *sex ratio* di atas menunjukkan perkembangan dari tahun 2016 hingga 2020. Jika pada 2016 rasio jenis kelamin Luwu Timur pada angka 106,75 kemudian menjadi 106,52 pada 2017. Lalu meningkat lagi menjadi 106,05 pada 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 106,59 serta pada tahun 2020 turun menjadi 106,43.

Data rasio Jenis Kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Dari tabel diatas sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak daripada

penduduk perempuan. Dengan angka sex ratio 106 berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 orang penduduk laki – laki.

2.1.3.2 Distribusi dan kepadatan penduduk

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangkutana	22,925	22,868	22,827	22,523	22,437
2	Nuha	23,709	23,867	24,003	23,769	23,755
3	Towuti	37,750	39,542	41,510	42,391	43,597
4	Malili	41,475	41,653	42,610	42,882	43,421
5	Angkona	24,813	24,955	25,297	25,377	25,303
6	Wotu	33,728	33,531	33,694	33,569	33,732
7	Burau	36,247	35,753	35,463	35,197	35,100
8	Tomoni	26,011	26,220	26,489	26,578	26,773
9	Tomoni Timur	13,559	13,634	13,802	13,699	13,649
10	Kalaena	12,014	12,129	12,334	12,337	12,297
11	Wasuponda	21,747	21,752	21,946	22,052	21,975
	Jumlah	**293,978**	**295,904**	**299,975**	**300,374**	**302,039**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Data sebaran penduduk di atas menunjukkan jika wilayah yang terbesar jumlah penduduknya untuk tahun 2020 adalah Kecamatan Towuti yakni 43.597 jiwa atau 14,43 persen, kemudian Kecamatan Malili 43.421 jiwa atau 14,37 persen serta Kecamatan Burau yakni 35.100 jiwa atau 11,62 persen.

Meskipun secara keseluruhan terjadi Pertambahan penduduk disetiap tahunnya, tetapi jika di pilah menurut kecamatan tidak serta merta terjadi pertambahan penduduk, terdapat juga pengurangan penduduk pada beberapa kecamatan.

Terdapat dua kecamatan yang mengalami pertambahan penduduk yang cukup besar sejak tahun 2016 – 2020 yaitu kecamatan Towuti dan Malili, hal ini disebabkan antara lain faktor kelahiran dan juga merupakan wilayah yang banyak dipilh oleh para pendatang daril luar kabupaten Luwu Timur. Wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan, pusat perkantoran, perumahan –perumahan yang baru, perkebunan – perkebunan, pendidikan, industri dan perdagangan. Selain faktor tersebut kecamatan yang mengalami pertambahan penduduk di duga disebabkan masih banyaknya penduduk yang baru mengurus data administrasi kependudukan yang sebelumnya belum pernah terekam dalam data base kependudukan.

Untuk kecamatan yang mengalami pengurangan penduduk diduga disebabkan perpindahan penduduk ke luar dari kabupaten Luwu Timur dan adanya proses

penunggalan data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bagi penduduk yang memiliki data Ganda.

Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah Km2	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangkutana	1,300.96	17	17	18	17	17
2	Nuha	808.27	29	29	30	29	29
3	Towuti	1,820.48	20	21	23	23	24
4	Malili	921.2	45	45	46	47	47
5	Angkona	147.24	168	169	172	172	172
6	Wotu	130.52	258	256	258	257	258
7	Burau	256.23	141	139	138	137	137
8	Tomoni	230.09	113	113	115	116	116
9	Tomoni Timur	43.91	308	310	314	312	311
10	Kalaena	41.98	286	288	294	294	293
11	Wasuponda	1,244.00	17	17	18	18	18
LUWU TIMUR		**6,944.88**	**42**	**42**	**43**	**43**	**43**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km^2). Dengan Luas 6,9488.88 $km^{2,}$ kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dalam tiga tahun terakhir sebesar 43 jiwa per $km^{2.}$.

Untuk kepadatan penduduk di Luwu Timur, wilayah kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Tomoni Timur yakni 311 jiwa per Km^2, kemudian Kecamatan Kalaena yakni 293 jiwa per Km^2, dan Kecamatan Wotu yakni 258 jiwa perk Km^2.

Berdasarkan tingkat kepadatan terdapat dua kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu kecamatan Tomoni Timur dan Kalaena. Hal ini dimungkinkan karena luas wilayah dua kecamatan ini merupakan wilayah yang terkecil di Kabupaten Luwu Timur.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Besarnya angka kemiskinan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai. Namun, jika suatu daerah mengalami kenaikan angka kemiskinan bukan berarti daerah

itu gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena kemiskinan itu tidak diukur berdasarkan satu titik melainkan dengan periode waktu.

Grafik 2. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

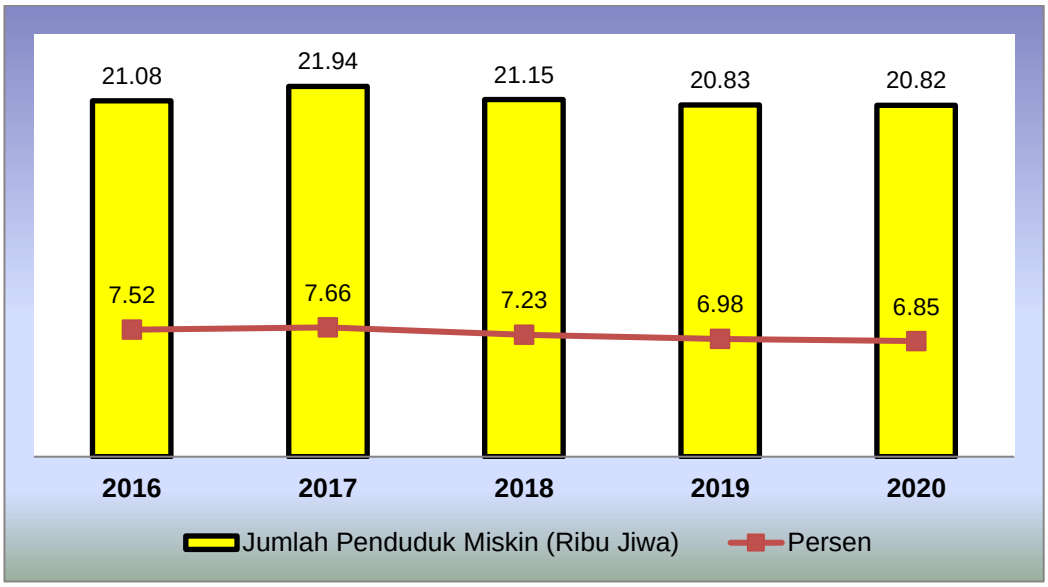

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Jika melihat perkembangan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 sebesar 20,82 ribu jiwa atau 6,85 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin atau sebesar 0,01 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 2019 dengan persentase kemiskinan pada tahun tersebut sebesar 6,98 persen.

Grafik 2. 6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

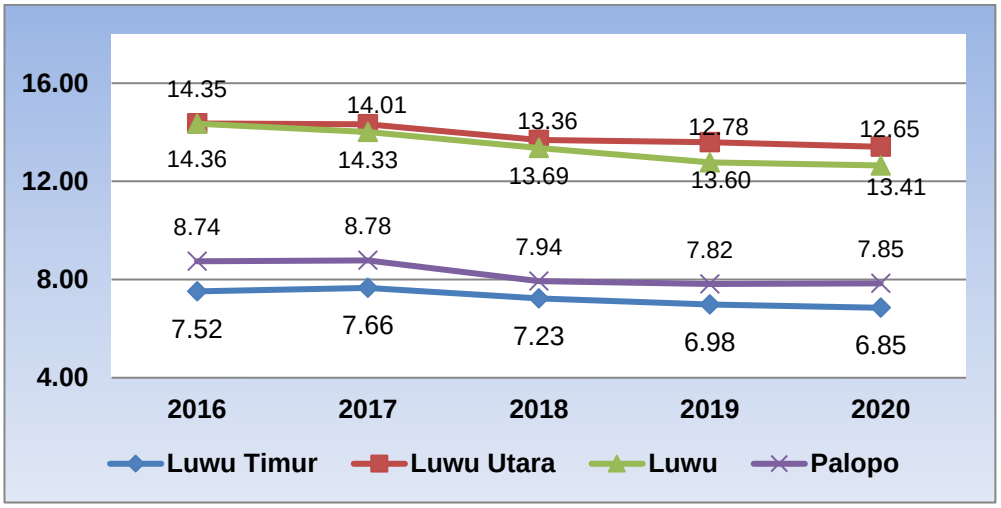

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Sementara jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, persentase Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 lebih rendah dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Hal yang sama juga tergambar pada grafik perbandingan persentase Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2. 7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional
Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

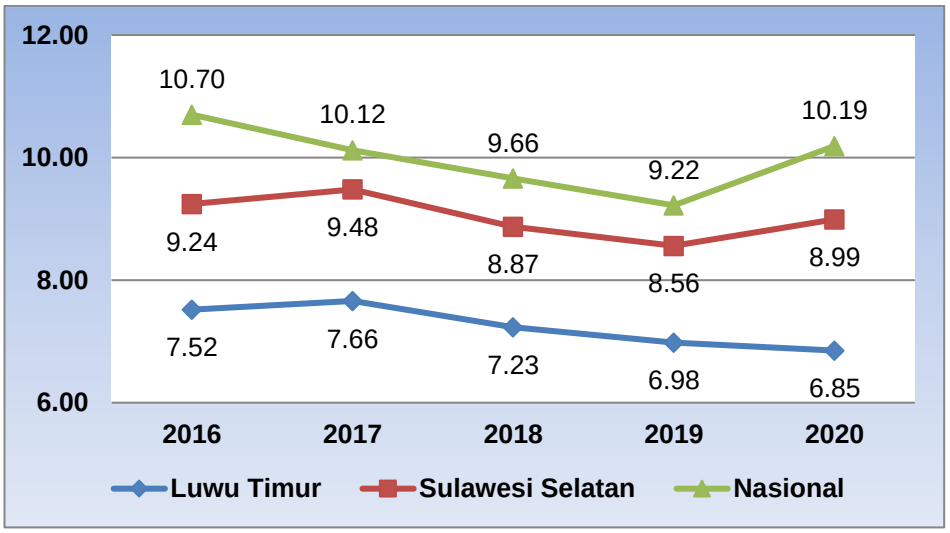

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2016 -

2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun, 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,04 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan.

Grafik 2. 8 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (rupiah/perkapita/bulan)

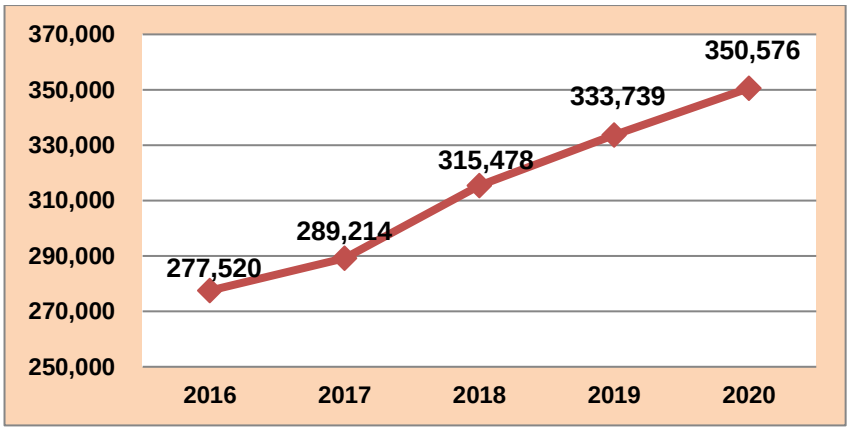

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 2. 9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020

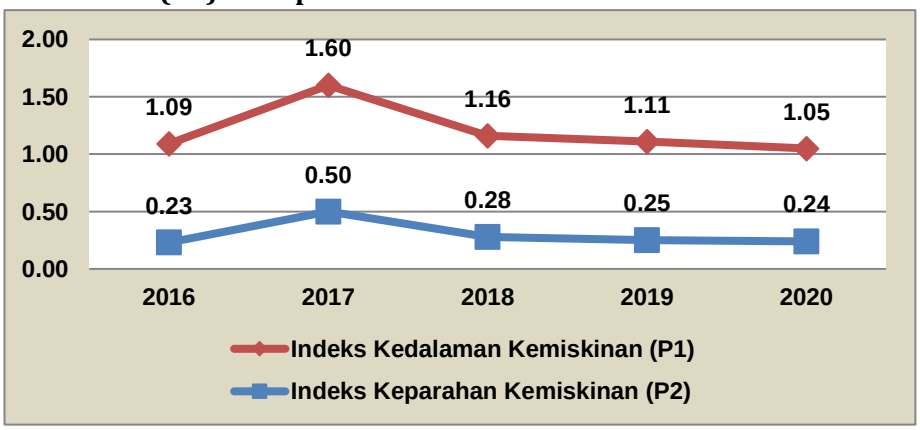

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2016 - 2020 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, Indeks P1 mengalami penurunan menjadi 1,11 dan kembali menurun menjadi 1,05 pada tahun 2020. Tahun 2020 merupakan Indeks kedalaman paling rendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dari perubahan Indeks P1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Sejalan dengan Indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2016 - 2020 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Selama kurun waktu lima tahun, seperti halnya Indeks P1, indeks Keparahan paling kecil terjadi pada tahun 2020. Dari perubahan Indeks P2 ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

Sejalan dengan Indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2016 - 2020 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Selama kurun waktu lima tahun, seperti halnya Indeks P1, indeks Keparahan paling kecil terjadi pada tahun 2020. Dari perubahan Indeks P2 ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

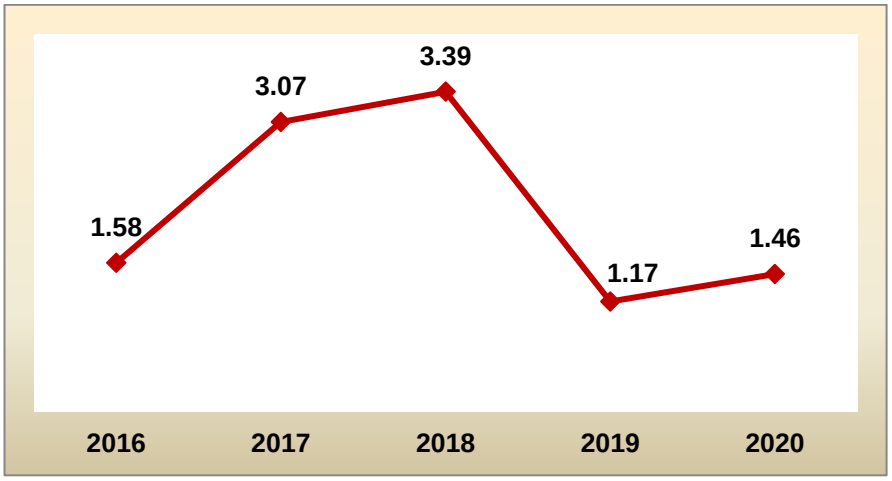

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Data diolah)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupeten Luwu Timur pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 16,02 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,17 persen.

Grafik 2. 11 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

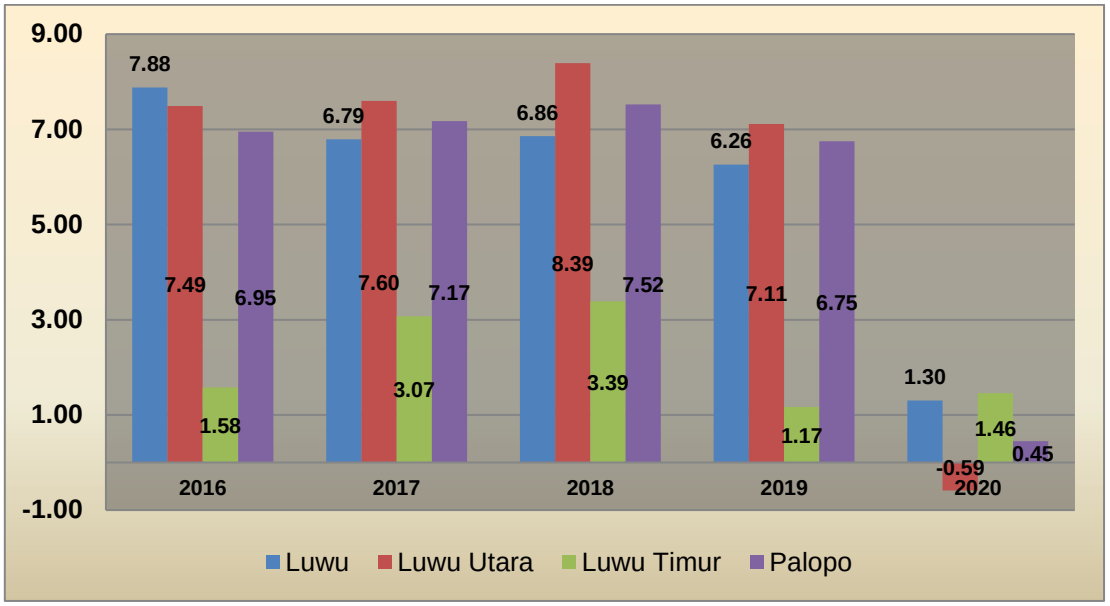

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Data diolah)

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, terlihat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami perlambatan dibanding Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Hal ini disebabkan karena dominasi Sub Kategori Pertambangan Biji Logam yang dalam hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya harga nikel di pasar dunia dan produksi nikel dari PT. Vale Indonesia, Tbk perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Namun pada Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur meningkat sebesar 1,46 persen dan tertinggi jika dibandingkan dengan Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian meningkat sebesar 1,66 persen.

Grafik 2. 12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional
Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)

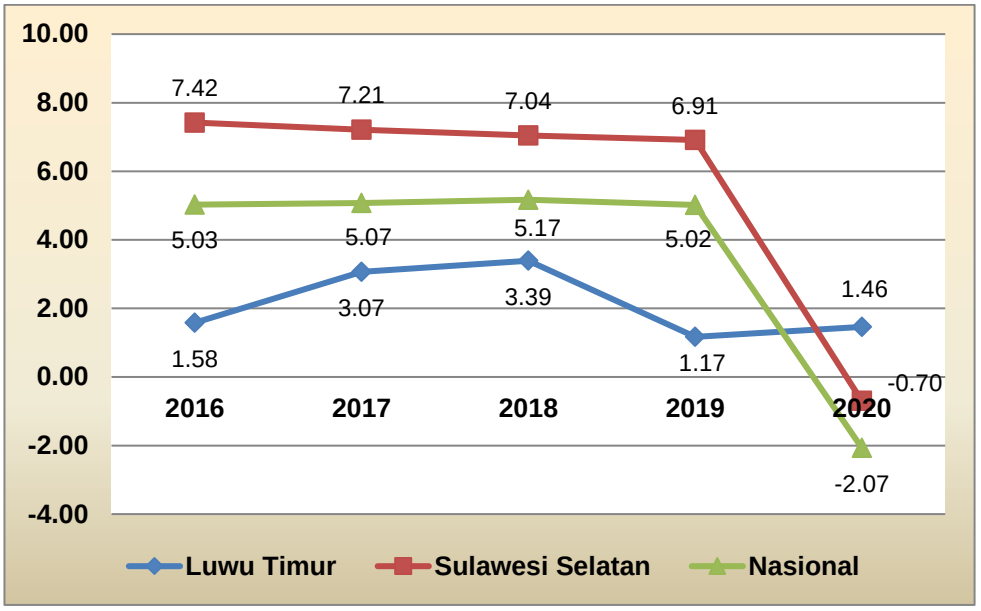

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Data diolah)

Hal yang sama terlihat pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun pada tahun 2020 mampu tumbuh positif sebesar 1,46 persen sementara Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi -0,70 persen dan Nasional -2,07 persen.

Tabel 2. 16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.758.786,7	2.955.133,6	3.150.529,4	3.183.973,3	3.175.948,7
B	Pertambangan dan Penggalian	8.634.509,7	8.667.996,5	8.681.490,7	8.447.706,1	8.587.768,9
C	Industri Pengolahan	413.305,7	430.907,2	455.673,6	521.872,7	507.751,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.473,1	9.091,6	9.630,7	10.029,2	10.522,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	938,4	1.051,6	1.139,4	1.206,4	1.319,0
F	Konstruksi	1.119.637,5	1.188.708,2	1.279.365,3	1.403.975,5	1.448.200,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	506.278,4	549.462,6	606.129,5	669.824,2	662.567,2
H	Transportasi dan Pergudangan	85.919,6	91.413,9	100.787,4	111.864,8	97.385,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.699,3	22.901,9	25.594,8	27.785,3	24.233,3
J	Informasi dan Komunikasi	219.670,4	241.297,3	266.313,3	294.885,7	328.119,3

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.592,5	126.056,5	134.022,5	141.691,7	147.326,3
L	Real Estate	245.477,2	261.709,3	274.471,9	295.870,9	313.475,3
M,N	Jasa Perusahaan	6.008,0	6.401,6	7.073,5	7.817,0	7.151,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	275.662,5	294.124,7	330.230,5	348.463,1	345.808,2
P	Jasa Pendidikan	258.940,5	272.676,0	296.293,1	317.685,5	337.636,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171.266,2	184.291,0	201.792,9	219.429,5	245.146,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.145,2	15.493,0	17.262,4	18.864,4	16.540,3
Produk Domestik Regional Bruto		**14.862.310,8**	**15.318.716,5**	**15.837.801,1**	**16.022.945,2**	**16.256.901,6**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Dari keseluruhan kategori, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 11,72 persen di tahun 2020. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen. Tiga lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen. Empat lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 11,72 persen di tahun 2020.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen antara lain: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen antara lain : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Pendidikan, *Real Estate*; Empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2. 17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Tahun 2016 s.d 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,16	7,12	6,61	1,06	-0,25
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,23	0,39	0,16	-2,69	1,66
C	Industri Pengolahan	7,85	4,26	5,75	14,53	-2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,19	7,30	5,93	4,14	4,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,44	12,07	8,34	5,88	9,34
F	Konstruksi	7,01	6,17	7,63	9,74	3,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	8,53	10,31	10,51	-1,08
H	Transportasi dan Pergudangan	3,76	6,39	10,25	10,99	-12,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	5,54	11,76	8,56	-12,78
J	Informasi dan Komunikasi	9,01	9,85	10,37	10,73	11,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,19	3,67	6,32	5,72	3,98
L	Real Estate	7,30	6,61	4,88	7,80	5,95
M,N	Jasa Perusahaan	7,50	6,55	10,50	10,51	-8,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	6,70	12,28	5,52	-0,76
P	Jasa Pendidikan	6,30	5,30	8,66	7,22	6,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,09	7,60	9,50	8,74	11,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,10	9,53	11,42	9,28	-12,32
Produk Domestik Regional Bruto		**1,58**	**3,07**	**3,39**	**1,17**	**1,46**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 21,5 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 535,6 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 21 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.157.596,3	4.488.747,3	4.941.165,3	5.005.805,8	5.157.680,0
B	Pertambangan dan Penggalian	8.520.812,2	8.795.474,3	9.741.532,8	9.502.349,5	9.677.497,8
C	Industri Pengolahan	623.287,6	635.626,1	691.960,3	801.193,7	790.884,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.364,6	8.966,8	9.721,2	10.218,2	10.595,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1.151,3	1.230,0	1.345,0	1.471,1	1.622,3
F	Konstruksi	1.515.435,0	1.644.089,5	1.885.660,9	2.192.080,8	2.269.461,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	625.067,2	681.935,4	775.841,0	882.665,1	883.234,4
H	Transportasi dan Pergudangan	126.788,9	132.112,5	146.264,6	164.428,4	147.146,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.255,8	36.473,0	41.408,0	46.132,7	41.372,1
J	Informasi dan Komunikasi	231.857,2	255.449,4	288.236,8	325.470,8	362.769,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	150.075,8	165.738,3	189.925,0	210.775,7	221.042,8
L	Real Estate	411.097,6	432.680,3	465.327,8	509.270,1	542.983,8
M,N	Jasa Perusahaan	8.777,5	9.445,3	10.755,2	12.096,3	11.270,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397.311,9	439.631,3	517.747,4	566.441,9	573.813,9
P	Jasa Pendidikan	349.432,5	368.418,8	409.500,4	454.545,5	486.909,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215.415,1	222.666,6	251.514,2	280.438,4	325.953,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	20.341,8	22.598,1	25.987,8	28.836,1	25.571,9
Produk Domestik Regional Bruto		**17.395.068,4**	**18.341.283,1**	**20.393.893,9**	**20.994.219,8**	**21.529.809,6**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 9,7 triliun rupiah atau sebesar 44,95 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertambangan dan Penggalian menurun selama tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan kategori ini meningkat sebesar 1,66 persen. Pada tahun 2020, kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 5,16 triliun rupiah atau sebesar 23,96 persen. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 23,84 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurunselama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, kategori ini tumbuh sebesar -0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,06 persen. Secara nominal, kategori Konstruksi berkembang dari 1,52 triliun rupiah

menjadi 2,23 triliun rupiah selama 5 tahun terakhir. Angka tersebut menduduki peringkat ketiga dalam menyumbang besaran PDRB Kabupaten Luwu Timur. Kontribusi kategori Konstruksi meningkat dari 8,71 persen menjadi 10,54 persen selama 2016-2020. Namun, laju pertumbuhannya berfluktuasi sepanjang 2016-2020 dengan pertumbuhan terendah berada pada tahun ini 2020, sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Pertumbuhan kategori konstruksi sebesar 3,15 persen di tahun 2020 lebih lambat dari 9,74 persen di tahun 2019.

Pada tahun 2020, kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 883,23 miliar rupiah atau sebesar 4,1 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Luwu Timur dan menduduki peringkat keempat. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 sebesar 4,2 persen.

Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2015-2019 yaitu berkisar 2-4 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu Timur melambat -1,08 persen pada tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Industri Pengolahan menyumbang lebih dari 2 persen hingga mencapai 3 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini menurun 790,88 miliar rupiah atau sekitar 3,67persen.

Secara umum, kontribusi Kategori Industri Pengolahan berfluktuasi selama periode 2016-2020 dengan kontribusi terendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 3,39 persen, sementara kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019, yang mencapai 3,82 persen. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dari 7,85 persen menjadi -2,71 persen pada periode 2016-2020.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,90	24,47	24,23	23,84	23,96
B	Pertambangan dan Penggalian	48,98	47,95	47,77	45,26	44,95
C	Industri Pengolahan	3,58	3,47	3,39	3,82	3,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,71	8,96	9,25	10,44	10,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,59	3,72	3,80	4,20	4,10
H	Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,72	0,72	0,78	0,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,20	0,20	0,22	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	1,33	1,39	1,41	1,55	1,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,90	0,93	1,00	1,03
L	Real Estate	2,36	2,36	2,28	2,43	2,52
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,40	2,54	2,70	2,67
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,01	2,01	2,17	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,21	1,23	1,34	1,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,12	0,12	0,13	0,14	0,12
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 44,95 persen (angka ini menurun dari 48,98 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 23,86 persen (angka ini meningkat dari 23,90 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,54 persen (naik dari 8,71 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 4,10 persen (naik dari 3,59 persen di tahun 2016). Berikutnya

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 3,67 persen (naik dari 3,58 persen di tahun 2016).

2.2.1.2 Inflasi

Salah satu indikator yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat perkembangan harga berbagai komoditi pada suatu wilayah tertentu adalah statistik harga. Selain itu, statistik harga juga berperan sebagai tolak ukur dalam perhitungan tingkat inflasi atau deflasi dalam suatu periode tertentu. Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara umum pada periode tertentu di suatu wilayah. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya :

a. Konsumsi masyarakat meningkat
b. Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi
c. Tidak lancarnya distribusi barang

Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan data tersebut, BPS melalui kegiatan Survei Harga Konsumen (SHK) berusaha mengumpulkan data harga beberapa barang dan jasa dalam suatu paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat saat ini. Selanjutnya, kegiatan SHK akan menghasilkan data statistik harga yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang mampu memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu inilah yang kemudian disebut dengan inflasi (tingkat kenaikan) atau deflasi (tingkat penurunan) harga dari barang/jasa (paket komoditas) yang secara umum dikonsumsi masyarakat. Kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa erat kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka semakin rendah daya belinya dan begitu pula sebaliknya. Selain bersumber dari kegiatan SHK, bahan penyusun IHK lainnya juga diperoleh dari hasil kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH) yang berupa diagram timbang. Diagram timbang mencerminkan pola konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa dalam sebuah paket komoditas yang sama dengan paket komoditas SHK.

Survei Biaya Hidup (SBH) dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi : Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya. Sebagai rujukan nilai inflasi, Kabupaten Luwu Timur menggunakan nilai Inflasi Kota Palopo sebagai Regional Wilayah Luwu Raya.

Grafik 2. 13 Laju Inflasi Kota Palopo (Persen)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020

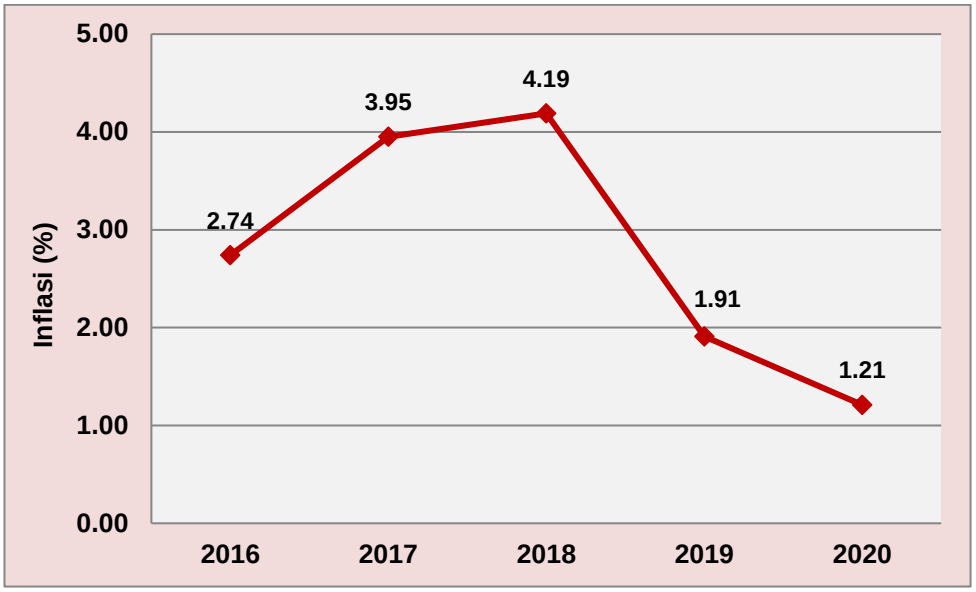

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Pada Bulan Desember 2020 Kota Palopo mengalami inflasi sebesar 0,27 persen, kumulatif inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,21 persen dan inflasi tahun ke tahun menjadi 1,21 persen. Inflasi di Kota Palopo terjadi karena perubahan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks tiga kelompok pengeluaran yaitu inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; serta kelompok transportasi sebesar 0,29 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi. Adapun enam kelompok lainnya tidak mengalami perubahan harga yang signifikan.

Grafik 2. 14 Perbandingan Inflasi (Persen)
5 (Lima) Wilayah Sulawesi Selatan
Tahun 2016 s.d 2020

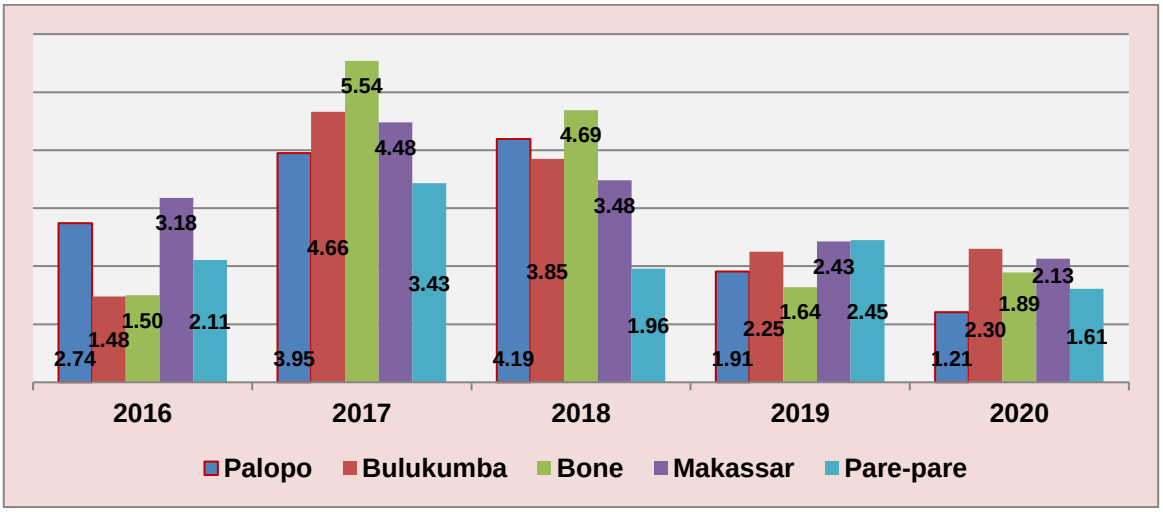

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Pada tahun 2020 tercatat bahwa di Kabupaten/Kota penghitung inflasi nasional wilayah Sulawesi Selatan, kumulatif inflasi tertinggi terjadi di Bulukumba sebesar 2,30 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 1,21 persen. Jika dilihat perkembangannya selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Inflasi Kota Palopo mengalami fluktuasi namun kecenderungannya mengalami penurunan.

Grafik 2. 15 Perbandingan Laju Inflasi (Persen)
Kota Palopo - Prov. Sul-Sel - Nasional
Tahun 2016 s.d 2020

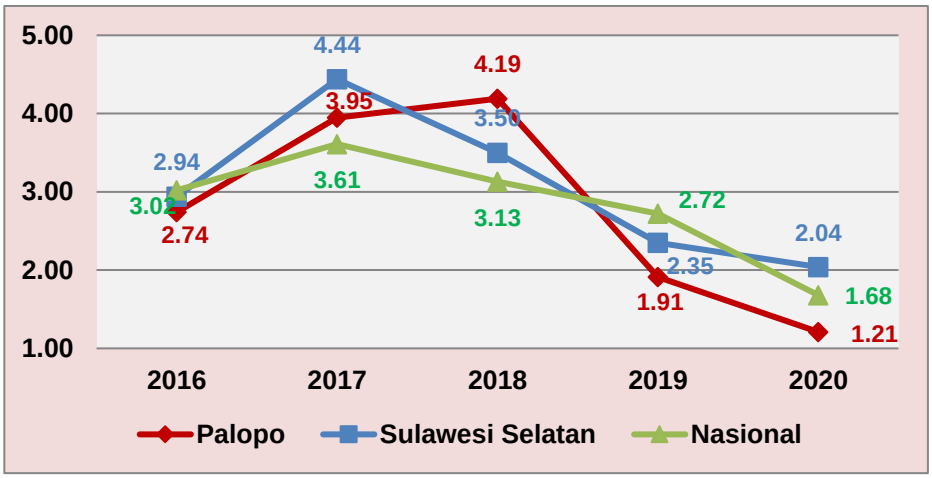

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Sementara jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat inflasinya sebesar 2,04 persen dan Nasional Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,68 persen, maka inflasi Kota Palopo lebih rendah dengan inflasi sebesar 1,21 persen. Apabila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perkembangan Inflasi Kota Palopo selalu berada dibawah inflasi Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 61,72 juta rupiah dan meningkat 8,78 juta rupah hingga tahun 2020 mencapai 70,50 juta rupiah atau 12,45 persen.

Grafik 2. 16 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020

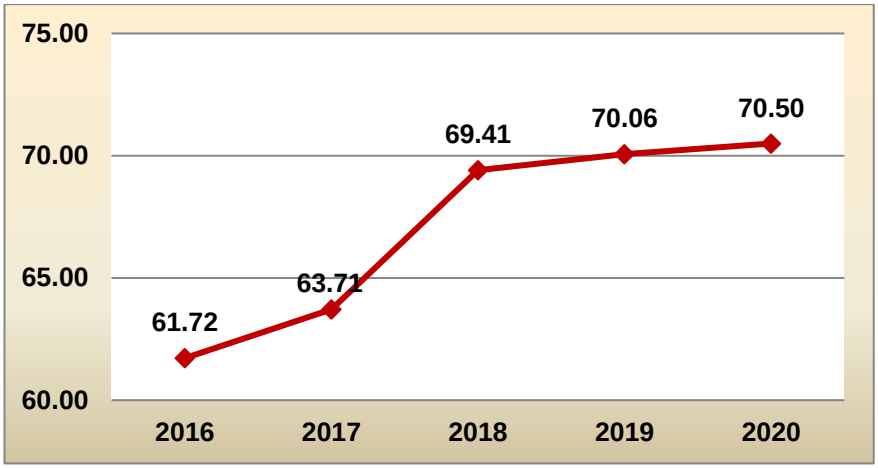

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Grafik 2. 17 Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2016 s.d 2020

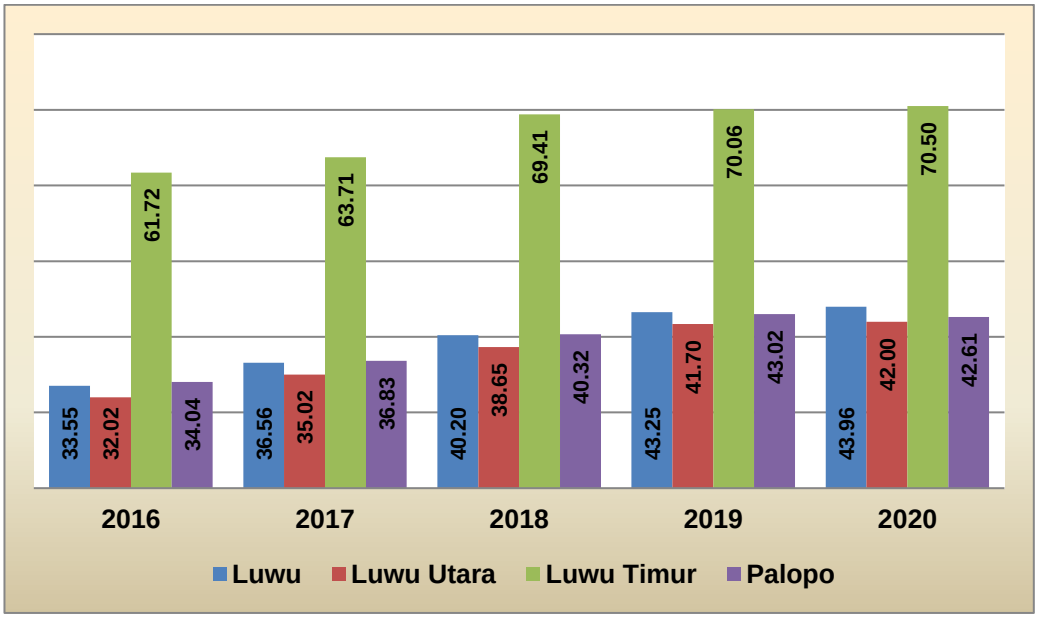

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, PDRB per kapita Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada jauh diatas capaian Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara. Namun tingginya PDRB per kapita Kabupaten Luwu Timur tersebut belum mewakili kondisi kesejahteraan seluruh masyarakat karena masih terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Grafik 2. 18 Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kab. Luwu Timur - Prov. Sul-Sel - Nasional
Tahun 2016 s.d 2020

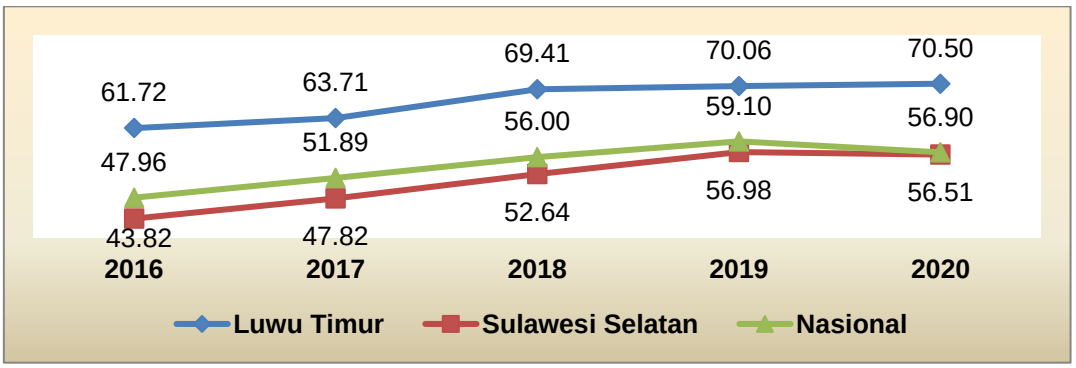

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Sementara itu, selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Luwu Timur juga berada jauh diatas capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.4 Gini Rasio

Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur meningkat di Tahun 2020 mencapai 0,405 atau berkategori sedang. Kondisi tersebut merupakan tertinggi dibandingkan di wilayah sekitar Kabupaten Luwu Timur, sehingga hal tersebut mengindikasikan kesenjangan di Kabupaten Luwu Timur masih lebih lebar dibandingkan wilayah sekitar Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tergambar pada grafik dibawah.

Grafik 2. 19 Perbandingan Gini Rasio
Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 s.d 2020

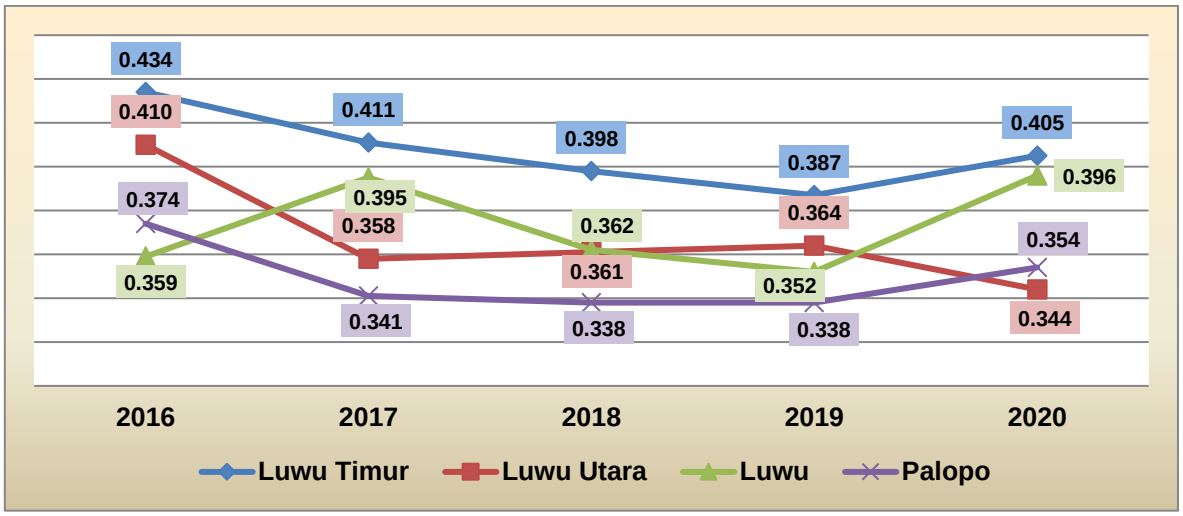

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi merupakan salah satu komponen penyusun PDB, maka dengan meningkatnya investasi tentu akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi meningkat maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut- larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Di Kabupaten Luwu Timur perkembangan Indeks Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Indeks Gini Sul-Sel maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Luwu Timur masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Sul-Sel dan Nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.33 dan Gambar 2.20.

Tabel 2. 20 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020

Luwu Timur	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405
Sulawesi Selatan	0.426	0.407	0.397	0.389	0.389
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.382	0.381

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4, 2020

Angka Indeks Gini Luwu Timur tersebut di atas menunjukkan fluktuasi. Ini juga mengindikasikan fluktuasi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Perkembangan ini menjadi tantangan ke depan untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya yang lebih stabil dari waktu ke waktu.

Grafik 2. 20 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

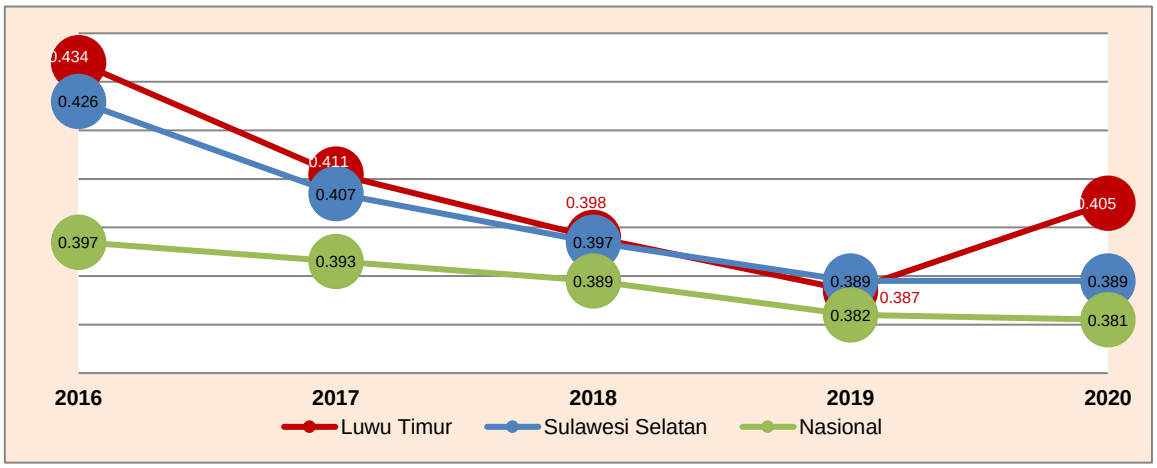

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Selain fluktuasi indeks gini, masalah lain yang masih menjadi tantangan bagi Luwu Timur adalah tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dibanding kondisi Indeks Gini Sulawesi Selatan dan nasional kurun waktu 2016 – 2020 sebagaimana grafik di atas.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan pertambahan produk secara kuantitas. Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).

Grafik 2. 21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016-2020

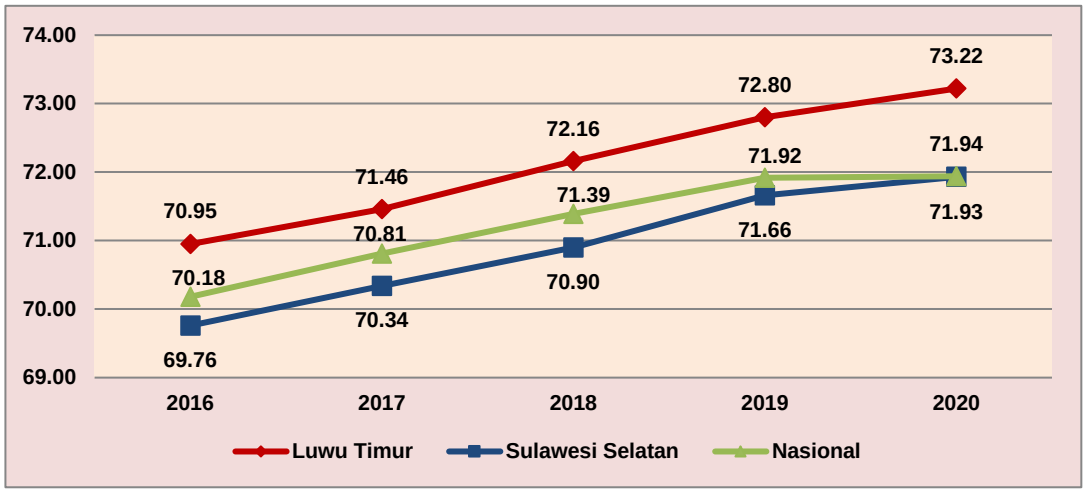

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan IPM Luwu Timur yang cukup memadai dibanding dengan perkembangan IPM Regional Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada 2016, Luwu Timur mencapai 70,95, sementara Sulawesi Selatan pada angka 69,76 dan nasional 70,18. Kemudian pada 2017, Luwu Timur mencapai 71,46, sedang Sulawesi Selatan 70,34 dan nasional 70,81. Selanjutnya pada 2018, Luwu Timur sebesar 72,16, sedang Sulawesi Selatan 70,90 dan nasional sebesar 71,39. Berikut pada 2019, Luwu Timur mencatat 72,80, sedang Sulawesi Selatan 71,66 dan nasional 71,92. Terakhir pada 2020, IPM Luwu Timur sebesar 73,22, sedang Sulawesi Selatan sebesar 71,93 dan nasional 71,94.

Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2016- 2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69.71	69.79	70.03	70.38	70.53
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.78	12.79	12.81	12.82	12.83
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.88	8.20	8.45	8.54	8.80
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	11,960	12,030	12,346	12,802	12,814
IPM		70.95	71.46	72.16	72.80	73.22

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sul-Sel, 2021

Data tersebut di atas menunjukkan jika keseluruhan komponen dari IPM di Luwu Timur periode 2016 – 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi bagi peningkatan IPM tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab secara sinergis dan terintegrasi.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur meningkat dari tahun 2016 sebesar 94,06 persen menjadi 95,30 persen di tahun 2020. Dengan semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 22 Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Angka melek huruf (%)	94,06	93,72	94,80	95,72	95,30

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

Data tersebut di atas menunjukkan jika terdapat kemajuan bagi Luwu Timur terkait dengan AMH periode 2016 - 2020. Ini menunjukkan jika terdapat perbaikan di dalam pengelolaan pendidikan yang mendorong berkurangnya angka buta huruf di satu sisi, dan meningkatnya AMH pada sisi yang lain.

2.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari 7.88 tahun menjadi 8,80 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas II SMP.

Tabel 2. 23 Angka Rata-rata Lama Sekolah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2021

Grafik 2. 22 Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

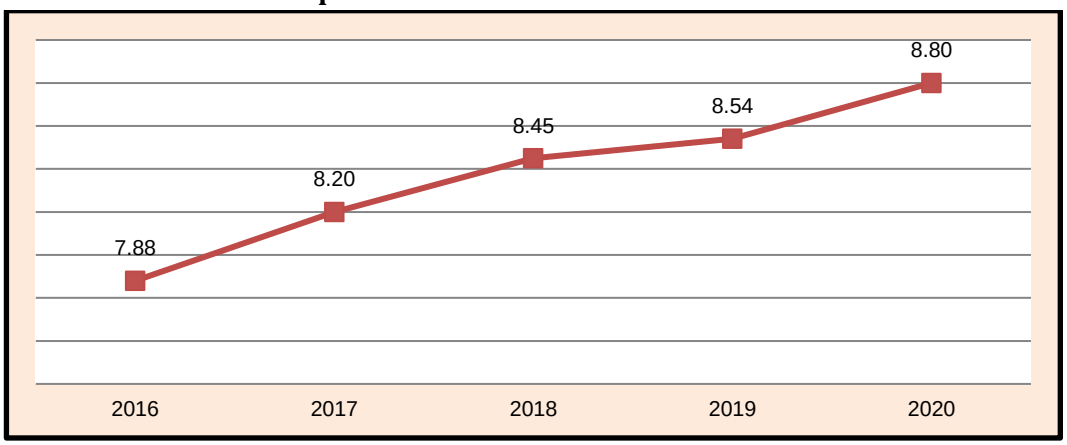

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur meningkat pada tahun 2020 sebesar 8,80 Tahun dan berada diatas Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,38 Tahun. Meskipun demikian, capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur masih menunjukkan adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka 8,50 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat. Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B, atau C).

Grafik 2. 23 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 s.d 2020

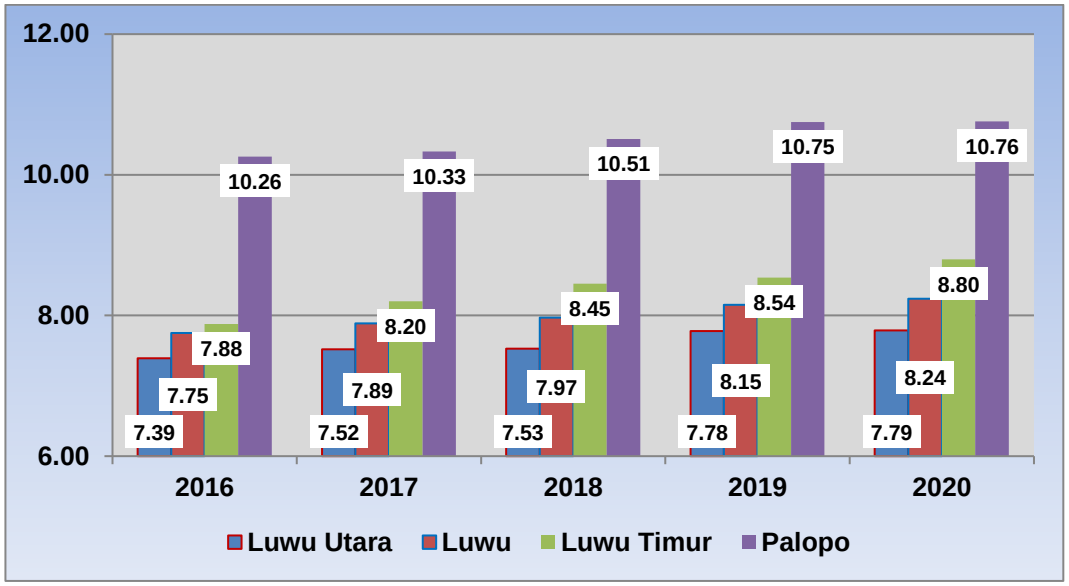

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dibawah capaian Kota Palopo namun berada diatas capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara.

Grafik 2. 24 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional Tahun 2016 s.d 2020

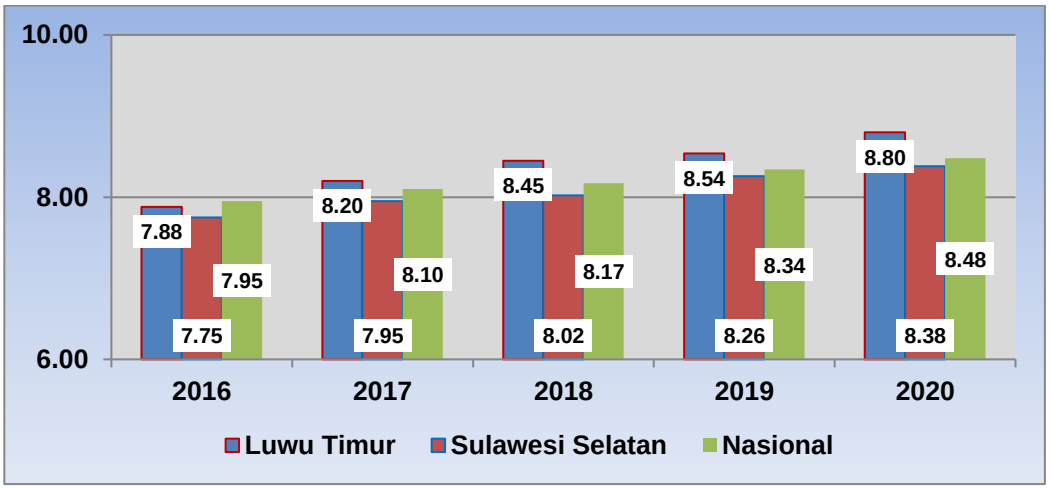

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Sementara itu, selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur berada diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk

suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tercatat pada tahun 2016 sebesar 69,71 tahun meningkat menjadi 70,53 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 2. 25 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur

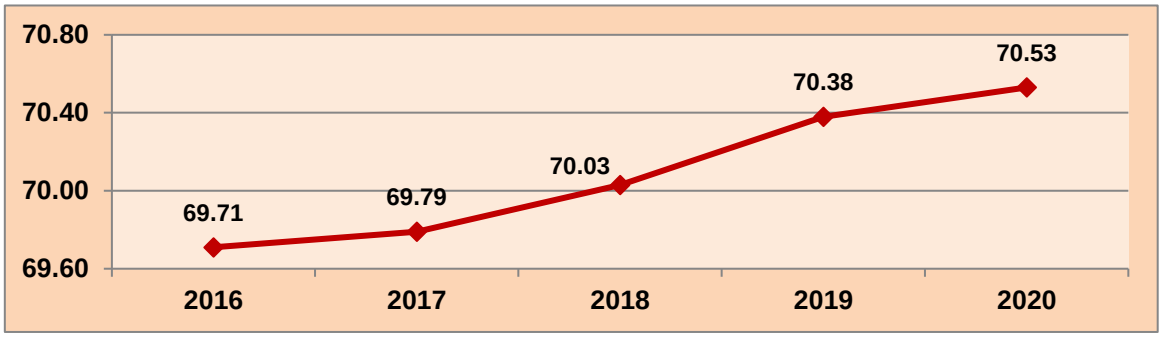

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2.2.2.5 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

**Grafik 2. 26 Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Tahun)**

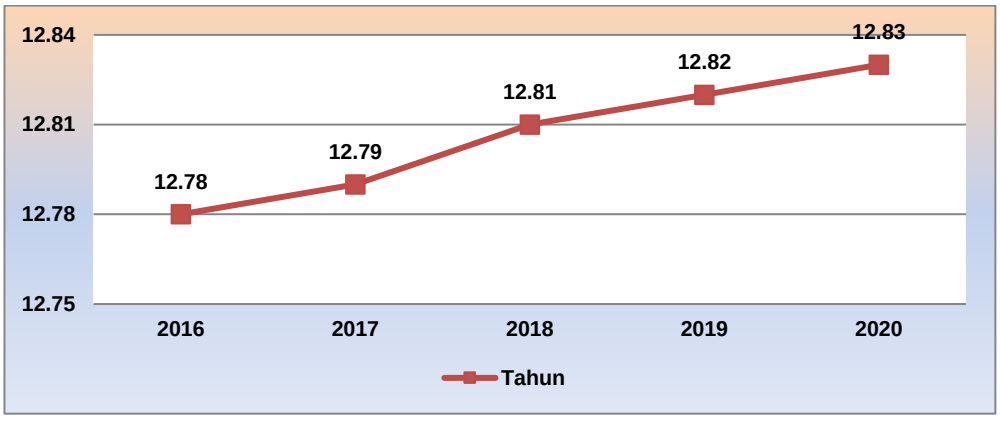

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur secara rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per

tahun mencapai 12,83 tahun pada tahun 2020. Harapan Lama Sekolah tahun 2020 yang mencapai 12,83 tahun dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas II SMP. Pertumbuhan yang positif ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Luwu Timur menuju Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi.

**Grafik 2. 27 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 s.d 2020**

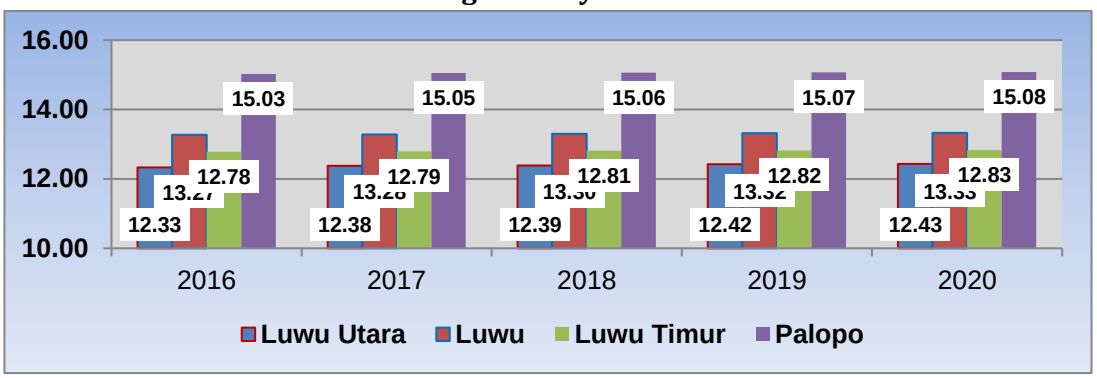

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dibawah capaian Kota Palopo dan Kabupaten Luwu namun berada diatas Kabupaten Luwu Utara.

**Grafik 2. 28 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional Tahun 2016 s.d 2020**

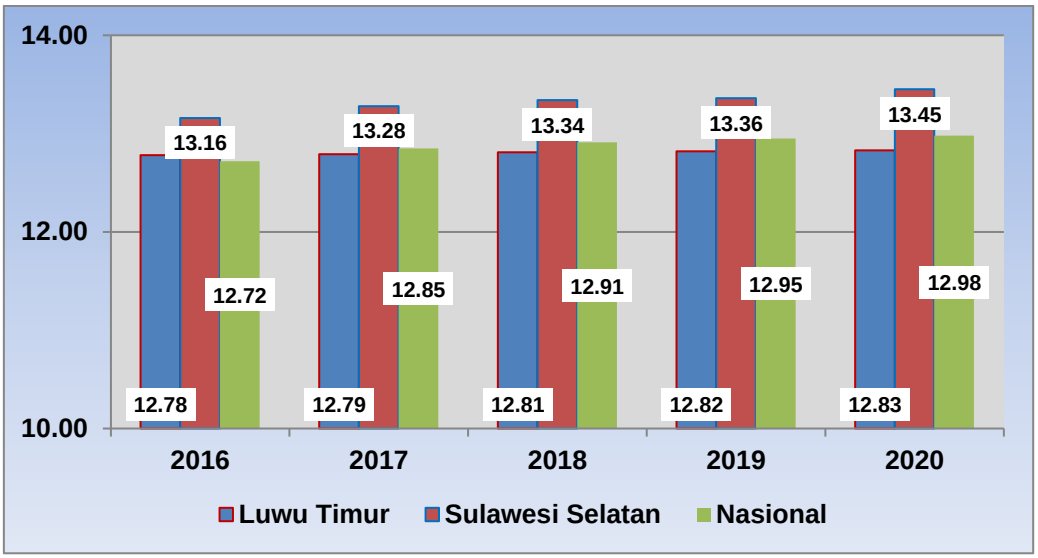

Pada tahun 2016 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur berada diatas Nasional namun dibawah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menurun berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi

Selatan dan Nasional.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan**.**

Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dicerminkan dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan IDG merupakan Cerminan peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 24 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur terhadap Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tahun 2015-2019

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	91.82	-	90.97	91.96	91.92
2	Bulukumba	96.08	-	96.56	96.45	96.59
3	Bantaeng	96.38	-	95.28	95.30	95.31
4	Jeneponto	90.17	-	90.94	91.30	91.64
5	Takalar	87.37	-	86.76	87.24	87.29
6	Gowa	87.92	-	87.69	87.24	87.19
7	Sinjai	98.61	-	98.01	98.13	98.20
8	Maros	88.84	-	88.91	88.93	89.10
9	Pangkep	89.75	-	89.26	89.80	90.16
10	Barru	95.02	-	95.51	95.44	95.42
11	Bone	91.93	-	92.65	92.95	93.25
12	Soppeng	98.42	-	97.43	97.25	97.08
13	Wajo	89.10	-	89.90	90.04	90.13
14	Sidrap	91.51	-	92.21	91.90	92.08
15	Pinrang	94.73	-	95.44	95.45	95.35
16	Enrekang	97.95	-	98.12	97.99	97.31
17	Luwu	91.89	-	92.52	92.28	92.00
18	Tana Toraja	86.57	-	87.18	87.86	88.18

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
19	Luwu Utara	88.68	-	88.87	88.94	89.21
20	Luwu Timur	89.31	-	89.49	89.38	89.61
21	Toraja Utara	85.61	-	86.03	86.38	86.78
22	Makassar	93.96	-	94.70	94.53	94.48
23	Parepare	97.29	-	97.47	96.87	96.78
24	Palopo	97.20	-	97.57	97.75	97.35
Sulawesi Selatan		92.92	92.79	92.84	93.15	93.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas data dilihat bahwa angka IPG Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 adalah 89.61% dibandingkan dengan angka IPG tahun 2017 sebesar 89.49% hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara regional Kabupaten Luwu Timur dalam nomer 20 (dua puluh) dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Indikator lainnya dalam melihat keberhasilan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak adalah melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel 2. 25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019

NO	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2019	2018
1	Kepulauan Selayar	68,03	64,69
2	Bulukumba	69,89	66,78
3	Bantaeng	80,27	80,53
4	Jeneponto	68,04	72,37
5	Takalar	70,66	70,55
6	Gowa	78,31	61,06
7	Sinjai	72,48	70,24
8	Maros	69,93	65,48
9	Pangkajene Dan Kepulauan	57,03	56,20
10	Barru	63,41	69,24
11	Bone	58,55	63,16

12	Soppeng	71,45	73,75
13	Wajo	55,09	61,07
14	Sidenreng Rappang	56,80	52,71
15	Pinrang	67,92	61,73
16	Enrekang	58,28	59,36
17	Luwu	55,89	63,58
18	Tana Toraja	69,32	74,14
19	Luwu Utara	38,92	46,24
20	Luwu Timur	50,76	46,06
21	Toraja Utara	62,58	56,15
22	Kota Makassar	78,32	67,89
23	Kota Pare-Pare	73,86	66,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2018 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 46,06l. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu 50,76 dimana kabupaten Luwu Timur berada diurutan 20 (duapuluh) secara regional. Beberapa upaya upaya yang dilakukan dalam mendorong pengarusutamaan gender di Kab. Luwu Timur yaitu keikutsertaan dalam penilaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai penghargaan atas implementasi pangarusutamaan gender dan kabupaten/kota layak anak. Beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya pada Tahun 2019, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Tahun 2019

No	Kab/Kota	Kategori Penghargaan
1	Sidrap	Utama
2	Luwu Timur	Utama
3	Sinjai	Utama
4	Makassar	Madya
5	Maros	Madya
6	Bone	Madya
7	Bulukumba	Madya
8	Bantaeng	Madya
9	Soppeng	Madya
10	Wajo	Madya
11	Pare-pare	Madya
12	Luwu	Madya

13	Pangkep	Pratama
14	Luwu Utara	Pratama

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia, Amerika, India, Brazil, China, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 212.930 orang pada Agustus 2019 menjadi 217.684 orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Luwu Timur. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 72,36 persen atau 157.509 orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 150.480 orang penduduk bekerja dan 7,029 orang pengangguran.

Tabel 2. 27 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN		
	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	**209,413**	**212,930**	**217,684**
Angkatan Kerja	**150,747**	**143,676**	**157,509**
- Bekerja	147,687	138,200	150,480
- Pengangguran	3,060	5,476	7,029
Bukan Angkatan Kerja	**58,666**	**69,254**	**60,175**
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	2.03	3.81	4.46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	71.99	67.48	72.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021
*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 13.833 orang dibandingkan Agustus 2019. Pada Agustus 2020 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 72,36 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 sebesar 67,48 persen. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

**Grafik 2. 29 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018 s.d 2020 (Persen)**

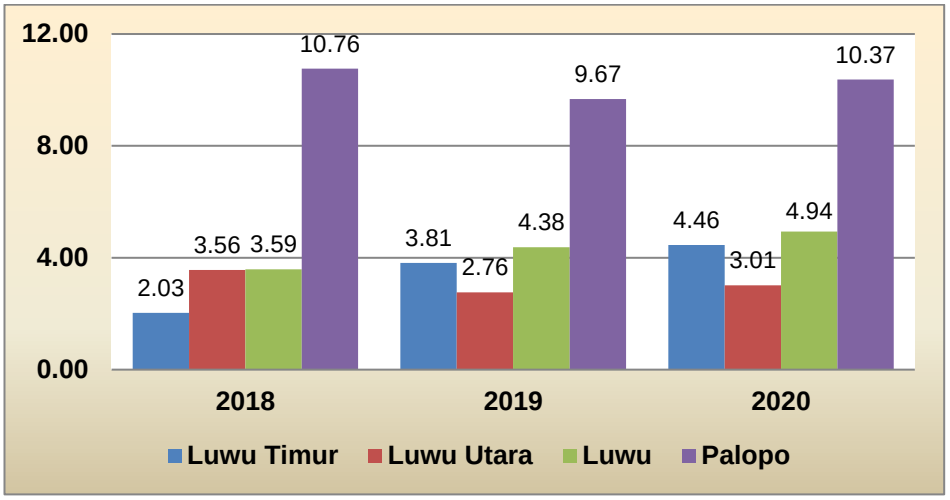

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, perkembangan TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan 0,65 persen dari tahun 2019, namun kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan kondisi TPT Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Sementara jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terlihat bahwa TPT Kabupaten Luwu Timur masih berada dibawah TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

**Grafik 2. 30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)**

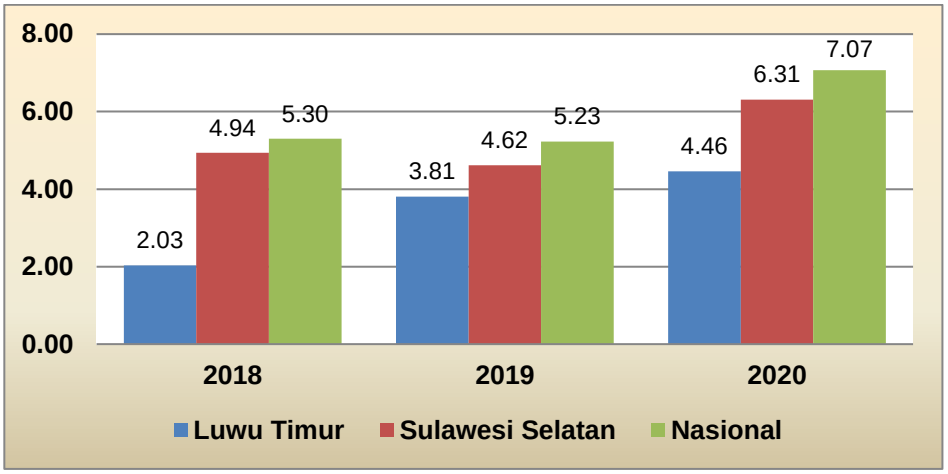

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuatif namun cenderung menurun di Tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, belum diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Tabel 2. 28 Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020

INDIKATOR	TAHUN		
	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Yang Bekerja (Orang)	147,687	138,200	150,480
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	150,747	143,676	157,509
Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,97	0,98	0,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021
*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Selain

itu juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Luwu Timur. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19.

2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampat dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Tabel 2. 29 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.19	78.46	81.81	83.43	84.31

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2021

Data di atas menunjukkan jika pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD di Luwu Timur periode 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan berdasar IKM. Pada 2016 IKM tersebut 78,19 kemudian menjadi 78,46 pada 2017, dan meningkat lagiu

menjadi 81,81 pada 2018. Selanjutnya mencapai 83,43 pada 2019, dan tahun 2020 sebesar 84,31.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sekolah	163	156	163	165	175
2	Jumlah Murid	6.973	7.414	7.545	7.562	7.961
3	Jumlah Guru	576	579	580	583	589

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Bila melihat tabel diatas, perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Luwu Timur meningkat setiap tahunnya yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah Sekolah PAUD dalam hal ini sekolah TK Negeri dan Swasta di Kabupaten Luwu Timur sehingga juga berdampak pada penambahan jumlah murid dan jumlah guru di jenjang PAUD. Meningkatnya jumlah sekolah PAUD (TK) akan meningkatkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD yaitu 4-6 tahun, sehingga memudahkan akses dan layanan penduduk untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD dan akan berdampak pada peningkatan APK PAUD di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 31 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Sekolah PAUD (TK)	Jumlah Siswa PAUD (TK)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (TK)
1	BURAU	23	1110	73
2	WOTU	19	734	59
3	TOMONI	18	856	57
4	TOMONI TIMUR	9	298	27
5	ANGKONA	14	408	33
6	MALILI	25	1260	95
7	TOWUTI	25	1239	84
8	NUHA	12	959	61
9	WASUPONDA	8	402	36
10	MANGKUTANA	15	492	45
11	KALAENA	7	203	19
	TOTAL	**175**	**7961**	**589**

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PAUD di Kab. Luwu Timur adalah 175 TK, yang terdiri atas 11 TK Negeri Pembina disetiap Kecamatan dan 164 TK Swasta di yang tersebar di setiap Desa di Kab.Luwu Timur. Begitupun jumlah guru yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah PAUD. Bila dilihat perkembangan jumlah siswa PAUD (TK) yang semakin meningkat setiap tahunnya yakni di Tahun 2020 mencapai 7.961 orang yang menunjukkan bahwa semakin tingginya partisipasi

masyarakat bersekolah pada jenjang PAUD.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menurut jenjang pendidikan di Kab. Luwu Timur memperlihatkan tendensi yang makin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diduduki. APK Murid SD/Sederajat melebihi dari angka seratus persen, hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat yang berumur di bawah 7 tahun dan atau di atas 12 tahun.

Tabel 2. 32 Angka Partisipasi Kasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD	%	38.39	38.39	39.79	45.71	46.11
2	APK SD/MI/Paket A	%	102.31	102.00	102.24	102.94	103.13
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	106.13	103.00	103.48	103.50	103.56

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Bila dilihat perkembangan APK PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun nilai APK PAUD ini masih belum cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 46,11 persen hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang mengharuskan anak usia TK umur 4 sampai 6 tahun harus masuk sekolah di TK sehingga orang tua masih ada yang kurang menyadari akan hal ini.

Perkembangan APK SD/MI/Paket A sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 103,13 persen. Namun terjadi penurunan nilai APK SD/MI dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah siswa dibandingkan dengan tahun lalu. Mengingat bahwa pada tahun ini diberlakukan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dan mengakibatkan banyak siswa yang mengikut berdasarkan domisilinya. Untuk capaian yang melebihi 100 persen dikarenakan untuk menghitung Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, digunakan seluruh data peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A meskipun bukan pada usia pendidikan yang seharusnya pada jenjang SD sederajat yakni 7-12 tahun.

Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 103,56 persen. Namun terjadi penurunan nilai APK SD/MI dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah siswa dibandingkan dengan tahun lalu. Mengingat bahwa pada tahun ini diberlakukan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dan mengakibatkan banyak siswa yang mengikut berdasarkan domisilinya Untuk capaian yang melebihi 100 persen dikarenakan untuk menghitung Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, digunakan seluruh data peserta didik yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B meskipun bukan pada usia pendidikan yang seharusnya pada jenjang SMP sederajat yakni 13-15 tahun. Adapun Capaian APK menurut Kecamatan dapat dilijhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 33 Angka Partisipasi Kasar PAUD
Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA TK/RA/Sederajat	JUMLAH ANAK USIA 4-6 TAHUN	APK PAUD
1	BURAU	1254	2644	47.43%
2	WOTU	873	1990	43.86%
3	TOMONI	901	1755	51.35%
4	TOMONI TIMUR	345	728	47.36%
5	ANGKONA	549	1544	35.55%
6	MALILI	1386	2479	55.91%
7	TOWUTI	1311	2176	60.24%
8	NUHA	994	1909	52.06%
9	WASUPONDA	541	2095	25.82%
10	MANGKUTANA	537	1430	37.55%
11	KALAENA	258	658	39.21%
JUMLAH		**8.949**	**19.409**	**46.11%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa Partisipasi tertinggi untuk jenjang PAUD terdapat pada kecamatan Towuti dengan APK 60,24 persen dan yang APK PAUD yang terendah terdapat pada Kecamatan Mangkutana dengan APK 37,55 persen. Nilai APK PAUD ini masih belum cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 46,11% hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang mengharuskan anak usia TK umur 4 sampai 6 tahun harus masuk sekolah di TK sehingga orang tua masih ada yang kurang menyadari akan hal ini.

Tabel 2. 34 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	(APK) SD/MI/PAKET A
1	BURAU	4689	5253	89.27%
2	WOTU	3686	3923	93.95%
3	TOMONI	3426	3254	105.28%
4	TOMONI TIMUR	1446	1438	100.56%
5	ANGKONA	2692	2898	92.90%
6	MALILI	5529	4475	123.55%
7	TOWUTI	5779	3695	156.39%
8	NUHA	2988	3045	98.12%
9	WASUPONDA	2728	3586	76.07%
10	MANGKUTANA	2447	2772	88.28%
11	KALAENA	1335	1291	103.41%
JUMLAH		**36745**	**35631**	**103.13%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tertinggi adalah Kecamatan Towuti dengan APK 156,39 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APK 76,07 persen. Perkembangan APK SD/MI/Paket A sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 103,13%. Untuk capaian yang melebihi 100% dikarenakan untuk menghitung Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, digunakan seluruh data peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A meskipun bukan pada usia pendidikan yang seharusnya pada jenjang SD sederajat yakni 7-12 tahun.

Tabel 2. 35 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2539	2444	103.90%
2	WOTU	1786	1871	95.44%
3	TOMONI	1241	1568	79.15%
4	TOMONI TIMUR	866	690	125.54%
5	ANGKONA	1365	1355	100.75%
6	MALILI	2155	2149	100.26%
7	TOWUTI	2158	1579	136.70%
8	NUHA	1431	1236	115.78%
9	WASUPONDA	1180	1527	77.28%

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
10	MANGKUTANA	1520	1353	112.38%
11	KALAENA	754	640	117.81%
JUMLAH		**16995**	**16411**	**103.56%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tertinggi adalah Kecamatan Towuti dengan APK 135,70 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APK 77,28 persen. Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 103,56%. Untuk capaian yang melebihi 100% dikarenakan untuk menghitung Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, digunakan seluruh data peserta didik yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B meskipun bukan pada usia pendidikan yang seharusnya pada jenjang SMP sederajat yakni 13-15 tahun.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah menengah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2. 36 Angka Partisipasi Murni
Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI/Paket A	%	99.18	99.02	92.03	92.39	92.54
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	93.47	80.80	95.73	95.97	95.99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2019 menargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 83,24 persen, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 83,24 persen. Realisasi tersebut diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 29.528 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 35.473 jiwa sehingga terealisasi sebesar 83,24 persen. Jika dibanding dengan tahun 2018 realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 92,03 persen, maka terjadi penurunan sebesar 8,79 persen pada tahun 2019. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Dasar sembilan tahun dengan kegiatan penambahan ruang kelas sekolah. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2019 menargetkan sebesar 84,17 persen terealisasi sebesar 73,10 persen, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 86,85 persen. Realisasi sebesar 73,10 persen diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 11.898 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 16.276 jiwa sehingga terealisir sebesar 73,10 persen. Jika dibanding dengan tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 95,33 persen, maka terjadi penurunan sebesar 22,23 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Luwu Timur dan ingin kerja. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan dasar sembilan tahun. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah menengah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2. 37 Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A USIA 7-12 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APM SD/MI/PAKET A (%)
1	BURAU	4254	5253	80.99
2	WOTU	3185	3923	81.18
3	TOMONI	3151	3254	96.83
4	TOMONI TIMUR	1194	1438	83.03
5	ANGKONA	2374	2898	81.92
6	MALILI	4711	4475	105.26%
7	TOWUTI	5387	3695	145.78%
8	NUHA	2959	3045	97.16
9	WASUPONDA	2321	3586	64.72
10	MANGKUTANA	2252	2772	81.23
11	KALAENA	1187	1291	91.94
JUMLAH		**32.974**	**35.631**	**92.54**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tertinggi adalah Kecamatan Towuti dengan APM 145,78 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APM 64,72 persen. Realisasi pada tingkat daerah (Luwu Timur) memiliki nilai yang cukup tinggi dan hampir setara dengan nilai tingkat provinsi dan nasional yakni 92,61% dan 92,88% hal ini diakibatkan karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah tingkat Provinsi dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya nilai APM SD di kabupaten luwu Timur yaitu karena adanya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 38 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B USIA 13-15 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2280	2444	93.30%
2	WOTU	1493	1871	79.78%
3	TOMONI	1205	1568	76.85%
4	TOMONI TIMUR	952	690	138.01%
5	ANGKONA	1372	1355	101.27%
6	MALILI	1869	2149	86.95%
7	TOWUTI	1956	1579	123.91%

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B USIA 13-15 TAHUN	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM SMP/MTs/PAKET B
8	NUHA	1273	1236	102.99%
9	WASUPONDA	1163	1527	76.16%
10	MANGKUTANA	1404	1353	103.80%
11	KALAENA	786	640	122.81%
JUMLAH		**15753**	**16411**	**95.99%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B tertinggi adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan APM 138,01 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APM 76,16 persen.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dinyatakan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SD/MI	%	99.69	95.26	91.93	95.93	95.95
2	APS SMP/MTs	%	98.76	96.55	95.51	98.37	98.49

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Bila dillihat pada tabel diatas perkembangan APS 7-12 tahun sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 95,95 persen. Angka Partispasi Sekolah (APS) 7-12 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah. Sementara itu perkembangan APS 13-15 tahun sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai

98,49 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 13-15 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah.

Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Sekolah(APS)SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APS SD/MI
1	BURAU	4380	5253	83.38%
2	WOTU	3627	3923	92.45%
3	TOMONI	3253	3254	99.96%
4	TOMONI TIMUR	1488	1438	103.48%
5	ANGKONA	2511	2898	86.65%
6	MALILI	5197	4475	116.13%
7	TOWUTI	4847	3695	131.17%
8	NUHA	2763	3045	90.73%
9	WASUPONDA	2629	3586	73.31%
10	MANGKUTANA	2216	2772	79.95%
11	KALAENA	1278	1291	98.99%
JUMLAH		**34189**	**35631**	**95.95%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tertinggi adalah Kecamatan Towuti dengan APS 131,17 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APS 73,31 persen.

Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Sekolah(APS) SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15Tahun	APS SMP/MTs
1	BURAU	2275	2444	93.10%
2	WOTU	1496	1871	79.94%
3	TOMONI	1279	1568	81.57%
4	TOMONI TIMUR	1018	690	147.58%
5	ANGKONA	1401	1355	103.41%
6	MALILI	1978	2149	92.03%
7	TOWUTI	1988	1579	125.93%
8	NUHA	1291	1236	104.45%
9	WASUPONDA	1214	1527	79.50%
10	MANGKUTANA	1438	1353	106.31%
11	KALAENA	785	640	122.66%

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15Tahun	APS SMP/MTs
JUMLAH		16.163	16.411	98.49%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tertinggi adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan APS 147,58 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APS 79,50 persen.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD/sederajat menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD/sederajat yang dinyatakan dalam persen. Begitupun angka putus sekolah pada jenjang SMP/sederajat. Angka Putus Sekolah di suatu daerah diharapkan menurun setiap tahunnya. Adapun capaian Angka Putus sekolah di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 42 Angka Putus Sekolah
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Angka Putus Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0.12	0.12	0.10	0.10	0.07
2	SMP/MTs	0.32	0.32	0.23	0.21	0.20

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Luwu Timur yang menurun setiap tahunnya. Hal ini berdampak positif dikarenakan, menurunnya angka putus sekolah menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan semakin baik.

Tabel 2. 43 Angka Putus Sekolah Menurut Kecamatan
Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
1	Burau	0.20	0.12
2	Wotu	0.00	0.06
3	Tomoni	0.07	0.92
4	Tomoni Timur	0.00	0.21
5	Mangkutana	0.09	0.13
6	Kalaena	0.00	0.00
7	Angkona	0.12	0.10
8	Malili	0.12	0.42

9	Wasuponda	0.00	0.32
10	Nuha	0.00	0.04
11	Towuti	0.00	1.02
Angka Putus Sekolah		**0.07**	**0.20**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang tidak terdapat jumlah siswa putus sekolahnya. Semetara Kecamatan yang dengan Angka Putus Sekolah tertinggi untuk jenjang SD/MI yaitu Kecamatan Burau (0.20%) dan untuk jenjang SMP/MTs yaitu Kecamatan Tomoni (0.92%).

6. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun capaian angka kelulusan SD/MI dan SMP /MTs dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 44 Angka Kelulusan SD/MI
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI						
1	Lulus	3.396	5.695	5.725	5.476	5.522
2	Tidak Lulus	0	22	22	26	14
Angka Kelulusan (%)		100	99,62	99,62	99,55	99,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka kelulusan SD/Mi adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SD/MI. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SD/Mi sudah cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 99,75 persen dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumya. Sementara capaian yang tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat pesrta ujian yang terdaftar untuk mengikuti ujian namun tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan tidak lulus.

Tabel 2. 45 Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kecamatan
Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta Ujian Tingkat SD/MI	Jumlah Siswa Lulus Tingkat SD/MI	Persentase Kelulusan SD/MI
1	Burau	686	685	99.85%
2	Wotu	553	551	99.64%
3	Tomoni	509	509	100.00%
4	Tomoni Timur	215	215	100.00%
5	Mangkutana	391	390	99.74%
6	Kalaena	181	180	99.45%
7	Angkona	460	460	100.00%
8	Malili	860	859	99.88%
9	Wasuponda	454	449	98.90%
10	Nuha	433	433	100.00%
11	Towuti	794	791	99.62%
JUMLAH		**5536**	**5522**	**99.75%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka kelulusan SD/Mi adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SD/MI. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SD/Mi sudah cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 99,75 persen dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumya. Sementara capaian yang tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat pesrta ujian yang terdaftar untuk mengikuti ujian namun tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan tidak lulus.

Tabel 2. 46 Angka Kelulusan SMP/MTS
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTS						
1	Lulus	4.024	4.974	5.225	5.171	5.194
2	Tidak Lulus	0	40	38	62	26
Angka Kelulusan (%)		100	99,20	99,28	98,82	99,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka kelulusan SMP/MTs adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SMP/Mts. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SMP/MTs sudah cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 99,50 persen dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumya. Sementara capaian yang tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat pesrta ujian

yang terdaftar untuk mengikuti ujian namun tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan tidak lulus.

Tabel 2. 47 Angka Kelulusan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Ujian Tingkat SMP/MTs	Jumlah Siswa Lulus Tingkat SMP/MTs	Persentase Kelulusan SMP/MTs
1	Burau	720	720	100.00%
2	Wotu	622	617	99.20%
3	Tomoni	384	383	99.74%
4	Tomoni Timur	305	304	99.67%
5	Mangkutana	418	409	97.85%
6	Kalaena	185	184	99.46%
7	Angkona	460	457	99.35%
8	Malili	722	719	99.58%
9	Wasuponda	337	335	99.41%
10	Nuha	387	386	99.74%
11	Towuti	635	635	100.00%
JUMLAH		**5175**	**5149**	**99.50%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka kelulusan SMP/MTs adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SMP/Mts. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SMP/MTs sudah cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 99,50 persen dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumya. Sementara capaian yang tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat pesrta ujian yang terdaftar untuk mengikuti ujian namun tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan tidak lulus.

7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS

Angka melanjutkan dedefinisikan sebagai Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu. Dengan kata lain, AM SD/MI ke SMP/MTs dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang akhir tingkat SD yaitu kelas 6 dengan jumlah siswa tingkat awal jenjang sekolah selanjutnya yaitu siswa kelas 7 tingkat SMP/MTs. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu

jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini.

Tabel 2. 48 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,2	89,81	95,74	95,75	95,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas, diketahui bahwa AM dari SD pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai ditahun 2020 namu adanya penurunan di tahun 2017 dipengaruhi oleh adanya pemindahan kewenangan SMA ke Provinsi serta adanya sistem Zonasi untuk penerimaan peserta didik baru yang berpengaruh pada jumlah siswa.

Tabel 2. 49 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Angka Melanjutkan (%)
1	Burau	835	642	130.06%
2	Wotu	535	566	94.52%
3	Tomoni	428	523	81.84%
4	Tomoni Timur	233	211	110.43%
5	Mangkutana	394	379	103.96%
6	Kalaena	157	191	82.20%
7	Angkona	469	424	110.61%
8	Malili	682	773	88.23%
9	Wasuponda	351	434	80.88%
10	Nuha	374	439	85.19%
11	Towuti	701	805	87.08%
TOTAL		**5159**	**5387**	**95.76%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Bila dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat beberapa Kecamatan dengan Angka Melanjutkan diatas 100%. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya sekolah-sekolah favorit maupun sekolah Keagamaaan (Ponpes) di Kecamatan tertentu yang membuat banyak lulusan siswa yang melanjutkan sekolahnya di Kecamatan lain.

8. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.

Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik, digambarkan dengan melihat kondisi ruang kelas belajar (RKB) di setiap sekolah. Kondisi ruang kelas belajar berpengaruh pada proses belajar mengajar disekolah. Sehingga RKB dengan kondisi rusak ringan/berat memerlukan rehabilitasi untuk kelancaran proses belajar mengajar.

Tabel 2. 50 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	SEKOLAH	Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	Baik (%)	79,27	78,04	78,35	71,78	72,27
		Rusak Ringan/Sedang (%)	17,53	17,54	18,32	19,92	19,61
		Rusak Berat/Total (%)	3,20	4,42	3,33	8,30	8,12
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	1.563	1.562	1.441	1.531	1.540

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan kondisi Ruang Kelas Belajar (RKB) pada jenjang SD/MI di Kab. Luwu Timur. Dimana setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi RKB setiap tahunnya, selain itu adanya penambahan maupun rehabilitasi RKB yang dilakukan setiap tahun yang memengaruhi kondisi tersebut.

Tabel 2. 51 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Kondisi RKB			Total Bangunan Gedung	Persentasi Capaian		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	BURAU	152	29	21	202	75.25%	14.36%	10.40%
2	WOTU	131	36	9	176	74.43%	20.45%	5.11%
3	MANGKUTANA	75	38	11	124	60.48%	30.65%	8.87%
4	TOMONI	129	11	6	146	88.36%	7.53%	4.11%
5	TOMONI TIMUR	56	15	0	71	78.87%	21.13%	0.00%
6	KALAENA	48	9	8	65	73.85%	13.85%	12.31%
7	ANGKONA	114	24	6	144	79.17%	16.67%	4.17%
8	MALILI	136	63	24	223	60.99%	28.25%	10.76%
9	WASUPONDA	53	22	21	96	55.21%	22.92%	21.88%
10	NUHA	97	11	4	112	86.61%	9.82%	3.57%
11	TOWUTI	122	44	15	181	67.40%	24.31%	8.29%

TOTAL	**1113**	**302**	**125**	**1540**	**72.27%**	**19.61%**	**8.12%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kondisi RKB SD/MI disetiap Kecamatan berbeda-beda hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah sekolah pada Kecamatan tersebut. Untuk Kecamatan dengan persentase kondisi RKB dalam kondisi baik tertinggi adalah diKecamatan Tomoni (88,36%) dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda (55,21%).

Tabel 2. 52 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	SEKOLAH	Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
1	SMP/MTS	Baik (%)	83,46	82,34	78,85	77	78,51
		Rusak Ringan/Sedang (%)	15,38	15,36	15,81	17,26	15,91
		Rusak Berat/Total (%)	1,15	2,30	5,34	6,24	5,58
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	520	521	506	481	484

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan kondisi Ruang Kelas Belajar (RKB) pada jenjang SMP/MTs di Kab. Luwu Timur.Dimana setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi RKB setiap tahunnya, selain itu adanya penambahan maupun rehabilitasi RKB yang dilakukan setiap tahun yang memengaruhi kondisi tersebut.

Tabel 2. 53 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Kondisi RKB			Total Bangunan Gedung	Persentasi Capaian		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	BURAU	18	31	12	61	29.51%	50.82%	19.67%
2	WOTU	59	4	0	63	93.65%	6.35%	0.00%
3	MANGKUTANA	28	1	9	38	73.68%	2.63%	23.68%
4	TOMONI	37	0	0	37	100.00%	0.00%	0.00%
5	TOMONI TIMUR	25	3	0	28	89.29%	10.71%	0.00%
6	KALAENA	21	3	0	24	87.50%	12.50%	0.00%

7	ANGKONA	47	5	0	52	90.38%	9.62%	0.00%
8	MALILI	58	8	0	66	87.88%	12.12%	0.00%
9	WASUPONDA	27	6	0	33	81.82%	18.18%	0.00%
10	NUHA	24	0	0	24	100.00%	0.00%	0.00%
11	TOWUTI	36	16	6	58	62.07%	27.59%	10.34%
TOTAL		**380**	**77**	**27**	**484**	**78.51%**	**15.91%**	**5.58%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa kondisi RKB SMP/MTs disetiap Kecamatan berbeda-beda hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah sekolah pada Kecamatan tersebut. Untuk Kecamatan dengan persentase kondisi RKB dalam kondisi baik tertinggi adalah di Kecamatan Tomoni dan Nuha (100%) dan yang terendah adalah Kecamatan Burau (29,51%).

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin banyak sekolah disuatu daerah maka semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah d suatu daerah sehingga akan memudahkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Di Tahun 2020 menunjukkan angka 48,23. Dengan kata lain terdapat 48,23 sekolah per 10.000 penduduk. Untuk melihat perkembangan rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	238	248	249	251	251
1.2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	49.394	49.432	51.748	51.749	52.042
1.3	Rasio	48,18	50,17	48,12	48,50	48,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas merupakan perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar yang menunjukkan ketersediaan seklah per 10.000 jumlah penduduk dimana setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif. hal ini dipengaruhi oleh Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya, namun

tidak disertai dengan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) setiap tahun.

Tabel 2. 55 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar	RASIO
1	Burau	29	7.696	37,68
2	Wotu	30	5.795	51,77
3	Mangkutana	19	4.822	39,40
4	Tomoni	16	2.128	75,20
5	Tomoni Timur	20	4.124	48,49
6	Kalaena	11	1.931	56,97
7	Angkona	27	4.253	63,49
8	Malili	34	6.625	51,32
9	Wasuponda	18	5.113	35,20
10	Nuha	15	4.281	35,04
11	Towuti	32	5.274	60,68
JUMLAH		**251**	**52.042**	**48,23**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar menunjukkan jumlah ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar yaitu 7-15 tahun. Adapun capaian di tahun 2020 yaitu terdapat 48,23 sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar yaitu 7-15 tahun.

10. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan dasar. Dimana rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar terhadap murid dan bisa juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Adapun tabel rasio guru/guru Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut.

Tabel 2. 56 Rasio Guru/Murid
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Guru	1.368	1.375	1.364	1.326	1.465
1.2	Jumlah Murid	34.483	33.833	36.269	36.517	36.745
1.3	Rasio	397	406	376	363	399
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Guru	883	885	880	792	818
2.2	Jumlah Murid	15.690	16.263	16.276	16.276	16.411
Rasio		**563**	**544**	**541**	**487**	**498**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas, diketahui bahwa rasio guru/murid setiap tahunnya semakin bertambah dengan capaian di tahun 2020 untuk jenjang SD/MI mencapai 399 guru per 10.000 murid atau dengan kata lain perbandingan guru dan muridnya adalah 1 : 25. Sementara untuk jenjang SMP/MTS terdapat 498 guru per 10.000 murid atau 1 : 20. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru dan murid di Kab. Luwu Timur sudah cukup baik bila dilihat kondisi ideal untuk rasio SD/MI adalah 1:32 dan untuk jenjang SMP/MTs adalah 1:36. Hanya saja masih diperlukan pemerataan guru disetiap jenjang pendidikan, serta untuk jenjang SMP perlu diperhatikan juga ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran.

11. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah

a. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar tahun 2020

Tabel 2. 57 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio
1	BURAU	208	3833	54,27
2	WOTU	160	3459	46,26
3	TOMONI	144	3344	43,06
4	TOMONI TIMUR	79	1406	56,19
5	ANGKONA	124	2559	48,46
6	MALILI	236	5191	45,46
7	TOWUTI	230	5072	45,35

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio
8	NUHA	108	2511	43,01
9	WASUPONDA	113	2485	45,47
10	MANGKUTANA	118	2138	55,19
11	KALAENA	61	1112	54,86
TOTAL		1581	33110	47,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan perbandingan jumlah rombongan belajar per 1.000 jumlah murid pada jenjang SD/MI. Pada tahun 2020 rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan angka 47,75 yang berarti terdapat 47,75 rombel per 1.000 jumlah siswa SD/MI.

b. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah pertama Tahun 2020

Tabel 2. 58 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SMP/MTs	Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio
1	BURAU	82	2447	33,51
2	WOTU	65	1678	38,74
3	TOMONI	43	1246	34,51
4	TOMONI TIMUR	33	877	37,63
5	ANGKONA	54	1329	40,63
6	MALILI	78	2137	36,50
7	TOWUTI	71	2016	35,22
8	NUHA	44	1203	36,58
9	WASUPONDA	38	1068	35,58
10	MANGKUTANA	42	1169	35,93
11	KALAENA	24	591	40,61
TOTAL		574	15761	36,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan perbandingan jumlah rombongan belajar per 1.000 jumlah murid pada jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2020 rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah pertama menunjukkan angka 36,42 yang berarti terdapat 36,42 rombel per 1.000 jumlah siswa SMP/MTs.

12. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar.

Indikator ini merupakan persentase perbandingan antara banyaknya lulusan SD dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun.

Tabel 2. 59 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya Lulusan SD	3.396	5.695	5.725	5.746	5.522
2	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	5.617	5.528	5.912	5.911	5.938
3	Proporsi	60.46	103.46	96.84	97.21	92.99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas merupakan persentase perbandingan antara banyaknya lulusan SD dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun yang menjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya.

13. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk disuatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka melek huruf Kab Luwu Timur 2016 –2020, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Melek Huruf	54.729	55.497	56.624	57.591	57.591
2	Banyaknya Penduduk Usia 15-24 Tahun	54.970	55.729	56.750	57.686	57.956

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
3	Angka Melek Huruf	99,56	99,58	99,78	99,84	99,37

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Bila dilihat pada tabel diatas, perkembangan persentase AMH 15-24 Tahun di Kab. Luwu Timur umumnya mengalami peningkatan, kecuali pada capaian tahun 2020, Hal ini dikarenakan belum dilakukan pendataan buta aksara disetiap Kecamatan sehingga masih menggunakan data 2019.

Tabel 2. 61 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk usia 15-24 Tahun yang melek huruf
1	Burau	7318
2	Wotu	6612
3	Mangkutana	4207
4	Tomoni	4829
5	Tomoni Timur	2606
6	Kalaena	2334
7	Angkona	4644
8	Malili	8128
9	Wasuponda	4586
10	Nuha	4362
11	Towuti	7965
JUMLAH		**57591**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka melek huruf usia 15-24 tahun merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf dengan total jumlah penduduk usia 15-24 tahun. Untuk capaian tahun 2020. Jumlah penduduk melek huruf usia 15-24 tahun adalah 57.591 orang yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun diKab. Luwu Timur sebanyak 57.956 orang sehingga diperoleh Persentasi AMH 15-24 tahun adalah 99.37%.

14. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV

a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SD

Tabel 2. 62 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD)

Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru S1/DIV	968	945	943	1025	1020
2	Jumlah guru SD	1177	1139	1075	1108	1135
Persentase		82,24	82,97	87,72	92,51	89,87

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang SD yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan keadaan guru (PNS) di Kab. Luwu Timur yang berubah-ubah setiap tahunnya. Sementara untuk Tahun 2020 terjadi penambahan jumlah total guru SD yang berpengaruh pada persentase capaian indikator ini.

b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SMP

Tabel 2. 63 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru S1/DIV	509	505	521	527	528
2	Jumlah guru SMP	518	508	524	550	553
Persentase		98,26	99,41	99,43	95,82	95,48

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan keadaan guru (PNS) di Kab. Luwu Timur yang berubah-ubah setiap tahunnya yang berpengaruh pada persentase capaian indikator ini.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendididkan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama (SMP), Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Kondisi Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf	%	94,06	93,72	94,80	95,72	95,30
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80
3		**Angka Partisipasi**					
	APM SD	%	99,18	99,02	92,03	92,39	92,54
	APM SMP	%	93,47	80,8	95,73	95,97	95,99
4		**Angka Kelulusan**					
	AK SD	%	100	99,62	99,62	99,55	99,75
	AK SMP	%	100	99,20	99,28	98,82	99,50
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83
6		**Standar Kompetensi Pendidik**					
7	Guru yg memenuhi kaulifikasi S1/DIV	Orang	1.477	1.450	1.464	1.552	1.548
8	Guru yg telah bersertifikat Pendidik	%	-	-	-	-	-
	Guru TK	%	64	64	66,67	66,67	66,67
	Guru SD	%	56	54	53,56	54,76	55,68
	Guru SMP	%	64	58	58,10	60,48	60,73

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur 2021

2.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untyk mencerminkan

keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2. 65 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	43	35	42	45	45
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Bayi AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,56	6,11	7,34	8,03	8,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Kematian bayi terbanyak pada kelompok bayi baru lahir 0-28 hari (neonatal), dimana penyebab kematian terbanyak adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah yaitu kurang 2500 Gram), *Asfiksia*, dan adanya kelainan bawaan lahir. Sedangkan untuk post neonatal (29 hari – 1 bln) penyebab kematian terbanyak adalah kelainan saluran cerna, kelainan jantung, dan kelainan bawaan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yaitu 8,16 per 1000KH, angka ini sudah dibawah target Nasional Tahun 2020 yaitu 20,6 per 1000KH. Meskipun angka tersebut dibawah target nasional tetapi tetap harus dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Luwu Timur.

2. Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel 2. 66 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kelangsungan hidup bayi	92.45	93.89	92.67	91.98	91.85

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kelangsungan hidup bayi cenderung menurun, hal ini berbanding terbalik dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Jika angka kematian bayi tinggi berarti angka kelangsungan hidup bayi rendah. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi dapat dilakukan dengan menurunkan angka kematian bayi.

3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2. 67 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita	Kasus	10	5	8	5	4
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Balita 1000 kelahiran hidup	Angka	1,76	0,87	1,40	0,89	0,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Angka Kematian Balita (AKABA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun. Penyebab kematian balita terbanyak karena kelainan jantung bawaan, diare dan pneumonia.

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2. 68 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	30	30	29	34	32
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5.518
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	5,27	5,24	5,07	6,06	4,61

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kematian neonatal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun meskipun pada tahun 2019 meningkat namun pada tahun 2020 kembali menurun yaitu 4,61 per 1000 KH, angka tersebut dibawah target Nasional.

Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah BBLR (Berat Badan lahir rendah yaitu kurang 2500 Gram), Asfiksia, dan adanya kelainan bawaan lahir. Bayi dengan BBLR terlahir dari ibu yang dimasa kehamilannnya mengalami Kurang Energi Kronik (KEK), kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dari pernikahan dini.

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel 2. 69 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	5	4	5	8	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.689	5.725	5.724	5.607	5518
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	87,89	69,87	87,35	142,67	108,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel 2.66 dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat meskipun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 108,74 per 100.000 KH dengan 6 kasus kematian. Angka tersebut masih dibawah target Nasional tahun 2020 yaitu 230 per 100.000 KH.

Penyebab kematian ibu terdiri atas penyebab langsung dan tidak langsung.

Untuk penyebab langsung paling banyak disebabkan karena perdarahan dan eklampsi. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada kematian ibu yaitu :

- Faktor geografis (jarak rumah ke tempat rujukan),
- Faktor psikis ibu dengan adanya komorbid (penyakit penyerta pada ibu yang dapat memperparah keadaan ibu jika mengalami komplikasi),
- Faktor 4T pada ibu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat jarak kehamilan, dan terlalu sering melahirkan) dan 3 Terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ditempat rujukan, dan terlambat mendapat penanganan.

6. Rasio posyandu per satuan balita

Tabel 2. 70 Rasio Posyandu per satuan Balita
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	Unit	266	267	270	273	274
2	Jumlah Balita	Unit	21.922	22.174	24.945	24.641	24.557
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Angka	12,13	12,04	10,82	11,08	11,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Rasio Posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sebanyak 266 dan jumlah balita sebanyak 21.922 jiwa dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 1:82 sedangkan pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 274 dan jumlah balita sebanyak 24.557 jiwa dengan rasio 1:89. Dalam kondisi sekarang yang dimana diharapkan jumlah rasio posyandu terhadapa balita 1:50, Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu masih kurang dan perlu penambahan posyandu dalam hal pelayanan balita yang ada.

Tabel 2. 71 Rasio Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio (4/5*1000)
1	BURAU	BURAU	39	2832	13.77
2	WOTU	WOTU	29	2195	13.21

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio (4/5*1000)
3	TOMONI	TOMONI	22	1726	12.75
4	TOMONI TIMUR	TOMONI TIMUR	16	1109	14.43
5	MANGKUTANA	MANGKUTANA	26	2011	12.93
6	KALAENA	KALAENA	13	976	13.32
7	ANGKONA	ANGKONA	29	2017	14.38
8	MALILI	MALILI	12	2264	5.30
		LAMPIA	10	748	13.37
		LAKAWALI	8	1105	7.24
9	WASUPONDA	WASUPONDA	8	1373	5.83
		PARUMPANAI	5	526	9.51
10	NUHA	NUHA	17	1617	10.51
11	TOWUTI	WAWONDULA	11	1676	6.56
		TIMAMPU	6	907	6.62
		MAHALONA	12	709	16.93
		BANTILANG	11	766	14.36
TOTAL			274	24,557	11,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Tabel 2. 72 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	15	15	17	17	17
2	Jumlah Poliklinik	Unit	4	4	4	4	8
3	Jumlah Pustu	Unit	60	62	64	64	73

4	Jumlah Penduduk	Jiwa	**293.978**	**295.904**	**299.975**	**300.374**	**302.039**
5	Rasio puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0.26	0.27	0.28	0.28	0.32

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu per seribu penduduk tahun 2020 sebesar 1 : 3.082 terjadi peningkatan pembangunan sarana fasilitas kesehatan untuk melayani penduduk yang berarti satu fasilitas kesehatan melayani 3.082 penduduk.

8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Tabel 2. 73 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Unit	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	Unit	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit swasta	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	Unit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	Jiwa	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
7.	Rasio Rumah Sakit		0.006	0.006	0.006	0.006	0.006

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per seribu penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terhitung konstan pada 0,006, karena tidak ada penambahan rumah sakit (pembangunan rumah sakit yang dilaksanakan pada tahun 2020, belum operasional)

dan pertumbuhan penduduk relatif kecil, sehingga rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk tidak berubah.

Tabel 2. 74 Rasio Rumah Sakit
menurut kecamatan se Kab. Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Wotu	33.732	1	0,033	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,033
2	Nuha	23.755	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,042	1	0,042
3	Wasuponda	21.975	0	0	0	s0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	302.039	1	0,003	0	0	0	0	0	0	1	0,042	2	0,075

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per seribu penduduk sebesar 0,075. Penduduk Kabupaten Luwu Timur dilayani oleh 2 Rumah Sakit yang berada di Kecamatan Wotu sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah dan di Kecamatan Nuha sebagai Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit di Kecamatan bertujuan untuk mengurangi membludaknya pasien di puskesmas. Pelayanan Puskesmas berbeda dengan pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelayanan di daerahnya masing-masing, sedangkan Rumah Sakit hanya bertanggung jawab untuk melayani atau mengobati masyarakat yang datang berobat sampai sembuh dan pulang.

9. Rasio dokter per satuan penduduk

Tabel 2. 75 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	Orang	45	38	38	42	43
2	Jumlah Penduduk	Orang	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Rasio Dokter Per satuan Penduduk		0.15	0.13	0.13	0.14	0.14

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tabel 2.72 dapat di simpulkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk

pada tahun 2016 sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,13 terjadinya penurunan ini disebabkan karena ada beberapa dokter yang mengambil program spesialis. Dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,14 peningkatan ini karena adanya penambahan dokter melalui rekrutmen tenaga dokter melalui CPNS.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter di Puskesmas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sejak tahun 2017 telah dilakukan perekrutan tenaga kontrak medik (dokter kontrak) sebanyak 5 orang, tahun 2018 jumlah tenaga kontrak medik sebanyak 10 orang, tahun 2019 sebanyak 9 orang dan tahun 2020 menjadi 18 orang.

10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tabel 2. 76 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	83	79	76	94	89
2	Jumlah Penduduk	Orang	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Rasio Tenaga Medis	Orang/tenaga medis	0.28	0.27	0.25	0.31	0.29

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya beberapa tenaga medis yang pindah keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dan ada juga yang meninggal. Sedangkan ditahun 2019 terjadi kenaikan disebabkan karena adanya penerimaan tenaga CPNS sebanyak 18 orang serta penyediaan tenaga kontrak spesialis di rumah sakit dan tenaga kontrak medik di Puskesmas.

11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tabel 2. 77 Cakupan komplikasi Kebidanan Yang ditangani
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	1043	1028	1029	1063	1008
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	1264	1259	1260	1266	1242
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	82,49	81,68	81,68	83,97	35,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan berfluktuasi cenderung menurun. Hal ini menunjukan bahwa kasus komplikasi yang ditangani semakin menurun, menurunnya kasus komplikasi maternal disebakan karena adanya deteksi dini resiko pada ibu hamil sehingga tidak berakhir dengan komplikasi. Kasus komplikasi maternal semakin menurun tetapi kita tetap berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan penanganan komplikasi maternal, sebab 20 persen adalah ibu hamil yang beresiko tinggi dan yang perlu menjadi perhatian.

12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2. 78 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan	Orang	5676	5719	8726	5613	5497
2	Jumlah seluruh sasaran ibu yang bersalin di suatu wilah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	6043	5974	6012	6042	5926
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan	%	94,07	95,73	95,24	92,09	92,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi berfluktuatif. Cakupan tahun 2020 sudah diatas target nasional (87 persen) yaitu 92,76 persen. Hal ini disebabkan karena tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sudah baik dan kesadaran masyarakat untuk melakukan

persalinan oleh tenaga Kesehatan meningkat.

13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tabel 2. 79 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	Desa/Kel	122	122	117	126	113
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Desa/Kel	127	127	127	127	127
3	Cakupan Desa/kelurahan UCI	%	96,00	96,00	92,13	99,21	88,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Universal Child Immunization (UCI) adalah keadaan pencapaian imunisasi dasar lengkap (HB0, BCG, Polio 1 – 4, DPT-HB-Hib 1 – 3, IPV dan MR) untuk semua bayi (anak dibawah satu tahun). Dikatakan suatu desa/ kelurahan sudah mencapai UCI jika 80 persen sasaran bayi (umur 0-11 bulan) dalam desa/ kelurahan tersebut dalam satu tahun mendapat imunisasi dasar lengkap.

Pencapaian UCI di Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 s.d 2020 berfluktuasi, capaian UCI Tahun 2016 dan 2017 melebihi target tahun 2016 sebesar 92 persen dengan capaian 96 persen dan tahun 2017 dengan target sebesar 93 persen dengan capaian sebesar 96 persen masih ada 5 desa di Kabupaten Luwu Timur yang belum mencapai 80 persen IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) karena mobilisasi penduduk tinggi, sehingga berpengaruh terhadap capaian imunisasi.

Tahun 2018 target UCI sebesar 94 persen dengan pencapaian sebesar 92,13 persen (10 desa/ kelurahan tidak UCI),hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 dan 2017 karena dampak adanya kampanye imunisasi MR (adanya hoax yang beredar di media sosial), yang menyebabkan ketakutan orang tua bayi untuk memberikan imunisasi MR pada bayinya dan adanya kekosongan vaksin DPT-HB-HIB pada bulan Januari – Maret 2019 yang menyebabkan banyak bayi yang drop out (DO).

Tahun 2019 pencapaian UCI mengalami peningkatan dari target 95 persen dengan capaian 99,2 persen, dimana kepercayaan orangtua terhadap program imunisasi sudah mulai pulih berkat kerja keras koordinator imunisasi di Puskesmas dan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang ada di wilayah kerja Puskesmas.

Tahun 2020 capaian UCI mengalami penurunan dari target 96 persen dengan capaian 88,98 persen (14 desa/ kelurahan tidak UCI), hal ini disebabkan adanya pandemik COVID-19 yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan imunisasi di Posyandu, di mana banyak orangtua yang tidak datang ke Posyandu membawa

bayinya untuk di imunisasi dan petugas juga terbatas untuk melakukan sweeping dan DOFU (*Drop Out Follow Up*) pada bayi yang tidak lengkap imunisasi dasarnya, serta adanya kekosongan vaksin IPV dari bulan Januari s.d September yang menyebabkan banyak bayi yang tidak mendapatkan imunisasi IPV.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Tabel 2. 80 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Orang	1	1	1	3	3
2	Jumlah seluruh balita gizi Buruk yang ditemukan disuatu wilayah	Orang	1	1	1	3	3
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai angka 100 persen. Hal ini berarti semua balita yang mengalami gizi buruk telah mendapatkan perawatan medis disarana pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan telah melakukan penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan dalam rangka pemulihan gizi dan melakukan kerjasama dengan kader posyandu balita.

15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Tabel 2. 81 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia satu tahun yang mendapatkan imunisasi campak	Orang	5674	5848	1931	6079	5466
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah	Orang	5747	6123	5543	5741	5644

	dan tahun yang sama						
3	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak	%	98,73	95,51	34,84	105,89	96,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Imunisasi campak/ MR diberikan kepada bayi pada usia 9 bulan karena bayi mendapatkan *maternal immunity* campak/ MR dari ibunya. Pencapaian persentase anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 s.d 2020 sebagian besar (tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020) sudah mencapai target dengan target 95, hanya tahun 2018 yang tidak capai target dan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2016 dan 2017, dengan capaian sebesar 34,84 persen. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kampanye MR (*Measles Rubella*) dimana banyaknya hoax yang beredar di media sosial yang menyebabkan masyarakat/ orang tua/ keluarga tidak menyetujui anaknya untuk diimunisasi campak / MR dan hal ini berdampak juga pada pelaksanaan imunisasi campak / MR rutin di Posyandu. Tetapi ditahun selanjutnya (2019) kepercayaan masyarakat kembali pulih terhadap imunisasi campak/ MR. Tahun 2020 capaian imunisasi campak/ MR walaupun mencapai target tetapi mengalami penurunan dengan capaian sebesar 96,85 persen ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelayanan imunisasi di Posyandu tidak berjalan maksimal.

16. Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk

Sejak tahun 2004 sesuai dengan anjuran WHO penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diintegrasikan kedalam sistem surveilans AFP. Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas polio bersama dengan negara anggota WHO (*World Health Organization*) di *South East Asia Region* (SEAR) pada bulan Maret 2014.Untuk mempertahankan status Indonesia Bebas Polio menuju eradikasi polio global diperlukan peningkatan kinerja surveilans lumpuh layuh akut (*Acut Flaccid Paralysis-AFP*), dilaksanakan surveilans polio lingkungan serta mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi polio yang tinggi dan merata. Disamping itu, dibutuhkan upaya peningkatan kewaspadaan dan persiapan menghadapi KLB atau Wabah polio apabila ditemukannya virus polio liar atau cVDPV (*circulate Vaccine Derived Polio Virus*) baik di manusia maupun di lingkungan.

Tabel 2. 82 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Orang	2	4	4	3	2
2	Jumlah penduduk < 15 Tahun	Orang	90.310	91.251	90.161	90.659	44.943
3	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	2,21	4,38	4,44	3,31	4,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Sejak tahun 2004 sesuai dengan anjuran WHO penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diintegrasikan kedalam sistem surveilans AFP. Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas polio bersama dengan negara anggota WHO (World Health Organization) di South East Asia Region (SEAR) pada bulan Maret 2014.Untuk mempertahankan status Indonesia Bebas Polio menuju eradikasi polio global diperlukan peningkatan kinerja surveilans lumpuh layuh akut (Acut Flaccid Paralysis-AFP), dilaksanakan surveilans polio lingkungan serta menjapai dan memepertahankan cakupan imunisasi polio yang tinggi dan merata. Disamping itu, dibutuhkan upaya peningkatan kewaspadaan dan persiapan menghadapi KLB atau Wabah polio apabila ditemukannya virus polio liar atau cVDPV (circulate Vaccine Derived Polio Virus) baik di manusia maupun di lingkungan. Untuk Kabupaten Luwu Timur AFP rate per 100.000 anak < 15 tahun pada tahun 2020 sebesar 4,45.

17. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Tabel 2. 83 Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita	Orang	199	197	359	393	82
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia	Orang	2.192	2.217	1.089	1.091	1.073
3	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	9,09	8,88	32,96	36,02	7,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2016 sebanyak 9,09 %,

kemudian menurun di tahun 2017 sebanyak 8,88% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 32,96%, tahun 2019 sebanyak 36,02% dan kembali menurun di tahun 2020 sebanyak 7,64% disebabkan karena adanya pandemi covid-19.

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tabel 2. 84 Cakupan Penemuan dana penanganan penderita penyakit TBC BTA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita baru TBC BTA	Orang	263	320	431	445	310
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA Dalam kurun waktu yang sama	Orang	263	320	431	445	310
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC paru yakni mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 100 persen hal ini sudah memenuhi target penanganan penderita TBC sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan target penanganan penderita baru sesuai program yaitu 100 persen.

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2. 85 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyak kasus penderita TBC	Orang	263	320	431	445	310
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis		89,46	108,14	143,67	148,14	102,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tingkat prevalensi TBC pada tahun 2016 sebanyak 89 per 100.000 penduduk

dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 108 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 berturut turut angka prevalensi sebanyak 144 per 100.000 penduduk dan 148 per 100.000 penduduk hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 angka prevalensi TBC menurun yaitu 102 per 100.000 penduduk hal ini penemuan kasus menurun diakibatkan adanya pandemi global Covid 19. Namun masih diatas target penemuan sebanyak 65 persen.

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2. 86 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien TB Yang meninggal	Orang	10	10	4	5	2
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Tingkat kematian Tuberkulosis		3,40	3,37	1,33	1,66	0,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Tingkat kematian karena TBC di Kab Luwu Timur sangat rendah yaitu 3,40 per 100.000 penduduk pada tahun 2016 dan mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,66 per 100.000 penduduk, dimana tingkat kematian secara nasional yaitu 25 per 100.000 penduduk.

21. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2. 87 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosi terdetaksi	Orang	263	320	431	445	310

2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diperkirakan	Orang	364	364	462	452	462
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	72,25	87,91	93,29	96,30	67,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Angka perubahan kasus TBC pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 72,25 persen dari target dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu 87,91 persen, tahun 2019 yaitu 93,29 persen dan hal ini sudah memenuhi target Nasional yaitu diatas 75 persen penderita baru setiap tahunnya. Namun ada penurunan penemuan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 67,09 persen disebabkan adanya pandemi global Covid 19.

22. Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Tabel 2. 88 Proporsi Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosi paru BTA yang sembuh	Orang	245	309	420	432	303
2	Jumlah-jumlah pasien TB PARU BTA yang di obati	Orang	263	320	431	445	310
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh	%	93,15	96,56	97,44	97,07	97,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Angka kesembuhan TBC di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik, dimana pada tahun 2016 angka kesembuhan sebanyak 93,15 persen dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2017 sebnyak 96,56 persen dan pada tahun 2020 sebanyak 97,74 persen. Hal ini sudah memenuhi target secara Nasional dimana target kesembuhan secara nasional yaitu 85 persen.

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2. 89 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penderita DBD Yang ditangani	Orang	607	96	114	107	37
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah	Orang	607	96	114	100	37
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Luwu Timur mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yaitu 100%, dimana penderita DBD sudah mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan standar operasional prosedur baik di FKTP tingkat pertama (Puskesmas) maupun di Rumah Sakit.

24. Penderita Diare Yang ditangani

Tabel 2. 90 Penderita diare yang ditangani
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan	Orang	11.579	10.442	12.139	12.436	7.741
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama	Orang	6.007	6.069	7.757	7.814	7.757
3	Penderita diare yang di tangani	%	192,76	172,05	156,49	159,15	99,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Capaian cakupan penemuan penderita diare dari tahun 2016 sampai tahun 2019 telah mencapai target hingga diatas 100 persen, capaian melebihi target karena target penemuan penderita diare. Pada tahun 2020 cakupan penemuan penderita diare tidak mencapai target dimana disebabkan adanya kasus Pandemi Covid-19 sehingga jumlah kunjungan pasien atau masyarakat ke fasilitas kesehatan mengalami penurunan dan hanya berkunjung ke fasilitas kesehatan jika dalam keadaan darurat tertentu, masyarakat cenderung untuk melakukan pengobatan tersendiri dengan cara membeli obat sendiri di apotik atau toko obat.

25. Angka Kejadian Malaria

Tabel 2. 91 Angka kejadian malaria
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	18	30	72	22	13
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Orang	0	0	0	0	0
3	Angka kejadian malaria	%	<1	<1	<1	<1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Angka kejadian malaria API (*Annual Paracite Incident*) di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah sangat rendah yaitu dibawah <1 persen per 1000 penduduk dan Kabupaten Luwu Timur sudah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria pada tahun 2018. Dan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut diupayakan semaksimal mungkin untuk kasus lokal diharapkan tidak ada lagi di Kabupaten Luwu Timur begitupun juga dengan daerah reseptif tidak boleh lagi ada wilayah tempat berkembang biakan nyamuk *anopheles*. Selain itu harus tetap harus dilakukan pengawasan terhadap daerah - daerah endemis serta waspada pada migrasi penduduk dari daerah endemis malaria dengan melakukan surveilance migrasi, baik ditingkat desa kecamatan dan kabupaten.

26. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total populasi

Tabel 2. 92 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV/AIDS disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2	7	8	4	4
2	Jumlah penduduk disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	%	0,0006	0,0024	0,0026	0,0013	0,0013

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tingkat prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 0,12 persen, kemudian ditahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yaitu 0,13 persen dan 0,14 persen prevalensi penemuan kasus. Ini telah memenuhi target standar nasional yakni <1 persen.

27. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tabel 2. 93 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rujukan miskin di strata 1	Orang	22.909	25.253	6.609	7028	5.332
2	Jumlah seluruh miskin	Orang	80.866	85.747	86.495	81.326	79.370
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	28,32	29,45	7,64	8,64	6,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin adalah jumlah pelayanan rujukan pasien miskin dalam kurun waktu tertentu, cakupan pelayanan kesehatan rujukan miskin di Tahun 2018-2020 menurun dibanding Tahun 2016-2017 dikarenakan dalam kurun waktu tersebut Kabupaten Luwu Timur sudah UHC sehingga sebagaian besar masyarakat yang dirujuk sudah terdaftar sebagai peserta PBI-APBD dan di tahun 2019-2020 cakupannya menurun disebabkan karena pandemi Covid-19.

28. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel 2. 94 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh kunjungan kesehatan sesuai standarisasi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	5.629	5.633	5.694	5.622	4.885
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	5.747	5.689	5.726	5.754	5.518

3	Cakupan kunjungan bayi	%	97,95	99,02	99,44	97,71	88,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari Tabel dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan bayi berfluktuatif, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung meningkat tetapi tahun 2019 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun dari tahun 2016 hingga 2018 ini ditunjang dengan kegiatan sweeping dan kunjungan rumah bayi yang tidak ke Posyandu oleh bidan Desa. Sedangkan yang menyebabkan kunjungan bayi menurun pada tahun 2019 yaitu ada beberapa orang tua bayi yang tidak disiplin membawa bayinya ke posyandu. Sedangkan pada Tahun 2020 penyebab kunjungan bayi sangat menurun karena Posyandu ditutup akibat adanya Pandemi Covid-19.

29. Cakupan Puskesmas

Tabel 2. 95 Cakupan Puskesmas
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	15	16	17	17	17
2	Jumlah Kecamatan	Unit	11	11	11	11	11
3	Cakupan Puskesmas	%	136,4	145,4	154,6	154,6	154,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan Puskesmas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang dibangun pada setiap kecamatan. Sesuai PMK No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.

30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Tabel 2. 96 Cakupan Puskesmas Pembantu
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	60	62	64	73	73

2	Jumlah Desa/Kelurahan	Unit	127	127	127	127	127
3	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	47,24	48,82	50,39	57,48	57,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan Puskesmas Pembantu, telah memenuhi target RPJMD 2016-2020, dimana puskesmas pembantu dapat melayani 2 sampai 3 desa, hal ini sesuai dengan PMK No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tabel 2. 97 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal	Orang	6007	6073	6024	6143	5484
2	Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Orang	6322	6293	6299	6330	6208
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95,02	96,50	95,53	97,05	88,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan kunjungan ibu hamil sesuai standar (K4) relatif baik, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan. Menurunnya cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan berkurang, yang dikunjungi hanya untuk ibu hamil yang beresiko tinggi.

32. Cakupan pelayanan Nifas

Tabel 2. 98 Cakupan pelayanan Nifas
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas	Orang	5.588	5.603	5.601	5.581	5.494

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	sesuai standar di suatu wilayah						
2	Seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kerja pada waktu yang sama	Orang	5.676	5.973	6.012	6.042	5.926
3	Cakupan pelayanan Nifas	%	92,61	95,73	93,13	92.37	92,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan pelayanan nifas relatif cukup tinggi, hal ini disebabkan tingginya frekuensi kunjungan bidan desa ke rumah ibu nifas yang tidak datang ke fasilitas kesehatan.

33. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tabel 2. 99 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Junlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang	430	327	472	461	412
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang	862	859	859	841	847
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	49,88	38,06	54,97	54,81	48,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan komplikasi neonatus sangat dipengaruhi dengan jumlah kasus yang terjadi, pada dasarnya semua kasus komplikasi neonatal yang ditemukan sudah ditangani sesuai standar pelayanan baik di puskesmas maupun yang dirujuk ke Rumah sakit.

34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2. 100 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja ada waktu tertentu	Orang	19.408	19.977	20.482	27.638	14.875
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Orang	21.922	22.174	22.406	31.315	22.405
3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	88,53	90,09	91,41	88,26	66,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan balita, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung meningkat, tetapi tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi dari tahun 2016 hingga 2018 ini ditunjang dengan kegiatan *sweeping* dan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke Posyandu oleh bidan Desa.

Sedangkan yang menyebabkan kunjungan Balita menurun pada tahun 2019 yaitu ada beberapa balita yang tidak berkunjung ke posyandu karena sudah lengkap imunisasinya, dan ketika dikunjungi ke rumahnya si balita dan keluarganya tidak ada ditempat. Sedangkan pada Tahun 2020 penyebab kunjungan balita sangat menurun karena Posyandu ditutup akibat adanya Pandemi Covid-19.

35. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Tabel 2. 101 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu	Orang	5427	5551	6188	5808	9601
2	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	5427	5551	6188	5808	16116
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	59,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada anak SD dan setingkat sebagai pencegahan dan deteksi dini anak usia sekolah yang dilakukan kepada siswa setiap tahun. Capaian 2016 – 2019 pada persentase 100 persen.

Pada tahun 2020 pelaksanaan penjaringan anak sekolah tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemi covid. Kendala pelaksanaan penjaringan di masa pandemi adalah sekolah melakukan proses belajar daring, siswa tidak ke sekolah. Sehingga pada pelaksanaan penjaringan tidak semua siswa hadir ke sekolah untuk diperiksa kesehatannya.

36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2. 102 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin disarkes Strata 1	Orang	107.027	106.708	114.427	106.370	106.763
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Orang	80.866	85.747	86.495	81.326	106.763
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	132,35	124,45	132,29	130,79	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Capaian cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin pada tahun 2016 – 2019 lebih dari 100 persen karena kunjungan pasien miskin dalam satu tahun lebih dari satu kali mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, artinya terjadi pencatatan berulang pada pasien yang datang ke sarana kesehatan. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 100 persen setelah dilakukan perbaikan pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien masyarakat miskin ke sarana kesehatan, sehingga tidak terjadi lagi pencatatan kunjungan pasien miskin yang berulang.

37. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2. 103 Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Gawat Darurat	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah RS	Unit	2	2	2	2	2
3	Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan dari tahun 2016 s/d 2020 adalah 100 persen. Capaian ini tetap setiap tahunnya karena tidak ada penambahan rumah sakit.

38. Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi< 24 jam

Tabel 2. 104 Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi< 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa / kelurahan yang di tangani >24 jam dalam priode tertentu	Kasus	5	9	8	7	7
2	Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang terjadi pada priode yang sama	Kasus	5	9	8	7	7
3	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi< 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyelidikan dan penanggulangan KLB sangat bergantung dari kemampuan petugas pelaksana yaitu Tim Gerak Cepat maupun petugas surveilans. Salah satu tantangan dan sekaligus keunggulan seorang ahli epidemiologi adalah pada kemampuannya melakukan penyelidikan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB).

KLB seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, banyak orang terserang dan luas wilayah yang terserang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Satu petugas dengan petugas lain seringkali saling menyalahkan, bahkan masyarakat pun disalahkan. Pada situasi seperti ini diperlukan seorang ahli epidemiologi, yang dituntut selalu bertindak tenang, professional, berpegang pada dasar-dasar ilmiah, pendekatan sistematis, dan berorientasi pada upaya penyelamatan dan pencegahan pada populasi yang mengalami KLB.

Referensi dalam penanggulangan KLB, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta menjadi penjabaran pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menteri/per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menteri/per/X/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sebab dengan terbangunnya jalan di wilayah Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa hal ditunjang termasuk, konektivitas antar wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, memudahkan pergerakan orang dan barang dan juga mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Tabel 2. 105 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	1.118,75	1.160,96	1.178,45	748,003	755,802
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	59,1	61,5	62,4	39,6	40,0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Panjang jalan kewenangan kabupaten berdasarkan SK bupati No 187/VIII tahun 2016 Tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan jalan desa adalah 1.894,57 Km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat tahun 2016 sampai tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 0,396 dan 2020 menjadi 0,400. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya panjang jalan kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik berbanding lurus dengan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Lebih lanjut mengenai rincian dari kondisi jalan di Luwu Timur dengan keadaan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 106 Kondisi Jalan

Kab. Luwu Timur 2016 – 2020

NO.	KONDISI	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	1.118,75	1.160,96	1.178,447	748,003	755,802
2	Sedang	336,38	323,05	313,263	749,286	594,076
3	Rusak Ringan	276,58	243,24	224,522	71,213	227,577
4	Rusak Berat	162,86	162,03	173,041	320,771	311,818
5	Jumlah	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka-angka tersebut di atas yang patut mendapat perhatian adalah meningkatnya panjang jalan yang rusak berat. Pada 2016, terdapat 162,86 Km yang rusak berat. Kemudian berkurang pada 2017 yakni 162,03 Km, dan meningkat pada 2018 menjadi 173,04 Km, selanjutnya pada 2019 menjadi 320,77 Km dan berkurang pada 2020 menjadi 311,82 Km.

Pada tahun 2020 kondisi jalan terdiri : kondisi baik 755,802 Km, kondisi sedang 594,076 Km, kondisi rusak ringan 227,577 Km dan kondisi rusak berat 311,818 Km dari total panjang jalan 1.889,273 Km dengan jenis struktur permukaan aspal, beton, kerikil dan tanah. Penurunan kondisi jalan tahun 2019 disebabkan karena Kementerian PUPR mengklasifikasikan jalan kerikil dan tanah dalam kategori rusak berat dan rusak ringan, sedangkan *database* jalan dinas PU-PR Kab. Luwu Timur jalan kerikil diklasifikasikan kondisi rusak berat, rusak ringan, sedang dan baik. Peningkatan jalan kondisi baik Tahun 2020 target panjang 783,022 Km hanya terealisasi panjang 755,802 Km atau 40% dari 1.889,273 Km, ini disebabkan karena sebagian jalan yang ditingkatkan menjadi aspal tidak terdapat dalam SK Bupati.

2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi panjang jalan suatu wilayah dengan jumlah penduduk. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2. 107 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27

2	Jumlah penduduk	jiwa	280.684	287.874	293.822	300.374	305.407
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/jiwa	0,067	0,0065	0,0063	0,0063	0,0063

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016-2017 adalah 0,0064 dan menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 0,0063. Rasio panjang panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2019 dan 2020 masih 0,0063 hal ini dikarenakan tidak ada penambahan panjang jalan sementara jumlah penduduk bertambah setiap tahunnya.

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

Jalan kabupaten di Luwu Timur memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang menopang pergerakan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. data menunjukkan bahwa meskipun panjang keseluruhan jalan kabupaten tidak mengalami penambahan selama 2017 sampai 2020, namun untuk jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik mengalami penurunan yang signifikan khususnya pada tahun 2019 dan 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	1.118,75	1.160,96	1.178,447	748,003	755,802
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	59,05	61,45	62,37	39,59	40,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Persentase jalan kondisi baik meningkat di tahun 2016 – 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 39,59 persen atau 748,003 Km dan

meningkat di tahun 2020 menjadi 40,00 persen atau 755,802 Km terhadap 1.889,273 Km panjang jalan kewenangan kabupaten. Hasil verifikasi data base jalan oleh Kementerian PU-PR salah satu kriteria jalan kondisi baik dari segi jenis struktur permukaan adalah aspal dan beton sedangkan tanah dan kerikil masuk kondisi rusak berat dan rusak ringan. Tahun 2020 panjang jalan berdasarkan jenis struktrur terdiri : aspal 710,777 Km, beton 69,305 Km, kerikil 808,626 Km dan tanah 300,654 Km, peningkatan jalan kondisi baik dapat dicapai dengan peningkatan jalan kerikil menjadi aspal atau beton.

4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

Drainase jalan merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi persyaratan salah satu teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, kemanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.

Tabel 2. 109 Persentase Jalan Yang Memilikii Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan (Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	2,157	2,157	2,157	2,527	2,527
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	1.894,57	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27
3	Persentase jalan yang memilikii trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)	%	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase tahun 2016 adalah 0,113 persen, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0,114 persen dan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 0,133 persen atau sekitar panjang 2,527 Km jalan yang dilengkapi bangunan pelengkap trotoar/drainase. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase disebabkan oleh sebagian besar lebar *existing* jalan yang ada kurang dari standar, sehingga jalan yang dilengkapi trotoar/drainase pada ruas jalan tidak memenuhi lebar sesuai standar pada saat pembentukan jalan.

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel 2. 110 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Rumah	40.771	50.582	55.165	58.533	58.818
2	Jumlah rumah tinggal	Rumah	56.364	57.575	58.776	60.075	60.075
3	persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Akses sanitasi yang dimaksud adalah sanitasi dasar sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 97,37 persen dibanding realisasi tahun 2019 yaitu 97,43 persen. Untuk tahun 2020, jumlah rumah tinggal berakses sanitasi adalah 58.818 rumah tinggal atau sebesar 97,37 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di Kab. Luwu Timur. Permasalahan yang ada terkait sanitasi khususnya air limbah adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sanitasi aman.

6. Persentase drainase dalam kondisi baik

Drainase di Kabupaten Luwu Timur tersebar di wilayah permukiman dan yang berada pada jalan penghubung antar desa. Pembangunan drainase di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setiap tahunnya sebagai respon atas perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pemanfaatan anggaran belanja daerah sebaik-baiknya. Panjang drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya panjang drainase secara keseluruhan kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 111 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	Km	-	2,290	6,153	10,809	13,770
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (km)	Km	-	2,890	7,503	13,059	16,470

3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	79,24	82,01	82,77	83,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat) meningkat dari tahun 2017-2020. Tahun 2020 panjang drainase dalam kondisi baik 13,770 Km atau sebesar 83,61 persen atau dari total panjang 16,470 Km drainase yang dilaksanakan oleh Dinas PU-PR Kab. Luwu Timur.

7. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan kondisi saluran irigasi primer, sekunder ataupun tersier yang sesuai kewenangan kabupaten.

Tabel 2. 112 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	2.940	3.056,5	3.211	3.412,7	3.438,2
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,37	45,09	47,37	50,34	50,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dengan gambaran irigasi yang baik di atas, tetap terdapat tantangan daerah dalam mendukung produktivitas pertanian. Karena kurun waktu 2016 – 2020 masih terdapat irigasi yang penting untuk direhabilitasi. Pada 2016, terdapat 43,37 persen dalam kondisi baik sedang yang memerlukan rehabilitasi yakni 56,63 persen. Kemudian pada 2017 terdapat 45,09 persen dalam kondisi baik, sedang yang perlu direhabilitasi yakni 54,91 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 irigasi dalam kondisi baiuk yakni 50,72 persen, sedang yang perlu direhabilitasi yaitu 49,28 persen.

Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten adalah 6.778 Ha berdasarkan lampiran Permen PU-PR Nomor 14 tahun 2015 tentang kriteria dan status daerah irigasi. Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 50,34 persen atau 3.412,7 Ha pada tahun 2019 meningkat menjadi 50.72 persen atau 3438,2 Ha pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen. Peningkatan kinerja ini karena meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik pada saluran irigasi primer,

sekunder maupun tersier pada daerah irigasi kabupaten.

8. Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2. 113 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jaringan Primer	6.503,00	5.535,00	321,00	5.454,30	5.804,30
2.	Jaringan Sekunder	8.365,60	10.568,30	11.805,00	5.607,70	3.545,00
3.	Jaringan Tersier	795,00	335,00	223,00	223,00	630,00
4.	Total Panjang jaringan	15.663,60	23.466,90	28.012,60	34.751,90	37.991,90
5.	Luas Lahan Budidaya	5078	5078	5078	5078	5078
6.	Rasio	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Tahun 2020 rasio jaringan irigasi 7,482 dengan panjang jaringan primer 5.804,30 m, jaringan sekunder 3.545,0 m dan jaringan tersier 630 m dan total panjang jaringan 37.991,90 m dengan luas lahan budidaya 5.078 Ha. Keberhasilan pencapaian meningkatnya rasio jaringan irigasi ini didukung dengan adanya kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi.

9. Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 2. 114 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berakses air minum	Jiwa	90.183	103.635	139.741	148.955	172.665
2	Jumlah penduduk	Jiwa	281.822	287.874	293.882	300.374	302.039
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	32	36	47,55	49,59	57,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari peningkatan jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum, maka

pada tahun 2020 mencapai 57,17 persen atau 161.289 jiwa. Masih terdapat 42,83 persen penduduk yang harus menjadi sasaran prioritas akses air minum untuk mencapai angka 100 persen, atau sesuai target SDGs dan RPJMN. Jumlah tersebut setara dengan 140.750 jiwa.

Persentase jumlah penduduk berakses air minum meningkat tahun 2016 – tahun 2020, Tahun 2020 persentase penduduk berakses air minum adalah 57,17 persen atau sekitar 172.665 jiwa dari total jumlah penduduk 302.039 jiwa. Meningkatnya kinerja ini didukung adanya pembangunan *intake*, jaringan pipa serta pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Permasalahan yang ada terkait air bersih adalah potensi air baku yang di *intake* tidak didukung oleh kapasitas IPA yang memadai.

10. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan

Tabel 2. 115 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	90.183	103.635	139.741	148.955	172.665
2	Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	281.822	287.874	293.882	300.374	302.039
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	%	30,68	35,02	46,58	49,59	57,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan meningkat tahun 2016 –tahun 2020, Tahun 2020 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan adalah 57,17% atau sekitar 172.665 jiwa dari total jumlah penduduk 302.039 jiwa. Persentase jumlah penduduk berakses air minum sama dengan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan

11. Persentase areal kawasan kumuh

Tabel 2. 116 Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas kawasan kumuh	Ha	1,0162	1,0374	1,092	2,68	2,72
2	Luas wilayah	Km^2	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
3	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Angka Kawasan Kumuh Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 adalah 0,04 persen dan tetap pada tahun 2020 sebesar 0,04 persen. Namun, pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 0,02 persen. Hal ini diketahui dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019. Setelah dilakukan pembaharuan data serta survei terkait Kawasan Kumuh di Luwu Timur, jumlah titik Kawasan Kumuh yang pada awalnya berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh Tahun 2014 hanya terdapat di 2 Desa yaitu Desa Balantang dan Wewangriu kini terindikasi sebanyak 26 titik yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan. Beberapa desa tersebut, antara lain Desa Balantang, Desa Wewangriu, Desa Nikkel, Desa Baruga, Desa Wasuponda, Desa Beringin Jaya, Desa Bawalipu, Desa Watangpanua, Desa Pattengko, Desa Cendana Hitam, Desa Pekaloa, Desa Wonorejo, Desa Pertasi Kencana, Desa Mabonta, Kelurahan Tomoni, Desa Lakawali Pantai, Desa Balo-Balo, Desa Tampinna, Desa Burau Pantai, Desa Kalatiri, dan Desa Sorowako. Beberapa titik tersebut saat ini sedang dalam tahapan penyusunan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh Tahun 2021.

2. Penataan Ruang

1. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Tabel 2. 117 Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah bangunan ber IMB	unit	820	1.725	2.766	4.018	4.941
2	Jumlah bangunan	m2	6.959	13,746	20.872	28.004	35.458
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		0,11	0,12	0,13	0,14	0,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah bangunan yang mempunyai IMB, yaitu dari 6.959 unit menjadi 35.458 unit, berarti terdapat penambahan yang signifikan sebanyak 28.499 unit bangunan. Namun apabila dilihat dari proporsi setiap tahun terjadi fluktuatif dan bahkan mengalami kenaikan rasio yang sangat rendah dari 0,11 menjadi 0,13. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah bangunan baru lebih tinggi dibanding dengan jumlah bangunan yang mempunyai IMB. Perlu adanya kebijakan pengendalian dan sosialisasi yang lebih intensif tentang IMB.Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan tahun 2020 adalah 0,13 dengan jumlah bangunan ber-IMB 4.941 dari total 35.458 bangunan yang ada, meliputi bangunan rumah tinggal, bangunan perniagaan, bangunan industri, gudang dan lain lain.

2. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel 2. 118 Ketaatan Terhadap RTRW
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas ruang sesuai peruntukannya	Ha	200.550,096	208.906,35	227.072,12	241.556,08	262,048
2	Luas ruang yang tersedia	Ha	694,488	694,488	694,488	694,488	694,488
3	Persentase kesesuaian penataan ruang	%	28,88	30,08	32,70	34,78	37,73

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Ketaatan pemanfaatan tata ruang dalam RTRW Kab. Luwu Timur hingga akhir tahun 2020 relatif kecil karena Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan Kawasan Hutan Lindung.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m^2), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak.

Tabel 2. 119 Rasio Rumah Layak Huni
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	49.491	49.754	50.809	52.361	53.581
2	Jumlah penduduk	Jiwa	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
3	Rasio rumah layak huni		0,168	0,168	0,169	0,174	0,177

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021
Data Penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit.

Data tersebut di atas menunjukkan jika terdapat peningkatan rasio rumah layak huni di Luwu Timur kurun waktu 2016 – 2020. Namun pencapaian dengan rasio 17,74 persen pada 2020, masih relatif jauh dari target nasional yang dinyatakan di dalam RPJMN yakni 70 persen pada tahun 2024.

2. Rasio permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun jumlah luasan permukiman layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan.

Tabel 2. 120 Rasio Permukiman Layak Huni
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni	Km^2	23,91	24,91	26,23	27,61	27,89
2	Luas wilayah permukiman	Km^2	33,23	33,23	34,98	36,82	36,82
3	Rasio permukiman		0,71	0,74	0,74	0,74	0,75

	layak huni						

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data tersebut di atas menunjukkan jika terdapat peningkatan luas dan rasio pemukiman layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Pada 2016, yakni 23,91 Km^2 atau 71 persen dari luas wilayah pemukiman yang ada. Kemudian pada tahun 2020 mencapai 27,89 Km^2 atau 75 persen. Rasio pencapaian tersebut cukup memadai, karena telah berada di atas target RPJMN yakni 52,78 persen.

Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan rasio permukiman layak huni.

3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2. 121 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	49.491	4.754	50.809	52.361	53.581
2	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	60.582	61.571	61.614	61.922	61.834
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	81.69	80.81	82.46	84.56	86.65

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atas jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Demikian juga dengan proporsi ketersediaan rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Luwu Timur. Pada tahun 2016 yakni 81,69 persen, kemudian pada 2020 menjadi 86,65 persen. Proporsi ini telah melampaui target nasional hingga 2024 di dalam RPJMN, yakni 70 persen.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan

minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu baru sebanyak 53.581 unit atau baru mencapai 86,65 persen cakupan ketersediaan rumah layak huni.

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Tabel 2. 122 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	8.136	8.982	9.582	10.182	10.782
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	16.982	18.511	18.530	18.540	18.550
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	47,91	48,52	54,71	54,92	58,12

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Jika tahun 2016 sebanyak 8.136 unit, maka tahun 2020 menjadi 10.782. Meningkat 2.646 unit selama 4 (empat) tahun atau sebesar 32,52 persen atau rata-rata 8,13 persen per tahun. Sementara jumlah rumah tangga MBR juga mengalami peningkatan dari 16.982 unit pada 2016, kemudian menjadi 18.550 pada 2020, atau meningkat 1.568 unit selama 4 (empat) tahun atau 9,23 persen, rata-rata 2,31 persen per tahun. Ini berarti terdapat kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi rumah layak huni bagi rumah tangga MBR, yakni rata-rata 8,13 persen per tahun dari pertumbuhan rumah tangga MBR yakni 2,31 persen per tahun. Kemampuan tersebut sejatinya dipelihara dan sedapat mungkin dioptimalkan sehingga jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni sampai dengan 2026 akan semakin kecil.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu sebanyak 10.782 unit atau baru mencapai 58,12 persen cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

5. Persentase permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 luas permukiman yang tertata baru seluas 27,89 km2 atau baru mencapai 75,74%.

Persentase permukiman yang tertata mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 hal ini karena, penganggaran pada tahun 2016 s.d 2018 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan persentase permukiman yang tertata.

Tabel 2. 123 Persentase Permukiman Yang Tertata
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata	Km^2	23,91	24,91	26,23	27,61	27,89
2	Luas area permukiman keseluruhan	Km^2	33,23	33,23	34,98	36,82	36,82
3	Persentase permukiman yang tertata	%	71,94	74,95	74,98	74,98	75,74

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa luas areal pemukiman di Luwu Timur periode 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 tercatat 33,23 Km^2, maka tahun 2020 menjadi 36,82 Km^2, meningkat seluas 3,59 Km^2 atau 10,80 persen dalam waktu 4 (empat) tahun, dengan peningkatan rata-rata 2,70 persen per tahun. Sedang luas permukiman yang tertata juga mengalami peningkatan. Pada 2016 yakni 23,91 Km^2 menjadi 27,89 Km^2 tahun 2020, meningkat 3,98 Km^2 atau 16,65 persen atau rata-rata 4,16 persen per tahun. Hal ini kemampuan Kabupaten Luwu Timur dalam menyediakan area pemukiman tertata masih lebih rendah yakni 4,16 persen per tahun dibanding perkembangan luas area pemukiman yakni 10,80 persen per tahun.

6. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Persentase Lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data di atas mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena luas permukiman tidak mengalami pertambahan sedangkan jumlah

penduduk setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2. 124 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas permukiman kumuh	Km^2	1,02	1,04	1.09	2,68	2,72
2	Jumlah luas permukiman luas wilayah	Km^2	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah luas pemukiman di Luwu Timur periode 2016 – 2020 tidak mengalami perkembangan yakni 6.945 Km^2. Sedang untuk luas pemukiman kumuh justru mengalami peningkatan kurun waktu 2016-2020. Pada 2016 seluas 1,02 Km^2, kemudian menjadi 2,72 Km^2 pada 2020. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan seluas 1,7 Km^2 atau 166,67 persen selama 4 (empat) tahun atau rata-rata 41,67 persen per tahun. Peningkatan permukiman kumuh perlu mendapatkan perhatian serius pada masa yang akan datang.

7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Tabel 2. 125 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
2	Jumlah permukiman kumuh	%	1.02	1.04	1.09	2.68	2.72
3	Persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	5.02	5.21	5.22	2.24	2.24

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan mengalami penurunan. Selain penganggaran

dari APBD, terdapat juga anggaran dari APBD Provinsi dan APBN.

8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah.

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 126 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	RT	11.091	11.817	10.111	9.321	8.253
2	Jumlah seluruh rumah	Rumah	60.582	61.571	61.614	61.922	61.834
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	18.31	19.19	16.41	15.05	13.35

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 8.253 unit atau mengalami penurunan sebesar 13,35% untuk proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan rumah tangga kumuh perkotaan mendapat perhatian yang cukup besar.

9. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

Indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 127 Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Unit	57	59	68	75	86
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Unit	127	127	127	127	127
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	44.88	46.46	53.54	59.06	67.72

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun, karena didukung oleh penganggaran melalui dari Pengembang Perumahan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Diantara persyaratan tersebut adalah usia dan jenjang pendidikan.

Sebagai akibat penerapan Permendagri tersebut yang baru efektif dilaksanakan di Kab. Luwu Timur pada tahun 2018, jumlah anggota Satlinmas mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 jumlahnya tetap sama dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, jauh dari target sebanyak 1.500 orang pada tahun 2020. Capaian cakupan petugas perlindungan masyarakat Kab Luwu Timur berikut ini.

Tabel 2. 128 Cakupan petugas perlindungan masyarakat
Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.439	1.349	1.184	1.184	1.16
2	Jumlah Desa/Kelurahan	127	127	127	127	127
3	Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat	**11.33**	**10.62**	**9.32**	**9.32**	**9.12**

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Usia dan jenjang pendidikan paling banyak berdampak terhadap syarat keanggotaan Satlinmas. Selain itu minat masyarakat untuk menjadi Anggota Satlinmas juga mejadi salah satu faktor penyebab cakupan petugas perlindungan masyarakat semakin menurun. Kurangnya minat masyarakat disebabkan karena *image* Anggota Satlinmas sering menjadi bahan lelucon dan kesejahteraan (biaya operasional) belum menjadi perhatian beberapa Pemeritah Desa/Kelurahan.

Untuk memenuhi target Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan perlu melakukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi Petugas Satlinmas antara lain memperhatikan kesejahteraan Anggota Satlinmas melalui penganggaran biaya operasional pada APBDes, pemberian penghargaan, pelatihan keterampilan secara rutin dan fasilitasi perlengkapan operasional.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Terciptanya dan terpenuhinya ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif akan menciptakan stabilitas keamanan yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak terlepas dari K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban dan ketenteraman. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau dan lain-lain. Dengan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman maka akan tercipta keindahan.

Salah satu indikator ketenteraman dan ketertiban umum adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang merupakan perbandingan antara jumlah pelanggaran/gangguan K3 yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran/gangguan K3 yang dilaporkan dikali 100 persen.

Capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, cara pengukuran capaian kinerja mengalami perubahan. Hal ini disebabkan perubahan Renstra 2016-2021. Jika sebelum perubahan Renstra, jumlah pelanggaran/gangguan K3 hanya menghitung penyelesaian yang bersifat represif (penertiban paksa), namun setelah dilakakan

kajian ulang maka setiap pelanggaran/gangguan K3 yang telah tertangani secara langsung melalui patroli wilayah, pembinaan, sosialisasi dan pengarahan juga harus dihitung dalam pengukuran kinerja. Data Tahun 2019 jumlah pelanggaran/gangguan tercatat sebanyak 450 Gangguan dan tahun 2020 turun menjadi 448 gangguan. Seluruh pelanggaran/gangguan dapat tertangani dengan baik sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sehingga Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) sebesar 100 persen. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kab. Luwu Timur berikut ini.

Tabel 2. 129 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gangguan K3 yang ditangani	34	38	41	450	448
2	Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	55	60	55	450	448
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	**61.82**	**63.33**	**74.55**	**100**	**100**

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat mencapai 100 Persen disebabkan oleh karena pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara konsisten. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kab Luwu Timur telah diatur dengan Peraturan Daerah Kab Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014. Setiap pelanggaran/gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah ini. Secara teknis penempatan personil Polisi Pamong Praja di Setiap Kecamatan menjadi faktor utama keberhasilan capaian indikator ini. Dengan Patroli wilayah yang dilakukan secara rutin di seluruh kecamatan, maka potensi-potensi gangguan dapat dicegah secara cepat dan meminimalisir tindak kejahatan (kriminal).

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten dinyatakan dengan perbandingan

jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab Luwu Timur. Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (*respon time*) penanganan kebakaran sampai radius 176,62 km2.

Hingga tahun 2020, Kab. Luwu Timur telah memiliki 9 WMK dengan jangkauan luas wilayah sebesar 1.589,62 km^2. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kab Luwu Timur total maka diperoleh Cakupan pelayanan kebakaran sebesar 22,89 persen. Capaian cakupan pelayanan kebakaran ini selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan Unit Mobil Pemadam Kebakaran 2 (dua) Unit setiap tahun. Setiap Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran maka saat itu juga akan dibentuk WMK yang didukung dengan penyediaan SDM, mobil Pemadam Kebakaran, Pos Komando wilayah dan sarana prasarana lainnya. Berikut ini capaian cakupan pelayanan kebakaran Kab. Luwu Timur:

Tabel 2. 130 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	529,87	883,12	1.059,75	1.413	1.589,62
2	Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	**7.63**	**12.71**	**15.26**	**20.34**	**22.89**

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Berdasarkan capaian di atas masih perlu dilakukan peningkatan cakupan pelayanan kebakaran dengan pembentukan WMK di 2 (dua) Kecamatan yang sampai saat ini belum memiliki WMK yaitu Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Nuha serta berdasarkan pertimbangan intensitas dan potensi kejadian kebakaran perlu penambahan WMK di Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti.

4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* merupakan perbandingan jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggapterhadap jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK. *Respon Time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang

diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. Tingkat waktu tanggap pada WMK adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Tingkat waktu tanggap pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 76,6 persen tahun sebelumnya menjadi 73,03 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Capaian tingkat waktu tanggap sangat dipengaruhi oleh akses menuju lokasi kebakaran terutama terkait dengan infrastruktur jalan. Capaian tingkat waktu tanggap layanan WMK tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 131 Tingkat waktu tanggap (*response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	23	36	65	133	62
2	Jumlah kejadian kebakaran di WMK	37	47	89	177	68
3	Tingkat waktu tanggap (respon timerate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	**62.16**	**76.6**	**73.03**	**75.15**	**91.18**

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Masih adanya kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap disebabkan oleh faktor infrastruktur jalan menuju lokasi kejadian kebakaran. Rata-rata kejadian kebakaran yang tidak memenuhi waktu tanggap adalah kebakaran lahan, dimana akses jalan menuju titik terdekat ke lokasi kebakaran belum ada dan dukungan peralatan penanggulangan untuk menjangkau titik kebakaran tersebut belum memadai.

Pada tahun 2019 kejadian kebakaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kebanyakan adalah kebakaran lahan yang dekat dengan lokasi pemukiman. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembukaan lahan oleh warga masyarakat dengan cara membakar dan tanpa diawasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membakar lahan maka dilakukan edukasi yang intensif, sehingga tahun 2020 jumlah kejadian kebakaran kembali menurun.

5. Persentase penegakan Perda.

Penegakan Perda adalah penyelesaian atas pelanggaran Perda. Sesuai dengan Standar Operasional penegakan Perda yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan Perda dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu non-yustusial dan yustisial. Upaya non-yustisial adalah upaya pertama yang harus dilakukan untuk menghentikan suatu pelanggaran. Jika dengan upaya non-yustisial pelanggaran tidak dapat terselesaikan maka penyelesaian pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap penindakan yustisial. Penindakan yustisial ini akan berlaku *criminal justice system* sesuai dengan KUHAP. Salah satu indikator pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah kinerja persentase penegakan Perda.

Persentase penegakan Perda diperoleh dengan membagi jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang terlaporkan dan teridentifikasi dikali 100 persen. Selama periode 2016-2020, Capaian persentase penegakan Perda cenderung meningkat, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun hal yang menyebabkan penurunan pada tahun 2018 adalah beberapa kasus pelanggaran baru terlaporkan atau teridentifikasi pada akhir tahun sehingga membutuhkan waktu penyelesaian sesuai dengan tahapan. Akhirnya pelanggaran Perda yang terjadi tahun 2018 harus diselesaikan pada tahun 2019. Capaian Persentase Penegakan Perda kab Luwu Timur Tahun 2016-2020 adalah.

Tabel 2. 132 Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	28	34	38	40	22
2	Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	34	41	49	51	26
3	Persentase Penegakan Perda	**82.35**	**82.93**	**77.55**	**78.43**	**84.61**

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran Perda tahun 2019 sebanyak 51 kasus didominasi oleh pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Dengan upaya penutupan secara permanen terhadap Cafe/Warung/Kios yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran Perda sehingga turun menjadi 26 kasus pada tahun 2020.

2.3.1.6 Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tabel 2. 133 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	-	12.074	13.313	1.126	12.710
2	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	-	31.579	31.586	31.584	41.138
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	-	38.23	42.15	3.57	30.90

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan usaha bagi PMKS Fakir miskin, Disabilitas, dan Korban Bencana Alam. Fasilitasi pemberian Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan Kouta BPNT Kementrian Sosial yang setiap tahun berubah sebagai akibat validasi data, karena meninggal dunia, pindah domisisli ataupun sudah sejahtera hidupnya. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan mengalami Peningkatan setiap tahunnya. Sehingga PMKS yang belum tertangani diakomodir dalam Anggaran OPD yang terkait.

2. Persentase PMKS yang tertangani

Tabel 2. 134 Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	-	12.178	13.309	13.180	12.559
2	Jumlah PMKS	Jiwa	-	36.024	36.025	36.023	47.590
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	33.81	36.94	36.59	26.39

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 8 jenis dari 26 jenis PMKS. Jumlah PMKS setiap tahun mengalami peningkatan jumlahnya, terutama pada tahun 2020 sebagai

akibat pandemi Covid-19, sehingga banyak orang miskin baru yang perlu penanganan.

3. Persentase PMKS skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2. 135 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	-	12.074	12.074	11.205	12.587
2	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	-	34.442	34.591	34.794	44.442
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	35.06	34.91	32.20	28.32

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial cukup signifikan jumlah dibanding tahun sebelumnya, hal ini sebagai akibat dari terjadi Pandemi Covid 19 sehingga muncul orang miskin baru.

4. Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2. 136 Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	-	0	5	7	10
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	-	0	8	9	10
3	Persentase Panti Sosial	%	-	0.00	62.50	77.78	100.00

	dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan						

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada tiga tahun pertama belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan pada tahun 2020 semua LKSA sudah menyediakan sarana prasarana kesehatan meskipun belum sempurna/lengkap.

5. Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2. 137 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	0	0	0	4	7
2	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	0	0	0	9	10
3	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0.00	0.00	0.00	44.44	70.00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Belum semua WKBSM menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, disebabkan WKBSM baru terbentuk sehingga masih perlu pembinaan.

6. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat.

Tabel 2. 138 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	0	112	40	76	151
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	0	112	40	76	151
3	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh korban bencana telah mendapatkan bantuan sosial.

7. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2. 139 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	0	112	40	76	151
2	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	0	112	40	76	151
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.

8. Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2. 140 Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	0	297	295	301	298
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	0	3.201	3.580	3.906	4.030
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0.00	9.28	8.24	7.71	7.39

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah Penyadang Cacat, Mental dan Lansia tidak Potensial yang menerima Jaminan Sosial meningkat setiap tahunnya, namun yang mendapat jaminan sosial masih terbatas karena keterbatasan anggaran.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tabel 2. 141 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	10	15	12	14	34
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	138	165	102	123	151

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Angka Sengketa pengusaha- pekerja pertahun	X 1000	7,25	9,09	11,76	11,38	22,82

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari gambaran tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka sengketa pengusaha dan pekerja/ buruh dari Tahun 2016 -2020 terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dari 7,25 menjadi 11,76 kemudian tahun 2019 mengalami penurunan sedikit dan selanjutnya meningkat cukup drastis tahun 2020, menjadi 22,82.

Didalam Ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis kategori Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

Penanganan terhadap perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan fasilitasi oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mengupayakan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) agar tidak perlu sampai pada proses mediasi. Namun apabila para pihak tidak bermufakat maka dilanjutkan dengan proses mediasi. Dimana pada tahap ini para pihak tetap diupayakan untuk melakukan Perjanjian Bersama. Sebaliknya, apabila mediasi gagal maka dapat dilanjutkan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI).

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel 2. 142 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	10	20	16,67	-	8,82

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Terhadap besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dapat dijelaskan bahwa kondisi Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana penyelesaian kasus secara Perjanjian Bersama dicapai pada tahun 2016 sebanyak 10 persen, tahun 2017 sebanyak 20 persen dan tahun 2018 sebanyak 16,67 persen , namun tahun 2019 tidak ada kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian

Bersama memberikan gambaran bahwa para pihak yang berselisih baik Pekerja/ buruh, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan pengusaha mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat. Artinya, masalah diselesaikan dengan *win-win solution* karena mengedepankan sikap saling menghargai dan memahami untuk menerima kekurangan masing-masing pihak yang berselisih. Kelompok seperti ini biasanya lebih memilih untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan industrial dibanding memojokkan salah satu pihak untuk mencapai kemenangan, walaupun tuntutannya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan kelompok lain yang mempunyai tipe konfrontatif, kelompok ini cenderung agresif dan tidak mau mengalah sehingga perselisihan mereka bila difasilitasi ataupun dimediasi oleh mediator kemungkinan besar tidak bisa dicapai dengan Perjanjian Bersama (PB).

Namun demikian tidak semua kasus yang tidak bisa mencapai Perjanjian Bersama (PB) adalah termasuk tipe konfrontatif, akan tetapi tergantung pula jenis kasus yang dialami.

3. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Tabel 2. 143 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja buruh jamsostek	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	16.124
2	Jumlah pekerja/ buruh	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	16.124
3	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pekerja/buruh peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebabkan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh menjadi persyaratan utama bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, dimana perusahaan tersebut berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruh menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi Perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola ini maka dapat dipastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang terdaftar adalah merupakan

peserta jamsostek.

Kewajiban sebagai peserta jamsostek bagi pekerja/buruh diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan diatur dalam peraturan tersendiri mengenai jaminan sosial yang terdiri dari 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya apabila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketengakerjaan mempunyai cakupan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Dengan terdaftarnya para pekerja/buruh pada jaminan sosial ini diharapkan agar pekerja/buruh dan keluarganya merasa tenang bekerja karena adanya perlindungan yang diberikan baik pada saat bekerja, setelah pensiun bekerja maupun pada saat kehilangan pekerjaan.

4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2. 144 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	22	22	116	110	50
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	31	30	158	149	66
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komptensi	%	70,96	73,33	73,41	73,82	75,75

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tenaga kerja berbasis kompetensi yang dilatih di Akademi Teknik Sorowako (ATS) dari tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak mengalami penambahan karena minimnya anggaran pelatihan yang tersedia.

Tahun 2018 terdapat penambahan kegiatan pelatihan yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang K3 Umum dan ATS 66 orang jumlah 116 orang. Tahun 2019 K3 Dasar Pesawat Angkat Angkut / Surat Izin Operator (SIO) sebanyak 77 orang sedangkan peserta ATS sebanyak 33 orang total jumlah 110 orang. Tahun 2020 K3 Dasar Pesawat Angkat Angkut / Surat Izin Operator (SIO) sebanyak 50 orang sedangkan ATS terjadi pengurangan anggaran sehingga tidak terlaksana.

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel 2. 145 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	-	300	330	330	330
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	300	330	330	330
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat yang berbentuk Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Para Pencari Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah sekolah kejuruan dan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan swasta yang menjadi mitra atau binaan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Peserta diberikan penyuluhan informasi lowongan kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun ke luar negeri.

Narasumber yang didatangkan adalah perusahaan pengguna langsung. Tujuannya agar pacar calon pencari kerja dapat memperoleh informasi dan para Pengusaha dapat menawarkan peluang-peluang kerja keluar negeri. Apabila peserta atau para pencari kerja berminat dapat berhubungan langsung dengan perusahaan pengguna sesuai syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2017 dengan jumlah peserta sampai saat ini telah mencapai 330 orang. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. 146 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Peklatihan Kewirausahaan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	-	-	99	110	10
2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	99	110	10

3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diberikan pelatihan dan pendampingan dari tahun 2016 – 2018 bersumber dari anggaran APBN. Kegiatan pelatihan kewirausahaan diberikan kepada pelaku usaha tenaga kerja mandiri, dengan tujuan agar tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Pada tahun jumlah tenaga kerja yang dilatih menurun karena adanya pandemi Covid-19 dan sampai tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 219 orang.

Tabel 2. 147 Jumlah Perusahaan Menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

hun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK >100	TK 50-99	TK 25-49	< 25	< 10	
2016	11	5	21	33	68	138
2017	21	14	24	45	66	170
2018	31	17	33	45	75	201
2019	23	20	21	31	45	140
2020	25	22	25	36	43	151

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Terjadi peningkatan jumlah perusahaan kategori besar dan sedang sejak tahun 2016 sebanyak 11 perusahaan menjadi 25 perusahaan pada tahun 2020. Demikian pula perusahaan dengan skala sedang terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 5 perusahaan pada tahun 2016 menjadi 22 perusahaan pada tahun 2020. Perusahaan kategori menengah dan perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 25 karyawan relatif stabil. Sedangkan jumlah karyawan perusahaan kecil dibawah 10 orang justru mengalami penurunan, yaitu sebanyak 68 pada tahun 2016 menjadi 43 perusahaan pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas dan kapabilitas terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 148 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

Tahun	PP	PKB	SP/SB	LKS. BIPARTIT	PHI/PHK	TK Korban PHK

2016	51	8	32	1	5	5
2017	52	8	32	2	16	16
2018	58	8	29	2	7	16
2019	62	9	31	3	13	13
2020	65	9	32	3	34	6

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas tergaambar bahwa jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan sejak Tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari perusahaan untuk mengatur batasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial di lingkungan perusahaan. Peraturan perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial sangat penting keberadaannya karena disamping sebagai pedomanuntuk mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh. Peraturan perusahaan juga merupakan rujukan dalam menangani perselisihan hubungan industrial.

Peraturan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak Tahun 2016 sampai 2020 cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Subtansi pengaturan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada dasarnya hampir sama, perbedaanya untuk penyusunan PKB harus dilaksanakan bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang resmi di perusahaan. Ketentuan mengenai persyaratan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat mengikuti perundingan PKB diatur tersendiri dalam Ketentuan Perundang-Undangan.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga merupakan sarana hubungan industrial dalam perusahaan yang berfungsi sebagai organisasi pekerja/buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh. Oleh karena pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah hak bagi setiap pekerja/buruh, maka pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan tidak bisa dibatasi sepanjang pembentukannya memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi, menurun pada tahun 2018 dan selanjutnya meningkat kembali Tahun 2019 dan Tahun 2020. Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diperoleh berdasarkan target perusahaan yang dilakukan verifikasi setiap tahunnya.

Terkait Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dapat dijelaskan bahwa perkembangan LKS di perusahaan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 tidak banyak mengalami kemajuan dimana Tahun 2016 baru ada 1 perusahaan yang membentuk LKS Bipartit dan terakhir Tahun 2020 baru 3 perusahaan yang membentuknya. Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit berfungsi sebagai wadah komunikasi antara pekerja/buruh, SP/SB dan pengurus perusahaan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pada umumnya permasalahan yang timbul di perusahaan diselesaikan dengan

pendekatan persuasif antara pengusaha dengan pekerja/buruh, namun demikian apbila permasalahan tetap tidak menemui kesepakatan, maka selanjutnya difasilitasi Pemerintah penyelesaiannya ataupun menempuh jalur mediasi formal oleh mediator hubungan industrial. Adanya LKS Bipartit ini sebenarnya menjadi instrumen yang baik bagi pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyelesaikan permsalahan secara mandiri, tetapi masih sangat sedikit perusahaan yang dapat menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan ini.

Secara konseptual Pemerintah dan pengusaha selalu berusaha mencegah terjadinya PHK, namun secara faktual terjadinya PHK kadang tidak bisa dihindari. Ada banyak alasan yang menyebabkan terjadinya PHK antara lain pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran terhadap PP/PKB maupun adanya efisiensi yang dilakukan perusahaan. Bagi pekerja/buruh yang mendapat PHK mempunyai hak untuk menempuh jalur mediasi formal yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial bilamana mereka menolak alasan PHK, tetapi apabila alasan PHK diterima maka kewajiban pengusaha adalah menyelesaikan hak-hak pekerja/buruh yang belum diselesaikan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Tabel 2. 149 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	0	2.381	2.384	4.130	4.287
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	0	3.377	3.404	5.454	5.639
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0.00	70.51	70.04	75.72	76.02

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 meskipun pada tahun 2018 turun 0,47 poin. Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menandakan perempuan telah mendapatkan kesempatan dalam pembangunan.

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Tabel 2. 150 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	Orang	1	1	1	1	2
2	Jumlah total kursi keanggotaan DPRD	Orang	30	30	30	30	30
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun tidak signifikan penambahannya. Hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas, minat dan partisipasi politik perempuan dibanding laki-laki.

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2. 151 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Orang	0	996	1020	1324	1352
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	0	3,377	3.404	5.454	5.639
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0.00	29.49	29.96	24.28	23.98

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta secara riil sejak tahun 2017 mengalami peningkatan, walaupun secara persentase menurun. Hal ini diakibatkan karena jumlah pekerja perempuan yang ada tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Lembaga swasta.

4. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tabel 2. 152 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No		Satuan	Tahun

	Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	Kasus	21	27	27	33	21
2	Jumlah Rumah Tangga	RT	69.073	69.988	70.058	87.534	69.073
3	Rasio KDRT	Rasio	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2020 yang terlaporkan mencapai 0,03 persen atau dengan kata lain dari 100.000 perempuan 30 diantaranya mengalami kekerasan.

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2. 153 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	0	3.377	3.404	5.454	5.639
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	0	48.541	48.453	46.113	45.341
3	partisipasi angkatan kerja perempuan	%	0.00	6.96	7.03	11.83	12.44

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Luwu Timur mulai tahun 2017 sampai tahun 2020 peningkatannya cukup signifikan dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja.

6. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penangananan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2. 154 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penangnanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab.

Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	0	21	27	27	33
2	Jumlah Laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	0	21	27	27	33
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	0.00	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Korban Kekerasan Terhadap Anak (KtA) yang mendapatkan penanganan pengaduan di Kabupaten Luwu Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir (2017-2020), dapat ditangani 100 persen. Hal ini menunjukkan kesigapan petugas yang terlatih.

7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2. 155 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Korban Kekerasan yang memperoleh layanan rehabsos	Orang	0	21	21	27	33
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Orang	0	21	21	27	33
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	0.00	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Gambaran lainnya yang terkait dengan penagan Korban ktP dan ktA, adalah

layanan komprehensif yang dilakukan pada korban saat melapor pada Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

8. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Tabel 2. 156 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	0	14	19	24	31
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang	Perkara	0	21	21	27	33
3	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0.00	67	90	89	94

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan penyelesaian perkara secara damai tidak dapat dilakukan.

9. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2. 157 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum	Orang	0	14	19	24	31
2	Jumlah korban yang mebutuhkan bantuan hukum	Orang	0	21	21	27	33
3	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	0.00	67	90	89	94

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Korban Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Korban Kekerasan Terhadap Anak (KtA) belum seluruhnya mendapatkan pelayanan bantuan hukum, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, dibandingkan dengan jumlah korban yang harus dilayani.

Tabel 2. 158 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Korban	0	8	10	8	9
2	Korban Kekerasan terhadap perempuan	0	5	5	4	4
3	Korban kekerasan terhadap anak	0	3	5	4	5

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2021

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data diatas penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut, karena kasus KDRT timbul dari penyebab yang cukup kompleks.

2.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Kecukupan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutunya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional karena dapat memperbesar

akses bagi penduduk untuk memperoleh pangan. Angka kecukupan ketersediaan energi dan protein dengan skor mutu pola pangan harapan yang dianjurkan dalam Widyakarya Pangan dan Gizi ke VI tahun 1998 menjadi indikator penilaian aspek ketersediaan dari ketahanan pangan nasional, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 159 Ketersediaan Pangan Utama
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rata rata ketersediaan pangan utama pertahun	Ton	193.744	204.693	259.389	245.401	252.728
2	Jumlah penduduk	Orang	293.978	283.609	298.981	300.078	302.039
3	Ketersediaan pangan utama	%	65,90	72,17	86,75	81,77	83,67

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020
Data jumlah penduduk menggunakan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan utama Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 sampai 2020 cukup melimpah meskipun pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 karena jumlah penduduk bertambah sementara hasil panen menurun.

Tabel 2. 160 Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi (Ton)	308.657	308.404,19	338.836,59	327.848	327.848
2.	Kebutuhan (Ton)	32.890	31.730	33.450	33.573	28.055,81
3.	Persediaan (Ton)	155.675	160.234	212.596	205.692	208.872,25
Surplus/Defisit		Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Ketersediaan pangan utama (beras) menggambarkan bagaimana kondisi ketahanan pangan suatu daerah. Dari data tabel diatas memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (Beras) di Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016 ketahun 2018, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019 namun ketersediaan pangan utama masih tersedia (surplus) dari kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Luwu Timur. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi.

2. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2. 161 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Gram/kap/hari	5.947,42	3.457,15	4.383,08	3.731,26	3.258,86

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa total ketersediaan pangan dan gizi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat ketersediaan jenis pangan dan gizi yang termasuk energi dan protein telah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) jika dibandingkan dengan standar nasional ketersediaan energi dan protein sebesar 2.400 kkal/kapita (hasil widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012). Capaian tersebut sudah melampaui standar yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan dilaksanakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia di Kabupaten Luwu Timur, Hasil Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 162 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikomsumsi	Sampel	8	7	9	5	-
2	Jumlah total sampel pangan yang di uji	Sampel	13	10	13	9	-
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	66.66	70	69,2	55,5	-

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, Pada Tahun 2016 – 2019 dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamananan Pangan berupa pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dipasar yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, kemudian sampel tersebut dikirim untuk diuji di laboratorium. Pada

tahun 2016 – 2019 pengambilan hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) meningkat disebabkan jumlah sampel yang diuji lebih banyak dan juga mengalami penurunan disebabkan karena jumlah sampel lebih sedikit. Tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan tidak tersedia anggarannya.

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2016 s/d 2020 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 163 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Tani	1.994	2.063	2.101	2.162	2.306
a	Kelas Pemula	1.457	1.476	1.496	1.541	1.647
b	Kelas Lanjut	502	548	562	582	605
c	Kelas Madya	33	36	40	45	49
d	Kelas Utama	2	3	3	4	5
2. a.	Jumlah Petani/Buruh Tani	49.153	50.853	51.790	53.294	56.844
b	Jumlah Keanggotaan dalam Kelompok Tani	25	25	25	25	25
c	Rasio jumlah kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04

Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani/buruh tani tergabung dalam kelompok masih sangat rendah, karena dari 100 petani hanya 5 orang yang tergabung dalam kelompok.

2.3.2.4 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2. 164 Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas lahan bersertifikat	M2	-	8.395.654	8.537.136	8.538.186	8.842.736
2	Jumlah luas wilayah	M2	-	22.299.930	22.299.930	22.299.930	22.299.930
3	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	37.65	38.28	38.29	39.65

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Persentase luas lahan bersertifikat masih relatif kecil, hal ini disebabkan disamping kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat masih kurang, juga biaya pengurusan sertifikat yang masih relatif mahal.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2. 165 Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang di selesaikan	Kasus	5	3	9	7	5
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	6	3	9	7	5
3	Penyelesaian kasus tanah negara	%	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Seluruh kasus tanah negara yang didaftarkan dapat ditangani secara keseluruhan. Tetapi tidak menjamin bahwa seluruh tanah negara di Kabupaten Luwu Timur aman dari permasalahan, mengingat masih ada kasus tanah negara yang tidak terlaporkan.

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2. 166 Penyelesaian izin lokasi
Kabupaten Luwu Timur 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin lokasi	Ijin	4	-	-	2	1
2	Jumlah permohonan ijin lokasi	Ijin	4	-	-	2	1
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	-	-	100.00	100.00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin lokasi telah ditindaklanjuti, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada tindak lanjut izin lokasi karena tidak ada yang mengajukan permohonan izin lokasi.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2. 167 IKLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

No	Tahun	IKLH
1	2017	56.99
2	2018	58.35
3	2019	70.55
4	2020	86.87

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Data lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa IKLH Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program pengawasan dan pengendalian lingkungan di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan baik.

Tabel 2. 168 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan
Hutan Kabupaten Luwu TimurTahun 2018 – 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	13.87	15	10.92	26.75
2	Indeks kualitas Udara	150.25	15.25	29.03	29.52
3	Indeks tutupan hutan/lahan	28.09	28.09	30.59	30.59

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari tahun 2017 – 2020, terjadi kenaikan indeks kualitas air yang menandakan kualitas air pada kondisi baik. Demikian halnya dengan indeks kualitas udara juga

mengalami kenaikan, ini menandakan kualitas udara pada kondisi sedang dan untuk indeks tutupan lahan, terjadi kenaikan besaran dimulai pada tahun 2019 dengan adanya dukungan kebijakan penambahan tutupan lahan di luar hutan.

2. Tersusunnya RPPLH Kabupaten

Tabel 2. 169 Tersedianya Dokumen RPPLH Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungann Hidup (RPPLH) merupakan amanah dari UU 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 5 ayat (3) huruf c. Adapun muatan dan subtansi dari RPPLH ini adalah 1, informasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; 2, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan; 3. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan 4. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

RPPLH Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini belum dilakukan penyusunan dokumen secara utuh beserta dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar dan tolak ukur dalam penerapa RPPLH ini karena menunggu selesainya penyusunan RPPLH tingkat Nasional dan RPPLH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai tahun 2021 belum selesai. Akan tetapi dalam penyedian data penunjang telah tersedia seperti dokumen KLHS, dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan baik kualitas tanah, kualitas udara dan kualitas air permukaan.

3. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Tabel 2. 170 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Adapun muatan dan subtansi dari RPPLH ini adalah salah satunya dasar dalam penyusunan dan wajib dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Akan tetapi RPPLH Belum Tersedia Sehingga data yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan khususnya RPJMD tahun 2021-2026 adalah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dokumen KLHS yang mana termasuk substansi dan isi muatan RPPLH

4. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Tabel 2. 171 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah Kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

KLHS yang disusun pada tahun 2019 adalah KLHS Revisi RTRW dan tahun 2020 adalah KLHS RPJMD Kab. Luwu Timur dan KLHS RDTR Wilayah Malili dan Wotu.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kab. Luwu Timur terhadap Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih dan Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Adapun penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu Timur diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Hasil kajian daya dukung penyediaan air berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur sebesar 652.312.478 m^3/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 21.927.302 m^3/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 630.385.176 m^3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Towuti (120.063.362 m^3/Tahun), dan Mangkutana (101.274.038 m^3/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tomoni Timur (3.750.140 m^3/Tahun). Hal ini dikarenakan pada Kecamatan Tomoni Timur ketersediaan airnya paling kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Meski secara umum ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang

ketersediaan airnya tidak mencukupi seperti pada beberapa grid di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan air lebih besar dari pada ketersediaan. Untuk memperjelas analisis tersebut maka pada gambar dibawah ini diperlihatkan status daya dukung penyediaan air di Kabupaten Luwu Timur berbasis grid. Hal ini menunjukkan terdapat area yang status daya dukung penyediaan airnya telah melampaui ambang batas.

Hasil kajian daya dukung penyediaan pangan berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur sebesar 2.237.120.333.024 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 235.718.496.638 Kkal/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 2.001.401.836.386 Kkal/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Towuti (376.231.500.649 Kkal/Tahun), dan Mangkutana (332.031.508.073 Kkal/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tomoni Timur (11.722.747.000 Kkal/Tahun) dan Kecamatan Kalaena (24.921.815.222 Kkal/Tahun). Hal ini dikarenakan pada Kecamatan Tomoni Timur dan Kalaena ketersediaan pangannya paling kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Meski secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan pangannya tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan lebih besar dari pada ketersediaan. Untuk memperjelas analisis tersebut maka pada gambar dibawah ini diperlihatkan status daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur berbasis grid. Hal ini menunjukkan terdapat area yang status daya dukung penyediaan pangannya telah melampaui ambang batas. Secara total terdapat 2,27% dari total luas wilayah di Kabupaten Luwu Timur yang status penyedia pangannya telah melampaui ambang batas. Sementara yang tidak melampaui ambang batas terdapat 99,98% dari total luas wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Wilayah yang melampaui ambang batas pangannya tidak signifikan berdampak dikarenakan pada faktanya kebutuhan pangan pada wilayah tersebut dapat disuplai oleh wilayah disekitarnya.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2. 172 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air		0	46.25	50.00	36.40	89.19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Nilai Indeks kualitas Air Kab Lutim 2017 – 2019 pada kondisi cemar ringan dan tahun 2020 pada kondisi baik, hal ini disebabkan bertambahnya titik pengambilan dan frekuensi pengambilan sampel dan data pembanding sebelumnya.

Klasifikasi Kualitas Air NSF-WQI

SKOR	KRITERIA
100 - 90	SANGAT BAIK
90 - 70	BAIK
70 - 50	SEDANG
50 - 25	BURUK
25 - 0	SANGAT BURUK



Klasifikasi Kualitas Air baru

SKOR	KRITERIA		KETERANGAN
100 ≥ I ≥ 90	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	
90 > I ≥ 80	BAIK	BAIK	KELAS I
80 > I ≥ 70	CUKUP BAIK	CUKUP BAIK	KELAS II
70 > I ≥ 50	SEDANG	SEDANG	KELAS III
50 > I ≥ 35	*"MARGINAL"*	*"BURUK"*	KELAS IV
35 > I ≥ 0	*"BURUK"*	*"SANGAT BURUK"*	

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2. 173 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		0	50.078	50.85	96.79	98.40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Nilai indeks kualitas udara dari tahun 2017 – 2020 berada dalam kondisi "sedang" menandakan kualitas udara tidak mberpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan peka.

ISPU	Pencemaran Udara Level	Dampak Kesehatan
0 - 50	Baik	Tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia
51 - 100	Sedang	Tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka
101 – 199	Tidak Sehat	Bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
200-299	Sangat Tidak Sehat	Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
300 – 500	Berbahaya	Kualitas Udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misalkan iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan)

7. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2. 174 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas tutupan lahan		0	70.24	70.24	76.48	76.48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tahun 2017 – 2020, terjadi kenaikan besaran tutupan lahan yang dimulai pada tahun 2019 terdapat dukungan kebijakan untuk potensi penambahan tutupan lahan diluar hutan (Data Ruang terbuka hijau, data kebun raya dan data taman kehati) Peraturan Dirjen PPKL Nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan IKTL dan Pengelolaan Tutupan Lahan.

8. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 2. 175 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha Kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin lingkungan, izil PPLH dan PUU LH dari izin yabng terbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Usaha/ Kegiatan	26	26	26	26	26
2	Total Penanggung jawab usaha dan kegiatan yang dihina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha/ Kegiatan	50	50	50	50	50
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha	Persentase	52	52	52	52	52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan arahan dalam izin lingkungan dan dokumen lingkungan.

Jumlah Usaha dan Kegiatan yang dibina dan diawasi pada tahun 2016 sampai

2020 sebanyak 50 usaha. Adapun usaha yang dibina dan diawasi adalah *Base Transciever Seluler* (BTS), Pabrik Sawit, Pabrik Pengeringan Bijih Kakao, Pabrik *Stone Crusher* dan *Aspal Mixing Plan*, Fasilitas Kesehatan, PLTA, Tambang Batuan Mineral bukan logam, Penginapan, Rumah Pemotongan Hewan, *Sawmill*, SPBU, Perumahan, Industri Kayu Lapis(*Veneer*) dan Tambang Laterit Nikel.

Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada 50 usaha dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha dan/atau kegiatan telah mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan dan sebagian kecil usaha belum melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha yang izin lingkungan, izin PPLH, PUU LH yang diterbitkan belum mencapai hasil maksimal disebabkan oleh minimnya pengetahuan penanggung jawab usaha lingkungan terhadap regulasi dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan serta tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun jumlah usaha yang dibina dan diawasi tahun 2016 sebanyak 20 usaha, pada tahun 2017 sebanyak 20 usaha dan sampai pada tahun 2020 sebanyak 20 usaha. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2016 – 2020 difokuskan pada fasilitas layanan kesehatan yang berjumlah 18 yaitu RSUD I Lagaligo, Puskesmas Burau, Puskesmas Wotu, Puskesmas Tomoni, Puskesmas Tomoni Timur, Puskesmas Mangkutana, Puskesmas Angkona, Puskesmas Kalaena, Puskesmas Lakawali, Puskesmas Malili, Puskesmas Lampia, Puskesmas Parumpanai, Puskesmas Wasuponda, Puskesmas Wawondula, Puskesmas Timampu, Puskesmas Mahalona, Puskesmas Bantilang dan Puskesmas Nuha. Sedangkan 2 usaha dan/atau kegiatan lainnya difokuskan pada kegiatan hotel yaitu Hotel Lusiana dan Hotel I Lagaligo.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketaatan usaha dapat disimpulkan bahwa seluruh fasilitas layanan kesehatan dan Hotel Lusiana serta Hotel I Lagaligo sampai tahun 2020 telah memiliki izin lingkungan. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan.

9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Tabel 2. 176 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah MHA Yang diakui	MHA	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Fasilitasi pengakuan MHA di Kabupaten Luwu Timur dimulai sejak tahun 2019 dengan telah diajukannnya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan MHA ke DPRD Luwu Timur , saat ini perda tersebut masih dalam proses penetapan.

10. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Tabel 2. 177 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional kab. Luwu timur tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA dan kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	MHA	0	0	0	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Masyarakat Hukum Adat atau MHA adalah Warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Hak MHA di Luwu Timur belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat, sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan dan perlindungan MHA (PPMHA).

Mulai tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan sosialisasi kepada komunitas adat di Luwu Timur yang dianggap memiliki kriteria MHA. Substansi sosialisasi adalah mengenai tahapan yang harus dilalui komunitas adat tersebut, untuk mendapatkan PPMHA, yang terdiri atas identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan.

Berhubung komunitas adat To Cerekang yang memiliki wilayah adat di Desa Manurung Kecamatan Malili telah melakukan identifikasi secara mandiri, maka To Cerekeng menjadi lokus simulasi verifikasi pada tahun 2019. Simulasi verifikasi tidak serta merta membuat To Cerekeng tidak perlu lagi mengikuti kembali identifikasi dan verifikasi secara formal setelah Peraturan Daerah tentang PPMHA disahkan.

11. Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional.

Pada tahun 2019 telah di tetapkan 1 SK Bupati tentang kearifan lokal untuk Cerekang.

Tabel 2. 178 Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan tradisional yang terverifikasi	MHA	0	0	0	1	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan verifikasi terhadap komunitas adat To Cerekeng. Berdasarkan verifikasi tersebut, pada tahun 2019 To Cerekeng menjadi komunitas adat penerima SK Bupati pertama di Luwu Timur sekaligus di Indonesia tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PPLH).

Perbedaan antara PPMHA dengan PPLH adalah jika PPMHA adalah Pernyataan Negara sebagai penerimaan dan penghormatan atas kearifan lokal yang diampu Masyarakat Hukum adat dan/atau masyarakat setempat, maka PPLH adalah suatu bentuk pelayanan negara kepada MHA atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin kelangsungan kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

12. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2. 179 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terlaksananya Pemberian pernghargaan lingkungan Hidup	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada Tahun 2016 -2017 Kabupaten Luwu Timur tidak mendapatkan Piala Adipura karena nilainya tidak masuk dalam standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh Tim Penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan TPA Ussu sementara dalam perbaikan, dimana TPA

adalah salah satu titik pantau yang sangat tinggi nilainya dibanding dengan titik pantau yang lain.

Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2018 merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan Piala Adipura Kategori Kota Kecil. Piala Adipura tersebut diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia (HM. Yusuf Kalla) dan didampingi oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Sitti Nurbaya) dan diterima langsung oleh Bapak Bupati Luwu Timur H. Muh. Thoriq Husler pada tanggal 14 Januari 2019 di Ball Room Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia.

13. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Tabel 2. 180 Timbulan Sampah Yang Ditangani
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Timbulan Sampah yang Ditangani melalui kegiatan pengurangan dan penanganan	Ton	6.219	8.009	30.672	34.318	28.298

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Timbulan sampah Kabupaten Luwu Timur sebesar 119,8 ton per hari pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebesar 299.673 (BPS, Luwu Timur dalam Angka 2020). Setara dengan 43 ribu ton per tahun, dengan koefisien 0,4 kilogram per orang per hari.

Jumlah timbulan sampah yang ditangani meningkat setiap tahunnya dikarenakan semakin besar jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur dengan asumsi estimasi pertambahan jumlah penduduk sekitar 2 persen per tahun. Penambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan jumlah timbulan sampah.

Jumlah timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2016 sebesar 6.219 ton dan meningkat hingga 28.298 ton pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan peningkatan pengelolaan baik dari sisi penanganan ataupun pengurangan sampah yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. 181 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
1	DELIMA	-	MAGANI	NUHA
2	MORINA	-	SOROWAKO	NUHA
3	MOLENA INIAKU	-	NIKKEL	NUHA

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
4	KAMASE	-	WAWONDULA	TOWUTI
5	BARUGA SAYANG	-	BARUGA	TOWUTI
6	MANDIRI	-	PEKALOA	TOWUTI
7	SEJAHTERA	-	TIMAMPU	TOWUTI
8	MONSOLINGA	-	ASULI	TOWUTI
9	MABES	-	MATOMPI	TOWUTI
10	RANTE ANGIN	-	RANTE ANGIN	TOWUTI
11	TOKALIMBO	-	TOKALIMBO	TOWUTI
12	LOEHA	-	LOEHA	TOWUTI
13	BANTILANG	-	BANTILANG	TOWUTI
14	LIOKA	-	LIOKA	TOWUTI
15	LANGKEA RAYA	-	LANGKEA RAYA	TOWUTI
16	KECAMATAN TOWUTI	-	KECAMATAN	TOWUTI
17	LOWITA	-	TABARANO	WASUPONDA
18	LEMBO SEJATI	-	WASUPONDA	WASUPONDA
19	BIRONO	-	PARUMPANAI	WASUPONDA
20	HARAPANKU	-	BALAMBANO	WASUPONDA
21	BSC SATU HATI	-	WASUPONDA	WASUPONDA
22	LEDU-LEDU	-	LEDU-LEDU	WASUPONDA
23	MOMOIKO	-	KANTOR WASUPONDA	WASUPONDA
24	ANGGREK	-	MALILI	MALILI
25	D'LIMA	-	LAKAWALI	MALILI
26	BIRAWA	-	BALANTANG	MALILI
27	IPIN	-	PUNCAK INDAH	MALILI
28	LAKALOI	-	BARUGA	MALILI
29	HARAPAN BERSIH SAMPAH	-	HARAPAN	MALILI
30	MALINDO	-	PASI-PASI	MALILI
31	BAROKAH	-	LASKAP	MALILI
32	MUDA BERKARYA	Dsn. Hulu Padang	PONGKERU	MALILI
33	MALLIWENG	-	WEWANGRIU	MALILI
34	SAHABAT MANURUNG	-	MANURUNG	MALILI
35	BALAPAN	DSN. LADOPING	LAKAWALI PANTAI	MALILI
36	BANK SAMPAH CEMARA	-	PUNCAK INDAH (PERKANTORAN)	MALILI
37	TCLB	-	TAWAKUA	ANGKONA
38	LBS	-	LAMAETO	ANGKONA
39	MPS	-	WANASARI	ANGKONA
40	BBM	-	BALIREJO	ANGKONA
41	CILIBER	-	TARIPA	ANGKONA
42	GPS	-	SOLO	ANGKONA
43	BSM BALI	-	MANTADULU	ANGKONA
44	WANAGIRI	-	KECAMATAN	ANGKONA
45	WATSAP	-	WATANGPANUA	ANGKONA

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
46	TAMPINNA BISA	-	TAMPINNA	ANGKONA
47	MABESSAH	-	MALIWOWO	ANGKONA
48	BINA HARAPAN	-	KALAENA KIRI	KALAENA
49	GEMAH RIPAH	-	ARGOMULYO	KALAENA
50	KARYA SEJAHTERA	-	NON BLOK	KALAENA
51	BERLIAN	-	MEKAR SARI	KALAENA
52	BII	-	PERTASI KENCANA	KALAENA
53	BERSERI	-	SUMBER MAKMUR	KALAENA
54	SUMBER AGUNG	-	SUMBER AGUNG	KALAENA
55	BANG KUMIS	-	MARGOLEMBO	MANGKUTANA
56	ANDALAN	-	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA
57	MELAYU	Dsn. Senam Hari 2	WONOREJO	MANGKUTANA
58	MANIS ASAM ASIN	-	TEROMU	MANGKUTANA
59	SAPULIDI	-	SINDU AGUNG	MANGKUTANA
60	BALAI KEMBANG	-	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA
61	KASINTUWU	-	KASINTUWU	MANGKUTANA
62	SILET	-	PANCAKARSA	MANGKUTANA
63	KISS	-	KORONCIA	MANGKUTANA
64	HARAPAN JAYA	-	BANGUN JAYA	TOMONI
65	MULYASRI	-	MULYASRI	TOMONI
66	MABALLO	-	TOMONI	TOMONI
67	MANDIRI	-	MANDIRI	TOMONI
68	KARYA	-	BANGUN KARYA	TOMONI
69	BUAH SAWIT	-	KALPATARU	TOMONI
70	BAYONDO CINTA LINGKUNGAN	-	BAYONDO	TOMONI
71	MAWAR	-	SUMBER ALAM	TOMONI
72	TADULAKO	-	TADULAKO	TOMONI
73	BASMAN	-	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR
74	DERES	-	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR
75	MARGOMULYO	-	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR
76	BERSINAR	-	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR
77	SULE	-	LERA	WOTU
78	RANGATA	-	LAMPENAI	WOTU
79	MADANI	-	MADANI	WOTU
80	KANAWATU	-	KANAWATU	WOTU
81	KITA PEDULI KEBERSIHAN	-	MARAMBA	WOTU
82	ASRI	-	PEPURO BARAT	WOTU
83	BERIMAN	-	CENDANA HIJAU	WOTU
84	SAYANG BUMI	-	KARAMBUA	WOTU
85	BAHARI	-	BAHARI	WOTU
86	KENNENG	-	BAWALIPU	WOTU
87	TARENGGE	-	TARENGGE	WOTU
88	RINJANI	-	RINJANI	WOTU

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
89	TARENGGE TIMUR	-	TARENGGE TIMUR	WOTU
90	LINKBAS	Dsn. Bone Pata	BONE PUTE	BURAU
91	MELATI	-	LEWONU	BURAU
92	SIPAKATAU SIPAKAINGE BURAU	-	BURAU	BURAU
93	BILAS	-	LUMBEWE	BURAU
94	MAPACCING	-	JALAJJA	BURAU
95	BERKASIH	-	BENTENG	BURAU
96	LAUWO	-	LAUWO	BURAU
97	LANOSI	-	LANOSI	BURAU
98	LAMBARESE	-	LAMBARESE	BURAU

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Pengelolaan Bank Sampah dilakukan dengan hirarki bank sampah induk di tingkat kabupaten hingga bank sampah bergerak melakukan pemilahan hingga penjualan sampah anorganik. Sampah yang dikumpulkan meliputi jenis kertas dan plastik yang bernilai ekonomis.

Bank Sampah ditingkat desa dan kecamatan telah terbentuk 98 dengan tingkat keaktifan sebesar 25 persen. Bank Sampah diawali pada tahun 2013 dimana dibentuk 7 Bank Sampah. Pertumbuhan Bank Sampah di Luwu Timur sangat pesat, terutama sejak adanya Program Membangun Bank Sampah pada akhir 2017.

Tabel 2. 182 Jumlah Sampah Terolah Per Hari Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Jenis Olaahan sampah	Jumlah (ton)	Keterangan
1	Komposting	1.00	-
2	Daur Ulang	7.11212	-
3	Bahan Bakar	0	-
4	Dikelola Bank sampah	2.400	-
5	Daur Ulang Biogas	0	-
Jumlah		10.51212	-

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, 2021

Sampah terolah meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan proses daur ulang dan memberi kontribusi pada pengurangan sampah yang dibawa ke TPA. Jenis olahan sampah yang didaur ulang adalah sampah yang bernilai ekonomi, sebagian besar dilakukan dengan pengumpulan sampah oleh pengepul sampah dan bank sampah. Sampah yang terkumpul dikirimkan ke industri daur ulang di Makassar dan beberapa kota di Pulau Jawa.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pola pengolahan sampah di masyarakat cukup banyak melalui daur ulang. Hal ini cukup baik karena dapat membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan mengingat sampah yang didaur ulang merupakan jenis sampah yang sulit terurai. Disamping itu, jenis sampah tersebut masih

memiliki nilai ekonomi sehingga kegiatan masyarakat untuk mendaur ulang sampah juga cukup tinggi.

14. Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

Tabel 2. 183 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah sampah yang dikelolah melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak di angkut ke TPA atau dibuang dilingkungan.	Ton	-	2.051,3	4.714,89	4.742,69	-
2	Persentase Jumlah Sampah Yang dikurangi Melalui 3R	%	-	5.09	11,46	11,06	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) adalah tingkatan manajemen pengelolaan sampah yang menunjukkan strategi pengurangan sampah yakni mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur ulang sampah. Beberapa aktifitas yang berjalan di Kabupaten Luwu Timur mencakup bank sampah, pengomposan dan pengelolaan *maggot BSF*.

Bank sampah dilaksanakan secara terkoordinir dengan hirarki Bank Sampah Induk pada tingkat kabupaten, bank sampah cabang di tingkat kecamatan dan bank sampah unit di tingkat desa/instansi. Hingga tahun 2020 telah tercatat 4500 nasabah yang menabung di bank sampah.

Pengelolaan sampah organik dilakukan dengan metode pengomposan dan pemanfaatan maggot BSF. Pengomposan dan pemanfaatan maggot BSF dilakukan pada TPST Kelurahan Malili, Rumah Kompos Perkantoran dan TPA Ussu.

Persentase pengurangan berkisar pada 11 persen selama 2 tahun (2018-2019) namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,36 persen. Hal ini disebabkan masa awal pandemi sehingga pengelolaan bank sampah oleh masyarakat desa juga menurun yaitu mulai tercatat bulan Maret hingga bulan Juli 2020 bank sampah tidak melakukan aktifitas.

15. Persentase Jumlah sampah yang ditangani.

**Tabel 2. 184 Persentase Jumlah Sampah yang ditangani.
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Sampah Yang Ditangani	%	15,5	19,52	73,18	80,01	64,68
2.	Total Timbulan sampah per tahun	Ton	40.127	41.033	42.862	43.632	43.734
3.	Jumlah sampah yang ditangani	Ton/tahun	6.219,63	8.009,70	31.366,53	34.910,27	28.287,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Estimasi timbulan sampah harian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebesar 120 ton per hari atau sebesar 43.734 ton per tahun. Timbulan sampah meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini sesuai target pengelolaan sampah kabupaten yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Dalam Jakstrada ditetapkan bahwa pemerintah kabupaten akan memenuhi target pengelolaan sampah sebesar 30 persen pada sector pengurangan dan 70 persen sector penanganan pada tahun 2025.

Penanganan sampah di Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan perhatian dari pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2015 baru 5 kecamatan yang mendapatkan pelayanan, yakni Kecamatan Malili, Nuh, Wasuponda, Towuti dan Tomoni. Sarana pelayanan sampah juga masih terbatas dengan sarana terbanyak tersedia di wilayah perkotaan Malili. Sejak tahun 2017 armada pengangkut sampah ditambahkan ke Kecamatan Burau, Wotu, Mangkutana, dan Kalaena sesuai arahan RPJMD. Cakupan wilayah pelayanan yang semula hanya 15 persen dari jumlah populasi saat ini sudah mampu menjangkau setidaknya 60 persen dari jumlah populasi. Kapasitas penanganan pada tahun 2020 juga meningkat 4,5 kali lipat dibanding tahun 2016.

Peningkatan penanganan sampah juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir sampah. TPA Ussu direvitalisasi sejak tahun 2015 dan mulai aktif digunakan pada tahun 2016 dengan sistem pengelolaan Control Landfill. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menyusun *feasibility study* untuk mendapatkan gambaran rencana pengelolaan TPA di wilayah yang berada diluar kawasan perkotaan Malili.

Grafik 2. 31 Persentase Jumlah Sampah Yang Ditangani Tahun 2016-2020

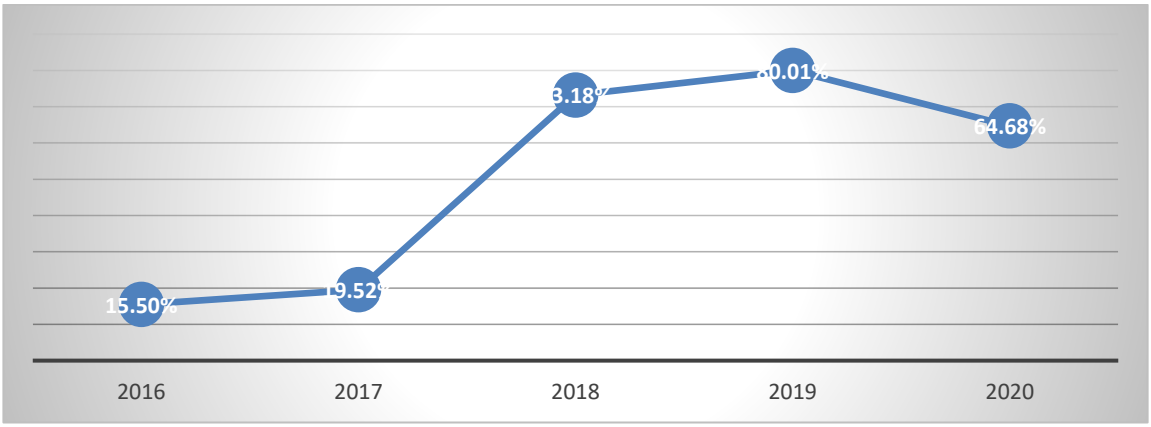

Persentase pengelolaan sampah sesuai grafik mengalami peningkatan selama 5 tahun dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan luas wilayah penanganan yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, penanganan baru mencakup wilayah perkotaan Malili, Tomoni, Wasuponda, Wawondula dan Sorowako. Sejak tahun 2018 penanganan bertambah dengan adanya pengadaan truk pengangkut sampah melalui Dana Alokasi Khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 8 unit sehingga wlayah penanganan bertambah di wilayah Kecamatan Burau, Wotu, Mangkutana, Kalaena serta penambahan unit truk di wilayah Kecamatan Nuha, Malili, Wasuponda dan Towuti.

Selain melalui penanganan, peningkatan persentase jumlah sampah yang ditangani dipengaruhi pula oleh kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Jumlah sampah yang ditangani mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 menyebaban kekhawatiran pada pengelolaan sampah sehingga berimbas pada penurunan pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota

Tabel 2. 185 Oprasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	-	77,07	77,07	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui 3 prinsip, yakni (1) Pembuangan terbuka (*open dumping*), (2) Penimbunan terkontrol (*Control Landfill*), dan (3) Penimbunan saniter (*sanitary landfill*). Sistem *open dumping* dilarang dilakukan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah.

TPA Ussu di Kecamatan Malili telah dikelola dengan prinsip *control landfill* dan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 77,07 pada periode penilaian Adipura terakhir (2018). Pengelolaan TPA Ussu dilakukan dengan melakukan penumpukan dan perataan sampah pada area dumping terbatas, penutupan sampah dengan tanah secara reguler, pengelolaan lindi pada kolam lindi, penyiapan sarana pengelolaan gas metan, pengomposan dan pengeolaan sampah organik dengan metode larva *black soldier fly* (lalat tentara hitam/BSF).

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el, juga semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada Tahun 2016 terdapat 90 persen penduduk yang memiliki KTP sedangkan untuk tahun 2017 terdapat 91 persen yang memiliki KTP, Pada Tahun 2018 Mengalami peningkatan lagi 96 persen, dan tahun 2019-2020 meningkat lagi menjadi 97 persen yang memiliki KTP, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 186 Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP	Jiwa	175.927	181.355	191.879	195.707	202.728
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah	Jiwa	195.956	198.622	200.534	202.055	203.326
3	Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk		0,90	0,91	0,96	0,97	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Capaian Rasio kepemilikan KTP-el dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui penduduk di tahun 2020 yang terdaftar sebagai Wajib KTP sebanyak 203.326 jiwa. Dari Jumlah tersebut rasio kepemilikan KTP-el di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,99, Artinya 202.728 jiwa yang sudah memiliki KTP-el. Adapun penduduk yang belum memiliki KTP-el, dimungkinkan karena permasalahan-permasalan tertentu yang dialami penduduk.

2. Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran

Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran merupakan jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor.

Tabel 2. 187 Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jiwa	3.210	3.516	3.809	3.772	4.066
2	Jumlah bayi	Jiwa	3.575	3.821	4.124	4.035	4.256
3	Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran		0,90	0,92	0,92	0,93	0,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu dan di suatu wilayah, informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk

perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibuthkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak baik untk masa kini maupun masa yang akan datang. Pada tabel diatas menyajikan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur yang secara umum meningkat dari tahun 2016-2018. Meskipun pada tahun 2019 pencatatan kelahiran menurun dari tahun sebelumnya akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi. Dengan rasio Bayi yang berakta kelahiran sebesar 0,96 yang artinya dari 4.256 jiwa jumlah kelahiran terlapor yang telah memiliki akta kelahiran 4.066 jiwa.

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK). Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 188 Rasio Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	10.800	12.873	17.054	23.674	29.402
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	67.425	63.281	69.889	71.056	71.847
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah		0,16	0,19	0,24	0,33	0,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel diatas menampilkan bahwa Rasio Pasangan Berakte Nikah menunjukkan Jumlah Pasangan Nikah (Kepala keluarga dengan Status Kawin) dan telah memiliki akta nikah. Selain menjadi salah satu persyaratan yang harus dilampirkan pada saat pengurusan akta kelahiran, Updating SIAK versi 7.3 yang mewajibkan menginput nomor buku nikah dan tanggal perkawinan pada biodata WNI adalah salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan buku nikah (status Kawin Tercatat), dan apabila nomor buku nikah dan tanggal perkawinan kosong dalam biodata penduduk dengan status kawin secara otomatis akan tercatat dengan status Kawin Belum Tercatat.

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Tabel 2. 189 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Lahirnya database kependudukan diawali dengan proses penginputan hasil pemutakhiran data kependudukan melalui aplikasi SIAK yang dilakukan pada tahun 2009. Pengelolaan database kependudukan ini meliputi perekaman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, verifikasi dan validasi data. Pada tahun 2016 database kependudukan skala kabupaten sudah tersedia di Kabupaten Luwu Timur.

5. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2. 190 Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Sejak Tahun 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menerbitkan NIK sebagai dasar untuk melakukan perekaman data untuk kepemilikan KTP-el dalam rangka mendukung program nasional Penerapan KTP

berbasis NIK secara nasional berbasis database SIAK.

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dibanding Jumlah penduduk wajib KTP. selengkapnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 191 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jiwa	175.927	181.355	191.879	193.773	202.728
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	195.956	198.622	200.534	200.780	203.826
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	89,78	91,31	95,68	96,51	99.46

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel diatas menyajikan cakupan penerbitan kartu tanda penduduk yang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020 Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 99,46 persen yaitu sebanyak 202.728 jiwa.

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran merupakan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibanding jumlah kelahiran di tahun bersangkutan, selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 192 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	3.210	3.516	3.809	3.772	4.066
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	3.575	3.821	4.124	4.035	4.256

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	89,79	92,02	92,36	93,48	95,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Secara umum pencatatan kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun bersangkutan mengalami peningkatan sejak tahun 2016, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan pencatatan dari tahun 2018 akan tetapi di tahun 2020 sudah meningkat lagi. Peningkatan ini disebabkan dengan adanya program inovasi Balada Capil (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran, KIA dan KK dari Dukcapil) yang memberikan kemudahan masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan perubahan Kartu Keluarga bagi anak usia 0-60 hari.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2. 193 Tipologi Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Timur

No	Desa/Kelurahan	Tipologi
1	LAUWO	Pesisir/Nelayan
2	LAGEGO	Pesisir/Nelayan
3	BURAU	Perladangan
4	LUMBEWE	Perladangan
5	JALAJJA	Perladangan
6	MABONTA	Pesisir/Nelayan
7	LARO	Persawahan
8	LEWONU	Perladangan
9	LAGOSI	Perladangan
10	BONEPUTE	Perladangan
11	BENTENG	Persawahan
12	LAMBARESE	Persawahan
13	CENDANA	Perladangan
14	BATU PUTIH	Perladangan
15	BURAU PANTAI	Pesisir/Nelayan
16	KALATIRI	Persawahan
17	ASANA	Perladangan
18	HARAPAN	Perladangan
19	LERA	Perladangan
20	BAWALIPU	Pesisir/Nelayan
21	LAMPENAI	Pesisir/Nelayan
22	BAHARI	Pesisir/Nelayan
23	KALAENA	Perladangan

No	Desa/Kelurahan	Tipologi
24	KARAMBUA	Persawahan
25	KANAWATU	Persawahan
26	MARAMBA	Persawahan
27	TARENGGE	Perladangan
28	CENDANA HIJAU	Perladangan
29	BALOBALO	Pesisir/Nelayan
30	PEPURO BARAT	Perladangan
31	RINJANI	Peternakan
32	TARENGGE TIMUR	Persawahan
33	MADANI	Persawahan
34	TABAROGE	Perladangan
35	TADULAKO	Perladangan
36	BANGUN KARYA	Persawahan
37	LESTARI	Persawahan
38	BAYONDO	Perladangan
39	BERINGIN JAYA	Perladangan
40	MANDIRI	Perladangan
41	SUMBER ALAM	Perladangan
42	UJUNG BARU	Kehutanan
43	KALPATARU	Perladangan
44	TOMONI	Perindustrian/Jasa
45	BANGUN JAYA	Persawahan
46	MULYA SARI	Persawahan
47	RANTE MARIO	Peternakan
48	MANUNGGAL	Persawahan
49	ALAM BUANA	Peternakan
50	CENDANA HITAM	Persawahan
51	KERTORAHARJO	Persawahan
52	MARGOMULYO	Persawahan
53	PURWOSARI	Persawahan
54	PATTENGKO	Persawahan
55	CENDANA HITAM TIMUR	Persawahan
56	MALIWOWO	Pesisir/Nelayan
57	TAMPINNA	Pesisir/Nelayan
58	LAMAETO	Perladangan
59	SOLO	Perladangan
60	TAWAKUA	Perladangan
61	BALIREJO	Perladangan
62	MANTADULU	Perladangan
63	TARIPA	Persawahan
64	WATANGPANUA	Perladangan
65	WANASARI	Persawahan

No	Desa/Kelurahan	Tipologi
66	HARAPAN	Pesisir/Nelayan
67	PONGKERU	Kehutanan
68	LASKAP	Kehutanan
69	PUNCUK INDAH	Perindustrian/Jasa
70	MALILI	Perindustrian/Jasa
71	WEWANG RIU	Pesisir/Nelayan
72	BALANTANG	Pesisir/Nelayan
73	BARUGA	Pesisir/Nelayan
74	USSU	Pesisir/Nelayan
75	ATUE	Perladangan
76	MANURUNG	Kehutanan
77	LAKAWALI	Perladangan
78	TARABBI	Perladangan
79	PASIPASI	Pesisir/Nelayan
80	LAKAWALI PANTAI	Pesisir/Nelayan
81	TOKALIMBO	Perladangan
82	BANTILANG	Perladangan
83	LOEHA	Perladangan
84	TIMAMPU	Kehutanan
85	LANGKAE ARAYA	Pertambangan
86	BARUGA	Pertambangan
87	LIOKA	Persawahan
88	WAWONDULA	Pertambangan
89	PEKALOA	Persawahan
90	ASULI	Pertambangan
91	MAHALONA	Persawahan
92	MASIKU	Perladangan
93	RANTE ANGIN	Perladangan
94	MATOMPI	Persawahan
95	TOLE	Persawahan
96	BUANGIN	Perladangan
97	KALOSI	Kehutanan
98	LIBUKAN MANDIRI	Peternakan
99	SOROWAKO	Pertambangan
100	NEKKEL	Pertambangan
101	MAGANI	Pertambangan
102	MATANO	Kehutanan
103	NUHA	Persawahan
104	BALAMBANO	Perladangan
105	TABARANO	Perladangan
106	LEDU LEDU	Persawahan
107	WASUPONDA	Perladangan

No	Desa/Kelurahan	Tipologi
108	KAWATA	Kehutanan
109	PARUMPANAI	Kehutanan
110	BALAI KEMBANG	Perladangan
111	MANGGALA	Persawahan
112	WONOREJO	Persawahan
113	MALEKU	Persawahan
114	PANCA KARSA	Perladangan
115	MARGOLEMBO	Persawahan
116	KASINTUWU	Perladangan
117	TEROMU	Persawahan
118	SINDU AGUNG	Persawahan
119	WONOREJO TIMUR	Peternakan
120	KORONCIA	Persawahan
121	ARGOMULYO	Persawahan
122	SUMBER AGUNG	Persawahan
123	PERTASI KENCANA	Perladangan
124	KALAENA KIRI	Persawahan
125	NON BLOK	Persawahan
126	SUMBER MAKMUR	Peternakan
127	MEKAR SARI	Peternakan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan data diatas tipologi desa dikelompokkan dalam tujuh tipologi yaitu perladangan 45 desa, kemudian urutan kedua persawahan sebanyak 40 desa, urutan ketiga desa pesisir nelayan sebanyak 17 desa, kemudian kehutanan sebanyak 9 desa, pertambangan sebanyak 7 desa, peternakan sebanyak 6 desa dan yang paling sedikit perindustrian/jasa sebanyak 3 desa.

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik merupakan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibanding jumlah seluruh pemerintahan desa, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 194 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa	Unit	124	124	124	124	124

	yang baik						
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	Unit	124	124	124	124	124
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

2. Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata- Rata Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 195 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM		127	127	127	127	127
2	Jumlah LPM		127	127	127	127	127
3	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM		1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

LPM sebagai mitra Pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dengan system partisipasi dalam pembangunan mempunyai peran. Ini membantu pemdes/pemkel dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan asset desa/kelurahan. Menyelenggarakan swadaya gotong royong serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan LPM juga memiliki fungsi :

a. Penunjang dan penyalur aspirassi masyarakat dalam pembangunan
b. Meningkatkan kwalitas dan percepatan pelayanan pembangunan dalam masyarakat
c. Menumbuhkembangkan dan penggerak penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong
d. Menggali dan mendayagunakan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
e. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuanmasyarakat dalam rangka memp[erkokoh NKRI .

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

a. Peningkatan pelayanan maasyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
c. Pengembangan kemitraan
d. Pembangunan masyarakat
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 196 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 S.d 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK		340	350	365	365	365
2	Jumlah PKK		127	127	127	127	127
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		2,67	2,75	2,87	2,87	2,87

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

4. Persentasi PKK Aktif

Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu timur cukup baik karena adanya dukungan peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak PPK Kabupaten/Kecamatan/Desa untuk melakukan fungsinya dan pelaksanaan agenda kerja. Persentasi PKK Aktif di Kab. Luwu Timur selanjutnya disajikan sebagai berikut.seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 197 Persentase PKK Aktif
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	Klp	139	139	139	139	139
2	Jumlah PKK	Klp	139	139	139	139	139
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan dengan pemberian Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan lain desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 198 Jumlah Bantuan Keuangan Desa

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Jenis Bantuan	2016	2017	2018	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Alokasi Dana Desa	68,920,000,000	69,900,100,000	64,588,000,000	68,418,500,000	67,280,000,000
Bagi Hasil Pajak	812,749,780.56	8,726,296,450.14	13,981,185,000		16,843,320,838
Bagi Hasil retribusi	9,516,406.36	623,113,147.84	623,485,000		418,781,131
Jumlah	69,742,266,186.92	79,249,509,597.98	79,192,670,000.00	68,418,500,000.00	84,542,101,969.00

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada desa berupa alokasi dana desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Bagi hasil Retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi daerah.

Sarana prasarana perkantoran desa sangat mendukung dalam kelancaran menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat. Belum semua kondisi kantor desa dalam kondisi baik tetapi sudah sebagian besar dalam kondisi baik, karena tidak ada yang rusak berat hanya sedang dan rusak ringan. Kondisi kantor desa dapat diketahui dalam tabel berikut;

Tabel 2. 199 Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak Ringan
1	Mangkutana	11		

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak Ringan
2	Nuha	4		
3	Towuti	10	7	1
4	Malili	11	3	
5	Angkona	10		
6	Wotu	14	2	
7	Burau	14	4	
8	Tomoni	12		
9	Tomoni Timur	8		
10	Kalaena	6	1	
11	Wasuponda	6		
Jumlah		106	17	1

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk (LPP/*Growth Rate of Population*) adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Manfaat Laju pertumbuhan penduduk untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, LPP>0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPP<0 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah

perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. Migrasi penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bias menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 200 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,05	1,66	1,63	1,99	1,99

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada tabel diatas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang diartikan bahwa berhasil menekan laju pertumbuhan lewat program keluarga berencana, namun pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 naik sekitar 0,36 persen disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Migrasi (pencari kerja / tenaga Kerja), kelahiran, kematian dan meningkatnya angka harapan hidup rata-rata diumur 70 Tahun.

2. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Total fertility rate (TFR) di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 201 Total Fertility Rate (TFR)

Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR) Total Angka Kelahiran	%	2,76	2,31	2,21	2,21	2,21

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

TFR Luwu Timur Tahun 2017 mengalami penurunan Tahun 2016 sebesar 2,76 dari hasil survey SDKI 2012 oleh BPS pada tahun 2017 sebesar 2,31 ini dikarenakan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB di tahun 2018 menurun menjadi 2,21 dan stagnan tahun 2019 sampai tahun 2020 ini disebabkan belum dilakukan survey oleh BPS dan survey berikutnya baru dilaksanakan pada tahun 2022.

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB adalah program nasional yang digagas oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat terutama wilayah yang berada di pesisir, kumuh, tertinggal, perbatasan, terpencil, pesisir, padat penduduk, kesertaan ber-KB masih rendah DAS (Daerah Aliran Sungai).

Tabel 2. 202 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	0	5	9	9	9
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	16	16	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	0	31,25	32,14	32,14	32,14

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah kampung KB yang sudah dibentuk di Luwu Timur sebanyak 24 yang tersebar di 11 kecamatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB selain program keluarga berencana, intervensi lintas sektor sangat diharapkan sesuai dengan program kegiatan yang ada di OPD. Persentase

perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah Kampung KB di tahun 2017 5 OPD dari 16 OPD (31,25 persen) dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 9 OPD (32,14 persen) tergambar seolah-olah stagnan, tetapi sebenarnya meningkat karena jumlah OPD mulai tahun 2018 sebanyak 28 OPD.

4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel 2. 203 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	OPD	0	0	0	0	0
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	16	16	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk 0% hal ini disebabkan oleh dokumen rancangan induk pengendalian penduduk rencana dialokasikan di tahun anggaran 2022.

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

Tabel 2. 204 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas	Perda/Perkada	0	0	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	dan kualitas penduduk						

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 sampai tahun 2017 Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk masih dalam bentuk surat keputusan, namun pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan digunakan untuk melayani masyarakat yang ingin ber-KB sehingga dapat menekan jumlah/Kuantitas penduduk.

6. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Tabel 2. 205 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah masih sangat rendah bahkan stagnan dari tahun 2016 s/d 2020 dan hal ini disebabkan oleh baru 4 sektor ini yang memiliki kaitan yang erat dalam program kegiatannya melakukan pelayanan langsung kepada penduduk (masyarakat). Hal ini juga dikarenakan GDPK (grand desain program kependudukan baru akan disusun pada tahun 2022. Empat sektor yang dimaksud adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Kesehatan
4. Badan Perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah

7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Tabel 2. 206 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan di tahun 2019 dan di tahun 2020 masih 1, ini dikarenakan Dinas P2KB fokus melakukan pembinaan pada 1 sekolah yang sudah terbentuk SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) yaitu di kecamatan Angkona.

8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di Kabupaten Luwu Timur rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 orang, hal ini berarti program Keluarga Berencana telah dapat menekan angka kelahiran.

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 207 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	Jiwa	127.251	121.821	120.407	134.468	154.638
2	Jumlah keluarga	KK	66.353	69.073	69.988	70.058	75.510
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

9. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kab Luwu Timur, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 208 Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2020
Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	43.098	45.004	45.047	44.971	44.679
2	Jumlah Peserta KB Aktif	Pasangan	33.277	33.523	32.224	33.227	32.381
3	Rasio Akseptor KB	%	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Secara nasional rasio peserta KB aktif di suatu wilayah adalah 65 persen itu dapat dikatakan sudah wajar sementara Kabupaten Luwu Timur capaian peserta KB setiap tahunnya diatas rasio nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan melibatkan semua mitra dan intervensi anggaran dari APBD untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana.

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 209 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB	Jiwa	33.277	33.523	32.224	33.227	32.381

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	aktif						
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	43.098	45.004	45.047	44.971	44.679
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukan persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan usia 15-49 di Kabupaten Luwu Timur lima tahun terakhir mengalami capaian yang fluktuatif, hal ini terlihat dari capaian tertinggi pada tahun 2016 yakni sebesar 77,21 persen dan yang terendah pada tahun 2018 yakni sebesar 71,89 persen namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 73,89% dan mengalami penurunan di Tahun 2020 yakni sebesar 72,47 persen.

Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan angka CPR tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perencanaan keluarga termasuk manfaat kontrasepsi, mitos bahwa KB memiliki efek buruk bagi kesehatan perempuan dan juga hambatan layanan kontrasepsi selama masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian capaian tersebut telah melebihi target yang dibebankan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yakni sebesar 54,59 persen di Tahun 2020.

11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun.

Tabel 2. 210 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	Jiwa	-	1.027	916	1.343	-
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	-	45.004	45.047	44.971	-
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	Tidak Melakukan Pendataan	2,28	2,03	2,98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Secara umum Wanita dinyatakan subur pada umur 15 sampai dengan 49 tahun yang sudah dan masih haid, dalam program keluarga berencana Pasangan Usia subur (PUS) dibagi dalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu, (a) kelompok umur 15-19 tahun, (b) kelompok umur 20-29 tahun dan (c) kelompok umur 30-49 tahun.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 nihil, karena secara nasional tidak melakukan pendataan karena pendataan telah dilakukan pada tahun 2015 dan pendataan baru dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dan tahun 2020 tidak lagi dilakukan pendataan karena pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia.

Pada tahun 2017 persentase PUS yang umur istrinya dibawah 20 tahun sebesar 2,28 persen kemudian tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,03 persen, hal ini dikarenakan telah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 2,98 persen hal ini disebabkan karena masih ada remaja yang belum mengetahui dampak yang ditimbulkan bila melakukan pernikahan di usia yang masih muda, besarnya pengaruh media sosial dan masih ada tradisi di masyarakat yang menikahkan anak yang masih dibawah umur.

12. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Unmet Need merupakan presentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dan dikalikan 100%.

Faktor yang mempengaruhi cakupan *unmet need* antara lain: Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan;) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan; serta Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Capaian kinerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 211 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	5.068	5.955	6.691	6.377	6.976

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	43.098	45.004	45.047	44.971	44.679
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Target *Unmet Need* secara nasional di angka 8 persen tetapi kenyataan di Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai 15,61, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan Pasangan Usia Subur (PUS) dan adanya peserta KB Aktif yang umurnya sudah diatas 45 Tahun berhenti dalam kepesertaan ber-KB dan juga ada Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah umur 45 Tahun keatas tidak mau lagi memakai alat kontrasepsi.

13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan. MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender, utamanya dalam meningkatkan kesertaan MKJP laki-laki di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 212 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	10.583	10.593	10.752	11.150	11.160
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	43.098	45.004	45.047	44.971	44.679
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka	%	24.55	23.54	23.86	24.79	24.98

	Panjang (MKJP)						

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir minat masyarakat semakin meningkat pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yakni sebesar 23,54 persen di tahun 2017, selanjutnya meningkat di tahun 2018 sebesar 23,86 persen, begitu pula di tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 24,79 persen dan di tahun 2020 juga meningkat sebesar 24,98 persen. Terjadinya peningkatan pengguna MKJP ini tidak terlepas dari KIE yang secara berkesinambungan dilakukan oleh PKB/PLKB, Kader dan Bidan terutama kepada akseptor pengguna Non MKJP. Selain itu juga gencar dilakukan Bakti Sosial MKJP yang dilaksanakan di Kecamatan.

14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Capain kinerja, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 213 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jiwa	9.833	11.481	11.338	11.734	12.300
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	33.271	33.550	30.465	33.237	32.381
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	29.55	34.22	37.21	26.66	37.98

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan capaian kinerja terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi (*Drop Out*) di setiap tahunnya meningkat yang

seharusnya menurun persentasenya, hal ini diakibatkan oleh masih tingginya peserta KB pengguna non MKJP, Pasangan Usia Subur (PUS) berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena program anak kedua.

15. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Capain kinerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 214 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus PUS	Jiwa	3.650	3.774	4.002	4.104	3.955
2	Jumlah PUS anggota Kelompok Kegiatan yg menjadi Peserta KB	Jiwa	3.227	3.280	3.391	3.449	3.160
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	88.41	86.91	84.73	84.04	79.90

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Terlihat dari tabel, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,13 persen. Namun setelah tahun 2018 sampai tahun 2020 terlihat cakupan anggota BKB yang ikut program KB semakin meningkat walaupun tidak signifikan. Ini disebabkan salah satunya oleh peran kader yang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi belum maksimal dalam hal meningkatkan kesertaan ber KB anggota kelompok kegiatan.

16. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat.

Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.

Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di pada kurun waktu 2015 hingga 2020 masih fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Olehnya itu, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kesertaan ber-KB bagi anggota BKR dengan melakukan sosialisasi yang kontinyu oleh PLKB kepada seluruh keluarga BKR di Kab. Luwu Timur, selengkapnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 215 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jiwa	2.854	3.298	3.320	3.180	3.020
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Jiwa	2.332	2.720	2.734	2.611	2.577
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	81.71	82.47	82.35	82.11	85.33

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tahun ke tahun terlihat cakupan anggota BKR yang ikut program KB semakin meningkat walaupun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 2,59 persen, hal Ini disebabkan salah satunya oleh peran kader yang aktif melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam meningkatkan kepesertaan ber-KB anggota kelompok kegiatan BKR.

17. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Pada kurun waktu

2015 hingga 2019 kesertaan ber KB keluarga yang mempunyai lansia yang tergabung dalam kelompok BKL mengalami peningkatan, dan diharapkan angka ini semakin meningkat di tahun mendatang. Sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL masih harus dioptimalkan, selengkapnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 216 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jiwa	1.962	2.026	2.150	1.759	1.749
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Jiwa	1.740	1.733	1.833	1.427	1.420
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	88.69	85.54	85.26	81.13	81.19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Terlihat dari tabel, cakupan anggota BKL yang ikut program KB pada tahun 2018 menurun. Hal ini disebabkan oleh PUS peserta KB sebagian ada yang keluar dari kesertaan ber-KB karena ingin merencanakan anak kedua. Walaupun demikian, pemberian KIE tetap dilakukan secara maksimal oleh petugas lini lapangan. Sehingga di tahun 2019 dan 2020 cakupan PUS ber-KB anggota kelompok kegiatan kembali meningkat, walaupun kecil persentase peningkatannya.

18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal : 1. Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, 2. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, 3. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), 4. Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, 5. Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar tetap produktif. 6. Masalah kesehatan reproduksi, 7. Konsultasi kewirausahaan, dan8.Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kab. Luwu Timur, selengkapnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 217 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	Klp	0	0	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	Kec	0	0	11	11	11
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

PPKS merupakan program yang selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan namun kembali digaungkan pada tahun 2015. Dalam melaksanakan program ini, ditemukan beberapa kendala sehingga sulit untuk membentuk PPKS di setiap kecamatan, dimana syarat utama pembentukan PPKS adalah memiliki sarana prasarana untuk menunjang program ini. Selama beberapa tahun ini hanya satu PPKS yang memiliki sarana prasarana yang dianggap memadai yaitu di PPKS Batara Guru di Kecamatan Malili. Pembentukan PPKS di kecamatan lain masih diupayakan agar PPKS dapat terbentuk di 11 kecamatan se Kabupaten Luwu Timur.

19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2. 218 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	46	49	46	49	48
2	Jumlah kecamatan	11	11	11	11	11
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	418.18	445.45	418.18	445.55	436.36

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) merupakan suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan dan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja. Kelompok PIK Remaja yang terbentuk ada yang berbasis Formal/Pendidikan dan Non Formal/Masyarakat.

Cakupan Remaja dalam PIK Remaja cukup tinggi disebabkan jumlah Kelompok PIK Remaja yang rata – rata dibentuk di setiap SMP dan SMA sederajat untuk pendidikan formal dan di masyarakat untuk non formal.

20. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.

Cakupan PKB dan PLKB didayagunakan oleh OPD KB setiap tahunnya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga PKL/PLKB yang ada. Penurunan jumlah tenaga PKB/PLKB karena ada beberapa yang meninggal dunia dan pensiun.

Tabel 2. 219 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Jiwa	115	115	114	114	112
2	Jumlah PKB/PLKB	Jiwa	115	115	114	114	112
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

21. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya reward pemerintah kepada penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi : pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelompok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 220 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Jiwa	43.098	45.004	45.047	44.971	44.679
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jiwa	444	422	396	385	385
3	Cakupan PUS peserta KB dan (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	1.03	0.94	0.88	0.86	0.86

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB Mandiri pada kelompok UPPKS presentasenya mengalami penurunan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap tahunnya dikarenakan oleh alat dan obat kontrasepsi saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat.

22. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Beberapa faktor pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 221 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	Jiwa	127	127	127	127	127

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	127	127	127	127	127
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah PPKBD di Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan wilayah, setiap desa telah memiliki 1 orang PPKBD yang membantu PKB/PLKB dalam melaksanakan program Bangga Kencana.

23. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Tabel 2. 222 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alokon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alokon kab/kota	Jiwa	33.277	33.523	32.224	33.227	32.381
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	Jiwa	27.251	27.654	25.032	24.036	28.464
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	%	122.11	121.22	128.73	138.24	113.76

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukan tingkat ketersediaan *alokon* di gudang kabupaten terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bahkan tingkat ketersediaan tersebut rata-rata diatas angka 100 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terhambatnya layanan kontrasepsi selama pandemi (Covid-19).

24. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai satandarisasi pelayanan, akan berdampak pada

peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Untuk ke depannya diharapkan seluruh faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 223 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	17	17	19	21	21
2	Jumlah Faskes dan jejaring	17	17	19	21	21
3	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, terjadinya penambahan jumlah faskes Layanan KBKR yang bekerjasama dengan BPJS sebanyak 4 faskes sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan KBKR semakin meningkat dan merupakan perhatian pemerintah agar lebih memudahkan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan KBKR.

25. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2. 224 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Data	-	12	18	18	-
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Data	-	12	18	18	-
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	Tidak Melakukan Pendataan	100	100	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa yaitu pada tahun 2017 terdapat 12 data mikro dan di tahun 2018 dan 2019 terdapat 8 data mikro atau capaian 100 persen. hal ini dapat dicapai karena dalam pengumpulan data di lapangan melibatkan institusi masyarakat desa (Kader KB) yang setiap dusun terdapat 1 orang kader. Pada tahun 2016 data ini tidak tersedia karena menggunakan hasil pengumpulan data tahun 2015. Tahun 2020 juga tidak dapat menyediakan data atau melakukan pengumpulan data disebabkan Covid-19.

26. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2. 225 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	KLP	185	129	186	218	239
2	Jumlah kelompok kegiatan	KLP	319	347	356	347	336
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	57.99	37.18	52.25	62.82	71.13

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Gerbang untuk menuju Keluarga Sejahtera adalah dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga. Implementasi 8 fungsi keluarga bertujuan menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja. Selain itu 8 fungsi keluarga tersebut sebagai upaya melestarikan lingkungan yakni untuk hidup dinamis secara serasi, selaras dan seimbang dengan alam.

Dari tabel terlihat dari tahun ke tahun kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi semakin meningkat karena di setiap pertemuan kelompok dan kegiatan penyuluhan KB selalu disisipkan 8 fungsi keluarga agar keluarga benar – benar menerapkan fungsi ini di keluarganya masing – masing.

27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. 226 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jiwa	2.222	2.448	2.368	2.730	2.368
2	Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Jiwa	10.447	11.631	10.403	10.791	10.874
3	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	21.27	21.05	22.76	25.29	21.77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pola asuh merupakan faktor yang terkait langsung dengan perkembangan anak dan tidak kalah penting dari pendidikan di sekolah bagi keberhasilan perkembangan seorang anak. Orang tua adalah guru terbaik bagi setiap anak, karena anak – anak belajar nilai – nilai sosial dan moralitas dari orang tua. Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan Indonesia lebih maju oleh karena itu, keluarga harus memperhatikan pola asuh anak dan memberikan kebutuhan kasih sayang dan cinta.

Terlihat dari tabel diatas terjadi peningkatan keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang berarti bahwa keluarga semakin memahami akan pentingnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

28. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel 2. 227 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun**				
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	18	18	19	19	19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan undang-undang perkawinan usia wanita dibolehkan atau dilayani

pencatatan pernikahannya adalah umur 17 Tahun. Karena dari segi umur sudah dewasa namun dari segi Kesehatan mental dan segi ekonomi belum bisa dinyatakan siap dan banyak terjadi kasus perceraian diakibatkan oleh terjadinya pernikahan dini. Selama 5 tahun terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melaksanakan program kegiatan Penyuluhan di PIK Remaja sekolah SMP, Kegiatan Pedewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga dari tahun 2016 sampai dengan 2017 rata rata UKP 18 tahun, di tahun 2018 sampai dengan 2020 Usia Kawin Pertama (UKP) meningkat menjadi 19 tahun dari target rata-rata pada umur 21 tahun.

29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2. 228 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0068	0,0088	0,0058	0,0061	0,0058

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pembiayaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung keberhasilan program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kabupaten Luwu Timur, namun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan anggaran mengalami *refocusing*.

2.3.2.9 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2. 229 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun 2016– 2020

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	112.155	113.426	141.090	277.291	209.996
2	Jumlah penumpang Kereta Api	Orang	0	0	0	0	0
3	Jumlah penumpang Kapal Laut	Orang	0	0	0	0	0
4	Jumlah penumpang Pesawat udara	Orang	16.712	17.060	23.712	22.934	6.018
5	Jumlah Penumpang Kapal di Danau	Orang	131.000	143.129	135.425	76.733	37.782
	Total jumlah penumpang	**Orang**	**259.867**	**273.615**	**300.227**	**376.958**	**253.796**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Jumlah penumpang umum yang menggunakan angkutan darat, danau dan udara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Di sektor angkutan darat dan udara, akibat urbaninasi ke kota – kota seperti Makassar, Palopo, Bone dan Toraja karena alasan pendidikan, ekonomi, wisata dan sosial menyebabkan peningkatan pergerakan orang. Selain itu dipengaruhi pula peningkatan jumlah armada dan kualitas layanan bus / MPU serta penambahan frekuensi penerbangan dan dibukanya *seat* untuk penumpang umum di Bandar Udara Soroawako.

Di sektor angkutan danau, peningkatan dan penurunan jumlah penumpang lebih dipengaruhi oleh persoalan ekonomi. Melambungnya harga merica / lada tahun 2016 – 2018 menyebabkan tingginya aktivitas masyarakat menyeberang menggunakan kapal di Danau Matano dan Danau Towuti. Namun pada tahun 2019 harga merica anjlog drastis mempengaruhi menurunnya pergerakan penumpang dan barang di kedua danau tersebut.

Tahun 2020 merebak Virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan adanya pembatasan pergerakan orang, mengakibatkan jumlah penumpang di semua sektor angkutan menurun drastis. Sektor angkutan udara merupakan sektor yang sangat terdampak. Hal ini disebabkan adanya penghentian penerbangan selama beberapa bulan dan ketatnya aturan kesehatan untuk bisa menggunakan pesawat.

2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 230 Rasio Ijin Trayek
Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin trayek perkotaan	Ijin	0	0	0	0	0
2	Izin trayek pedesaan	Ijin	140	40	26	43	33
3	Jumlah izin trayek	Ijin	140	40	26	43	33
4	Jumlah penduduk	Orang	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
5	Rasio Izin Trayek		0,00048	0,00014	0,00009	0,00014	0,00011

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio ijin trayek mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah angkutan pedesaan / perkotaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dari tahun 2016 sampai 2020 terjadi penurunan jumlah angkutan desa / perkotaan akibat meningkatnya kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas jarak dekat serta kalah bersaing dengan angkutan sewa roda 2 (ojek).

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 231 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%
1	Mobil penumpang umum	185	129	69,73	185	67	36,22	190	63	33,16	198	64	32,32	198	70	35,35
2	Mobil Bus	110	109	99,09	117	91	77,78	130	124	95,38	145	145	100	186	183	98,39
3	Mobil Barang	1428	1094	76,61	1435	1300	90,59	1520	1457	95,86	1545	1480	95,79	1623	1612	99,32
4	Truck Sumbu II	515	510	99,03	517	455	88,01	543	469	86,37	563	526	93,43	587	556	94,72
5	Truk Sumbu III	185	180	97,30	188	184	97,87	193	189	97,93	199	190	95,48	213	219	102,82
6	Jumlah	2423	2022	83,45	2442	2097	85,87	2576	2302	89,36	2650	2405	90,75	2807	2640	94,05

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan / penggunaan kendaraan usaha khususnya mobil barang jenis pick up dan truk sumbu II. Agar pemilik kendaraan patuh melakukan pemeriksaan kendaraan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, maka petugas Dinas Perhubungan secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan di jalan dan terminal bersama petugas kepolisian.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Luwu Timur yaitu, pelabuhan Lampia (kewenangan pusat), pelabuhan Malili (kewenangan provinsi), pelabuhan Wotu (kewenangan Kabupaten). Pelabuhan udara sebanyak 1 yaitu Bandara udara Soroako. Kedepannya akan dibangun bandara Di Kec. Maliwowo untuk mendukung pengembangan pariwisata, dan aspek ekonomi lainnya. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 232 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kab. Luwu Timur Tahun 2016– 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
2	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Terminal Bis	2	2	3	3	3
4	Jumlah Dermaga	7	7	7	8	8
4	Jumlah	13	13	14	15	15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah infrastruktur perhubungan di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2020. Di sektor perhubungan darat, terdapat 3 terminal angkutan yaitu di Malili (Bunker), Tomoni dan Wawondula. Sedangkan untuk pengembangan terminal sedang dipersiapkan pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Baru Malili (dekat Pasar Niaga). Untuk pelabuhan penyebarangan sampai akhir tahun 2020 terdapat 8 dermaga yang beroperasi, yang terdiri dari 4 dermaga konstruksi beton dan 4 dermaga konstruksi kayu.

Di sektor Perhubungan Laut terdapat 3 jenis pelabuhan umum yang beroperasi yaitu Pelabuhan Pengumpul Regional di Waru – Waru Desa Harapan Malili, Pelabuhan Pengumpan Regional di Sungai Malili Desa Balantang, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Wotu. Di sektor perhubungan udara terdapat satu bandar udara khusus milik PT. Vale Indonesia Tbk yang juga melayani penumpang umum. Untuk tahap pengembangan layanan penerbangan maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

melakukan penyiapan dokumen teknis Pembangunan Bandar Udara Baru dengan spesifikasi panjang runway 1.600 meter untuk pesawat jenis ATR 72 di Maliwowo Kecamatan Angkona.

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2. 233 Persentase Layanan Angkutan Darat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	Bis	295	302	320	343	384
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	112.155	113.426	141.090	277.291	209.996
3	Persentase layanan angkutan darat	%	0,263	0,266	0,227	0,124	0,183

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penumpang dan jumlah angkutan darat. Angkutan darat yang dimaksud adalah angkutan desa/kota (dalam kabupaten) dan AKDP (bus besar 30 seat, bus sedang 24 seat, bus kecil 19 seat dan MPU) dengan trayek utama ke Makassar, Bone, Sidrap, Toraja dan Palopo. Terdapat penurunan penggunaan angkutan desa / kota dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, namun ada kenaikan penggunaan kendaraan AKDP. Pada 2 tahun awal (2016-2017) terdapat kenaikan persentase layanan angkutan, namun pada 3 tahun berikutnya (2018-2020) persentasenya menurun disebabkan tingginya penumpang angkutan darat tidak diimbangi dengan penambahan angkutan darat.

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2. 234 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	401	345	274	245	167
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	Unit	2.423	2.442	2.576	2.650	2.807
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	16,55	14,13	10,64	9,25	5,95

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur menargetkan menurunkan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum, dengan secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan angkutan (di jalan dan terminal) bersama petugas kepolisian dan meningkatkan layanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan wajib uji yang tidak diuji sebanyak 401 unit dan pada tahun 2020 telah menurun menjadi 167 unit. Hampir sebagian besar kendaraan yang tidak dapat diuji pada tahun 2020 disebabkan karena kendaraan tersebut sedang / sudah tidak bisa beroperasi (rusak) atau telah pindah keluar Kabupaten Luwu Timur.

7. Pemasangan Rambu Rambu Jalan

Tabel 2. 235 Presentase Pemasangan Rambu-rambu Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	20.269	25.806	46.113	46.155	46.121
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	20.269	25.806	46.113	46.155	46.121
3	Pemasangan Rambu rambu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 236 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	Km	1.889,273	1.889,273	1.889,273	1.889,273	1.889,273
2	Jumlah Kendaraan	Unit	33.221	28.080	30.353	33.192	30.393

3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	17,58	14,86	16,07	17,57	16,09

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai 2020 berada di angka 14 – 17, yang artinya bahwa setiap 1 Km jalan kabupaten melayani 14-17 kendaraan. Setiap 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan motor. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Luwu Timur masih jauh dari kepadatan.

9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 237 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang	Orang	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241
2.	Jumlah Barang	Ton	300.227	376.958	290.241	290.241	253.796

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 238 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga /Bandara/ Terminal Per Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga	131.000	47.237	143.129	48.118	135.425	39.753	76.733	26.600	37.782	13.001
2.	Bandara	16.712	182.902	17.060	161.174	23.712	161.174	22.934	28.182	6.018	84.923
3.	Terminal	112.155	20.387	113.426	21.458	141.090	21.458	277.291	55.459	209.996	41.099
Jumlah		259.867	250.526	273.615	230.750	300.227	222.385	376.958	290.241	253.796	139.023

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada Tahun 2016 – 2019 Jumlah penumpang dan barang yang diangkut menggunakan moda transportasi di darat, laut dan udara di Kabupaten Luwu Timur, mengalami peningkatan. Penumpang yang didata menggunakan angkutan kapal melalui dermaga penyeberangan di danau, pesawat udara dan angktuan darat di terminal. Begitu juga dengan barang, namun ada penambahan pendataan barang yang melalui pelabuhan umum dan khusus. Namun pada tahun 2020 merebak Virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia menerapkan banyak langkah – langkah penanganan. Penanganan penyebaran Virus Corona sektor transportasi dilakukan dengan caran pembatasan/penundaan keberangkatan angkutan, pengetatan naik angkutan dan penyekatan jalan. Hal ini berdampak pada menurunnya arus jumlah penumpang dan barang di seluruh wilayah indonesia termasuk Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 239 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor	Unit	30.265	25.330	27.316	29.645	26.586
2	Mobil Penumpang Bukan Umum	Unit	261	237	273	371	369
3	Minibus Umum	Unit	190	139	126	110	82
4	Bus Umum	Unit	68	54	68	83	73
5	Bus Bukan Umum	Unit	99	110	81	105	136
6	Pick up Umum	Unit	8	6	7	8	7
7	Pick up Bukan Umum	Unit	1.608	1.543	1.769	2.052	2.316
8	Truck Umum	Unit	209	197	209	171	142
9	Truck Bukan Umum	Unit	513	464	504	647	682
	JUMLAH	Unit	33.221	28.080	30.353	33.192	30.393

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan data kantor Samsat Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2016 sampai 2019 terdapat peningkatan kepemilikan kendaraan dengan alamat STNK Kabupaten Luwu Timur khususnya kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dengan dipermudahnya persyaratan kepemilikan kendaraan oleh perusahaan ATPM

yang ditopang perusahaan jasa *Leasing*, maka masyarakat semakin banyak yang membeli kendaraan bermotor. Semakin majunya sektor jasa, pertanian / perkebunan dan perdagangan di Kabupaten Luwu Timur menyebabkan meningkatnya pembelian kendaraan angkutan barang (pick up / truk) dan angkutan penumpang jenis bus berplat hitam. Bus ini banyak digunakan oleh swasta untuk operasional perusahaan atau dipersewakan (rental).

Bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi (mobil dan motor) serta maraknya jasa ojek dan mobil rental berdampak pada menurunnya pemggunaan kendaraan angkutan umum dengan trayek pendek atau menegah. Jumlah angkutan desa dan angkutan kota semakin berkurang begitupun dengan bus jenis microbus dengan trayek tidak sampai kota Makassar.

Di tahun 2020 wabah virus corona -19 merebak, menyebabkan turunnya perkonomian masyarakat dan negara meskipun tidak berlangsung lama. Hal ini berimbas penurunan pembelian kendaraan angkutan jenis motor roda 2 dan mobil pribadi. Sedangkan untuk kendaraan angkutan barang jenis pick up dan truck angka pembeliannya cenderung stabil.

Tabel 2. 240 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	kejadian Kecelakaan lalu lintas				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	267	308	252	213	206
2	Kerugian Materiil	Rupiah	550.100.000	839.200.000	497.500.000	461.950.000	373.950.000
3	Jumlah Korban	Orang	267	490	496	375	352
4	Meninggal	Orang	46	50	54	42	45
5	Luka Berat	Orang	8	11	14	0	1
6	Luka Ringan	Orang	213	429	428	333	306

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dan POLRES Luwu Timur, 2021

Di tahun 2016 sampai 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah mengoperasikan sejumlah fasilitas keselamatan di jalan – jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Fasiltias tersebut terdiri dari Warning Light 32 titik, rambu – rambu 985 unit, traffic light 4 titik, marka jalan 150.710 meter, RPPJ 46 unit, guard rail 235 meter dan halte 23 unit. Pengoperasian fasiltias keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan berkendara dan keselamatan pengguna jalan. Pada tabel 2.240 ditampilkan kejadian kecelakan lalu lintas dan korban orang / materil dari tahun 2016 – 2020. Terdapat penurunan yang sangat kecil jumlah kejadian

kecelakaan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena rata – rata kejadia kecelakaan tersebut terjadi di jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tabel 2. 241 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan KabupatenLuwu Timur Tahun 2016-2020

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rambu-rambu lalu lintas	949	985	985	985	985	buah
2	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	46	46	46	46	46	buah
3	Cermin tikungan	6	6	6	6	6	buah
4	Marka jalan	14.52100	150.710	150.710	150.710	150.710	m^2
5	Traffic light (APILL)	3	3	3	4	4	unit
6	Warning Light	26	32	32	32	32	unit
7	Guard rail (pagar pengaman)	235	235	235	235	235	meter
8	Halte	21	21	21	23	23	unit
9	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	0	titik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Tabel 2. 242 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	-	80,74	82,44	83,73	85,14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Merujuk pada data tabel diatas, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon seluler mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukan

bahwa akses jaringan yang disediakan oleh *provider* telah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik yang di Perkotaan maupun di Pedesaan. Dari tabel di atas juga kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan Hp/Telepon seluler menandakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Berkaitan dengan Indikator Penduduk yang menggunakan HP/Telepon seluler ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan penggunaan HP/Telepon bagi masyarakat, yakni salah satunya adalah kerjasama dengan pihak *Provider*.

Tak bisa dipungkiri bahwa peran pihak *Provider* dalam usaha penyediaan jaringan sangat vital mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jaringan sangat besar sehingga perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak *Provider* untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Adapun kendala yang dihadapi dalam usaha peningkatan penggunaan HP/Telepon di Kabupaten Luwu Timur yakni akses ke beberapa wilayah/desa yang masih sulit, infrastruktur pendukung seperti listrik di beberapa desa juga belum memadai dan jumlah penduduk yang relatif sedikit di beberapa desa sehingga membuat pihak *provider* tidak membangun infrastruktur telekomunikasi dengan alasan profit.

2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2. 243 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	-	29,13	33,07	43,93	53,44

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan peningkatan penduduk yang menggunakan HP/Telepon meskipun jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Internet persentasenya lebih kecil dibanding dengan Jumlah Penduduk yang menggunakan Hp/Telepon. Dari tabel diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa peningkatan proporsi rumah tangga yang menggunakan akses internet dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang disediakan oleh pihak *provider* maupun disediakan oleh pemerintah daerah.

Perlu diketahui bahwa penyediaan jaringan internet oleh pihak *provider* cakupannya lebih luas karena jaringan yang disediakan bisa diakses masyarakat secara

umum dengan biaya tertentu sedangkan jaringan internet yang disediakan pemerintah hanya bisa diakses oleh kantor kantor pemerintah dan beberapa pengguna dari masyarakat di wilayah atau area tertentu dengan cakupan yang lebih sempit. Adapun persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet masih didominasi oleh masyarakat yang berdomisili di ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, hal ini dikarenakan akses jaringan internet di wilayah ibu kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan cukup bagus. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan internet adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu kerjasama yang intens antara Pemerintah Daerah dan Pihak *Provider* untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Presentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2. 244 Persentase Koperasi Aktif
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	159	115	120	121	125
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	272	157	159	160	165
3	Persentase koperasi aktif	%	58.46	73,25	75,47	75,63	75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah Koperasi Aktif di tahun 2017 mengalami penurunan, baik koperasi aktif maupun total koperasi dari tahun 2016 dikarenakan ada beberapa koperasi dibubarkan karena tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga koperasi, sehingga jumlah koperasi secara otomatis berkurang. Namun setelah tahun 2017, jumlah koperasi aktif maupun jumlah total koperasi mengalami peningkatan setelah dilakukan pembinaan.

Tabel 2. 245 Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
Kab Luwu Timur Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Akif
1	Burau	10	8	80,00
2	Wotu	14	14	100,00
3	Tomoni	13	9	69,23
4	Mangkutana	14	9	64,28
5	Tomoni Timur	7	2	28,57
6	Kalaena	11	9	81,81
7	Angkona	15	13	86,66
8	Malili	37	29	78,37
9	Wasuponda	13	11	84,62
10	Towuti	20	16	80,00
11	Nuha	11	5	45,45
JUMLAH		165	125	75,75

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Wotu adalah kecamatan dengan tingkat persentase aktif paling tinggi yang mencapai 100 persen, sedangkan Kecamatan Tomoni Timur adalah kecamatan dengan tingkat persentase aktif yang paling rendah, hanya 28,57 persen atau dari 7 koperasi yang ada hanya 2 koperasi yang aktif.

2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM pada Tahun 2020 sebanyak 20.179 yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang didominasi sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Adapun pertumbuhan UKM non BPR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 246 UKM Non BPR/LKM Aktif
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM aktif	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
3	Persentase UKM non BPR/aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa jumlah UKM setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan bahwa selain aktif dilakukan pendataan dan pemutakhiran data UKM secara rutin setiap tahun juga kegiatan ekonomi di masyarakat terus mengalami pertumbuhan yang tergambar dari pertambahan jumlah

Wirausaha baru setiap tahun.

3. Persentase BPR/LKM aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 247 Persentase BPR/LKM Aktif
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	60	64	70	70	70
2	Jumlah seluruh BPR/LKM aktif	Unit	60	64	70	70	70
3	Persentase BPR LKM aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tergambar jumlah BPR dan LKM dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan. Jumlah BPR sampai saat ini tetap konstan diangka 1 (satu) unit yakni BPR Harapan Sejahtera Malili sementara kategori LKM dalam hal ini KSP/USP Koperasi juga tidak mengalami pertumbuhan sejak kewenangan pengesahan Badan Hukum (BH) Koperasi ditarik kembali ke Pemerintah Pusat.

4. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 7.051 unit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.227 unit.

Tabel 2. 248 Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	7.051	7.652	10.744	16.011	19.227
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	7.435	8.105	11.378	16.959	20.179
3	Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM	%	94,84	94,41	94,42	94,41	95,28

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa Jumlah Usaha Mikro dan Kecil terus mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap setiap tahunnya, dengan persentase berada pada kisaran 94 - 96 persen bila dibandingkan dari total keseluruhan UMKM yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha untuk semua sektor kegiatan ekonomi, masih didominasi oleh pelaku usaha skala usaha Mikro dan Kecil.

2.3.2.12 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Tabel 2. 249 Jumlah Investor PMDN/PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2016	Investor	17	3	20
2	2017	Investor	30	5	35
3	2018	Investor	34	5	39
4	2019	Investor	32	5	37
5	2020	Investor	21	5	26

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Semakin banyak jumlah investor, menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Tabel diatas menyatakan bahwa jumlah investor dalam negeri (PMDN) di Kab. Luwu Timur mengalami kenaikan dari tahun 2016 – 2019, tetapi pada Tahun 2020 mengalami Penurunan karena disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan jumlah Perusahaan terjadi pada Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 11 Perusahaan, sementara Perusahaan Modal Asing (PMA) tetap sebanyak 5 PMA.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan

jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jumlah nilai investasi PMDN berskala nasional dengan investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2. 250 Jumlah Investasi PMDN
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2016	17	560.900.000.000	17	498.800.000.000
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Pada Tahun 2019 persetujuan Nilai investasi meningkat dikarenakan semua perizinan diinput menggunakan aplikasi OSS, sehingga semua perusahaan dikategorikan PMDN dan PMA, namun berdasarkan Perka BKPM No.17 Tahun 2018 bahwa yang wajib menyampaikan Nilai Investasi diatas Rp.500.000.000,- sehingga perusahaan-perusahaan yang berada dibawah Rp.500.000.000,- tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih adanya Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tabel 2. 251 Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	17	–	17	Rp. 498.800.000.000
2017	21	–	21	Rp. 235.225.507.125
2018	34	-	34	Rp. 396.134.523.000
2019	13	-	13	Rp.6.120.947.250.000
2020	8		8	Rp.2.185.879.358.954

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2020 meningkat drastis sebesar Rp 2.185.879.358.954,- disebabkan adanya Peningkatan Realisasi Proyek pada PT. Vale serta peningkatan kepatuhan Perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2. 252 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	%	3.530	8.448	6.694	9.576	7.251
2	jumlah seluruh PMA/PMDN	%	17	23	33	59	26
3	Rasio daya serap tenaga kerja		208,5	367,3	202,8	162,3	278,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Rasio daya serap tenaga kerja sebesar pada Tahun 2020 sebesar 278,9 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 Jumlah Tenaga kerja sebanding dengan peningkatan jumlah perusahaan (PMA dan PMDN), sementara pada Tahun 2020 Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) jauh lebih sedikit (menurun) karena adanya pandemi Covid-19.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2. 253 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rp	498.800.000.000	452.245.000.000	516.916.000.000	R598.558.569.406	1.636.201.132.539
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	409.500.000.000	433.500.000.000	456.500.000.000	470.000.000.000	483.500.000.000
3	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi	%	121,81	90,67	128,51	135,45	328,19

	PMDN (Milyar Rupiah)						

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2020

Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2020 disebabkan kesadaran dan tingkat kepatuhan PMDN dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semakin tinggi dan adanya Penggunaan Aplikasi OSS (*Online Single Submision*) memberi kemudahan pelaku usaha dalam pendaftaran dan pengurusan perizinan berusaha.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan. Persentase organisasi pemuda yang aktif di di Kab. Luwu Timur berfluktuasi, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 254 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif		0	20	30	30	30
2.	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda		0	70	70	74	74
3.	Jumlah Persentase organisasi	%	0	28.57	43.24	40.59	40.54

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2019

Dari tabel 2.244 di atas, terlihat bahwa persentase Organisasi Pemuda yang Aktif mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 43.24% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 40.59% demikian pula pada tahun 2020 mencapai 40.54% salah satu penyebab turunnya capaian indikator tersebut adalah adanya pandemik covid 19 pada tahun 2020.

2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2. 255 Persentase Wirausaha Muda
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wirausaha Muda		-	-	7	10	13
2.	Jumlah Seluruh Wirausaha		-	-	19	19	19
3.	Jumlah Persentase Organisasi Wirausaha	%	N/A	N/A	19	19	19

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Persentase Wirausaha Muda mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 19% dan pada tahun 2019 mencapai 19% demikian pula pada tahun 2020 mencapai 19%.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga merupakan Jumlah Cabang olahraga yang dibina dibandingkan Jumlah Cabang olahraga yang terdaftar, selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 256 Cakupan Pembinaan Olahraga
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	5	5	5	6	0
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	21	21	21	21	21
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	24	24	30	48	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Jumlah cabang olahraga yang terdaftar selama empat tahun terakhir tidak mengalami

penambahan. Demikian halnya dengan cabang olahraga yang dibina relatif stagnan, karena cabang olahraga yang dibina hanya cabang olahraga berprestasi. Tahun 2020 tidak dilakukan pembinaan cabang olahraga dikarenakan Pandemi Covid-19.

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Tabel 2. 257 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	N/A	N/A	20	40	40
2	Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	N/A	N/A	113	153	153
3	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	N/A	N/A	17,68	26,14	26,14

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase Pelatih yang Bersertifikasi pada tahun 2018 mencapai 17.68% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 26.14% dan pula pada tahun 2020 mencapai 26.14%, sehingga sampai tahun 2020 pelatih olahraga yang bersertifikasi berjumlah 100 orang.

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2. 258 Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet pelajar yang di bina	Atlet	0	50	40	40	0
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	Atlet	0	50	40	40	40
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0	100	100	100	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Cakupan Pembinaan Atlet Muda pada tahun 2017 mencapai 100% dan pada tahun 2019 mencapai 100% dan pula pada tahun 2020 mengalami penurun 0% kegiatan yang menunjang indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda mengalami *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19.

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2. 259 Jumlah Atlet Berprestasi
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	N/A	27	47	64	30

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Sampai tahun 2019, jumlah atlet yang berprestasi meningkat dan di tahun 2020 menurun karena event yang dilaksanakan berkurang akibat Pandemi Covid-19.

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2. 260 Jumlah Prestasi Olahraga
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Medali	N/A	5	5	6	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Sampai tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang berprestasi relatif stagnan dan di tahun 2020 menurun karena yang dilaksanakan berkurang akibat Pandemi Covid-19.

2.3.2.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalammerancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar

sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para *stakeholders*, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Luwu Timur menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut:

- Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data menurut masing-masing sumbernya.
- Rendahnya kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur.
- Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro.

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Sistem pengumpulan data statistik yang terintegrasi dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan pengendalian Pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari Sistem Pengumpulan Data ini yakni memiliki satu basis data Pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi, menghasilkan Perencanaan Pembangunan secara teratur dan komprehensif serta Informasi Pembangunan di Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akurat.

Tabel 2. 261 Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data statistik yang terintegrasi dari tahun 2016-2020 selalu dipublikasikan. Adapun peran Kominfo dalam pengolahan dan publikasi data statistik terintegrasi adalah dengan mencetak data dalam bentuk buku dan dokumen dan disebarkan ke OPD yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan data statistik yang terintegrasi ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang statistik sebagai pengolah dan penyedia data dan rendahnya dukungan anggaran untuk proses survei lapangan sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

Tabel 2. 262 Buku Kabupaten Dalam Angka
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Buku Kabupaten Dalam Angka merupakan seri publikasi tahunan yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan Dinas/Instansi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan serta perkembangan kondisi social-demografi dan perekonomian di Luwu Timur. Buku Buku Kabupaten Dalam Angka dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah karena didalamnya memuat data data suatu daerah.

Penerbitan Buku Kabupaten Dalam Angka dilakukan dengan bekerjasama antara Kominfo dan BPS Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi pengelola dan penyedia data statistik daerah, Hal ini dimaksudkan agar data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerbitan Buku Kabupaten dalam angka yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang statistik sehingga mempengaruhi efisiensi waktu penerbitan buku.

Tabel 2. 263 Buku PDRB
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku PDRB	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang memberikan gambaran perekonomian secara makro. Publikasi PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian di Kabupaten Luwu Timur secara deskriptif.

Penerbitan Buku PDRB dilakukan dengan bekerjasama antara Kominfo dan BPS Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi pengelola dan penyedia data statistik daerah, hal ini dimaksudkan agar data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerbitan Buku PDRB yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang statistik sehingga mempengaruhi efisiensi waktu penerbitan buku.

2.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesian. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini.

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 264 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam

Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	28	28	28	28	28
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	28	28	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah telah mencapai target 100% sesuai perencanaan. Adapun pemanfaatan layanan pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi adalah melalui pemanfaatan jaring komunikasi sandi untuk melakukan kirim dan terima berita antar wilayah di seluruh Indonesia melalui email persandian yang telah dilaksanakan sesuai tata Kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan pada pelaksanaan kegiatan adalah belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan, belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi, kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan plafon anggaran dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki kebijakan standar keamanan informasi.

2.3.2.16 Kebudayaan

**Tabel 2. 265 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	2	2	2	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyelenggaraan festival seni dan budaya sampai pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan karena kegiatan ini lebih banyak diprakarsai oleh pemerintah daerah daripada masyarakat, mengingat anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tahun 2020 tidak ada festival seni dan budaya diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19.

**Tabel 2. 266 Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	6	10	13	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	0	71	71	71	71
3	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	%	0	26	27	28	25

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan sampai tahun 2020 terus meningkat, tetapi belum dapat dilakukan pelestarian seluruhnya karena alokasi anggaran yang terbatas.

**Tabel 2. 267 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan	Unit	0	6	10	13	15

	inventarisasi						

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2. 268 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	0	0	2	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmupengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Tabel 2. 269 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	144.049	232.199	216.118	221.736	15.596
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	10	10	99	99	99
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.405	23.220	2.183	2.240	158

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 144.049 mengalami peningkatan kunjungan pada tahun 2017 sebanyak 232.199 tahun 2018 mengalami penurunan sehingga jumlah kunjungan menurun menjadi 216.118 pengunjung. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan ke perpustakaan 221.736, tahun 2020

mengalami penurunan drastis pengunjung perpustakaan sangat menurun karena adanya Covid-19.

Tabel 2. 270 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	9.500	8.400	13.363	13.363	13.463
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	20.000	27.863	34.633	34.633	34.733
3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	0,48	0,30	0,39	0,39	0,39

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah Judul buku pada tahun 2016 sebanyak 9.500 Judul 20.000 eksemplar mengalami penurunan jumlah pada tahun 2017 sebanyak 8.400 Judul 27.863 eksemplar. Penurunan jumlah buku terjadi karena ada beberapa anggota perpustakaan tidak mengembalikan buku, buku hilang dan buku rusak. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebanyak 13.363 judul 34.633 eksemplar, peningkatan ini terjadi karena adanya sumbangan buku. Pada tahun 2019 jumlah buku tidak mengalami perubahan, masih sebanyak judul 34.633 eksemplar, karena tidak ada pengadaan buku. Pada tahun 2020 ada pengadaan buku sebesar 100 judul sehingga jumlah judul buku menjadi 13.463 judul 34.733 eksemplar.

Tabel 2. 271 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	Unit	81	85	318	336	336
2	Jumlah penduduk	Jiwa	293.976	295.904	299.975	300,374	302.975
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	0,28	0,29	1,06	1,12	1,10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas jumlah perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Demikian pula jumlah penduduk terus mengalami bertambah sehingga kenaikan rasio perpustakaan per satuan penduduk tidak terlalu signifikan.

Tabel 2. 272 Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	10.131	19.350	18.010	13.112	11.962

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Penyebab menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disamping minat baca masyarakat kurang juga disebabkan perkembangan teknologi informasi digital / internet yang cukup pesat. Termasuk keberadaan gedung perpustakaan yang menyatu dengan kantor Dinas Perpustakaan menyebabkan keseganan masyarakat berkunjung ke Perpustakaan.

Tabel 2. 273 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	9.500	8.400	13.363	13.363	13.463

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada tahun 2017 terjadi penurunan judul buku akbiat dari adanya beberapa anggota perpustakaan tidak mengembalikan buku, buku hilang dan buku rusak.

Tabel 2. 274 Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang bersertifikat	Orang	2	2	2	2	3
2	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis,dan penilaian yang memiliki sertifikat	Orang	11	13	14	17	16
3	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	%	18	15	14	11	18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis, dan penilai terus bertambah namun dari segi kualitas masih rendah karena masih sedikit pustakawan yang bersertifikat.

2.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan arsip statis dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Capaian pendampingan kepada Unit Kerja dan desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di OPD tidak terlepas dari kesadaran Unit Kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan. Capaian Pengelolaan Kearsipan tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 275 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	0	8	19	23	34
2	Jumlah perangkat daerah	OPD	39	39	39	39	39
3	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	20,51	48,72	58,97	87,18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

OPD yang telah mengelola arsip secara baku adalah OPD yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, sedangkan OPD yang belum mengelola arsip secara baku belum mendapatkan pembinaan.

Tabel 2. 276 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Keg	2	2	2	3	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2016 Terdapat pelatihan pengelolaan arsip dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 2 (dua) orang. Tahun 2017 pelatihan pembuatan Jadwal Retensi Arsip di Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti 2 (dua) orang. Tahun 2018 Diklat Pengawasan Kearsipan di Bali diikuti oleh 2 (dua) orang. Tahun 2019 diklat penyusunan Jadwal Retensi Arsip di Bandung yang diikuti oleh 2 (dua) orang dan pelatihan di Bogor yang diikuti oleh 1 (satu) orang Arsiparis. Tahun 2020 Diklat lewat Zoom, Webinar di Arsip Nasional Republik Indonesia yang diikuti oleh 4 Orang mengikuti. Jadi total yang mengikuti diklat adalah 9 (Sembilan) orang.

2.3.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Tabel 2. 277 Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Jumlah Pengunjung (orang)						
No	**Obyek Wisata**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	**BURAU** (Pantai Lemo, Gua Batu Putih, Pantai Ujung Suso, Permandian Air Panas, Kuburan Tua, Air Terjun Bonepute & Hutan Mangrove)	3.530	10.281	10.795	11.595	3.479
2	**MANGKUTANA** (Sungai Uelanti, Permandian Lopi ,Air Terjun Saloanuang & Wisata	1.287	3.499	3.674	2.600	780

	Sungai Malela)					
3	**WOTU** (Pantai Balo-Balo, Banua Pangka,Makam Puang Sanro & Hutan Mangrove)	772	1.370	1.439	1.470	441
4	**MALILI** (Sumur Sawerigading, Hutan Mangrove, Air Terjun Atue & Pulau Bulu Poloe)	1.329	3.406	3.576	1.050	315
5	**TOMONI** (Semoga Lestari Water Park & Batu Papan)	435	859	902	920	276
6	**WASUPONDA** (Wasuponda (Air Terjun Mata Buntu, Bukit Agro (Tabarano) & Kali Dingin (Wasuponda)	2.421	2.800	2.940	3.240	972
7	**TOWUTI** ((Danau Mahalona & Danau Tapparang Masapi)	1.012	3.192	3.352	3.350	1.005
8	**NUHA** (Danau Matano, Cagar Alam Perburuan, Mata Air Matano (Bura-Bura), Makam Mokole Lakamandiu, Pantai Ide, Pantai Pomua Dahu-Solonsa, Bumi Perkemahan Sawerigading, Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole, Pantai Molino Topundau & Pantai Impian-Old Camp)	2.272	3.536	3.713	5.700	1.710
	Jumlah	**13.058**	**28.943**	**30.391**	**29.925**	**8.978**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, 2020

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa minat pengunjung secara keseluruhan tetap tumbuh walaupun tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 menurun drastis karena masa Pandemi Covid-19.

Tabel 2. 278 Kunjungan Wisata
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dan kota	Orang	13.058	28.943	30.391	29.925	8.978
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten dan kota	Orang	N/A	20.000	22.000	24.500	27.500
3	Kunjungan wisata	%	N/A	144	147	122	32,6

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Capaian kunjungan wisata secara keseluruhan tetap tumbuh, walaupun tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 menurun drastis karena masa Pandemi Covid-19.

2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2. 279 Lama Kunjungan Wisata
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	N/A	2	2	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Rata-rata lama kunjungan wisata dalam satu tahun di Luwu Timur masih sangat singkat, hal ini karena tidak adanya paket wisata antara destinasi wisata yang satu dengan lainnya, disamping itu variasi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi masih kurang.

2.3.3.2 Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2. 280 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya Per hektar
Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Produksi Tanaman padi	Ton	307,265.92	308,404.19	338,836.59	327,848.46	337,293.74
2	Luas Areal Tanaman Padi	Ha	42,655.00	43,714.00	45,286.00	46,640.00	48,838.00
3	Produktivitas padi atau bahan bangan utama lokal lainnya per hektar	%	7,20	7,05	7,48	7,02	6,90

Sumber : Dinas Pertanian, tahun 2021

Pada tahun 2016 – 2020 Kabupaten Luwu Timur memiliki luas areal padi yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rata – rata penambahan luas areal tanaman padi sebesar 1.546 Ha. Penambahan luas areal tersebut, tidak berbanding lurus dengan produksi padi yang masih fluktuatif pada setiap tahunnya, dimana produksi tanaman padi mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan produksi mencapai 333.836,59 Ton dengan luas lahan 45.286 Ha. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 meskipun luas areal tanaman padi bertambah akan tetapi produksi tanaman padi pada tahun 2020 dibawah produksi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan:

1. Menurunnya luas panen Padi disebabkan adanya bencana alam yakni banjir, gangguan Organisme Pengangu Tanaman (OPT) dibulan Mei dan Juni 2019, selain itu terjadinya musim kemarau sehingga mengakibatkan kekeringan di bulan September dan Oktober 2019 dengan total luas Puso (gagal panen) sebesar 266,5 Ha, dengan rincian :
   a. Untuk bulan mei 2019 :
      - Desa Manggala Kec. Mangkutana dengan luas lahan terdampak 20 Ha (akibat Banjir)
      - Kec. Burau dengan Luas Lahan terdampak 23 Ha, tersebar di beberapa desa diantaranya (Desa Lumbewe dengan luas lahan 5 Ha, Desa Lambarese dengan luas lahan 3 Ha, desa Mabonta dengan luas lahan 15 Ha yang disebabkan oleh Banjir dan Hama Penggerek Batang Padi).
      - Kec. Tomoni timur terdapat luas lahan 22 Ha diantaranya adalah Desa Alam buana dengan 21 Ha, Desa Cendana Hitam Timur dengan 1 Ha yang mengalami puso (gagal Panen) akibat banjir.
      - Kec. Malili dengan luas lahan 2 Ha (desa Pongkeru dengan 2 Ha mengalamami puso (gagal Panen) akibat banjir).
   b. Untuk bulan Juni 2019
      - Desa Tabaroge kecamatan wotu dengan luas lahan 17 Ha mengalami puso akibat banjir di fase generative (pengisian buah).
   c. Untuk Bulan September 2019

- Kec. Towuti dengan luas lahan terdampak 176 Ha yang mengalami puso dikarenakan akibatkan kekeringan (desa kalosi 100 ha, Desa Lioka 20 Ha dan desa bantilang 56 Ha)
- Kec Wasuponda mengalami puso dengan luas lahan terdampak 2 Ha akibat kekeringan.

d. Untuk bulan Oktober 2019

- Kec Wasuponda dengan luas lahan terdampak 4 Ha akibat kekeringan
- Kec malili dengan 0.5 Ha akibat kekeringan.

2. Beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Luwu Timur mengalami pergeseran waktu panen ke bulan januari 2020 antara lain di Kecamatan Nuha dengan 62 Ha dan Kecamatan Towuti dengan 327 Ha, yang mana hal tersebut turut mempengaruhi luas panen dan produksi di tahun 2019.

Pada tahun 2020 produksi padi meningkat akibat adanya penambahan luas areal tanam sebesar 2.198 Ha. Upaya ini cukup efektif untuk meningkatkan nilai atau hasil produksi tanaman padi, hal ini dibuktikan dengan peningkatan produksi tanaman padi sebanyak 2,9 persen dari hasil sebelumnya atau setara dengan 9.445,28 ton.

2. Cakupan bina kelompok petani

Tabel 2. 281 Cakupan Bina kelompok Tani
Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	klp	233	226	265	353	1.341
2	jumlah kelompok tani	klp	1.994	2.063	2.101	2.162	2.306
3	Cakupan bina kelompok petani	%	11,68	10,95	12,61	15,31	58,15

Sumber : Dinas Pertanian, tahun 2021

Jumlah kelompok tani di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 berjumlah 2.306 kelompok tani yang terdaftar di data base Sistem Infromasi Penyuluhan (SIMLUH) Kementerian Pertanian, dengan jumlah kelompok tani yang telah menerima manfaat dari Pemerintah baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD pada tahun 2020 sebanyak 1.341 kelompok tani.

Tabel 2. 282 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2020

No	Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi (ton)	307,265.92	308,404.19	338,836.59	327,848.46	337,293.74
2	produksi Buah - Buahan (Kwintal)	181,081	38,546	123,917	263,801	222,817
3	Produksi sayuran tahunan (ton)	830,80	837,90	944,20	861,36	875,00
4	Produksi Biofarmaka (kg)	7.371	7.713	6.663	6.247	6.322
5	Produksi Perkebunan (ton) Lada	3.819	432,92	4.174,36	3.487,51	2.751,64
	Produksi Perkebunan kakao (ton)	12,250	12,861.72	13,761.28	6.055,28	4,274.95
	Produksi Perkebunan (ton) kelapa sawit	242,702	112,301.96	91,119.93	67,977.03	59,188.86
6	Populasi ternak besar (ekor)	16,115	16,613	18,392	23,295	21,109
7	Populasi ternak kecil (ekor)	30,743	32,157	33,088	29,956	24,462
8	Populasi unggas (ekor)	1,446,812	1,514,930	1,192,231	1,304,284	849,529
9	Produksi daging (Ton)	568,56	607,72	1.104,71	813,39	725,63
10	Produksi telur (Ton)	11,835.185	15,664.073	14,790.16	13,185.35	16,582.34

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Komoditas buah – buahan produksinya fluktuatif dari tahun 2016 – 2020. Penurunan produksi terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya 38,546 Kwintal, disebabkan oleh:

1. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
2. kurangnya pemeliharaan atau pemberian asupan nutrisi (pemupukan) yang memadai sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas buah.
3. Faktor alam yaitu curah hujan tinggi sehingga potensi gugurnya buah cukup tinggi.

Produksi komoditas sayuran beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini terjadi karena komoditas sayuran merupakan tanaman jangka pendek dan sebagian besar lahan mengunakan lahan pekarangan. Kendala dalam peningkatan produksi antara lain :

1. Belum maksimalnya kelompok – kelompok masyrakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagia sumber pangan.

2. Biaya produksi dan hasil produksi tidak berbanding lurus.
3. Potensi serangan hama dan peyakit yang cukup tinggi.

Produktifitas Komoditas biofarmaka menunjukkan produksi relatif stabil dari tahun 2016 – 2020, hal ini dikarenakan komoditi tersebut relatif mudah dibudidayakan dan tidak membutuhkan lahan yang luas, namun ada beberapa kendala yang sering di hadapi antara lain :

1. Belum adanya jenis varitas yang berkualitas atau masih mengunakan varitas lokal.
2. Belum tersedia pasar sehingga petani atau pelaku utama membudidayakan sesuai skala rumah tangga saja.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan hal ini dipengaruhi oleh :

1. Ada beberapa lahan dikecamatan yang masuk dalam kawasan sehingga dikeluarkan dari pendataan statistik perkebunan,.
2. Terdapat alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan persawahan
3. Adanya program pemerintah dalam kegiatan replanting mulai tahun 2017 dan terus berjalan sampai tahun 2021 untuk tanaman tua atau tanaman yang tidak produksi lagi.

Tahun Anggaran 2017 s.d. tahun 2020 telah dilakukan program peremajaan tanaman kakao melalui kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao (sumber anggaran APBD) dengan luas lahan yang telah diremajakan seluas 2.655,81 ha dan kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao (Sumber Anggaran APBN) dengan luas lahan 1.000 hektar sehingga total luas lahan yang sudah diremajakan sejak tahun 2017 s.d 2020 adalah seluas 3.655,81 hektar. Untuk tahun 2021 luas lahan yang sudah mendapat bantuan bibit kakao seluas 255 hektar dengan sumber anggaran APBD dan APBN.

Pada tahun 2020 melalui anggaran APBN, telah dibangun UPH kakao yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni beserta peralatan dan mesin lainnya. Namun dengan peralatan dan mesin yang sudah ada tersebut, belum mampu menghasilkan produk kakao yang maksimal karena belum lengkap.

Untuk komoditi tanaman lada mulai tahun 2018 s.d. tahun 2020 produksi lada terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2020 produksi lada turun sampai 36,36% jika dibandingkan tahun 2017, hal ini disebabkan biaya produksi yang tinggi dan nilai jual komoditi lada yang terus menurun, disisi lain adanya serangan organisme pengangu tanaman (OPT) *Mikroba Salmonella* dan *Escerichia Coli* (*E.Coli*) yang ada pada biji lada sehingga perlu dilakukan sterilisasi dimana ikut andil dalam penurunan produksi lada, sehingga menurunkan animo petani dalam membudidayakan dan merawat tanaman lada dan pada akhirnya memaksa petani atau pelaku utama beralih membudidayakan komoditi pertanian lainnya.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan hal ini dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan persawahan
2. Banyak yang menggunanakan bibit illegalitim (bibit asalan)
3. Sudah masuk tanaman tua (umur tanaman lebih dari 25 tahun) sehingga di masukkan dalam kegiatan *replanting* mulai tahun 2017.

Tabel 2. 283 Data Populasi Ternak di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2020

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	Ternak Besar	16,115	16,613	18,392	23,295	21,109
a.	Sapi Potong	15,021	15,546	17,288	22,148	20,464
b.	Kerbau	1,094	1,067	1,104	1,147	645
II.	Ternak Kecil	30,743	32,157	33,088	38.152	37.003
a.	Kambing	13,454	14,060	14,500	14,978	12.554
b.	Babi	17,289	18,097	18,588	23.174	24.449
III.	Ternak Unggas	1,477,489	1,540,640	1,219,216	1,338,291	888,679
a.	Ayam Buras	528,499	440,617	239,136	240,465	210,609
b.	Ayam Ras Petelur	116,202	124,522	126,252	130,101	140,385
c.	Ayam Pedaging	802,111	949,791	826,843	933,718	498,535
d.	Itik	16,895	12,253	13,452	15,743	19,166
e.	Itik Manila	13,782	13,457	13,533	18,264	19,984

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Populasi ternak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Populasi ternak Kabupaten Luwu Timur dibagi berdasarkan jenis ternak besar, ternak Kecil dan ternak unggas. Ternak besar mengalami rata-rata kenaikan 11% pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dan mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan populasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : faktor kelahiran, pemasukan ternak, kematian, pemotongan, pengeluaran ternak. Faktor kelahiran dan pemasukan ternak memiliki peran dalam meningkatkan populasi sehingga pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi kelahiran yang tinggi dan dibantu dengan adanya pemasukan ternak dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur sendiri. Pada tahun 2020 populasi ternak besar mengalami penurunan sebesar 10%, penurunan tersebut disebabkan oleh faktor kelahiran yang menurun serta adanya pemotongan ternak yang meningkat yang didasarkan dengan adanya konsumsi daging yang meningkat serta pengeluaran ternak (khusus ternak sapi dan kerbau) ke daerah lain seperti ke Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Utara.

Populasi ternak kecil juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dengan rataan sebesar 4% dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dengan rataan sebesar 16%. Faktor kenaikan dan penurunan populasi ternak kecil tersebut memiliki kesamaan dengan faktor yang mempengaruhi kenaikan

dan penurunan populasi pada ternak besar, yaitu tingkat kelahiran, pemasukan ternak, dan pemotongan ternak.

Ternak unggas merupakan ternak yang memiliki siklus pemeliharaan yang singkat dan memiliki masa panen yang cepat, sehingga lama pemeliharaan ternak unggas disebut dengan satu periode pemeliharaan. Ternak unggas yang umum dipelihara dan memegang populasi yang besar ialah ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam kampung. Populasi ternak unggas akan mengalami fluktuasi yang beragam karena masa panen yang singkat jika dibandingkan dengan ternak besar dan ternak kecil yang relatif stabil, sebagai contoh pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 4% dan pada tahun 2018-2019 sebesar 9%. Namun, pada tahun 2017-2018 dan 2019-2020 populasi ternak unggas mangalami penurunan sebesar 26% dan 51%, hal tersebut dapat terjadi karena salah satu populasi terbesar ternak unggas yaitu ternak ayam ras pedaging memliliki pasang-surut pemeliharaan dikarenakan harga pasar, ternak unggas juga memiliki masalah pada penyakit endemik yang dapat menyerang ternak dan mampu membunuh ternak dalam waktu yang cepat.

Tabel 2. 284 Situasi Umum Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Jumlah Jenis Penyakit dan jumlah kasus penyakit (ekor)											
		2016		2017		2018		2019		2020		Rata - Rata	
		Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah jenis penyakit	Jumlah jenis penyakit	Jumlah jenis penyakit
1	Ayam	5	1.944	6	2.221	6	2.906	2	889	2	809	4	8.769
2	Sapi	9	424	9	342	9	353	7	652	7	771	8	2.542
3	Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Anjing	2	335	2	300	2	300	2	187	2	106	2	1.228
5	Kambing	5	247	5	232	5	256	5	347	5	713	5	1.795
6	Babi	5	185	5	115	5	142	4	259	2	216	4	917

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur masih terjadi beberapa kasus kejadian penyakit yang menyerang ternak, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : adanya lalu lintas ternak yang tidak terkontrol dengan baik sehingga menyebabkan masuknya penyakit dari luar, selain itu jenis-jenis penyakit tersebut diatas merupakan jenis penyakit yang selalu ada pada ternak namun dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas dengan pemberian vitamin dan obat-obatan.

Rata-rata kasus penyakit hewan yang terjadi sepanjang tahun 2016 – 2020 yaitu sebanyak 3.066 ekor atau sekitar 0,22% dari jumlah populasi yang ada, hal ini menunjukkan bahwa kasus penyakit yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur masih cukup dapat dikendalikan namun masih memerlukan perhatian yang lebih lagi

khususnya pada ketersediaan dokter hewan, paramedik veteriner dan sarana prasarana pendukung seperti Puskeswan.

2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 2. 285 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,82	94,89	97,07	99,8	98,91

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021, 2020 dan 2019 (Data Diolah)

Persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, hal ini dikarenakan adanya penambahan jaringan PLN yang masuk ke pemukiman penduduk. Sehingga penduduk dapat memanfaatkan sumber penerangan melalui PLN.

2.3.3.4 Perdagangan

1. Ekspor bersih perdagangan

Komoditi Kabupaten Luwu Timur yang di ekspor sampai saat ini meliputi 5 komoditi yaitu lada, nikel, kakao, rumput laut dan CPO. Ekspor bersih perdagangan terbesar diperoleh dari komoditi nikel.

Tabel 2. 286 Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US$	468.926.145,86	475.387.123,47	658.612.319,17	660.572.391,96	773.511.973,67.

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan diatas tergambar bahwa ekspor bersih perdagangan untuk Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan, dimana pada Tahun 2016 jumlah ekspor bersih perdagangan sebesar US$ 468.926.145,86 dan tahun 2020 mencapai US$ 773.551.973,67.

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal merupakan pedagang/usaha informal yang dalam hal pengurusan izin usaha. Tahun 2018, realisasi cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan sebesar 75,41%.

Penurunan target yang signifikan disebabkan diberlakukannya aturan (1) Menteri perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 yang menerangkan bahwa penghapusan kewajiban pendaftaran ulang surat izin usaha perdagangan dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha, (2) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan.

Tabel 2. 287 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indokator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	pedagang	2.610	2.650	585	763	1.190
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	pedagang	4.000	4.684	4.203	4.203	4.100
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	65,25	56,57	13,91	18,20	29,02

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tergambar cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 cakupan bina usaja kelompok pedagang/usaha informal mencapai 65,25% sedangkan pada tahun 2018 cakupan bina usaha kelompok pedagang/usaha informal hanya sebesar 13,91% mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016.

2.3.3.5 Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2. 288 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indokator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	IKM	98	98	112	74	81
2	Jumlah kelompok pengrajin	IKM	1.778	1.778	1.778	1.150	1.150
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	5,51	5,51	6,34	6,47	7,04

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur dilakukan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para pelaku IKM dalam mengembangkan produk-produk sehingga mampu berdaya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku IKM.

Kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Luwu Timur bergerak dalam bidang furniture/meubel dan handicraft. Bidang Furniture/Meubel telah dibentuk 1 (satu) sentra meubel di Kecamatan Angkona dengan berbagai macam produk yang dihasilkan seperti meja, kursi, lemari, jendela dan lain sebagainya. Bidang Handicraft terdiri dari anyaman enceng gondok, anyaman rotan, anyaman lidi, anyaman teduhu, rajutan, dan kerajinan kayu.

Pembinaan terhadap pengrajin dilaksanakan dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis yang dimulai pada tahun 2017 berdasarkan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan kegiatan furniture/meubel dan kerajinan lainnya (handicraft).

Persentase target binaan pelaku IKM belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Diharapkan setiap tahunnya kegiatan ini terus dijalankan sehingga seluruh pengrajin mendapatkan kesempatan untuk dibina melalui pelatihan.

2.3.3.6 Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Tabel 2. 289 Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah transmigran swakarsa	KK	0	0	0	0	0
2	Jumlah transmigrasi	KK	1.190	1.190	1.230	1.255	1.255

3	Persentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Transmigran swakarsa adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Minat warga bertransmigran swakarsa khususnya di Kabupaten Luwu Timur tidak ada.

2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.

Produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 1,9 persen. Pada tahun 2020 produksi perikanan Kab Luwu Timur mencapai 325.355,71 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 315.343 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 10.013 ton.

Kenaikan produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi Perikanan budidaya dan Perikanan Tangkap. Pada Perikanan budidaya total produksi pada tahun 2020 sebesar 315,343 ton atau 96,9 persen dari produksi perikanan tahun 2020 yang meliputi, Produksi Air Tawar, Produksi Air Payau meliputi komoditi Unggulan Udang, Bandeng dan Rumput Laut (kering) dan Produksi Pengembangan Budidaya Laut berupa Rumput Laut Cottoni. Sedangkan Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2020 sebesar 10.012,71 ton atau sebesar 3,1 persen total produksi perikanan tahun 2020. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 290 Produksi perikanan
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan	Ton	315,356	317,680	319,739	320,368	325.355,71

2	Jumlah target daerah	Ton	315,404	317,453	318,422	319,394	320,411
3	Produksi perikanan	%	99.98	100	100	100	101

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas persentase produksi perikanan pada tahun 2016 sebesar 99,98 persen. Angka ini menandakan bahwa jumlah produksi ikan tidak mencapai jumlah produksi ikan yang ditargetkan daerah. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, produksi perikanan telah mencapai 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 101 persen. Hal ini menandakan jumlah produksi ikan telah mencapai target yang telah ditetapkan daerah bahkan telah melebihi target daerah. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari sumbangsih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan bantuan sarana dan prasaran budidaya dan penangkapan ikan.

Melihat Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan, tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif cukup besar dan menjanjikan. Namun yang menjadi kendala ketersedian sarana dan prasarana belum cukup untuk menunjang potensi yang ada.

2. Konsumsi ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Kabupaten Luwu Timur tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 291 Konsumsi ikan
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kosumsi ikan	Kg/Perkapita/Tahun	43.86	44.19	44.76	44.99	45.42
2	Jumlah target	Kg	43,23	44,09	44,53	44,96	45,39

	daerah						
3	Konsumsi ikan	%	101	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang terdaftar di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 71 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok yang telah dibantu, dengan jumlah kelompok yang terdaftar sampai tahun 2020 sebanyak 134 Kelompok, dengan persentase kelompok yang telah dibantu dari kelompok yang ada sebesar 52,96 %. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 292 Cakupan bina kelompok nelayan
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Kelompok	7	11	25	11	17
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	122	125	128	130	134
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	5,73	8,80	19,53	8,46	12,68

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan.

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 293 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	8.702	8.753	9.993	9.995	10.012,71
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	21.386	23.269	24.850	21.300.5	26.643,71
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	40,69	37,61	40,21	46,92	37,58

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nelayan yang telah berkelompok dan berkonstribusi dalam produksi ikan sebesar 40,68 persen pada tahun 2016 dari total produksi sebesar 21.386 Ton, pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 37,61 dari total produksi, pada tahun 2018 berkonstribusi sebesar 40,21 dari total produksi, pada tahun 2019 berkonstribusi sebesar 46,92 dari total produksi sedangkan pada tahun 2020 berkonstribusi sebesar 37,58 dari total produksi. Dari data tersebut jumlah produksi nelayan yang berkelompok selalu berubah meskipun jumlah produksi nelayan yang berkelompok masih kecil dibanding nelayan yang tidak berkelompok namun hasil produksi meningkat dari tahun ke tahun.

Nelayan yang berkelompok memang memiliki tangkapan masih kurang dibanding nelayan yang tidak berkelompok, karena nelayan yang berkelompok rata-rata nelayan yang melaut di sekitar pesisir pantai dibanding nelayan yang tidak berkelompok seperti nelayan bagang yang dapat menangkap ikan diluar pesisir dengan alat tangkap yang besar.

5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, proporsi tangkapan ikan di Kabupaten Luwu Timur berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi

tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Tabel 2. 294 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	21,386	23,269	24,850	21,300.5	26.643,71
2	80 % dari tangkapan maksimum lestari	Ton	17,108	18,615	19,880	17,040	21,314.4
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016, jumlah tangkapan ikan sebesar 21,386 ton mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 23.269 ton. Kemudian ditahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 24.850 ton, namun di tahun 2019 menurun sebesar 21.300,5 ton dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai sebesar 26.643,71ton. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield–MSY).

6. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial.

Luas kawasan konservasi perairan di Kab Luwu Timur pada tahun 2016 seluas 606,5 Ha, sedangkan total luas perairan teritorial Kabupaten Luwu Timur seluas 4.805.000 Ha, berdasarkan data ini diketahui Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,001 Persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 295 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan lindung perairan	Ha	606,5	606,5	606,5	606,5	606,5
2	Total luas perairan teritorial	Ha	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Rasio	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

7. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure)* keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Tabel 2. 296 Nilai Tukar Nelayan
Kab Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks yang di terima nelayan	Persen	126.05	127.14	127.20	127.26	127.34
2	Indeks yang di bayar nelayan	Persen	121.79	122.76	122.64	122.52	122.53
Nilai tukar nelayan		Persen	103.49	103.56	103.71	103.86	103.92

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai tukar nelayan lima tahun terakhir berada diatas 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa daya beli nelayan cukup baik.

2.3.4 Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.4.1Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2. 297 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA)	Ada/Tidak	Ada	-	-	-	-

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dokumen perencanaan RPJPD Kab. Luwu Timur telah tersedia yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur 2005 -2025.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tabel 2. 298 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	-	Ada	-	-

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2016-2021 maka telah ditetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tabel 2. 299 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dokumen Perencanaan Tahunan Kab. Luwu Timur berupa RKPD dan Perubahan RKPD yang dibuat setiap tahun anggaran yang dikoordinir oleh Bapelitbangda yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya Peraturan Bupati tentang RKPD Pokok dan Perubahan Tahun 2016 – 2020 disebutkan sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
d. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
e. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018;
f. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018;
g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019;
h. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018;
i. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020;

j. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020;

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen RTRW Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan sejak tahun 2011 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan masih berlaku sampai saat ini.

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Tabel 2. 300 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	325	425	466	467	466
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	Program	366	434	472	479	479
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	88,80	97,93	98,73	97,49	97,29

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD setiap tahunnya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program sebagian besar telah dijabarkan dalam RKPD. Adapun beberapa program yang tidak terjabarkan dalam RKPD, hal ini mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembanghunan daerah yang menunjukkan target capaian kinerja OPD sudah optimal dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD terkait.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Tabel 2. 301 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Program	307	402	445	435	435
2.	Jumlah program RKPD	Program	325	425	466	467	466

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Tahun berkenaan						
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	94,46	94,59	95,49	93,15	93,34

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2020

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD menunjukkan kinerja yang cukup tinggi. Adapun beberapa program yang tidak terjabarkan dalam APBD, setelah dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah target kinerja dan pagu anggaran OPD sudah optimal.

2.3.4.2 Keuangan

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yak fesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan serta sinergitas dalam tahap penyusunan dan penetapan laporan keuangan. Data Opini BPK Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 302 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

2. Persentase SILPA

Tabel 2. 303 Persentase SILPA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Realisasi SILPA	Rp.	156.064.014.355,86	104.962.745.580,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25
2	Total Realisasi APBD	Rp	1.374.892.757.226,31	1.416.274.050.915,24	1.520.109.440.833,57	1.520.300.617.280,13	1.436.964.978.788,05
3	Persentase SILPA	%	11,35	7,41	3,13	1,72	5,07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Realisasi SILPA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan angka positif, yang berarti SILPA selama lima tahun terakhir mampu menutupi defisit yang telah ditetapkan. Selain itu, realisasi SILPA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung megalami penurunan yang menggambarkan serapan belanja program kegiatan yang telah direncanakan dapat di laksanakan. Untuk tahun 2020 realisasi SILPA meningkat sebesar Rp.72.907.296.644,25 di sebabkan oleh adanya sisa saldo pada Kas BUD, Badan Layanan Daerah (BLUD), JKN, BOS dan setara kas dan SILPA tahun 2020 ini sebagian menutupi defisit yang telah di tetapkan di Tahun Anggaran 2021.

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Tabel 2. 304 Persentase Belanja Pendidikan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Realisasi Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	330.183.660.465,70	298.211.752.388	331.017.934.796,70	340.996.954.738,65	334.072.059.524,08
2	Realisasi Total APBD	Rp	1.374.892.757.226,31	1.416.274.050.915,24	1.520.109.440.833,57	1.520.300.617.280,13	1.436.964.978.788,05
3	Persentase Realisasi belanja pendidikan	%	24,02	21,06	21,78	22,43	23,25

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dasar telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dan *mandatory spending* yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari total APBD. hal ini dapat dilihat dari Capaian Realisasi untuk belanja bidang urusan Pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar selama lima tahun terakhir realisasi belanja untuk urusan Pendidikan mencapai 21-24 persen.

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur telah memenuhi ketentuan yaitu sebesar 10 persen dari APBD. Persentase belanja kesehatan di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 305 Persentase Belanja Kesehatan
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan	Rp	220.594.628.237,65	255.380.571.440,24	325.136.710.388,94	314.815.234.479,98	350.546.382.276,34
2	Total APBD	Rp	1.553.764.811.738	1.544.366.403.790	1.591.059.131.709,95	1.609.008.544.799,42	1.489.289.489.113,78
3	Persentase belanja kesehatan	%	14,20	16,54	20,44	19,57	23,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

5. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2. 306 Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Belanja langsung	Rp	829.617.253.067,35	831.416.765.316,24	902.594.570.599,57	855.682.821.264,13	732.710.092.584,38
2	Realisasi Belanja tidak langsung	Rp	545.275.504.158,96	584.857.285.599,00	617.514.870.234,00	664.617.794.016,00	704.259.217.269,00
3	Realisasi Total APBD	Rp	1.374.892.757.226,31	1.416.274.050.915,24	1.520.109.440.833,57	1.520.300.617.280,13	1.436.964.978.788,05
4	Perbandingan antara Realisasi belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	60 :40	59 : 41	59 : 41	56: 44	51 : 49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi dua komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung selain komponen Gaji hanya dapat di anggarkan pada SKPKD, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dianggarkan pada SKPD.

Belanja Langsung sebagai belanja sektor publik diharapkan mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langusung. dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur secara konsisten menetapkan kebijakan belanja daerah dengan capaian persentase untuk belanja langsung lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung. hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total realisasi APBD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan persentase belanja langsung 60-51 persen terhadap total Realisasi APBD dan untuk belanja tidak lang langsung 40-49 persen terhadap total realisasi APBD.

6. Penetapan APBD

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulasi terbaru yakni PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian 5 tahun terakhir, terlihat bahwa dalam penetapan APBD Pemerintah Kab. Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan 2020, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Kab. Luwu Timur, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Kab. Luwu Timur sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum sebelum tanggal 31 Desember, Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Kab. Luwu Timur yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Data penetapan APBD sebagai berikut :

Tabel 2. 307 Penetapan APBD
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang perubahan APBD Tanggal 25 Oktober 2016)	Tepat Waktu (Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang perubahan APBD Tanggal 23 Desember 2017)	Tepat Waktu (Perda Nomor 10 Tahun 2018, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 11 Oktober 2019)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 pada (pasal 203 ayat 4) yang telah berubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020 pada (pasal 203 ayat 4), juga terdapat pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PERLAN RI) Nomor 10 Tahun 2018 (Pasal 4 ayat 2) bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 2. 308 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	4 JP	24 JP	10 JP	6 JP	1 JP

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (kecuali tahun 2017) belum memenuhi standar minimum yaitu 20 Jam Pelajaran, hal ini disebabkan karena pagu anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan terus mengalami penurunan sehingga beberapa diklat yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan olehnya itu diharapkan pada tahun tahun yang akan datang ada kenaikan pagu anggaran untuk pengembangan kompetensi.

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, melalui lembaga yang berwenang menurut

ketentuan yang berlaku yang terdiri dari :

a. Diklat Prajabatan dan
b. Diklat Dalam Jabatan.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis.

Tabel 2. 309 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN Yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	603	874	774	711	251
2	JumlahTotal ASN	Orang	4.003	3.906	3.854	3.992	3.877
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	15,06	22,38	20,03	17,81	6,46

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Data tabel diatas menjelaskan jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Prajabatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Prajabatan berjumlah 603 orang (15,06%), pada tahun 2017 bertambah 874 orang (22,38%), pada tahun 2018 berjumlah 774 orang (20,03%) termasuk Diklat Prajabatan 54 orang, pada tahun 2019 berjumlah 711 orang (17,81%) termasuk Diklat Prajabatan 233 orang, dan pada tahun 2020 berjumlah 251 orang (6,46%) termasuk Diklat Prajabatan 1 orang.

Data tersebut diatas menunjukkan dari tahun 2017 sampai ke tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terus mengalami penurunan hal ini disebabkan karena belum adanya penekanan pengikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan 20 JP/Tahun bagi setiap ASN, ketersediaan anggaran yang terbatas dan

bahkan semakin rendah pada setiap tahunnya, selain itu pelaksanaan Surat Edaran Bupati Nomor : 800/405/XI/BKPPD tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu belum dipatuhi oleh setiap OPD lingkup Pemda Kab. Luwu Timur sehingga data ASN yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional, Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh OPD tidak dapat diketahui oleh BKPSDM.

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural

Tabel 2. 310 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat ASN Yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	287	319	401	463	465
2	Jumlah Total Pejabat	Orang	512	497	510	550	528
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan struktural	%	56,05	64,19	80,02	84,18	88,07

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Data di atas merupakan akumulasi Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama 5 (Lima) tahun terakhir, hal ini berdasarkan Target IKU BKPSDM yg perhitungannya secara akumulatif bukan pada tahun tersebut. Adapun diklat struktural terdiri dari Diklatpim II, Diklatpim III dan Diklatpim IV.

Jika dilihat dari data diatas jumlah pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim pertahun adalah pada tahun 2016 berjumlah 32 orang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 82 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 62 orang, pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu hanya 15 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 37 orang, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yaitu perangkat daerah Kab. Luwu Timur yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan Daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas JPT

madya, dan JPT pratama.

Tabel 2. 311 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	26	23	27	30	27

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Jumlah formasi jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 32 Jabatan, pada tahun 2016 terisi sebanyak 26 Jabatan (81,25 persen), pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 23 Jabatan (71,87 persen), pada tahun 2018 terisi sebanyak 27 Jabatan (84,37 persen), pada tahun 2019 terisi sebanyak 30 Jabatan (93,75 persen), dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27 Jabatan (84,37 persen) kondisi ini disebabkan karena beberapa pejabat telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), pensiun atas permintaan sendiri, mutasi keluar dari Kab. Luwu Timur, dan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.820/6923/SJ tanggal 23 Desember tentang Larangan Penggantian Pejabat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

a. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III.
b. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV.
c. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2. 312 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1.076	755	665	802	787

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Data tabel diatas tampak penurunan terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2018 salah satu penyebabnya adalah moratorium penerimaan CPNS sesuai kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan disebabkan adanya penerimaan CPNS sebanyak 234 orang dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena terjadi penundaan pelaksanaan Tes CPNS.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

a. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.

b. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel 2. 313 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	2.415	2.654	2.679	2.640	2.572

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Data tabel diatas tampak kenaikan terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 disebabkan adanya penerimaan CPNS sebenyak 234 orang dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena terjadi penundaan pelaksanaan Tes CPNS.

Jabatan fungsional tertentu yang dimaksud diatas adalah tenaga Kesehatan, guru dan fungsional lainnya yang ada pada tiap OPD. Pada tahun 2020 jumlah fungsional kesehatan berjumlah 834 orang (32,43 persen), jumlah fungsional guru berjumlah 1554 orang (60,42 persen), jumlah jabatan fungsional pada seluruh OPD berjumlah 184 orang (7,15 persen).

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2. 314 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan yang di tindaklanjuti	Buah	0	0	1	1	1
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Buah	0	0	1	1	2
3	Persentase pemanfataan hasil kelitbangan	%	0	0	100	100	50

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Luwu Timur masih sangat kurang. Hal ini disebabkan disamping anggaran yang dialokasikan terbatas, juga kuantitas dan kualitas SDM pengelola kelitbangan yang rendah.

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel 2. 315 Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi	OPD	2	2	3	4	9
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	39	39	39	39	39
3	Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	5.13	5.13	7.69	10.25	23,08

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa terjadi peningkatan penerapan inovasi yang difasilitasi, walaupun peningkatannya masih kecil. Kurangnya penerapan inovasi dikarenakan manajemen perangkat daerah / Bapelitbangda dalam memfasilitasi masih rendah.

2.3.4.5 Pengawasan

1. Persentase Tindaklanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. Angka peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan laporan keuangan dan aset.

Tabel 2. 316 Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Temuan	376	284	366	383	44
2	Jumlah total temuan	Temuan	451	316	455	521	190
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	83,37	89,87	80,44	73,51	23,16

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 temuan menjadi lebih sedikit dari sebelumnya karena adanya peran aktif fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terkait temuan-temuan yang ada, baik temuan desa maupun perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu Timur.

Penurunan hasil temuan ini juga dipengaruhi oleh perubahan pola pengendalian kegiatan oleh APIP melalui kegiatan *review dan probity audit* terhadap kegiatan-kegiatan prioritas, anggaran besar dan pekerjaan kompleks sebagaimana dituangkan dalam rencana aksi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK RI.

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2. 317 Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	0	0	0	0	0
2	Jumlah total ASN	Orang	4.003	3.906	3.854	3.992	3.877
3	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2. 318 Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	7	6	23	8

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan realisasi jumlah temuan BPK pada tahun 2016-2021, Jumlah temuan setiap tahun berada pada nilai lebih kecil dari 10, hal tersebut disebabkan peran pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat melalui pemeriksaan reguler ke OPD setiap tahun secara sampling dan pendampingan PHO kegiatan sebelum pembayaran.

Untuk Tahun 2019 temuan sebanyak 23 merupakan akumulasi temuan 2 (dua) pemeriksaan yaitu pemeriksaan LKPD TA.2019 sebanyak 9 (sembilan) temuan dan pemeriksaan kinerja sebanyak 14 (empat belas) temuan, dimana pemeriksaan kinerja merupakan hal baru yang dilakukan oleh BPK di Kabupaten Luwu Timur sehingga pada tahun 2020 dilakukan penyesauaian pola dan metode pengawasan yang pembinaan yang optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja di semua PD dan pengendalian kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai dari tahap perencanaan sampai pada proses pembayaran.

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota.

Tabel 2. 319 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh alat kelengkapan DPRD telah membuat rencana kerja setiap tahunnya.

2. Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).

Tabel 2. 320 Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

DPRD telah menyusun program kerja sesuai fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, penyusunan perda dan fungsi anggaran secara terintegrasi dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

3. Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen

Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2. 321 Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DRPD Kab. Luwu Timur Tahun 2020

DPRD telah menyusun program kerja sesuai fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, penyusunan perda dan fungsi anggaran secara terintegrasi dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Dewan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Tabel 2. 322 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020

No	Kelompok Makanan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Padi-padian	75.120	71.073	78.302
2	Umbi-umbian	5.571	4.305	4.946
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	57.916	59.081	61.130
4	Daging	13.679	17.237	22.960
5	Telur dan Susu	34.302	32.557	36.218

No	Kelompok Makanan	Tahun		
		2018	2019	2020
6	Sayur-sayuran	29.659	30.070	33.293
7	Kacang-kacangan	8.329	7.947	9.077
8	buah-buahan	29.438	52.146	41.223
9	Minyak dan Kelapa	11.294	10.721	11.522
10	Bahan minuman	18.977	15.770	19.515
11	Bumbu-bumbuan	11.322	11.247	11.423
12	konsumsi lainnya	10.451	9.700	9.510
13	Makanan dan minuman jadi	131.541	149.819	132.090
14	Rokok	74.471	80.383	73.199
Total		**512.070**	**471.673**	**471.209**

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019,2020 dan 2021

Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan selama tiga tahun, 2018 – 2020, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar 512.070 rupiah, kemudian turun menjadi 471.673 rupiah pada tahun 2019, dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 471.209 rupiah.

Jika ditinjau dari segi kelompok makanan, 3 kelompok makanan dengan proporsi terbesar tidak mengalami perubahan selama 2018 – 2020, yaitu Makanan dan Minuman Jadi, Padi-padian, dan Rokok. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, sebesar 132.090 rupiah atau sekitar 28,03 persen digunakan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi, sebesar 78.302 rupiah atau sekitar 16,62 persen untuk pengeluaran padi-padian, dan sebesar 73.199 rupiah atau sekitar 15,53 persen untuk pengeluaran rokok.

Sementara 3 kelompok makanan dengan proporsi pengeluaran terendah selama 2018 – 2020, yaitu Umbi-umbian, Kacang-kacangan, dan Konsumsi Lainnya. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, sebesar 4.946 rupiah atau sekitar 1,05 persen digunakan untuk pengeluaran umbi-umbian, sebesar 9.077 rupiah atau sekitar 1,93 persen untuk pengeluaran Kacang-kacangan, dan sebesar 9.510 rupiah atau sekitar 2,02 persen untuk pengeluaran Konsumsi Lainnya.

2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk nonpangan).

Tabel 2. 323 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020

No	Kelompok Makanan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	259.821	285.199	312.676
2	Aneka komoditas dan jasa	96.361	130.518	144.749

3	pakaian, alas kaki dan tutup kepala	31.921	42.827	43.357
4	Komoditas tahan lama	104.373	114.233	119.061
5	pajak, pungutan dan asuransi	44.537	59.684	95.941
6	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	22.617	11.394	25.743
Total		**559.630**	**643.855**	**741.527**

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021

Pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan selama tiga tahun, 2018 – 2020, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan sebesar 559.630 rupiah, kemudian naik menjadi 643.855 rupiah pada tahun 2019, dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 741.527 rupiah.

Jika ditinjau dari segi kelompok bukan makanan, 3 kelompok bukan makanan dengan proporsi terbesar tidak mengalami perubahan selama 2018 – 2020, yaitu Perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa, dan Komoditas barang tahan lama. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan, sebesar 312.676 rupiah atau sekitar 42,17 persen digunakan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, sebesar 144.749 rupiah atau sekitar 19,52 persen untuk pengeluaran aneka komoditas dan jasa, dan sebesar 119.061 rupiah atau sekitar 16,06 persen untuk pengeluaran Komoditas barang tahan lama.

Sementara 3 kelompok makanan dengan proporsi pengeluaran terendah selama 2018 – 2020, Keperluan pesta dan upacara/ kenduri, Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, dan Pajak, pungutan, dan asuransi. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan, sebesar 25.743 rupiah atau sekitar 3,47 persen digunakan untuk Keperluan pesta dan upacara/ kenduri, sebesar 43.357 rupiah atau sekitar 5,85 persen untuk pengeluaran Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, dan sebesar 95.941 rupiah atau sekitar 12,94 persen untuk Pajak, pungutan, dan asuransi.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2. 324 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	Km	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273	1889,273
2	Jumlah Kendaraan	Unit	2423	2442	2576	2650	2807
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah	Rasio	77,97	77,37	73,34	71,29	67,31

	Kendaraan						

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai 2020 berada di angka 14 – 17, yang artinya bahwa setiap 1 Km jalan kabupaten melayani 14-17 kendaraan. Setiap 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan motor. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Luwu Timur masih jauh dari kepadatan.

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2. 325 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang	Orang	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241
2.	Jumlah Barang	Ton	300.227	376.958	290.241	290.241	253.796

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 326 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016–2020

NO	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga	131.000	47.237	143.129	48.118	135.425	39.753	76.733	26.600	37.782	13.001
2.	Bandara	16.712	182.902	17.060	161.174	23.712	161.174	22.934	28.182	6.018	84.923
3.	Terminal	112.155	20.387	113.426	21.458	141.090	21.458	277.291	55.459	209.996	41.099
4	Jumlah	249.867	250.526	273.615	230.750	300.227	222.385	376.958	290.241	253.796	139.023

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari

jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

1. Angka kriminalitas

Tabel 2. 327 Angka Kriminalitas Tahun 2016-2020 Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	21	32	24	25
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	2	4	2	-	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	13	23	26	19	16
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	80	219	232	176	90
5.	Jumlah kasus Pencurian	102	176	196	143	59
6.	Jumlah kasus Penipuan	73	117	92	11	16
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	5	6	3	8	1
8.	Jumlah kasus pidana anak	12	31	20	14	14
9.	Jumlah kasus pemerasan dan pengancaman	-	27	18	13	14
10.	Jumlah kasus pengrusakan	18	32	37	9	5
11.	Jumlah tindak criminal selama 1 tahun	305	656	658	417	241
12.	Jumlah Penduduk	282.684	287.874	293.822	300.374	305.407
13.	Angka Kriminalitas	0,0010789	0,0022788	0,0022395	0,0013883	0,0007891

Sumber : Polres Luwu Timur, 2021

2. Jumlah Demonstrasi

Istilah demonstrasi dan mogok kerja perlu dibedakan karena terkait dengan pelaku aksi kegiatan tersebut. Demonstrasi dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan mogok kerja hanya dilakukan oleh pekerja/buruh yang menyebabkan terhentinya sebagian atau seluruh proses produksi barang/jasa.

Aksi demonstrasi yang sering terjadi umumnya diinisiasi oleh kelompok/organisasi masyarakat dengan motif perekrutan tenaga kerja di

perusahaan. Sedangkan aksi mogok kerja jumlahnya lebih sedikit dan biasanya disebabkan oleh motif terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terjadinya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Cara penanganan aksi demonstrasi dilakukan dengan fasilitasi pertemuan untuk menerima tuntutan dari para demonstran dan selanjutnya menyampaikan tuntutan tersebut kepada para pihak yang berkepentingan khususnya kepada pihak perusahaan. Sedangkan cara penanganan aksi mogok kerja dilakukan dengan bipartit dan mediasi sebagaimana yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.

Tabel 2. 328 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Demonstrasi Politik	2	1	7
2	Demonstrasi Ekonomi	22	20	14
3	Demonstrasi Mogok Kerja	9	8	7

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa demonstrasi politik pada tahun 2020 meningkat karena pada tahun tersebut terdapat pelaksanaan Pilkada. Trend jumlah demonstrasi/mogok kerja mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2020. Terjadinya demonstrasi/mogok kerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya perekrutan tenaga kerja di perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perselisihan kepentingan atau perselisihan hak antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang 0ada. Pembangunan SDM di Luwu Timurdiarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wileayah.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Tabel 2. 329 Rasio Lulusan S1/S2/S3
Di Kabupaten Luwu Timur 2018-2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan S1	10.695	11.351	12.386	13.097	14.211
2	Jumlah Lulusan S2	199	309	224	364	396
3	Jumlah Lulusan S3	1	3	3	5	6
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	10.895	11.663	12.613	13.466	14.613
5	Jumlah Penduduk	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, 2021.

Rasio lulusan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan tinggi dan dibarengi dengan himbauan pemerintah daerah bahwa untuk bersaing di dunia kerja minimal sarjana. Selain itu, hal lain yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan rasio tersebut adalah adanya Pendidikan gratis sampai SMA oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 2005 sampai sekarang dan pemberian bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu sejak tahun 2017.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 2. 330 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 14 tahun	86,149.00	85,330	86,960	85,815	86,518
65+	12,718	13,190	14,379	14,861	14,794
15 - 64 tahun	195,111	197,384	198,636	199,698	200,727
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	98,867	98,520	101,339	100,676	101,312
Rasio Ketergantungan	50.67	49.91	51.02	50.41	50.47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun satu penduduk yang tidak produktif rata-rata ditanggung oleh dua orang penduduk produktif. Hal ini menunjukkan bahwa beban masyarakat yang tidak produktif masih dapat dipenuhi oleh masyarakat usia produktif.

2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 331 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,48	92,34	92,77	93,02	93,15	92,91	>
2	Pertumbuhan PDRB	1,58	3,07	3,39	1,17	1,46	>8	<
3	Laju inflasi	2,74	3,95	4,19	1,91	1,21	3,46	<
4	PDRB per kapita Berlaku	Rp 61.723.60	Rp 63.712.89	Rp 69.409.01	Rp 70.057,09	Rp 70.495,47	Rp 116.198.969	>
5	Indeks Gini	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405	<0,4	<
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,95	71,46	72,16	72,80	73,22	-	-
7	Angka melek huruf	94,06	93,72	94,08	95,72	95,30	97,52	<
8	Rata-rata lama sekolah	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80	-	-
9	Angka usia harapan hidup	69,71	69,79	70,03	70,38	**70.53**	69,58	>
10	Harapan lama sekolah	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83	-	-
11	Tingkat pengangguran terbuka	2.58%	2.58%	2.03%	3.81%	4.46%	-	-
12	Rasio penduduk yang bekerja	0,97%	0,97%	0,97%	0,98%	0,96%	-	-
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.19	78.46	81.81	83.43	84.31	-	-
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38.39	38.39	39.79	45.71	46.11	65,4	<
1.2	Angka Partisipasi Kasar							
1.3	APK SD/MI/PAKET A	102,31	102,00	102,24	102,94	103,13	109,2	<
1.4	APK SMP/MTs/PAKET B	106,13	103,00	103,48	103,50	103,56	106,02	<
	Angka Partisipasi Murni							
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	99.18	99.02	92.03	92.39	92.54	100	<
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	93.47	80.80	95.73	95.97	95.99	86,15	>
1.7	Angka Partisipasi Sekolah							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.69	95.26	91.93	95.93	95.95	-	-
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	98.76	96.55	95.51	98.37	98.49	80,00	>
	Angka Putus Sekolah :							
1.20	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0.12	0.12	0.10	0.10	0.07	0,3	>
1.21	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0.32	0.32	0.23	0.21	0.20	0,32	>
	AngkaKelulusan:							
1.22	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,62	99,62	99,55	99,75	100	<
1.23	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,20	99,28	98,82	99,50	100	<
	Angka Melanjutkan							
1.24	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,2	89,81	95,74	95,75	95,76	100	<
	Fasilitas Pendidikan:							
1.25	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,27	78,04	78,35	71,78	72,27	160	<
1.26	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	83,46	82,34	78,85	77	78,51	92	<
1.27	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,18	50,17	48,12	48,50	48,23	-	-
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							
1.28	SD/MI	397	406	376	363	399	-	-
1.29	SMP/MTs	563	544	541	487	498	-	-
1.30	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	60.46	103.46	96.84	97.21	92.99	-	-
1.31	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perepmpuan dan laki-laki	99,56%	99,58%	99,78%	99,84%	99,37%	-	-
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
1.32	SD/MI	82,24	82,97	87,72	92,51	89,87	85	>
1.33	SMP/MTs	98,26	99,41	99,43	95,82	95,48	85	>
2	**Kesehatan**							
2.1	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7.56	6.11	7.34	8.03	8.16	-	-
2.2	angka kelangsungan hidup bayi	92.45	93.89	92.67	91.98	91.85	0.996	
2.3	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	1.76	0.87	1.40	0.89	0.72	-	-
2.4	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	5.27	5.24	5.07	0.06	4.61	-	-
2.5	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	87.89	69.87	87.35	142.67	108.74	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.6	rasio posyandu per satuan balita	12.13	12.04	10.82	11.08	11.16	12,13	<
2.7	rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.26	0.27	0.28	0.28	0.32	0.053	<
2.8	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	<
2.9	rasio dokter per satuan penduduk	0,15	0,13	0,13	0,14	0,14	0,294	<
2.10	rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,28	0,27	0,25	0,31	0,29	2.384	<
2.11	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	82.49	81.68	81.68	83.97	35.88	84	<
2.12	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94.07	95.73	95.24	92.09	92.76	96	<
2.13	cakupan desa/keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	96.00	96.00	92.13	99.21	88.98	97	<
2.14	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	=
2.15	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98.73	95.51	34.84	105.89	96.85	-	-
2.16	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	2.21	4.38	4.44	3.31	4.45	-	-
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	9.08	8.88	32.96	36.02	7.64	-	-
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	29	>
2.19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	89.46	108.14	143.67	148.14	102.63	-	-
2.20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3.40	3,37	1.33	1.66	0,66	-	-
2.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	72,25	87,91	93,29	96,30	67,09	-	-
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93,15	96,56	97,44	97,07	97,74	-	-
2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	80	>
2.24	Penderita diare yang ditangani	192.76	172.05	156.49	159.15	99.79	-	-
2.25	Angka kejadian Malaria	<1	<1	<1	<1	0	-	-
2.26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0.006	<0.024	<0.026	<0.013	<0.013	-	-
2.27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	28,32	29,45	7,64	8,64	6,71	7	<
2.28	Cakupan kunjungan bayi	97,95	99,02	99,44	97,71	88,52	97	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.29	Cakupan puskesmas	136.4	145.4	154.6	154.6	154.6	136.36	>
2.30	Cakupan puskesmas pembantu	47,24	48,82	50,39	57,48	57,48	48,82	>
2.31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,02	96,50	95,53	97,05	88,34	-	-
2.32	Cakupan pelayanan nifas	92,61	95,73	93,13	92.37	92,71	-	-
2.33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	49,88	38,06	54,97	54,81	48,67	-	-
2.34	Cakupan pelayanan anak balita	88,53	90,09	91,41	88,26	66,39	-	-
2.35	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	59,57	-	-
2.36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	132.35	124.45	132.29	130.79	100	-	-
2.37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	-	-
2.38	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	-	-
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	Pekerjaan Umum							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	59,1	61,5	62,4	39,6	40,0	88,42	<
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0067	0,0065	0,0063	0,0063	0,0063	-	-
3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	59,05	61,45	62,37	39,59	40,00	-	-
3.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133	-	-
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91	86,70	>
3.6	Persentase drainase dalam kondisi baik	-	79,24	82,01	82,77	83,61	95	<
3.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,37	45,09	47,37	50,34	50,72	-	-
3.8	Rasio Jaringan Irigasi	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482	3,683	>
3.9	Persentase penduduk berakses air minum	32	36	47,55	49,59	57,17	-	-
3.10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	30,68	35,02	46,58	49,59	57,17	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.11	Persentase areal kawasan kumuh perkotaan	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	-	-
3.12	Penataan Ruang:							
3.13	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,11	0,12	0,13	0,14	0,13	-	-
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
4.1	Rasio rumah layak huni	0,168	0,168	0,169	0,174	0,177	89,30	
4.2	Rasio permukiman layak huni	0,71	0,74	0,74	0,74	0,75	-	-
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	81,69	80,81	82,46	84,56	86.65	-	-
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	47,91	48,52	54,71	54,92	58.12	-	-
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	71,94	74,95	74,98	74,98	75.74	-	-
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	1,10	
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,02	5,21	5,22	2,24	2,24	-	-
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	18,31	19,19	16,41	15,05	13.35	-	-
4.9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	44,88	46,46	53,54	59,06	67.02	-	-
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	11.33	10.62	9.32	9,32	9,12	-	-
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan	61.82	63.33	74.55	100	100	-	-
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.63	12.71	15.26	20.34	22,89	-	-
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	62.16	76.6	73.03	75.15	91.18	-	-
5.5	Persentase Penegakan PERDA	82.35	82.93	77.55	78.43	84.61	-	-
6	**Sosial**							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	38.23	42.15	3.57	30.90	79	-
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	-	33.81	36.94	36.59	26.39	-	-
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	35.06	34.91	32.20	28.32	-	-
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	0,00	62.50	77.78	100	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,00	0,00	0,00	44.44	70	-	-
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0,00	100	100	100	100	-	-
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0,00	100	100	100	100	-	-
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,00	9.28	8.24	7.71	7.39	-	-
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	**Tenaga Kerja**							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	7.25%	9.09%	11.76%	11.38%	22.82%	12	-
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10.00%	20.00%	16.67%	0,00	8.82%	-	-
1.3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70,96	73,33	73,41	73,82	75,75	-	-
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	100	100	100	100	-	-
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	0	100%	100%	100%	-	-
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.00	70.51	70.04	75.72	76.02	80	<
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67	-	-
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.00	29.49	29.96	24.28	23.98	17.19	>
2.4	Rasio KDRT	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0	>
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	6.96	7.03	11.83	12.44	80	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0.00	100	100	100	100	-	-
2.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0.00	100	100	100	100	-	-
2.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	0.00	67	90	89	94	-	-
2.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0.00	67	90	89	94	-	-
3	**Pangan**							
3.1	Ketersediaan pangan utama	65.90	72.17	86.75	81.77	83.67	-	-
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	5,947.42	3,457.15	4,383.08	3,731.26	3,258.86	-	-
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	66.66	70	69.2	55.5	0	-	-
4	**Pertanahan**							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	0	37.65	38.28	38.29	39.65	16.34	>
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	83.33	100	100	100	100	-	-
4.3	Penyelesaian izin lokasi	100	0	0	100	100	-	-
5	**Lingkungan Hidup**							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	-
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	-
5.3	Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	-
5.4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	0	46.25	50	36.40	89.19	-	-
5.5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	0	50.78	50.85	96.79	98.40	-	-
5.6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	0	70.24	70.24	76.48	76.48	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20	52	52	52	52	-	-
5.8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	1	0	-	-
5.9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	-	-
5.10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	1	0	-	-
5.11	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	ada	ada	ada	Tidak ada	-	-
5.12	Timbulan sampah yang ditangani	6.219	8.009	30.672	34.318	28.298	-	-
5.13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0	5,09	11,46	11,06	0	-	-
5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	15.5	19.52	73.18	80.01	64.68	-	-
5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	77.07	77.07	-	-	-	-
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Siipil**							
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.90	0.91	0.96	0.97	0.99	1	<
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.90	0.92	0.92	0.93	0.96	0.78	>
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	0.16	0.19	0.24	0.33	0.41	0.23	>
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	=
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	89.78	91.31	95.68	96.51	99.46	-	-
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89.79	92.02	92.36	93.48	95.54	-	-
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100	-	-
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	173,45	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,67	2,75	2,87	2,87	2,87	31,2	-
7.4	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	-	-
7.5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	100	-
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.05	1.66	1.63	1.99	1.99	-	-
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.76	2.31	2.21	2.21	2.21	-	-
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	31.25	32.14	32.14	32.14	-	-
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0	-	-
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	1	1	-	-
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4	-	-
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	1	1	-	-
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2	2	2	2	2,9	<
8.9	Ratio Akseptor KB	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47	70.00	>
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77.21	74.49	71.53	73.89	72.47	-	-
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Tidak Melakukan Pendataan	2.28	2.03	2.98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)	-	-
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61	-	-
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24.55	23.54	23.86	24.79%	24.98	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	29.55	34.22	37.21	26.66	37.98	-	-
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88.41	86.91	84.73	84.04	79.90	-	-
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	81.71	82.47	82.35	82.11	85.33	-	-
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	88.69	85.54	85.26	81.13	81.19	-	
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	9.09	9.09	9.09	-	-
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	418.18	445.45	418.18	445.55	436.36	-	-
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	-	-
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	1.03	0.94	0.88	0.86	0.86	-	-
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	-	-
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	122,11	121,22	128,73	138,24	113,76	-	-
8.24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	-	-
8.25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap des	Tidak Melakukan Pendataan	100	100	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19	-	-
8.26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	57.99	37.18	52.25	62.82	71.13	-	-
8.27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	21.27	21.05	22.76	25.29	21.77	-	-
8.28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18	18	19	19	19	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
8.29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.0068	0.0088	0.0058	0.0061	0.0058	-	-
9	**Perhubungan**							
9.1	jumlah arus penumpang angkutan umum	259.867	273.615	300.227	376.958	253.796	175.229	>
9.2	Rasio ijin trayek	0.0048	0.00014	0.00009	0.00014	0,00011	-	-
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	2022	2097	2302	2405	2640	5793	>
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	13	13	14	15	15	15	=
9.5	Persentase Layanan angkutan darat	0.263	0.266	0.227	0.124	0.183	-	-
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16.55	14.13	10.64	9.25	5.95	-	-
9.7	Pemasangaan Rambu - rambu	100	100	100	100	100	-	-
9.8	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	17.58	14.86	16.07	17.57	16.09	-	-
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	259.867	273.615	300.227	376.958	290.241	-	-
9.10		300.227	376.958	290.241	290.241	253.796	-	-
9.11	jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	259.867	273.615	300.227	376.958	253.796	-	-
		250.526	230.750	222.385	290.241	139.023	-	-
10	**Komunikasi dan Informatika**							
10.1	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	-	80.74	82.44	83.73	85.14	-	-
10.2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	29.13	33.07	43.93	53.44	-	-
10.3	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
10.4	Persentase Koperasi aktif	58.46	73.25	75.47	75.63	75,75	61,64	>
10.5	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	-	-
10.6	persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	-	-
10.7	Persentase Usaha Mikro dan kecil	94,84	94,41	94,42	94,41	95,28	68,06	<
11	**Penanaman Modal**							
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	35	39	37	26	21	<
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp. 498.800.000	Rp. 452.245. 000.000	Rp. 516.916. 000.000	Rp. 598.558. 569.406	Rp. 1.636.201. 132.539	450.000.000.000	>
11.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	Rp. 498.800.000	Rp.235.225. 507.125	Rp.396.134. 523.000	Rp.6.120.947. 250.000	Rp.2.185.879. 358.954	-	-
11.4	Rasio daya serap tenaga Kerja	208,5	367,3	202,8	162,3	278.9	182,2	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
11.5	kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	121,81	90,67	128,51	135,45	32,19	-	-
12	**Kepemudaan dan Olahraga**							
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0	28.57	43.24	40.59	40.54	-	-
12.2	persentase wirausaha muda	data tidak tersedia	data tidak tersedia	19	19	19	-	-
12.3	Cakupan pembinaan olaraga	24	24	30	48	0	-	-
12.4	Cakupan pelatih yang bersertifikat	data tidak tersedia	data tidak tersedia	17,68	26,14	26,14	-	-
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	0	100	100	100	0	-	-
12.6	Jumlah atlet berprestasi	data tidak tersedia	27	47	64	30	-	-
12.7	Jumlah prestasi olaraga	data tidak tersedia	5	5	6	3	-	-
13	**Statistik**							
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	-	-
13.2	Buku "Kabupaten dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	=
13.3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada	-	-
14	**Persandian**							
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	-	-
15	**Kebudayaan**							
15.1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	1	2	2	2	0	8	<
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	26	27	28	25	3	>
15.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	6	10	13	15	-	-
15.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	2	3	3	-	-
16	**Perpustakaan**							
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	14.405	23.220	2.183	2240	158	15161	<
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.48	0.30	0.39	0.39	0.39	12.000	-
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.28	0.29	1.06	1.1	1.10	-	-
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	10,131	19,350	18,010	13,112	11.962	-	-
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9,500	8,400	13,363	13,363	13,463	-	-
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	18	15	14	11	18	-	-
17	**Kearsipan**							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	20.51	48.72	58.97	87.18	-	-
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	2	3	4	100	<
	Layanan Urusan Pilihan							
1	**Pariwisata**							
1.1	Kunjungan wisata	N/A	144	147	122	32,6	-	-
1.2	Lama kunjungan wisata	0	2	2	3	3	-	-
2	**Pertanian**							
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,20	7,05	7,48	7,02	6,90	-	-
2.2	Cakupan bina kelompok petani	11,68	10,95	12,61	15,31	58,15	28,63	<
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
3.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	95,82	94,89	97,07	99,8	98,91	-	-
3.1	**Perdagangan**							
3.2	Ekspor Bersih Perdagangan	468.926.145,86	475.387.123,47	658.612.319,17	660.572.391,96	773.511.973,67.	890.000.00,00	<
3.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	65.25	56.57	13.91	18.20	29.02	75 %	-
4	**Perindustrian**							
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	5.51%	5.51%	6.34%	6.47%	7.04%	2.2	-
5	**Transmigrasi**							
5.1	Persentase transmigran swakarsa	Tidak ada Penempatan Transmigrasi Swakarsa Tahun 2016-2020					-	-
6	**Kelautan dan Perikanan**							
6.1	Produksi perikanan	99.98	100	100	100	101	8.875	-
6.2	Konsumsi ikan	101	100	100	100	100	90%	-
6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	5.73	8,80	19.53	8.46	12.68	70%	
6.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	40.69	37.61	40.21	46.92	37.58	-	-
6.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	-
6.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-
6.7	Nilai Tukar Nelayan	103,49	103,56	103,71	103,86	103,92	-	-
	Penunjang Urusan							
1	**Perencanaan Pembangunan**							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	-	-	-	-
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	-	Ada	-	-	-	-
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	=
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	88,80	97,93	98,73	97,49	97,29	100	<
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	94,46	94,59	95,49	93,15	93,34		
2	**Keuangan**							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
2.2	Persentase SILPA	11.35	7.41	3.13	1.72	5.07	-	-
2.3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	24.02	21.06	21.78	22.43	23.25	-	-
2.4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	14.20	16.54	20.44	19.57	23.62	-	-
2.5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	60/40	59/41	59/41	56/44	51/49	-	-
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 7 Tahun 2016,tentang perubahan APBD Tanggal 25 Oktober 2016)	Tepat Waktu (Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang perubahan APBD tanggal 23 Desember 2017)	Tepat Waktu (Perda Nomor 10 Tahun 2018,tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)	-	-
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	4 JP	24 JPi	10 JP	6 JP	1 JP	-	-
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15.06%	22.38%	20.03%	17.81%	6.46%	-	-
3.3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	56.05%	64.19%	80.02%	84.18%	88.07%	-	-
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26 Orang	23 Orang	27 Orang	30 Orang	27 Orang	-	-
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1076 Orang	755 Orang	665 Orang	802 Orang	787 Orang	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2415 Orang	2654 Orang	2679 Orang	2640 Orang	2572 Orang	-	-
4	**Penelitian dan Pengembangan**							
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	0	0	100	100	50	-	-
4.2	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	5.13	5.13	7.69	10.25	23.08	-	-
5	**Pengawasan**							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	83.37	89.87	80.44	73.51	23.16	-	-
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0	0	0	-	-
5.3	Jumlah temuan BPK	9	7	6	23	8	-	-
6	**Sekretariat Dewan**							
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat alat kelengkapang DPRD kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada	-	-
6.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	ada	ada	ada	ada	ada	-	-
6.3	Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	ada	ada	ada	ada	ada	-	-
1	**Aspek Daya Saing Daerah**							
1.1	Kemampuan ekonomi daerah							
1.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)	-	-	512070	471673	471209	-	-
1.3	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)	-	-	559630	643855	741527	-	-
2	**Iklim Berinvestasi**							
2.1	Angka kriminalitas	0.001	0.002	0.002	0.001	0.0007	-	-
2.2	Jumlah demostrasi	-	-	33	29	28	-	-
3	**Sumber Daya Manusia**							
3.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-
3.2	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	50.67	49.91	51.02	50.41	50.47	-	-

2.6 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 2. 332 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020 (capaian SPM 2016 – 2018)

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	PENDIDIKAN							
1	**Pendidikan Dasar**							
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	%	NA	NA	NA	84,99	88,19
2	**Pendidikan Kesetaraan**							
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	NA	NA	NA	75,72	51,98
3	**Pendidikan Anak Usia Dini**							
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	%	NA	NA	NA	44,32	62,73
	KESEHATAN							
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**							
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	%	95,03	NA	NA	97,05	88,34
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**							
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	%	94,07	NA	NA	92,42	92,76

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**							
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	NA	NA	NA	96,40	96,23
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**							
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	86,07	69,31
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**							
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	%	NA	NA	NA	100	NA
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**							
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	44,02	23,50
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**							
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	81,26	71,84
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**							
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	30,27	28,70
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus**							
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	67,05	29,72
10	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**							
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang	100	%	NA	NA	NA	41,44	41,97

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun							
11	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB**							
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayana TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	100	100
12	**Pelayanan Kesehatan Orang denga Resiko Teninfeksi HIV**							
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	%	NA	NA	NA	100	100
	PEKERJAAN UMUM							
1	**Penyediaan kebutuhan pokok Air minum**							
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	100	%	NA	NA	NA	45,90	
	1). Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	%					57,48
	2). Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	%					31,93
2	**Penyediaan pengelolaan air limbah domestic**							
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	100	%	NA	NA	NA	76,07	
	1.Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	%					97,91
	2. Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses aman	100	%					7,31
	PERUMAHAN RAKYAT							
1	**Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten**							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	NA	NA	NA	100	NA
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah**							
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang	100	%	NA	NA	NA	NA	NA

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni							
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	NA	NA	NA	100	100
2	**Pelayanan informasi rawan bencana**							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	18,05
3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	14,41
4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	NA	NA	NA	NA	100
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananPenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	NA	NA	NA	100	100
	SOSIAL							
1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti**							
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	95
2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**							
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	50
3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**							
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	100	97
4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**							

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian SPM				
				2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten**							
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	NA	NA	NA	NA	184

2.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasii ke generasi berikunya. Regulasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/ SDGs telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/ SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Mellenium Development Goals/ MDGs) yang merupakan komitmen global dan Nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkulaitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;

12. Komsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya memiliki 197 target indikator yang relevan untuk dicapai. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang ditetapkan sebagai kewenangan kabupaten namun tidak terdapat di Kabupaten Luwu Timur, seperti indikator terkait jalan tol, rel kereta api, daerah tertinggal, kota metropolitan, DAS Perioritas. Selain itu terdapat beberapa indikator yang ditetapkan secara nasional lebih cocok untuk di ukur pada level provinsi. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Luwu Timur terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 35,53% atau sebanyak 70 indikator, dari total 197 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, sebanyak 28,43% (56 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 16 indikator atau 8,12% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 27,92% atau 55 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Luwu Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** dan Tabel 2. 333 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 334 Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	70	35,53
2	B	56	28,43
3	C	16	8,12
4	D	55	27,92
Total Indikator		197	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

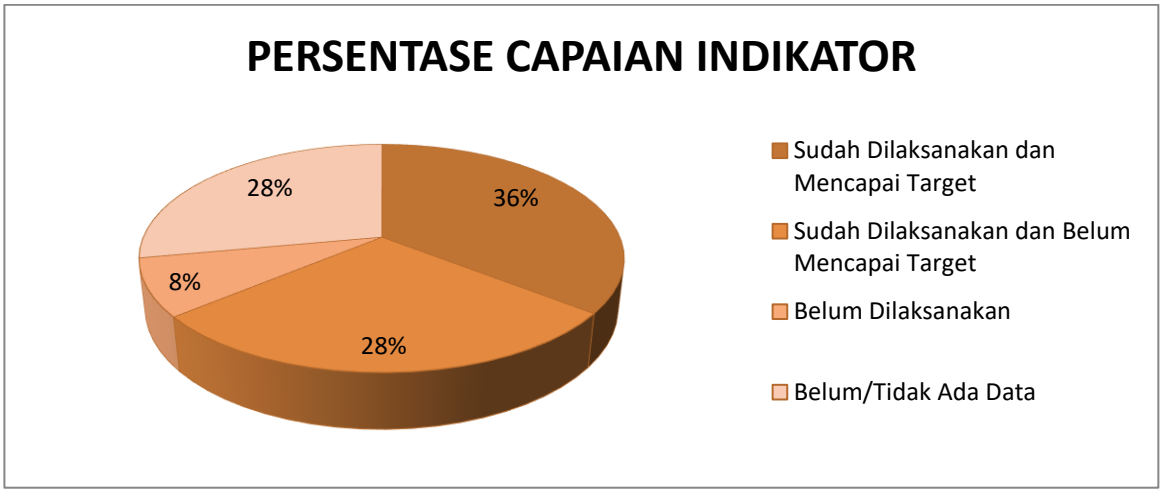

Gambar 2. 2 Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 17 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) dan TPB 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) memiliki indikator paling banyak masing-masing 9 indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) dengan 4 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 10 Indikator. Data lengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 335 Pencapaian Indikator (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	Menurun menjadi 7-8%	7.52	7.66	7.23	6.98	6.85
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 90%	68.00	100.00	100.00	97.00	97.00
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 70%	94.07	95.73	95.24	92.90	92.76
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 63%	96.00	96.00	92.13	99.21	88.98
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 65%	77.21	74.48	71.53	73.89	72.47
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	70.34	87.86	93.88	97.43	97.91

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 94.78 %	99,18	99,02	92,03	92,39	92,54
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 82.2%	93.47	80,0	95.73	95.97	95.99
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	Meningkat menjadi 77.4 %	67.59	71.15	75.55	80.11	81.53
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 17%	0,23	1,4	2,15	2,18	2.02
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	Menurun	na	5.7	7.3	7.13	6.2
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 28%	8.30	15.10	10.87	10.91	na
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 50%	74.92	73.07	72.94	66.84	na
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	Skor PPH- 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan- 54,5 kg/kapita/thn	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian		PM					
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	Menurun	87,89	69,87	87,35	142,67	108,74
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	94.07	95,73	95,24	92.9	92,76
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 85%	94.07	95,73	95,24	92.9	92,76
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1.76	0.87	1.4	0.89	0.72
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	5.27	5.24	5.07	0.06	4.61

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	7.56	6.11	7.34	8.03	8.16
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	96.00	96.00	92.13	99.21	88.98
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 0.5%	<0,007	<0,024	<0,027	<0,013	<0,013
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	Menurun menjadi 245	100	100	100	100	100
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	Menurun	<1	<1	<1	<1	0
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	SEKOLAH	Menurun menjadi 0.02%	0	0	0	0	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 66%	77.21	74.48	71.53	73.88	na
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 65%	77.21	74.48	71.53	73.88	na

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	~~%~~	Meningkat menjadi 23, 5%	24.55	23.54	23.86	24.79	24,98
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi38	30,3	30,6	30,8	32,3	32,3
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi 2.28	2.31	2.21	2.21	2.21	2.21
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	68.00	100.00	100.00	97.00	97.00
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat	91	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat	2.42	2.64	2.62	2.72	
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 114.9 %	102.31	102	102.24	102.94	103.13

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 106.94 %	106.13	103	103.48	103.5	103.56
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 8.8 tahun	7.88	8.20	8.45	8.54	8.80
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 77.2 %	38.39	38.39	39.79	45.71	46.11
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Meningkat menjadi 70%	0	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1.(b)	Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Menurun menjadi 38 tahun	30,3	30,6	30,8	32,3	32,3
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Meningkat menjadi 16, 6%	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi 9.9 %	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	79.15	82.05	82.00	89.41	na
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	79.15	82.05	82.00	89.41	na
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100%	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	Meningkat	127	127	127	127	127
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	Meningkat	78	78	78	97	97
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	Meningkat	1	1	1	1	1
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Juta	Meningkat	1.58	3.07	3.39	1.17	1.46
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Juta	Meningkat menjadi 50 Juta	61.72	63.71	69.41	70.06	70.49
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	Meningkat	7	7	7	8	8
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mengusai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	80.74	82.44	83.73	85.14
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	Menurun menjadi 0.36	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	BPS	%	Menurun menjadi 7-8%	7,52	7,66	7,23	6,96	6,85
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	Berkurang	67	67	65	21	na
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	Meningkat	0	1	1	1	1
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	23	18.83	16.81	16.94	17.43	17.74
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	Menurun	na	342,370,000	4,878,690,000	50,000,000	575,004,000
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	-	1	-	-	-
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	Meningkat	1	1	1	1	1
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	-	1	-	-	-
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	WTP	Meningkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Skor	Meningkat	48.04	55.86	58.08	60.17	61.06

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	Menjadi 80 %	55.25	49.37	31.86	42.57	34.43
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	Meningkat	-	-	-	-	30,13
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Meningkat menjadi 16.6 %	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat	0.90	0.92	0.90	0.93	0.96
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat menjadi 77.4 %	89.79	92.05	92.36	93.48	95.54
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat menjadi 85 %	89.79	92.05	92.36	93.48	95.54

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	Meningkat	12.52	18.67	18.06	20.71	22.76
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.2.(b)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	Meningkat	89.94	93.75	87.5	100	100.00
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	Meningkat	90.48	84.21	96.67	93.33	93.33
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam	BPS	%	Meningkat	-	-	6	6	6

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).								
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	Meningkat	55.00	53.18	55.45	57.73	59.09
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	%	Meningkat	5,888	7,835	6,202	9,746	9,746
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	Meningkat	84.92	100.00	97.40	100.00	100.00

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sejak periode yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Gambaran keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah selama satu periode Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Analisis tersebut memuat kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan kerangka pendanaan masa lalu untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, sebagai landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode ke depan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sturuktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan yang dimulai T.A 2021, secara teknis pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan dan Penganggaran, Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistem yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam

Negeri yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis web yang memuat Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Timur tahun 2021-2026 ini, pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang sangat terkait dengan proses penetapan arah perencanaan pembangunan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Dalam merumuskan Perencanaan strategis, di perlukan perencanaan anggaran yang memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan. demikian pula halnya dalam merumuskan perencanaan pendapatan perlu dipastikan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah di masa yang akan datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Salah satu kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Luwu Timur adalah kinerja pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan kapasitas atau kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. kinerja pelaksanaan APBD 5 tahun

sebelumnya dapat dilihat pada capaian realisasi pendapatan, belanja, defisit, terhadap target selama lima tahun serta Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2016-2020.

Tabel 3.1
Capaian Realisasi Pendapatan dan belanja terhadap target
Tahun 2016-2020

Tahun	*Target Pendapatan*	*Realisasi*	*(%)*
2016	1.436.866.872.462,00	1.414.058.832.305,76	98,41
2017	1.388.302.389.435,00	1.365.172.782.139,53	98,33
2018	1.493.024.683.089,90	1.466.152.959.823,12	98,20
2019	1.576.504.544.799,42	1.513.997.519.184,08	96,04
2020	1.475.087.649.260,13	1.495.670.435.578,65	101,40
Tahun	*Target Belanja*	*Realisasi*	*(%)*
2016	1.553.764.811.738,00	1.374.892.757.226,31	88,49
2017	1.544.366.403.790,00	1.416.274.050.915,24	91,71
2018	1.591.059.131.709,95	1.520.109.440.833,57	95,54
2019	1.609.008.544.799,42	1.520.300617.280,13	94,49
2020	1.489.289.489.113,78	1.436.964.978.788,05	96,49

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Pada Tabel 3.1 diatas, dapat di jelaskan untuk Realisasi Pendapatan terhadap Target selama tahun 2016-2019 menunjukkan hal yang positif dengan capaian rata-rata diatas 90 Persen sedangkan untuk tahun 2020 mengalami over dari target dikarenakan adanya penghematan belanja. Sedangkan untuk Realisasi belanja juga menunjukkan hal yang positif selama lima tahun terakhir dengan serapan belanja dari tahun 2017 sampai dengan 2020 diatas 90 persen. sedangkan untuk tahun 2016 tidak mencapai 80 persen. hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 adanya kebijakan dari pusat untuk melakukan pemangkasan anggaran.

Tabel 3.2
Capaian Realisasi Defisit dan Silpa terhadap target
Tahun 2016-2020

Tahun	*Target Defisit*	*Realisasi*	*(%)*
2016	(116.897.939.276,00)	(39.166.075.079,45)	(33,50)
2017	(156.064.014.355,00)	(51.101.268.775,71)	32,74
2018	(98.034.448.620,05)	(53.956.481.010,45)	55,04
2019	(32.504.000.000,00)	(6.303.098.096,05)	19,59
2020	(14.201.839.853,65)	58.705.456.790,60	(413,3)
Tahun	*Target Silpa*	*Realisasi*	*(%)*
2016	116.897.939.276,00	156.064.014.355,86	133,50
2017	156.064.014.355,00	104.962.745.580,15	67,26
2018	104.962.745.580,05	47.504.937.949,70	45,26
2019	47.504.000.000,00	26.201.839.853,65	55,16
2020	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25	278,25

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Dalam kurun lima tahun, pengelolaan defisit anggaran menunjukkan hal yang positif, dengan capaian realisasi defisit selama tahun 2016-2019 cenderung di bawah dari target defisit yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami surplus diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang berakibat pada penghematan belanja pemerintah dan pembatasan kegiatan. Pada sisi Silpa selama lima tahun terakhir juga menunjukkan hal yang positif, hal ini terlihat adanya penurunan silpa dari tahun ketahun yang mencerminkan serapan anggaran cukup ideal yang meggambarkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang di rencanakan. Khusus untuk tahun 2020 capaian silpa sangat tinggi, selain diakibatkan oleh pandemi yang menyebabkan pembatasan kegiatan, juga diakibatkan oleh adanya pos anggaran belanja dan telah ada peruntukannya tidak terserap secara maksimal sehingga dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan Penerimaan Pendapatan dan alokasi anggaran belanja daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antar kegiatan, antar program, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan hal yang positif dengan kinerja yang meningkat. hal ini dapat di lihat dengan capaian realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sejalan dengan target yang telah di tetapakan, dengan melihat capaian realisasi pendapatan dan belanja dengan capaian rata-rata diatas 90 persen, pelekasanaan defisit yang menunjukkan trend menurun selama lima tahun terkahir dan capaian pelaksanaan silpa yang sesuai dengan target yang ditetapkan dan Opini BPK terhadap Laporan Keaungan Daerah yang memperoleh predikat WTP selama lima tahun berturut-turut. hal ini tidak terlepas dari peingkatan kapasistas SDM, konsitensi perencanaan dan pelaksanan, peningkatan pengawasan dan pembinaan serta dukungan penggunanaan Informasi Tekhnologi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu timur khusus untuk Pendapatan dan Belanja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan menyajikan gambaran Ratio Kemandirian Keuangan daerah, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase

Capaian relisasi pendapatan,belanja, defisit,silpa dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

a. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya. dengan mengukur persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan. dari Tahun 2016 sampai dengan 2020, Ratio kemandirian keuangan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend peningkatan di kisaran 12 persen – 22 persen. ratio kemandirian terendah pada tahun 2016 di kisaran 12 persen. dan pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan..

Untuk Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu melalui Peta Kapasistas Fiskal Daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah yang di keluarkan oleh Kementrian Keuangan RI setiap tahunnya. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang di keluaran setiap tahun, peta kapasitas fiskal daerah dibagi menjadi 4 Kategori, yaitu Rendah, Sedang dan tinggi. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada kategori sedang dan tinggi. hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan sebagai salah satu indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah cukup baik.

Tabel 3.3
Ratio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-202

Tahun	Ratio Kemandirian (%)	IKF	Kategori
2016	*12,52*	*1,43*	*Tinggi*
2017	*18,67*	*0,95*	*Sedang*
2018	*18,05*	*1,14*	*Tinggi*
2019	*20,71*	*1,29*	*Tinggi*
2020	*22,01*	*1,12*	*Sedang*

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Luwu Timur) Kementrian Keuangan RI

b. Capaian Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, defisit dan Silpa

Persentase realisasi Pendapatan dari tahun 2016-2019 dikisaran >90%, sedangkan untuk tahun 2020 realisasi pendapatan diatas 100 persen atau melebih dari target yang telah ditetapkan. sedangkan untuk persentase capaian realisasi belanja dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di kisaran 88-96 persen. selama lima tahun terakhir pelaksanaan belanja daerah cukup konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga serapan belanja mencapai rata-rata 90 persen tanpa melampaui realisasi pendapatan daerah yang berimplikasi pada SILPA yang menunjukkan angka positif selama lima tahun terakhir sebagai penutup defisit yang telah di tetapkan

Grafik 3.1
Capaian Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap target Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020

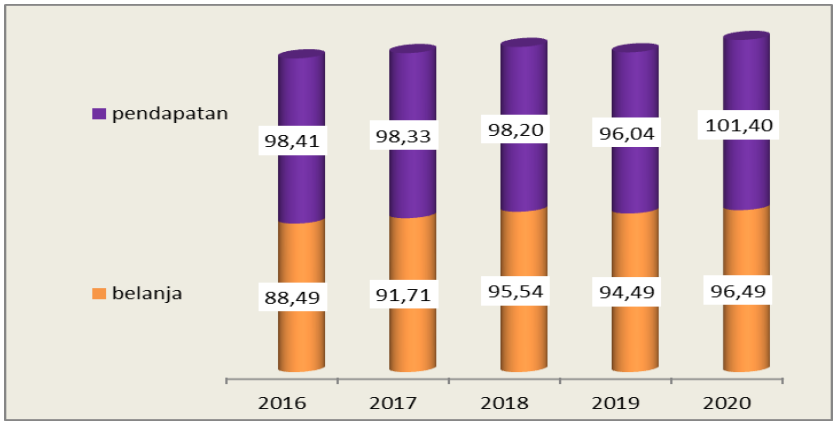

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Defisit dan Silpa menjadi salah satu indikator penilaian dalam tata kelola keuangan daerah. untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan belanja daerah dapat dilihat sejauh mana realisasi defisit terhadp target defisit yang telah di tetapkan, serta penggunaan SiLpa dalam menutup defisit.

Kementrian Keuangan RI telah menetapkan batas defisit yang dikeluarkan setiap tahun. batas defisit kategori > 4% (kategori tinggi), 3% (kategori sedang) dan < 3% kategori rendah. Selain itu, Silpa yang tinggi menggambarkan belanja yang tidak terserap secara maksimal. selama lima tahun terakhir pelaksanaan batas defisit APBD Kabupaten Luwu Timur sangat dinamis, namun tidak pernah mencapai batas kategori tinggi. untuk tahun 2016 realisasi defisit sebesar (2,77%) kategori rendah, 2017 sebesar (3,74%) kategori sedang, 2018 sebesar (3,68%) kategori sedang, 2019 (0,42%) kategori rendah dan untuk pelaksanaan APBD 2020 mengalami surplus.

Grafik 3.2
Capaian Realisasi Defisit, Surplus dan Silpa
Tahun 2016-2020

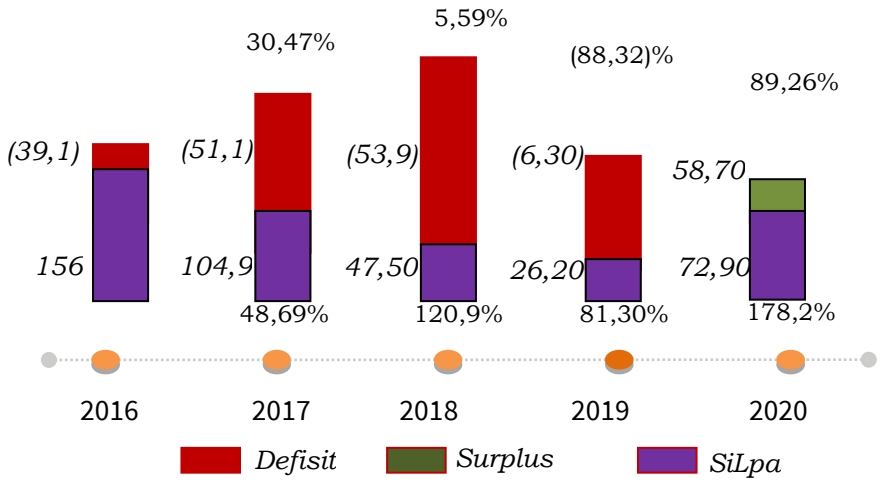

Pada Grafik 3.1, realiasi defisit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami pengingkatan. dari tahun 2016 ke tahun 2017 kenaikan defisit sebesar 30,47 persen, 5,59 persen tahun 2018. Dan mengalami penurunan sebesar 88,32% pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 pelaksanaan APBD mengalami surplus. Sedagnkan untuk SiLpa, selama empat tahun terakahir cenderung mengalami penurunan. Tahun 2017 mengalami penurunan 48,69 persen dari tahun 2016. Tahun 2018 turun sebesar 120,9 persen dan tahun 2019 turun sebesar 81,30 persen. hal ini mencerminkan pelaksnaaan program kegiatan dengan distribusi anggaran yang telah disediakan dapat terserap dengan cukup baik. khusus untuk tahun 2020 Silpa mengalami peningkatan sebesar 178,2 persen, dikarenakan kondisi tahun 2020 adalah tahun pandemi covid-19 yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal.

Tabel 3.4
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur
Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET OPINI BPK RI	REALISASI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber Data : BPK RI

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian sistem. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah penyajian material.

Dari tahun 2016-2020, Pemerintah Daerah Luwu Timur telah menyajikan Laporan Keuangan yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan Pemerintah Daerah Luwu Timur dalam menyajikan laporan keuangan daerah telah memenuhi standar Laporan keuangan yang telah di tetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

3.1.1.1 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah dan sebagai pengendali defisit anggaran. Struktur Pendapatan pada

tahun 2016-2020 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dengan menetapkan tujuan Kebijakan Pendapatan Daerah untuk :

1. Mengoptimalkan Sumber-sumber Penerimaan Daerah
2. Meningkatkan Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
3. Mengoptimalkan Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah
4. Meningkatakan penguatan regulasi tentang Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan penyertaan modal

Adapun Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 dilakukan melalui:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
2) Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
3) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
5) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
6) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2020

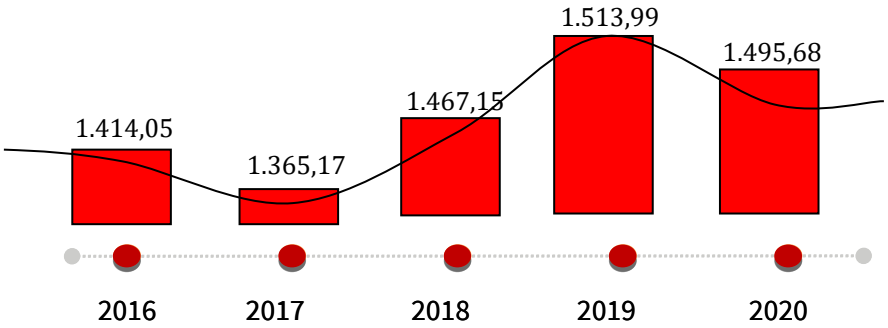

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain.

Grafik 3.4
Capaian Realisasi PAD Tahun 2016-2020

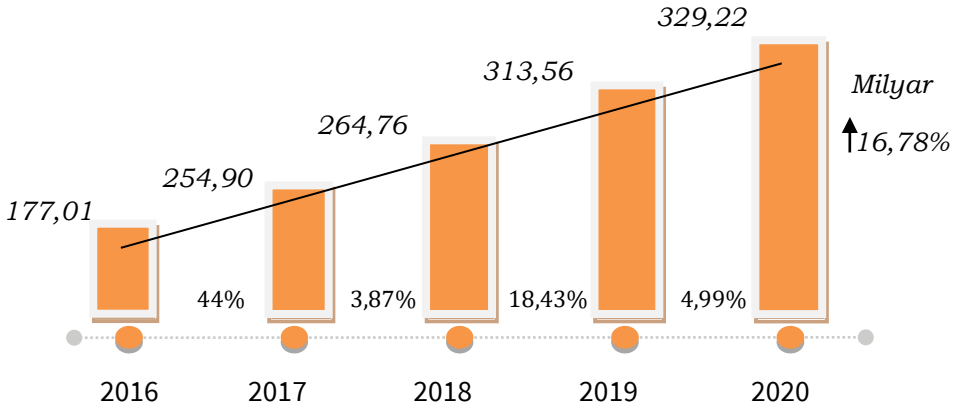

Tabel 3.5
Capaian Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2016	*177.018.897.819*	*87.262.964.488*	*6.231.131.540*	*20.417.954.358*	*63.106.847.433*
2017	*254.902.886.906*	*139.811.835.913*	*6.234.833.296*	*32.076.032.045*	*76.780.185.651*
2018	*264.769.982.685*	*135.222.909.760*	*4.867.621.007*	*25.666.782.331*	*99.012.669.586*
2019	*313.564.038.877*	*168.433.208.386*	*4.187.811.316*	*26.214.125.742*	*114.728.893.432*
2020	*329.220.137.283*	*192.720.735.828*	*4.505.935.086*	*23.835.212.109*	*114.810.176.051*
%	***16,78***	***21,91***	***(7,78)***	***3,94***	***16,14***

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur) Auditied

Dari Tabel 3.1 diatas, untuk Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Proporsi tertinggi dalam capaian realisasi PAD ada pada Pajak Daerah dengan Proporsi mencapai 50 persen dari total Pendapatan Asli Daerah. disamping itu capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, untuk tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan. untuk pajak daerah naik sebesar 60 Persen, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 57 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 21 persen. peningkatan realisasi PAD dengan rata-rata pertumbuhan 16,78% selama lima tahun, tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan pendapatan dan upaya dalam menggali sumber-sumber PAD yang baru.

Grafik 3.5
Capaian Realisasi Pajak Daerah tahun 2016-2020

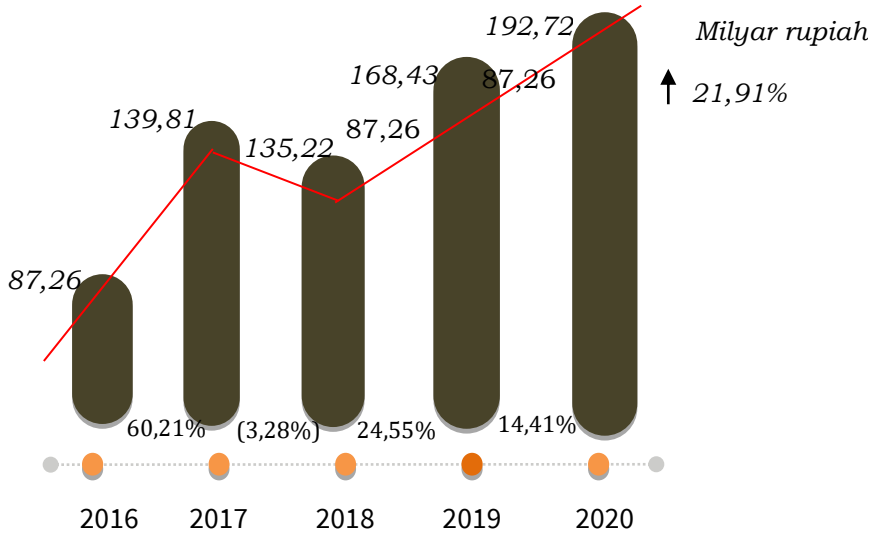

Pajak Daerah selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan hal yang positif dengan kanaikan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 21,91persen. pertumbuhan realisasi pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 60,21% dari tahun 2016, dan mengalami penuruanan sebesar (3,28%) pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 peningkatan sangat flutuatif dan tidak signifikan sebesar 24,55% dan 14,41%.

Pajak daerah merupakan sub sektor PAD yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD di bandingkan sub sektor yang lain. Sedangka sub sektor pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada Pajak daerah dari tertinggi dan terendah dengan persentase pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun adalah : bea perolehan ha katas tanah dan bangunan 50,01%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25,97%, pajak air bawah tanah 19,05%, pajak reklame 18,23%, pajak penerangan jalan 16,39%, pajak restoran 12,28%, pajak hiburan 11,48% dan pajak hotel minus (4,29%). rendahnya pertumbuhan persentase pajak hotel disebabkan implikasi dari covid-19 yang terjadi di tahun 2020 sehingga menurunnya pengunjung dan pengguna hotel.

Grafik 3.6
Capaian Realisasi Retribusi Daerah
tahun 2016-2020

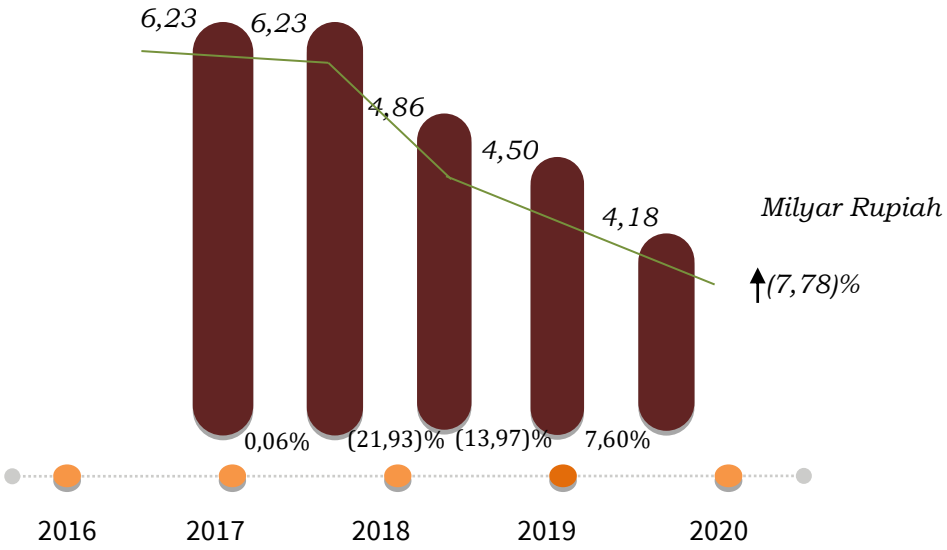

Retribusi Daerah sebagai sub sektor ke dua PAD, selama lima tahun terakhir capaian realisasinya cenderung mengalami penurunan. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan yang tajam dan signifikan terajdi pada tahun 2018 dengan persentase penurunan sebesar (21,93)% dibandingkan tahun 2017 dan (13,97)% pada tahun 2019 dan tumbuh tidak signifikan sebesar 7,60 % di tahun 2020. penurunan ini disebabkan oleh capaian pada komponen retribusi perizinan tertentu tumbuh minus sebesar (10,84).

Grafik 3.7
Capaian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan tahun 2016-2020

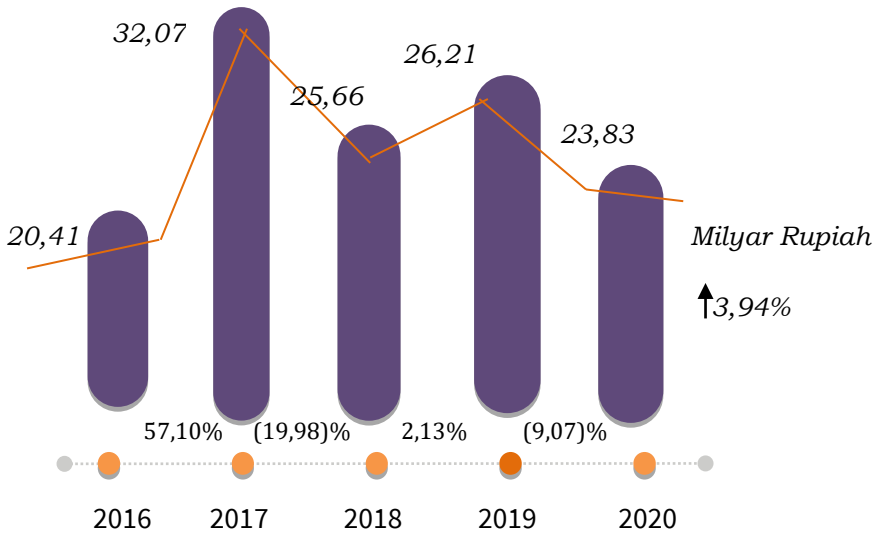

Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangannya fluktuatif dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,94%. tahun 2017 merupakan capaian tertinggi selamat lima tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 57,10 persen. sedangkan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 19,98 persen.

Grafik 3.8
Capaian Realisasi Lain-lain PAD yang sah
2016-2020

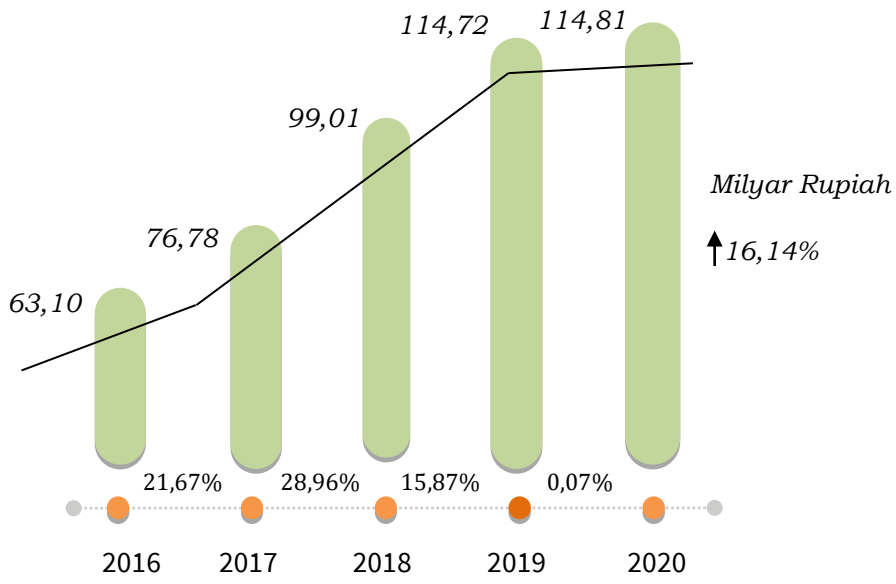

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sub sektor PAD yang memberikan kontrubisi terbesar setelah pajak daerah. dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, capaian realisasinya terus tumbuh dengan persentase rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,14 persen. persentase peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 28,96% dan tahun 2019 sebesar 15,87%.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk Komposisi Pendapatan daerah, Dana Perimbangan menempati Proporsi yang terbesar. Hal ini menunujukkan untuk Pendapatan Daerah, Kabupaten Luwu Timur masih tergantung dari dana perimbangan.

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2016-2020

Tahun	DANA PERIMBANGAN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)
2016	*932.434.270.075*	*190.296.048.420*	*550.581.811.000*	*191.556.410.655*
2017	*786.407.535.589*	*73.570.711.179*	*545.609.968.000*	*167.226.856.410*
2018	*873.706.953.349*	*107.080.369.038*	*545.609.968.000*	*221.016.616.311*
2019	*834.360.290.818*	*116.175.746.971*	*557.933.304.000*	*160.251.239.847*
2020	*766.923.342.007*	*105.117.724.030*	*508.456.665.000*	*153.348.952.977*
%	***(4,77)***	***(13,79)***	***(1,97)***	***(5,41)***

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Pada Tabel 3.6 Capaian Realisasi Dana Perimbangan dari tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Capaian realisasi tertinggi pada tahun 2016 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp.146.026.734.486, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp.87.299.417.760 pada tahun 2018. Sedangkan untuk dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp.39.346.662.531 dan Rp.67.436.948.811 untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Mengingat dana perimbangn adalah dana transfer pemerintah pusat, sehingga alokasinya sangat dinamis selama lima tahun terakhir.

Grafik 3.9
Capaian Realisasi Dana Perimbangan
tahun 2016-2020

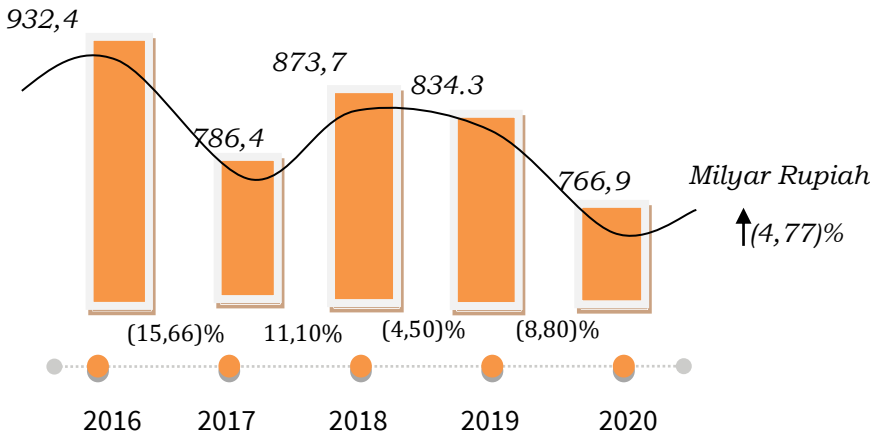

Penurunan Capaian Dana Perimbangan dalam kurun waktu lima tahun terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar (15,66%) dibandingkan tahun 2016. penurunan ini dipengaruhi oleh komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor DAK Fisik yang berkurang sebesar Rp.35.795.513.405. selain itu, capaian untuk DAK fisik untuk dua tahun terakhir juga cenderung mengalami penurunan.

Grafik 3.10
Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil
tahun 2016-2020

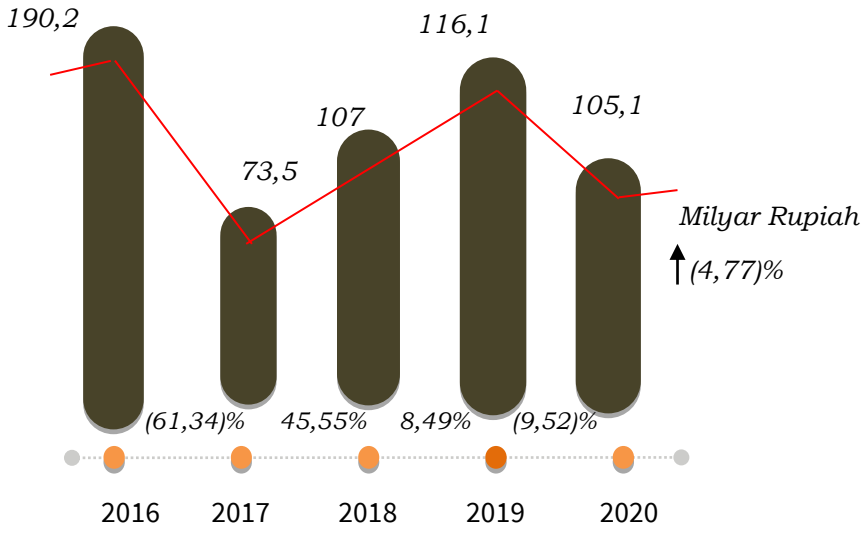

Untuk Dana Bagi Hasil yang merupakan komponen pada Dana Perimbangan, capaian realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sangat fluktuatif. penurunan signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar (61,34) Persen, yang di pengaruhi oleh komponen bagi hasil bukan pajak (SDA) yang mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.108.742.160.998 atau 72,24 persen.

Grafik 3.11
Capaian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
tahun 2016-2020

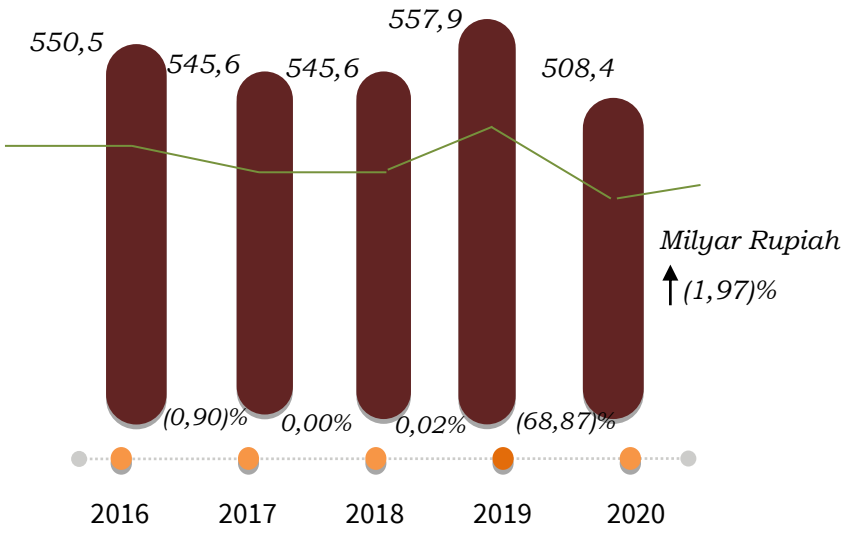

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian.

Capaian Realiasi DAU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung stabil di kisaran 50 Milyar, kenaikan dan penurunan dalam rentang empat tahun terakhir tidak begitu signifikan. penurunan sebesar (8,87) persen hanya terjadi pada tahun 2020. hal tersebut adalah konsekuensi dari pandemi Covid-19 yang

berpengaruh pada Ekonomi global dan Penerimaan Negara yang berimplikasi pada penurunan Transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Grafik 3.12
Capaian Realisasi DAK Tahun 2016-2020

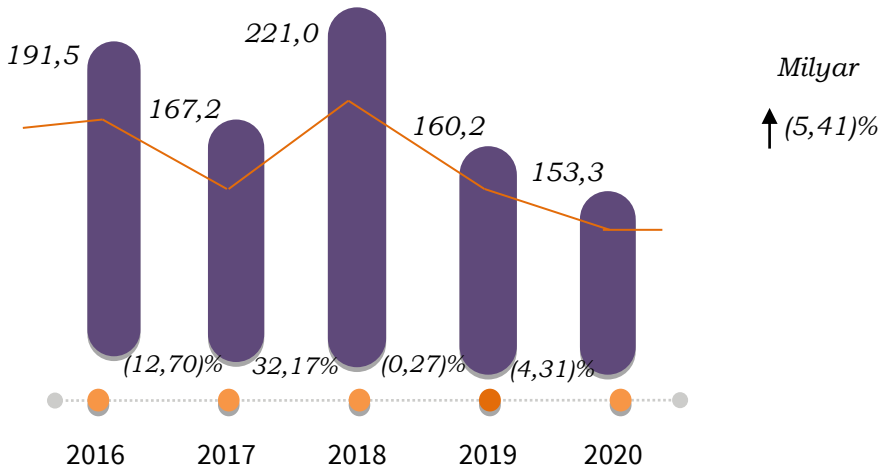

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pendapatan APBN yang penyalurannya di tetapkan melalu Peraturan Menteri Keuangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan.

Capaian Realiasi DAK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif, capaian tertinggi berada pada tahun 2018 yang mencapai 32,17 persen dibandingkan tahun 2017. Sedangkan tahun 2020 merupakan capaian yang terendah selama lima tahun terakhir dengan persentase penurunan sebesar (4,31) persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini ini terjadi pada DAK Non Fisik sebesar (10,09) persen

C. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Capaian realiasasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2016-2020, cenderung mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,22 persen. selama lima tahun terakhir, capaiana reallisasi pendapatan daerah yang sah memperlihatkan pertumbuhan yang positif dengan trend peningkatan dari tahun ke tahun. pertumbuhan yang positif ini lebih di pengaruhu oleh komponen Dana penyesuaian otonomi khusus dan DBH Provinsi yang secara konsisten tumbuh secara positif dengan rata-rata pertumbuhan 8,69 dan 3,03 persen selama lima tahun. sedangkan untuk komponen pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari propinsi pertumbuhannya sangat fluktuatif.

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Tahun 2016-2020

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Pendapatan Hibah	DBH Provinsi	Dana Penyesuaian otonomi Khsusus	Bantuan Keuangan dari Propinsi
2016	*304.605.664.411*	*90.036.251.044*	*118.953.266.431*	*82.723.388.000*	*12.892.758.936*
2017	*323.862.359.644*	*77.313.697.128*	*132.392.915.316*	*106.640.948.000*	*7.514.799.200*
2018	*328.676.041.789*	*80.243.287.681*	*105.717.522.011*	*133.747.559.000*	*8.967.673.097*
2019	*366.073.189.488*	*75.012.621.726*	*145.421.716.362.*	*138.050.397.000*	*7.588.454.400*
2020	*388.391.724.288*	*114.784.195.738*	*134.014.732.222*	*115.448.707.000*	*24.144.089.328*
%	***4,22***	***6,26***	***3,03***	***8,69***	***16,98***

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Grafik 3.13
Capaian Realisasi lain-Lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2016-2020

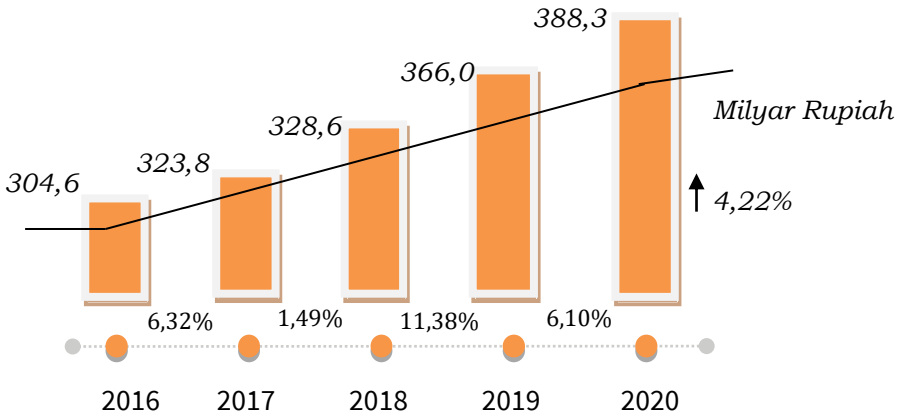

Pada grafik 3.13 terlihat capaian realisasi lain-lainpendapatan daerah yang sah dalam lima tahun terakhir, dibandingkan 3 tahun sebelumnya peningkatan persentase tertinggi ada pada tahun 2019 sebesar 11,38 persen yang bersumber dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi.

Tabel 3.8
Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Dari Provinsi Sulawesi Selatan Ke Pemerintah Daerah Kab.Luwu TimurTahun 2016-2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea balik nama kendaraan bermotor	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Pajak air permukaan	Pajak Rokok
2016	*11.473.496.598*	*11.383.624.689*	*32.552.879.064*	*49.902.546.592*	*13.640.719.488*
2017	*11.761.190.545*	*10.550.652.646*	*29.258.880.100*	*67.856.398.623*	*12.965.793.402*
2018	*11.301.995.930*	*8.972.563.732*	*22.897.548.435*	*49.692.069.451*	*12.853.344.463*
2019	*16.095.848.893.*	*12.622.052.029*	*36.501.061.047*	*65.498.326.817*	*14.704.427.576*
2020	*12.394.681.138*	*8.540.388.899*	*25.565.641.746*	*71.849.073.971*	*15.664.946.468*
%	***1,95***	***(6,93)***	***(5,86)***	***9,54***	***3,52***

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Salah satu komponen utama dalam lain-lain pendapatan deerah yang sah adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu timur, yang terdiri dari Pajak Kendaraan bermotor tumbuh 1,95%, Bea balik nama kendaraan bermotor (6,93)% pajak bahan bakar kendaraan bermotor (5,86)% pajak air permukaan 9,54% dan Pajak rokok 3,52%. Semua komponen dana bagi hasil dari provinsi ini selama lima tahun cenderung fluktuatif perkembangannya.

Grafik 3.14
Capaian Realisasi Komponen DBH dari Provinsi tahun 2016-2020

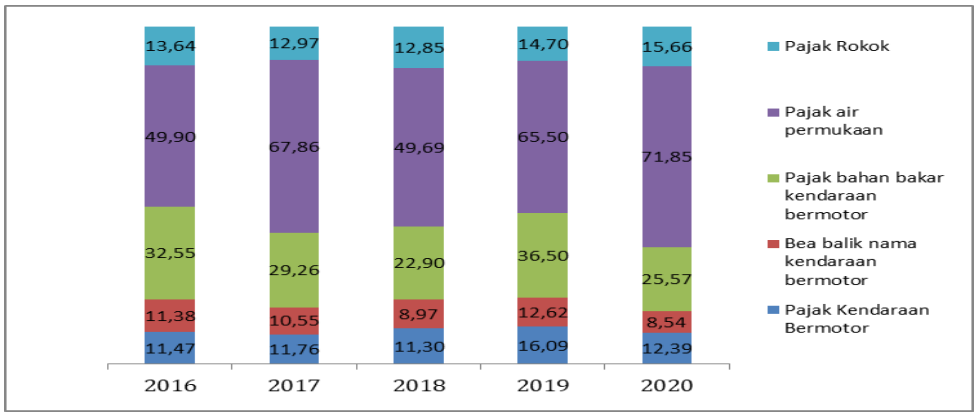

Pada Grafik 3.14 peningkatan dan penurunan pertahun komponen DBH selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk Pajak kendaraan bermotor +2,51% 2017, +2,85% 2018, +42,42% 2019 dan (-22,99%) tahun 2020. Bea balik nama kendaraan bermotor (-7,32%) 2017, (-14,96%)% 2018, +12,62 % 2019 dan (-32,34%) 2020. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (-10,12%) 2017, (-21,74%) 2018, +59,41% 2019 dan (-29,96%) 2020. Untuk pajak air permukaan +35,98% 2017, (-26,77%) 2018, +31,81% 2019 dan +9,70% 2020. Sedangkan untuk Pajak rokok (-4,95%) 2017, (-0,87%) 2018, +14,40% 2019 dan +15,66% untuk tahun 2020.

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
Pendapatan Asli Daerah	*12,52*	*18,67*	*18,05*	*20,71*	*22,76*

Dana Perimbangan	*65,94*	*57,60*	*59,55*	*55,11*	*51,28*
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	*21,54*	*23,72*	*22,40*	*24,18*	*25,97*

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Dari tabel 3.9 diatas, selama lima tahun terakhir proporsi capaian realisasi jenis pendapatan terhadap total realisasi pendapatan, masih di dominasi oleh Dana perimbangan. Namun data menunjukan selama lima tahun terakhir trend proporsi capaian realisasi untuk dana perimbangan mengalami penurunan. Sedangkan untuk proporsi capaian realisasi untuk PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend kenaikan. Ini menunjukkan potensi Kabupaten Luwu Timur untuk tidak tergantung begitu besar terhadap Dana perimbangan dari pemerintah Pusat mulai berkurang, sehingga ke depannya di perlukan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan capaian Sektor PAD.

Grafik 3.15
Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan
Tahun 2016-2020

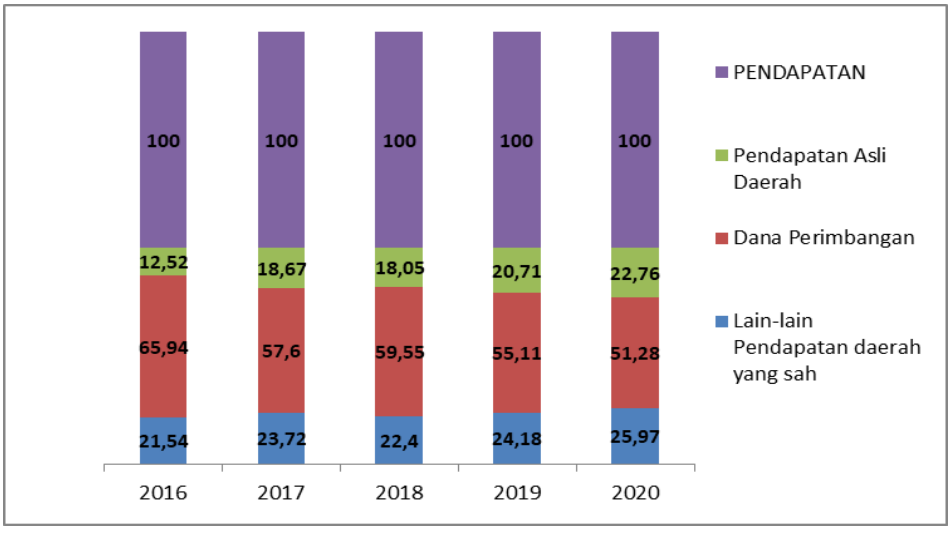

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Rincian Pendapatan terhadap Jenis Pendapatan
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***

Pajak Daerah	*49,30*	*54,85*	*51,07*	*53,72*	*58,54*
Retribusi Daerah	*3,52*	*2,45*	*1,84*	*1,34*	*1,37*
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	*11,53*	*12.58*	*9,9*	*8,36*	*7,24*
Lain-lain PAD yang sah	*35,65*	*30,12*	*37,40*	*36,59*	*32,85*
Dana Perimbangan	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
Dana Bagi Hasil	*20,41*	*9,36*	*12,26*	*13,92*	*13,71*
Dana Alokasi Umum (DAU)	*59,05*	*69,38*	*62,45*	*66,87*	*66,30*
Dana Alokasi Khusus (DAK)	*20,54*	*21,26*	*25,30*	*19,21*	*20,00*
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
Pendapatan Hibah	*29,56*	*23,87*	*24,41*	*20,49*	*29,55*
DBH Propinsi	*39,05*	*40,88*	*32,16*	*39,72*	*34,51*
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	*27,16*	*32,93*	*40,69*	*37,71*	*29,72*
Bantuan Keuangan dari Propinsi	*4,23*	*2,32*	*2,73*	*2,70*	*6,22*

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Grafik 3.16
Proporsi Realisasi Rincian Pendapatan terhadap Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020

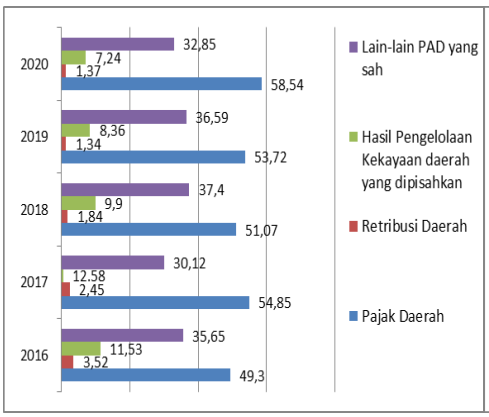

Proporsi terhadap PAD

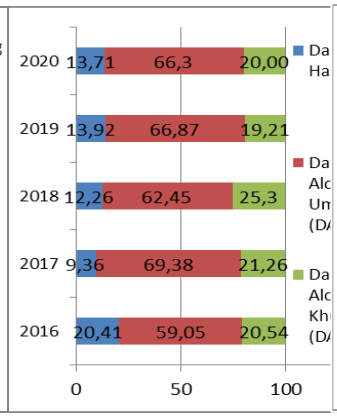

Proporsi terhadap dana perimbangan

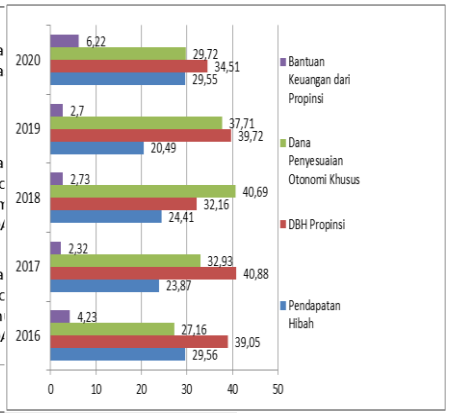

Proporsi terhadap Lain-lain PD yang sah

3.1.1.2. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga.
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Penggunaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya Tahun 2020, mengalami pergeseran yang sangat berarti sehingga banyak program dan kegiatan dalam APBD pokok tidak dapat dijalankan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan cepat dan menyeluruh yang berimplikasi pada pergeseran anggaran, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil,DAU dan DID tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid19), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahu 2020 tentang percepatan Penangnan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebabkan pemerintah daerah melakukan

Refocusing Anggaran belanja dalam penanganan Covid 19. Secara umum aturan diatas mengamanahkan Refocusing anggaran pada APBD Tahun 2020 sebesar 35% dari belanja modal maupun belanja barang dan jasa sehingga didapatkan besaran realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.23.868.531.206,72

Serapan belanja APBD selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.11
Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	%
Belanja Tidak Langsung	***545.275.504.158***	***584.857.285.599***	***617.514.870.234***	***664.617.796.016***	***704.259.217.269***	***6,61***
Belanja Pegawai	*374.763.155.128*	*373.587.185.653*	*397.203.737.409*	*413.363.367.514*	*406..616.470.053*	*2,06*
Belanja Hibah	*4.200.352.000*	*14.670.150.000*	*17.141.000.000*	*25.017.900.000*	*69.606.738.049*	*101,76*
Belanja Bantuan Sosial	*9.314.000.000*	*14.407.460.000*	*14.405.460.000*	*15.560.279.942*	*14.080.300.000*	*10,88*
Belanja Bagi hasil	*9.515.864.320*	*9.349.409.599*	*14.604.670.000*	*14.009.007.471*	*17.262.101.969*	*16,05*
Belanja Bantuan keuangan	*147.482.132.710*	*172.843.080.347*	*173.477.591.347*	*196.667.241.107*	*194.985.075.098*	*7,23*
Belanja Tidak terduga	*0,00*	*0,00*	*682.411.478*	*0,00*	*1.708.532*	*25,79*
Belanja Langsung	***829.617.253.067***	***831.416.765316.***	***902.594.570.599***	***855.681.861.264***	***732.710.092.584***	***(0,36)***
Belanja Pegawai	*7.750.648.064*	*5.494.807.166*	*3.844.253.000*	*1.933.629.000*	*3.631.250.000*	*(17,27)*
Belanja Barang dan jasa	*321.776.994.038*	*433.169.228.885*	*474.307.446.910*	*516.360.837.104*	*492.112.794.417*	*11,21*
Belanja Modal	*500.089.610.965*	*392.752.729.264*	*424.442.870.689*	*337.387.395.159*	*236.966.048.167*	*(17,03*

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Capaian Realiasai Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2016-2020, cenderung mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 6,61 persen. kenaikan belanja tidak langsung selain banyak dipengaruhi oleh belanja pegawai, juga di pengaruhi oleh belanja hibah khususnya dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020, dengan kenaikan masing 7,74 persen dan 64,05 persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sehingga terdapat penganggaran Hibah ke penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan BAWASLU yaitu selama periode 2 tahun anggaran meliputi Tahun 2019 dan Tahun 2020. Sementara
untuk belanja tidak terduga, capaian realisasi selama 5 tahun terakhir hanya ada pada tahun 2018 dan 2020. pada tahun 2018, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai rehabilitasi pasca bencana alam di Kabupaten Luwu Timur dan tahun 2020 untuk program Pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penurunan prosentase belanja di tahun 2020 dari sisi belanja Modal maupun Barang dan Jasa di picu oleh adanya refocusing anggaran di awal tahun yang berlanjut hingga akhir tahun serta pengurangan alokasi anggaran perimbangan dari pusat seperti DAU dan DAK, sehingga terjadi beberapa penundaaan beberapa kegiatan yang dianggarkan. Meskipun begitu beberapa kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan pada periode anggaran tahun berikutnya baik melalui alokasi PAD maupun DAK.

Dalam capaian realisasi belanja dalam kurun waktu 2016-2020, Realisasi belanja Kabupaten Luwu Timur rata-rata mencapai 90 persen dibandingkan dengan anggaran belanja, yang berarti memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjaga postur APBD selama lima tahun masih dalam keadaan yang normal

Grafik 3.17
Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2016-2020

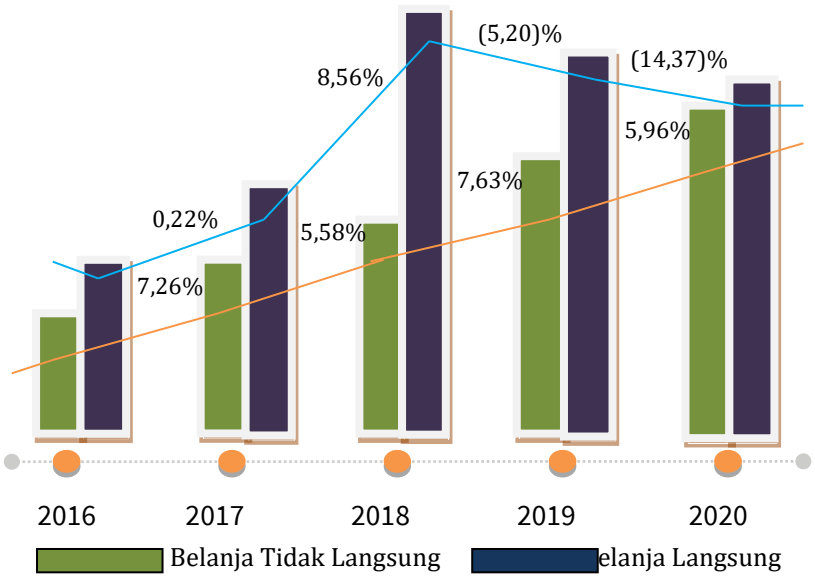

Grafik 3.17
Proporsi Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung
Terhadap total belanja Tahun 2016-2020

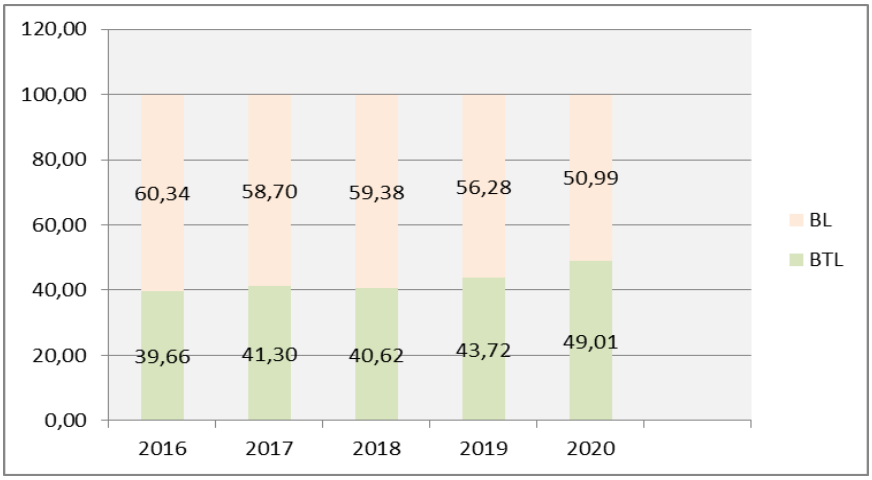

Proporsi Belanja tidak langsung terhdap APBD konsisten berada di bawah 50% begitupun dengan proporsi belanja langsung terhaap APBD berada di atas 50%. hal ini menunjukkan keberpihakan APBD terhadap belanja langsung dalam rentang waktu lima tahun terakhir sudah proporsional, mengingat belanja langsung adalah

belanja publik yang meliputi program kegiatan untuk pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 3.12
Rasio Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Realisasi total belanja Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Modal
2016	*27,26*	36,37
2017	*26,38*	*27,73*
2018	*26,13*	*27,92*
2019	*27,19*	*27,19*
2020	*28,30*	*16,49*

Rasio belanja pegawai terhadap total APBD menggambarkan semakin tinggi rasio belanja pegawai semakin tinggi proporsi alokasi belanja APBD terhadap belanja pegawai. dalam kurun lima tahun terakhir, ratio belanja pegawai tertinggi pada tahun 2020. Meningkatnya angka rasio ini di sebabkan adanya penambahan rektrutmen CPNS yang berimbas penambahan pada belanja pegawai. sedangkan untuk ratio belanja modal tertinggi pada tahun 2016. Untuk tahun 2020, ratio belanja modal cukup rendah. hal ini disebabkan rendahnya realisasi untuk belanja modal tanah dengan serapan hanya mencapai 47,97%.

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Tabel 3.13
Capaian Realisasi Pembiayaan
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	%
Penerimaan Pembiayaan	***116.897.939.276***	***156.064.014.355***	***104.961.418.960***	***47.504.937.949,***	***26.201.839.853***	***(31,19)***
Silpa	*116.897.939.276*	*156.064.014.355*	*104.961.418.960*	*47.504.937.949,*	*26.201.839.853*	*(31,19)*
Pengeluran Pembiayaan	***0,00***	***0,00***	***3.500.000.000***	***15.000.000.000***	***12.000.000.000***	***85,16***
Penyertaan Modal	*0,00*	*0,00*	*3.500.000.000*	*15.000.000.000*	*12.000.000.000*	*85,16*

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meletakkan Penerimaan Pembiayaan dalam rangka untuk mentupi defisit anggaran dilakukan secara cermat, hati-hati dan rasional. Mengingat tingginya target Realisasi Penermiaan Pembiayaan dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan trend penurunan yang berarti dalam pembiayaan program kegiatan terserap secara maksimal sesuai dengan target perencanaan yang telah di tetapkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, kebijakan pemerintah dalam melakukan Invesatasi dalam bentuk penyertaan Modal ke Bank Sulselbar dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

.

Tabel 3.14
Ringakasan Capaian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	%
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	***177.018.897.819***	***254.902.886.906***	***264.769.982.685***	***313.564.038.877***	***329.220.137.283***	***16,78***
Pajak Daerah	*87.262.964.488*	*139.811.835.913*	*135.222.909.760*	*168.433.208.386*	*192.720.735.828*	*21,91*
Retribusi Daerah	*6.231.131.540*	*6.234.833.296*	*4.867.621.007*	*4.187.811.316*	*4.505.935.086*	*(7,78)*
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	*20.417.954.358*	*32.076.032.045*	*25.666.782.331*	*26.214.125.742*	*23.835.212.109*	*3,94*
Lain-lain PAD yang sah	*63.106.847.433*	*76.780.185.651*	*99.012.669.586*	*114.728.893.432*	*108.158.254.259*	*14,42*
Dana Perimbangan	***932.434.270.075***	***786.407.535.589***	***873.706.953.349***	***834.360.290.818***	***766.923.342.007***	***(4,77)***
Dana Bagi hasil	*190.296.048.420*	*73.570.711.179*	*107.080.369.038*	*116.175.746.971*	*105.117.724.030*	*(13,79)*
Dana ALokasi Umum	*550.581.811.000*	*545.609.968.000*	*545.609.968.000*	*557.933.304.000*	*508.456.665.000*	*(1,97)*
Dana Alokasi Khusus	*191.556.410.655*	*167.226.856.410*	*221.016.616.311*	*160.251.239.847*	*153.348.952.977*	*(5,41)*
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	***304.605.664.411***	***323.862.359.644***	***328.676.041.789***	***366.073.189.488***	***388.391.724.288***	***6,26***
Pendapatan Hibah	*90.036.251.044*	*77.313.697.128*	*80.243.287.681*	*75.012.621.726*	*114.784.195.738*	*6,26*
DBH Propinsi	*118.953.266.431*	*132.392.915.316*	*105.717.522.011*	*145.421.716.362.*	*134.014.732.222*	*3,03*
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	*82.723.388.000*	*106.640.948.000*	*133.747.559.000*	*138.050.397.000*	*115.448.707.000*	*8,69*
Bantuan Keuangan dari Propinsi	*12.892.758.936*	*7.514.799.200*	*8.967.673.097*	*7.588.454.400*	*24.144.089.328*	*16,98*
BELANJA						
Belanja Tidak Langsung	***545.275.504.158***	***584.857.285.599***	***617.514.870.234***	***664.617.796.016***	***704.259.217.269***	***6,61***
Belanja Pegawai	*374.763.155.128*	*373.587.185.653*	*397.203.737.409*	*413.363.367.514*	*406..616.470.053*	*2,06*
Belanja Hibah	*4.200.352.000*	*14.670.150.000*	*17.141.000.000*	*25.017.900.000*	*69.606.738.049*	*101,76*

Belanja Bantuan Sosial	*9.314.000.000*	*14.407.460.000*	*14.405.460.000*	*15.560.279.942*	*14.080.300.000*	*10,88*
Belanja Bagi hasil	*9.515.864.320*	*9.349.409.599*	*14.604.670.000*	*14.009.007.471*	*17.262.101.969*	*16,05*
Belanja Bantuan keuangan	*147.482.132.710*	*172.843.080.347*	*173.477.591.347*	*196.667.241.107*	*194.985.075.098*	*7,23*
URAIAN	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**%**
Belanja Tidak terduga	*0,00*	*0,00*	*682.411.478*	*0,00*	*1.708.532*	*25,79*
Belanja Langsung	***829.617.253.067***	***831.416.765316.***	***902.594.570.599***	***855.681.861.264***	***732.710.092.584***	***(0,36)***
Belanja Pegawai	*7.750.648.064*	*5.494.807.166*	*3.844.253.000*	*1.933.629.000*	*3.631.250.000*	*(17,27)*
Belanja Barang dan jasa	*321.776.994.038*	*433.169.228.885*	*474.307.446.910*	*516.360.837.104*	*492.112.794.417*	*11,21*
Belanja Modal	*500.089.610.965*	*392.752.729.264*	*424.442.870.689*	*337.387.395.159*	*236.966.048.167*	*(17,03*
Surplus/(Defisit)	***(39.166.075.079,45)***	***(51.101.268.775,71)***	***(53.956.481.010,45)***	***(6.303.098.096,05)***	***58.705.456.790,60***	***10,65%***
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	***116.897.939.276***	***156.064.014.355***	***104.961.418.960***	***47.504.937.949,***	***26.201.839.853***	***(31,19)***
Silpa	*116.897.939.276*	*156.064.014.355*	*104.961.418.960*	*47.504.937.949,*	*26.201.839.853*	*(31,19)*
Pengeluaran Pembiayaan	***0,00***	***0,00***	***3.500.000.000***	***15.000.000.000***	***12.000.000.000***	***85,16***
Penyertaan Modal	*0,00*	*0,00*	*3.500.000.000*	*15.000.000.000*	*12.000.000.000*	*85,16*
PEMBIAYAAN NETTO	***116.897.939.276***	***156.064.014.355***	***101.461.418.960***	***32.504.937.949***	***14.201.839.853***	***(40,96)***
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	***156.064.014.355***	***104.962.745.580***	***47.504.937.949***	***26.182.083.168***	***72.902.965.578***	***(17,33)***

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Berdasarkan Tabel 3.13 di atas, dapat di jelaskan untuk tahun 2020, mengalami Surplus dalam realisasi, hal ini akibat dari ada anggaran yang tidak terserap, selain faktor penghematan juga disebabkan oleh adanya kegiatan yang anggarannya kurang maksmial akibat pandemi Covid19, sehingga anggaran belanja realisasinya lebih rendah dibanding realisasi capaian pendapatan.

Penurunan angka Silpa selamat 5 Tahun terakhir, merupakan hasil dari optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya sebagai indikator kesesuaian antara target dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah Pemerintah Daerah mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam penyusunan APBD, sehingga dalam meletakkan anggaran belanja berpedoman kepada tiga standar yang di maksud yang bertujuan menselaraskan kesesuaian antara target yang akan dicapai dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) sebesar Rp.20.500.000.000,- sejak 2018 sampai dengan 2020 merupakan penyertaan modal investasi pada Perusahaan Air Minum Daerah, sebagai upaya dalam meningkatkan infrastruktur air bersih pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan dapat memberikan kontribusi pendapatan pada Pemerintah Daerah diwaktu akan datang.

Untuk pembiayaan Netto yang Positif, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, sangat berhati-hati dalam meletakkan Proyeksi Silpa dan Penyertaan modal. khususnya untuk Tahun 2018 sampai dengan 2020 Penerimaan Pembiayaan selalu lebih tinggi dibanding pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk Sisa Lebih pembiayaan tahun anggaran berkenan yang sangat tinggi yaitu telah ada peruntukkannya.

3.1.2. Neraca Keuangan Daerah

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perkembangan neraca daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Kabupaten Luwu Timur selama periode pencatatan 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

No	*URAIAN*	*Rata-rata Pertumbuhan (%)*
1.	**ASET**	
1.1.	**ASET LANCAR**	**(1,82)**
1.1.1.	Kas	(17,33)
1.1.2.	Piutang	12,66
1.1.3	Persediaan	34,03
1.1.4	Investasi Jangka Panjang	15,70
1.2	**ASET TETAP**	**5,47**
1.3.1	Tanah	2,85
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	7,75
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	11,16
1.3.4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	9,05
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	19,19
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,72
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	15,81
1.3	**ASET LAINNYA**	**10,23**
1.4.1	Aset Tidak Berwujud	2,65
1.4.2	Aset Lain-lain	10,23
	Jumlah Aset	**5,48**
2.	**KEWAJIBAN**	**(18,05)**
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
2.1.1	Pendapatan diterima di muka	(10,85)
2.1.3	Utang Belanja	117,89

2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	20,18)
3.	**EKUITAS DANA**	**6,09**
3.1	Ekuitas Dana	6,09
	Jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana	**5,48**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Tabel 3.16
Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas					
Kas di Kas Daerah	139.693.850.681,86	90.921.817.990,69	26.238.309.946,24	6.691.540.772,19	52.435.799.001,79
Kas di Bendahara Pengeluaran	402.462.445,00	133.140.000,00	11.034.288,00	195.004,00	23.989.900,00
Kas di Bendahara Penerimaan	509.773.260,00	260.832.975,00	4.940.620,00	15.331.800,00	40,00
Kas di BLUD	6.654.215.323,00	915.271.067,00	710.388.638,00	87.655.080,00	2.863.471.015,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	1.614.164.467,46	1.469.523.935,46
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	2.442.952.730,00	564.512.752,00
Setara Kas	3.000.000.000,00	11.000.000.000,00	15.800.000.000,00	15.350.000.000,00	15.550.000.000,00
Kas di Bendahara JKN	4.902.942.278,00	1.093.666.341,46	4.311.998.067,46	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	900.770.368,00	638.017.206,00	437.599.918,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang					
Piutang Pendapatan	35.485.387.890,00	34.724.843.188,00	81.469.895.064,00	85.237.108.928,00	68.899.539.014,00
Piutang Lainnya	8.985.751.809,00	12.037.137.567,00	6.751.364.953,00		2.744.800.000,00
Penyisihan Piutang					
Penyisihan Piutang Pendapatan	(337.799.714,74)	(465.681.654,58)	(711.490.021,25)	(997.685.922,72)	(1.035.957.808,23)
Penyisihan Piutang Lainnya	(282.850.000,00)	(13.737.500,00)	(33.456.784,77)		(13.724.000,00)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Beban Dibayar dimuka					
Beban Dibayar dimuka	346.811.628,25	403.052.899,42	390.867.510,08	467.099.912,84	465.526.969,57
Persediaan					
Persediaan	18.334.585.988,29	24.452.186.906,57	25.412.616.945,18	38.493.652.940,51	59.167.123.573,36
Jumlah Aset Lancar	**218.595.901.956,66**	**176.100.546.986,56**	**160.794.069.143,94**	**149.402.015.712,29**	**203.134.604.392,96**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen					
Pinjaman Jangka Panjang	1.389.220.693,60	1.389.220.693,60	1.389.220.693,60	0,00	
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	212.476.506,83	212.476.506,83	1.645.816.738,77	822.773.728,56
Penyisihan Dana Bergulir	(139.186.397,01)	(139.186.397,01)	(557.701.966,83)	(557.701.966,83)	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	**1.250.034.296,59**	**1.462.510.803,42**	**1.043.995.233,60**	**1.088.114.771,94**	**822.773.728,56**
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.692.368.482,00	78.426.667.726,57	111.611.772.112,42	132.965.695.152,23	142.428.859.835,71
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	**78.692.368.482,00**	**78.426.667.726,57**	**111.611.772.112,42**	**132.965.695.152,23**	**142.428.859.835,71**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**79.942.402.778,59**	**79.889.178.529,99**	**112.655.767.346,02**	**134.053.809.924,17**	**143.251.633.564,27**
ASET TETAP					

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah	266.498.608.378,48	273.239.781.389,48	280.800.235.727,66	295.643.867.119,62	298.224.086.389,63
Peralatan dan Mesin	395.359.611.410,89	452.721.736.511,12	438.250.542.172,21	498.255.770.160,12	532.881.362.803,61
Gedung dan Bangunan	692.115.949.493,73	758.009.880.755,55	860.485.041.991,25	980.224.721.960,74	1.056.897.823.540,82
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.762.755.818.843,36	1.976.138.132.375,06	2.185.048.144.785,83	2.360.837.106.160,04	2.492.756.788.527,18
Aset Tetap Lainnya	12.086.344.092,77	14.348.032.954,76	23.858.714.585,85	24.342.079.351,35	24.389.468.784,93
Konstruksi dalam Pengerjaan	75.859.790.896,52	77.861.712.541,32	85.737.750.414,84	84.766.171.032,02	84.441.148.054,10
Akumulasi Penyusutan	(934.059.938.061,41)	(1.143.699.177.469,27)	(1.396.989.652.079,27)	(1.520.310.986.405,39)	(1.680.180.100.811,66)
JUMLAH ASET TETAP	**2.270.616.185.054,34**	**2.408.620.099.058,01**	**2.477.190.777.598,37**	**2.723.758.729.378,50**	**2.809.410.577.288,61**
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.968.512.000,00	3.894.061.000,00	4.697.097.000,00	3.149.631.100,00	3.295.991.100,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	(510.137.034,00)	(1.496.871.096,32)
Aset Tidak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Berwujud Netto					
Aset Lain-lain	97.383.903.549,02	97.233.043.549,02	164.627.254.704,92	164.615.452.330,92	146.382.896.820,87
JUMLAH ASET LAINNYA	**100.352.415.549,02**	**101.127.104.549,02**	**169.324.351.704,92**	**167.254.946.396,92**	**148.182.016.824,55**
JUMLAH ASET	**2.669.506.905.338,61**	**2.765.736.929.123,58**	**2.919.964.965.793,25**	**3.174.469.501.411,88**	**3.303.978.832.070,39**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	9.333.528,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	707.672.924,75	478.288.259,00	254.175.811,47	366.499.150,17	446.966.089,62
Utang Belanja	186.983.768,00	83.195.722,00	309.379.691,00	837.388.525,00	4.214.214.238,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	94.074.706.136,10	33.785.352.982,80	35.355.787.856,92	34.384.710.068,66	38.180.468.745,79
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**94.969.362.828,85**	**34.346.836.963,80**	**35.928.676.887,39**	**35.588.597.743,83**	**42.841.649.073,41**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**94.969.362.828,85**	**34.346.836.963,80**	**35.928.676.887,39**	**35.588.597.743,83**	**42.841.649.073,41**
EKUITAS					
EKUITAS	2.574.537.542.509,76	2.731.390.092.159,78	2.884.036.288.905,86	3.138.880.903.668,05	3.261.137.182.996,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.669.506.905.338,61**	**2.765.736.929.123,58**	**2.919.964.965.793,25**	**3.174.469.501.411,88**	**3.303.978.832.070,39**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

Grafik 3.18
Perbandingan Aset dan Kewajiban
Tahun 2016-2020

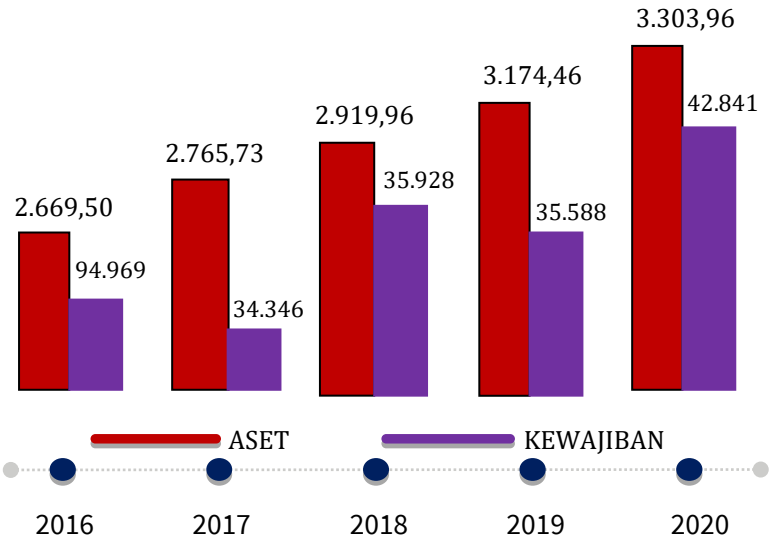

3.1.2.1 Aset

Analisis yang terkait dengan Aset Daerah dapat di Kategorikan menjadi 3 (tiga) bagian. Aset Lancar, Aset tetap dan Aset Tetap Lainnya. Aset lancar merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.yang terdiri dari kas, piutang, persediaan dan Investasi Jangka Panjang. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, Aset Kabupaten Luwu Timur tumbuh secara positif sebesar 4,77 Persen.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhannya

negatif, yang berarti utang Pemerintah Daerah Kabupeten Luwu Timur kepada Pihak Ketiga tidak begitu besar dan signifikan.

3.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama periode 2016-2020, menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan yang mencapai 5,41 persen setiap tahunnya.

3.1.3. Rasio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas

Dari neraca daerah dapat diketahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

1. Rasio Likuiditas atau *Liquidity Ratio*

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek dengan melihat aktiva lancar utang lancar. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio lancar *(Current Ratio)* dan Ratio Cepat *(Quick Ratio)*. Rasio Lancar atau *Current Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya sedangkan Ratio Cepat *(Quick Ratio)* adalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik.

2. Rasio Solvabilitas.

Rasio solvabilitas adalah perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung dan dibayarkan. Dari rasio solvabilitas tersebut, bisa diketahui kemampuan untuk melunasi hutang.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas dalam pemanfaatan semua sumber daya atau asset (aktiva) yang dimiliki.

Tabel 3.17
Ratio Likuiditas, Ratio Solvabilitas dan Ratio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2016-2020

Tahun	Ratio Likuiditas		Ratio Solvabilitas		Ratio Aktivitas	
	Ratio Lancar (Current Ratio)	Ratio Cepat (Quick Ratio)	Ratio Total Hutang *(Debt Ratio)*	Ratio Hutang Modal *(Debt To Equity Ratio)*	Lama Piutang	Lama Persediaan
2016	2,30	2,11	0,04	3,69	4,27	1,09
2017	5,13	4,42	1,24	1,26	7,35	1,14
2018	4,48	3,77	1,23	1,25	4,60	1,02
2019	4,20	3,12	1,12	1,13	3,78	1,20
2020	4,57	3,21	1,31	1,33	4,48	1,21

Sumber : Tim Penyusun

Dari tabel 3.17 diatas pada Ratio Likuiditas, untuk Ratio lancar dalam kurun waktu 2016-2020 berada di nilai 2,30- 4,57 dan Ratio Cepat berada di nilai 2,11-3,21, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan sangat mempu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat.

Pada Ratio Solvabilitas, untuk Ratio Total Hutang dan Ratio Hutang Modal dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada nilai 0.04- 1,31 dan 3,69-1,33 yang berarti Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur Mampu melunasi hutang

dengan aset yang tersedia dan mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia.

Sedangkan Untuk Ratio Aktivitas untuk lama Piutang dan Lama Persediaan, dalam rentang waktu lima tahun terakhir, lama piutang bernilai 4,27 -4,48 dan Lama persediaan bernilai 1,09-1,21. Yang berarti rata-rata lama piutang membutuhkan waktu 5,05 hari untuk merubah piutang menjadi kas, dan rata-rata umur persediaan membutuhkan waktu sekitar 1,14 dalam penggunaan persediaan untuk pelayanan publik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tergambar dalam APBD selama periode 2016-2020, menguraikan dua hal penting yaitu Proporsi Penggunaan Anggaran dan Hasil Analisis Pembiayaan yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan terakit dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah, yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan. Penguatan Kapasitas Fiskal dalam pembiayaan terhadap pelayanan publik untuk membangun kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor terutama untuk urusan wajib seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal dalam pembiayaan Program-Program yang termuat dalam Visi Misi Kepala Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Kebijakan Pendapatan Derah

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal serta meningkatkan ruang fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai ruang fiskal utama dalam memenuhi alokasi belanja untuk prioritas pembangunan daeah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kapasitas fiskal juga di topang oleh peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan keuangan oleh pemerintah pusat melalui Regulasi.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk merealisasikan/mendukung rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut:

1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
2) Peningkatan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT.Bank Sulselbar sebagaimana dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 110/F-04/III/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) dalam upaya mendukung Inovasi, percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETP);
3) Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
4) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada BUMD untuk terlibat dalam sektor pertambangan, perkebunan dan sektor lainnya sehingga dapat berkonstribusi khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan;
6) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

7) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
8) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; dan
9) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.

3.2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan Masa lalu untuk Kebijakan balanja di arahkan selain dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Mengikat yaitu Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang harus memenuhi standar dari pengeluaran yang diamanahkan Permendagri, juga di Arahkan kepada belanja kebutuhan aparatur.

Dalam Penyusunan Rencana Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama ini tetap memfokuskan Belanja Wajib Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Utama. Selain sebagai Amanah Peraturan Perundang-undangan juga adalah juga menjadi bagian Visi Misi Daerah. Untuk Sektor Pendidikan, Kebijakan Belanja Daerah selalu memenuhi alokasi anggaran belanja pendidikan diatas 20% dari total APBD, Kesehatan diatas 10% dan Infrastruktur diatas 25% dari total APBD. Kebijakan Belanja dalam mendukung ketiga sektor tersebut adalah untuk pendidikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Luwu Timur. Untuk sektor kesehatan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan Infrastruktur jalan dan bangunan di wilayah Luwu Timur.

Tabel 3.18
Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**345.599.329.599**	**366.814.935.894**	**365.356.456.300**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	231.585.256.919	255.004.023.049	262.054.425.123
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	102.945.222.088,	100.677.434.878	93.723.886.560
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.892.000.000	5.892.000.000	4.336.666.650
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	5.176.850.592	5.241.477.967	5.241.477.967
B	**Belanja Langsung**	**144.058.491.595**	**141.443.528.930**	**116.119.824.338,**
1	Belanja Honorarium PNS**)	1.239.365.000	1.221.565.000,00	126.800.000
2	Belanja Uang Lembur**)	1.072.938.000	1.072.938.000,00	1.077.075.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.661.483.306	2.741.679.958	2.981.945.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	9.488.225.058,00	6.737.554.297,00	2.041.105.607,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	44.241.945.594,00	43.329.357.038,67	54.329.357.038,67
6	Belanja makanan dan minuman Pegawai	4.718.121.750,00	4.718.121.750,00	4.718.121.750,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	412.515.000,00	412.515.000,00	387.222.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari	5.941.464.955,00	5.941.464.955,00	2.462.835.000,00
9	Belanja perjalanan dinas	75.282.432.932,00	75.268.332.932,00	47.995.362.943,00
	TOTAL	**489.657.821.194**	**508.258.464.824**	**481.476.280.636**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Pada Tabel 3.18 diatas, untuk Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, mengalami peningkatan untuk tahun 2019-2020 disebabkan banyaknya PNS yang

melanjutkan Studi pada jenjang S1 dan S2. Khususnya jenjang S2 untuk tenaga guru. Hal ini sejalan dengan visi misi kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar. Sementara pada periode Tahun Anggaran 2022-2026, belanja ini akan diperkuat untuk beasiswa penyelesaian studi untuk program S2 dan S3.

Untuk Belanja Kursus singkat, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS yang mengalami penurunan signifikan untuk tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan Sosialisasi lebih banyak di laksanakan melalui sistem Daring. Sehingga serapan anggaran untuk kegiatan ini sangat minim.

Pada Belanja Premi asuransi kesehatan yang mengalami lonjakan cukup signifikan pada tahun 2020, di karenakan adanya penambahan premi asuransi kesehatan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami penyesuaian Iuran.

Sedangkan untuk belanja pakaian khusus hari-hari tertentu pada tahun 2020 mengalami penurunan, disebabkan untuk tahun 2020 tidak ada lagi penganggaran belanja pakaian pakaian untuk hari tertentu. Dan untuk perjalanan dinas yang serapannya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan adanya pandemi covid 19 sehingga perjalanan dinas tidak dilaksanakan khususnya perjalanan dinas ke luar propinsi dan kordinasi dan konsultasi kegiatan lebih banyak dilaksanakan melalui daring.

pada umumnya belanja yang mengalami daya serap cukup rendah pada tahun 2020, serapan anggarannya dialokasikan pada kegiatan penanggulangan Covid 19.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, Pembiayaan pemenuhan kebutuhan aparatur adalah belanja yang perlu mendapatkan prioritas dalam menunjang pelayanan pemerintahan, sehingga dalam perumusan proporsi belanja APBD, perlu memperhitungkan seberapa besar porsi Belanja untuk kebutuhan aparatur. Untuk melihat realisasi dan prosentase porsi belanja kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk tiga tahun teakhir, dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.19
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Luwu Timur 2018-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	489.657.821.194,00	1.523.109.440.833,57	32,14
2	Tahun Anggaran 2019	508.258.464.824,67	1.535.344.386.204,14	33,10
3	Tahun Anggaran 2020	481.476.280.638,67	1.448.969.309.853,38	33,23

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Selain Proporsi belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menjadi salah satu prioritas dalam belanja daerah, belanja wajib mengikat serta prioritas utama adalah salah satu prioritas dalam pemenuhan utama dalam belanja daerah. belanja wajib mengikat adalah belanja wajib yang harus terpenuhi dalam pembiayaan daerah. belanja wajib mengikat kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 3 Tahun (2018-2020) dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.20
Pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Luwu Timur 2018-2020

No	Uraian	(Rp)2018	(Rp)2019	(Rp) 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**533.681.590.946,00**	**577.535.913.396,00**	**437.729.595.333,20**	**(6,54)**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	334.530.479.007,00	355.681.457.927,00	262.054.425.123,00	(7,82)
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta	5.892.000.000,00	5.892.000.000,00	4.336.666.650,00	(9,71)

	Operasional KDH/WKDH				
3	Belanja bagi hasil	188.082.261.347,00	210.720.977.502,00	169.294.053.550,20	(3,45)
4	Biaya Penungutan Pajak dan Retribusi Daerah	294.851.559,00	217.095.287,00	0,00	(14,19)
5	Belanja Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan	4.881.999.033,00	5.024.382.680,00	44.450.000,00	(79,12)
B	**Pembiayaan Pengeluaran**	**12.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**0,00**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
	TOTAL (A+B)	**545.681.590.946,00**	**592.535.913.396,00**	**447.729.595.323,20**	**(6,38)**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luuu Timur

Pada Tabel 3.16 diatas, untuk belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH mengalami serapan yang rendah dibanding dua tahun sebelumnya, di sebabkan selain adanya penyesuaian harga satuan belanja juga perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH terbatasi oleh adanya Pandemi Covid19.

3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Luwu Timur pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan anggaran dan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap

surplus/defisit. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan Penerimaan Pembiayaan dengan melakukan Penyertaan Modal (Investasi) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada PT.Bank Sulselbar.

Dalam Kurun waktu 3 Tahun, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam meletakkan perencanaan pembiayaan daerah, didasari dengan perhitungan yang cermat khususnya dalam melakukan asumsi dalam penerimaan pembiayaan sebagai penutup defisit APBD. Selain itu Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggarkan dalam memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, realisasi pembiayaan dalam 3 tahun yakni 2018-2020, menunjukkan trend yang positif, dimana Pelaksanaan Defisit jauh lebih rendah dari asumsi defisit yang di rencanakan.

Sedangkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan tahun bekenaan selama 3 tahun terakhir juga menunjukkan hal yang positif, dimana defisit rill mampu ditutupi oleh Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mampu menjaga Postur APBD dan Pelaksanaan APBD dalam kondisi normal. Hal ini di pengaruhi oleh dengan diterbitkannya Peraturan Bupati terkait Standar Biaya Umum (SBU), Analaisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) dalam pelaksanaan belanja daerah.

Untuk melihat kinerja pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2018-2020. dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.21
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.466.152.959.823,12	1.513.976.802.499,03	1.495.670.435.469,65
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.520.109.440.833,57	1.520.299.657.280,14	1.436.979.078.788,05

3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00
A	Defisit riil	(57.456.481.010,45)	(21.322.854.781,11)	48.047.162.994,48
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	-	-	-
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**104.961.418.960,15**	**47.504.937.949,70**	**26.201.839.853,65**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**47.504.937.949,70**	**26.182.083.168,59**	**21.845.323.140,83**

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Tabel 3.22
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	(1,82)	(222)	54
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(82,68)	(122,79)	45

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur

Dari Tahun 2018-2020, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya

sebesar 0,15 persen selama tiga tahun. Hal itu dapat dilihat pada tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.23
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	
	Jumlah SiLPA	**47.504.937.949,70**	**86,71**	**26.201.839.853,65**	**165,04**	**72.907.296.644,25**	**124,65**	**0,15**
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	7.654.098.287,19	29,21	38.125.828.257,32	52,29	**1,23**
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	**-**
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.263.941.992,00	11,08	-		9.436.182.789,00	12,94	**0,21**
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	**-**
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	35.928.676.887,39	75,63	35.588.597.743,83	135,82	43.313.844.073,41	59,41	**0,06**
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-		-	

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Auditied

3.3. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi Pedapatan dan belanja daerah untuk lima tahun kedepan yakni tahun 2021-2026. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi pendapatan dan belanja, dengan melihat realisasi pendapatan lima tahun terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja selama 2 tahun terakhir serta kondisi ekonomi dua tahun terakhir yang sedikit terganggu dikarenakan adanya pandemi Covid19.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2016-2026. Dalam menyusun asumsi kebijakan fiskal daerah, Pemerintah Derah tetap mengoptimalkan Sektor PAD dengan menggali potensi-potensi pendapatan daerah dalam upaya menggerakkan kemandirian fiskal daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3.24
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial 2021-2026

No	Indikator Mkaro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Asumsi Capaian 2021	Target Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	Nilai	73,22	73,50	73,80	74,10	74,40	74,70	75,00	75,00
2	Angka Kemiskinan (%)	%	6,85	6,84	6,64	6,44	6,24	6,04	5,84	5,84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,46	3.80	3.30	3.05	2.80	2.55	2.30	2.30
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	1,46	1,61-2,15	2,49-3,33	2,72-3,63	2.98-3,71	3.22-3,50	3.46-3,63	3,50-3,72
5	Pdrb Perkapita ADHB	Juta Rp	70,49	70,90	71,45	72,00	72,55	73,10	73,65	73,65
6	Gini Ratio	Nilai	0,405	0.397	0.389	0.381	0,247	0,232	0,217	0,217

Sumber: Bappelitbangda 2021 (angka proyeksi)

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya terhadap perkonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikkel dunia, hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemi ini tetap bertumbuh Positif, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang posif. Demikian halnya dengan subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Daerah akan mengupayakan mendorong sektor-sektor selain tambang untuk lebih optimal sehingga Ekonomi daerah khususnya sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Sehingga Perekonomian Daerah tidak lagi tergantung pada sektor tambang Indikator Utama dalam mengukur Pertumbuhan Ekonomi.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab. Luwu Timur lima tahun ke depan , adapun asumsi makro dimaksud mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan

PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Berikut akan disajikan Grafik Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan dan Perbandingan proyeksi laju pertumbuhan eknonomi dengan tingkat kemiskinan

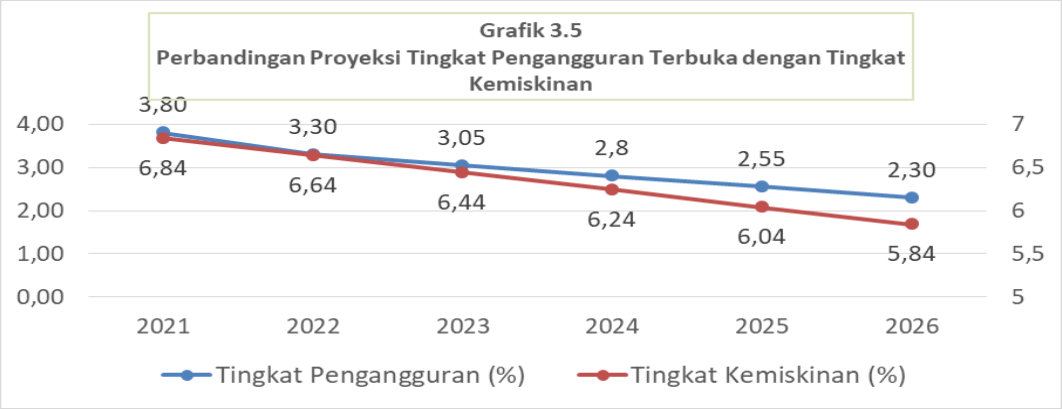

Sumber Data : Proyeksi Tim Penyusun

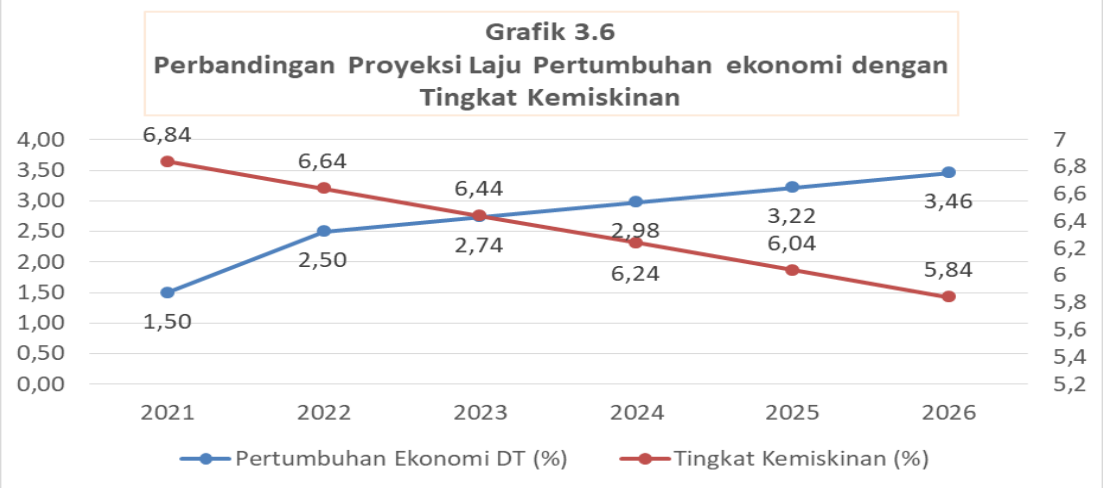

Sumber Data : Proyeksi Tim Penyusun

Pertumbuhan ekonomi daerah Kab. Luwu Timur untuk lima tahun ke depan diasumsikan dapat bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

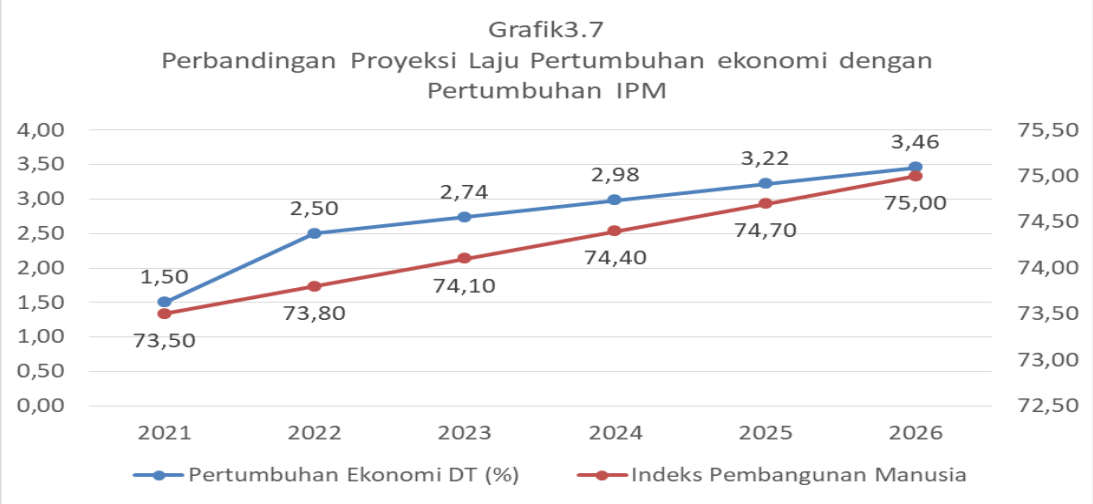

Sumber Data : Proyeksi Tim Penyusun

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kab. Luwu Timur akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relative dan diharapkan tetap lebih baik dari Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kab. Luwu Timur juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat

mutlak pencapaian kualitas manusia Kab. Luwu Timur yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, berada pada peringkat ke 4 (empat) dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan trend positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 7,29 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Transfer Pusat diperkirakan bertumbuh rata-rata 1,59 persen selama periode 2021-2026 dengan kecenderungan yang tidak menentu. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Transfer Pusat bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target sebagai dampak perkembangan Pandemi covid 19, Selain itu adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.25
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan PAD	12.43	8,88	5,95	15,30	3,78	3,84
2.	Pertumbuhan Dana Transfer Pusat:	18.50	0,14	1,84	2,71	1,00	0,40
a.	Pertumbuhan DBH	(26.15)	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
b.	Pertumbuhan DAU	1.30	15,92	4,94	4,81	4,45	3,00
c.	Pertumbuhan DAK	110.63	(5,26)	3,35	5,96	0,93	0,00

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun

untuk Sektor PAD pertumbuhan yang signifikan diproyeksikan pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,30 persen dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023. hal ini di nilai sebagai tahun pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi sehingga diharapkan tahun 2024 peningkatan PAD dapat meningkat secara signifikan disamping itu, capaian program prioritas pembangunan selama dua tahun

dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat tercapai yang berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 3.19
Perbandingan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dengan Pertumbuhan PAD Tahun 2021-2026

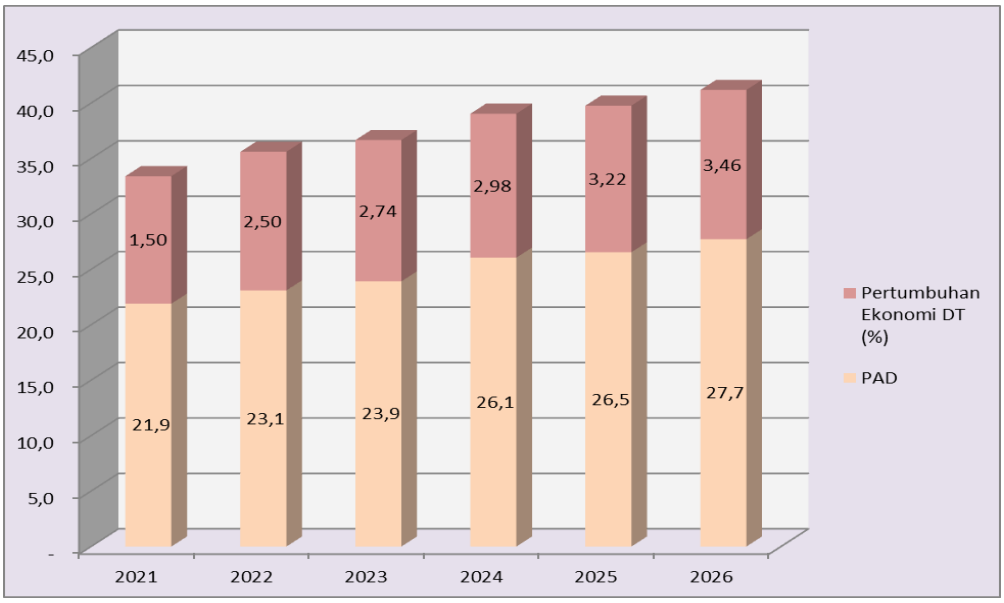

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun

Grafik 3.8 menggambarkan target laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang dibandingkan dengan pertumbuhan prosentase Pendaptan Asli Daerah terhadap Pendapatan. Target pertumbuhan Ekonomi untuk lima tahun kedepan, diharapkan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai fiskal murni daerah dalam membiyai penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kemandirian fiskal daerah yang meningkat dari tahun ketahun.

Grafik 3.20
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Proyeksi pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026

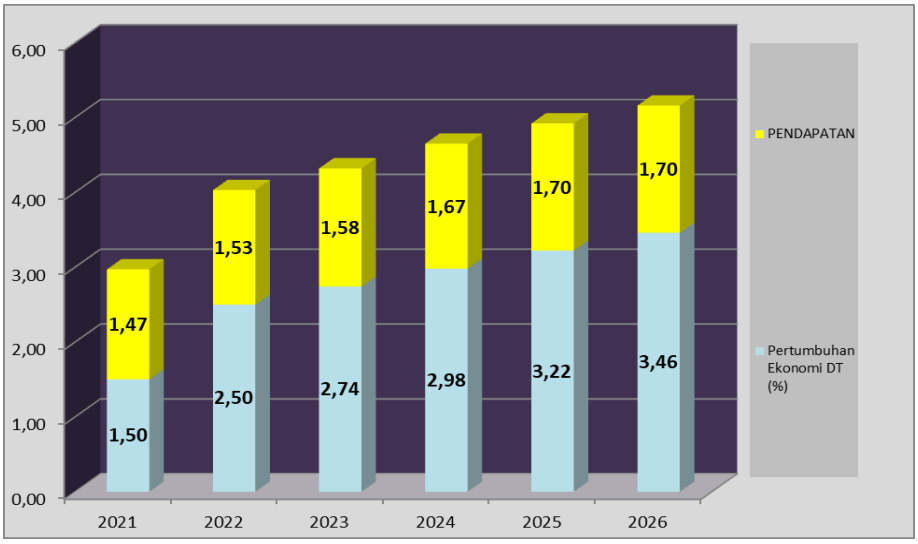

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan

Untuk Tahun 2021 di masukkan dalam kategori target, mengingat untuk APBD Tahun anggaran 2021 telah di tetapkan dan dalam proses pelaksanaan. Sehingga untuk proyeksi pendapatan hanya mencakup tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Pendapatan dalam persepektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dengan melihat capaian realisasi dan pertumbuhan pendapatan lima tahun yang lalu. Selain itu proyeksi pendapatan untuk lima tahun kedepan setidaknya memperhatikan empat determin yaitu (1) Asumsi Indikator Ekonomi Makro, (2) Kebijakan Kebijakan Keuangan negara, khususnya perubahan kebijakan untuk dana transfer pusat ke daerah, (3) Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Keuangan Daerah dan (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah.

Untuk lima tahun kedepan, Pendapatan di Proyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,29 Persen. pada tahun 2022 Pendapatan di proyeksikan naik sebesar Rp.60.108.783.775,- dibanding tahun 2021. untuk tahun 2023 di proyeksikan

naik sebesar Rp.41.473.865.700,- dibandingkan tahun 2022, untuk tahun 2024 di proyeksikan naik sebesar Rp.92.184.920.000,- dibandingkan tahun 2023, untuk tahun 2025 di proyeksikan naik sebesar Rp.34.035.150.000,- dibandingkan tahun 2024 dan untuk tahun 2026 diproyeksikan turun sebesar Rp.7.394.958.000,- dibandingkan tahun 2025.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan tetap tumbuh signifikan dari tahun ke tahun, sebagai sektor fiskal murni daerah yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahaan diluar penerimaan dana transfer dari pusat.

3.3.2.2 Proyeksi Belanja

Sebagaimana Proyoksi Pendapatan, Proyeksi Belanja di asumsikan dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan sehingga Alokasi belanja kedepan tetap memperhatikan postur APBD yang Ideal dengan mengacu kepada Kebijakan Arah Pembangunan untuk lima tahun kedapan untuk membiyai Standar Pelayanan Dasar yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dan Infrastrukur. Selain itu kebijakan belanja juga memperhatikan belanja wajib mengikat serta prioritas utama sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pemenuhan Standar Pelayanan dasar sebagai belanja wajib dan belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur. Alokasi belanja di arahkan untuk membiayai Program yang memuat Visi Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pencapaiannya untuk lima tahun kedepan.

Proyeksi belanja tetap memperhatikan Proyeksi Pendapatan sehingga Postur APBD tetap menjaga besaran defisit untuk tetap melampaui batas yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana capaian Realisasi pendapatan, belanja dan defisit lima tahun terakhir tetap di bawah ambang batas sehingga postur APBD dan pelaksanaannya tetap konsisten dengan defisit yang telah di tetapkan. Untuk Tahun 2021, sebagaimana Pendapatan, belanja juga di masukkan dalam kategori target, mengingat untuk APBD Tahun anggaran 2021 telah di tetapkan

dan dalam proses pelaksanaan. Sehingga untuk proyeksi belanja hanya mencakup tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Proyeksi Belanja Untuk dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,55 persen. dibandingkan dengan target belanja tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 untuk belanja Operasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar (0,70) persen. sedangkan belanja modal dan belanja transfer cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,21 dan 11, 54 persen, hal ini untuk membiayai prioritas pembangunan khususnya bidang infrastruktur yang menjadi visi misi kepala daerah.

Pada Belanja Bantuan Khusus yang dianggarkan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, merupakan belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah sebesar 1 Milyar per desa untuk 124 Desa. Hal ini merupakan Prioritas utama dalam Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Bantuan Keuangan Khsusu Ke Pemerintah Desa ini di luar Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa dalam bentuk Anggaran Dana Desa (ADD).

3.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan yang memuat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di asumsikan dengan mempertimbangkan besaran defisit antara Pendapatan dan belanja untuk lima tahun kedepan dan arah kebijakan Invesatasi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 sampai dengan 2026.

Penerimaan Pembiayaan untuk target 2021 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) dengan asumsi untuk membiayai defisit dengan besaran dalam kategori sedang yaitu 2,6 persen, dan diproyeksikan besaran defisit lima tahun ke depan makin kecil yang berparalel dengan Penerimaan Pembiayaan untuk lima tahun kedapan, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur sangat berhati-hati dalam meletakkan Asumsi Silpa di karenakan besaran Penerimaan Pembiayaan melalui Silpa menunjukkan Kinerja keuangan daerah khususnya serapan belanja. Makin besar Silpa mengindikasikan banyaknya program kegiatan yang tidak terlaksana yang berimplikasi pada perencanaaan.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiaayaan arah kebijakan pemerintah dareah kabupaten luwu timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ke PT.Bank Sulselbar dengan peningkatan Penyertaan Modal setiap tahun selama lima tahun ke depan, sehingga di harapakan dengan Penyertaan Modal bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2026.

.

Tabel 3.26
Analisis Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

URAIAN	TARGET	PROYEKSI				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	**324.224.809.425,00**	**355.831.714.925,00**	**378.341.667.900,00**	**436.212.787.900,00**	**453.354.837.900,00**	**471.439.987.900,00**
Pajak Daerah	163.677.500.000,00	187.634.600.000,00	192.651.330.000,00	198.982.450.000,00	206.086.500.000,00	212.390.650.000,00
Retribusi Daerah	5.747.309.425,00	5.806.114.925,00	5.867.337.900,00	6.329.337.900,00	6.798.337.900,00	7.064.337.900,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33.800.000.000,00	51.391.000.000,00	53.283.000.000,00	97.001.000.000,00	98.750.000.000,00	101.185.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.000.000.000,00	111.000.000.000,00	126.540.000.000,00	133.900.000.000,00	141.720.000.000,00	150.800.000.000,00
Pendapatan Transfer	**1.090.315.663.000,00**	**1.115.064.434.275,00**	**1.133.432.347.000,00**	**1.166.046.147.000,00**	**1.180.639.247.000,00**	**1.155.159.139.000,00**
Transfer Pemerintah Pusat	**946.715.663.000,00**	**948.060.126.000,00**	**965.862.347.000,00**	**992.081.147.000,00**	**1.002.131.247.000,00**	**1.006.159.139.000,00**
Dana Transfer Umum	**946.715.663.000,00**	**948.060.126.000,00**	**965.862.347.000,00**	**992.081.147.000,00**	**1.002.131.247.000,00**	**1.006.159.139.000,00**
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.015.708.000,00	519.015.708.000,00	520.000.000.000,00	521.000.000.000,00	522.000.000.000,00	522.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil	94.974.998.000,00	112.954.771.000,00	118.822.700.000,00	124.541.500.000,00	130.341.600.000,00	134.369.492.000,00
Dana Transfer Khusus	332.724.957.000,00	316.089.647.000,00	327.039.647.000,00	346.539.647.000,00	349.789.647.000,00	349.789.647.000,00
Transfer Antar Daerah	**143.600.000.000,00**	**167.004.308.275,00**	**167.570.000.000,00**	**173.965.000.000,00**	**178.508.000.000,00**	**149.000.000.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	143.600.000.000,00	157.004.308.275,00	157.570.000.000,00	163.965.000.000,00	168.508.000.000,00	139.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**65.235.520.000,00**	**68.988.627.000,00**	**69.584.627.000,00**	**71.284.627.000,00**	**73.584.627.000,00**	**73.584.627.000,00**
Hibah Dari Pemerintah Pusat	43.835.520.000,00	46.084.627.000,00	46.084.627.000,00	46.084.627.000,00	46.084.627.000,00	46.084.627.000,00
Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL	21.400.000.000,00	22.904.000.000,00	23.500.000.000,00	25.200.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	**1.479.775.992.425,00**	**1.539.884.776.200,00**	**1.581.358.641.900,00**	**1.673.543.561.900,00**	**1.707.578.711.900,00**	**1.700.183.753.900,00**
BELANJA						
BELANJA OPERASI	**1.037.389.631.024**	**913.102.272.410**	**919.657.449.783**	**952.702.726.246**	**988.237.574.674**	**1.001.348.944.301**

Belanja Pegawai	478.867.337.150	498.327.071.237	498.389.340.244	501.502.352.775	502.542.654.967	503.273.967.523
Belanja Barang dan Jasa	478.380.377.881	355.951.756.173	359.842.655.775	383.774.919.707	420.994.919.707	430.874.976.778
Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Belanja Hibah	61.728.475.723	40.000.000.000	40.500.000.000	43.500.000.000	40.000.000.000	42.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	18.213.440.270	18.623.445.000	20.725.453.764	23.725.453.764	24.500.000.000	25.000.000.000
BELANJA MODAL	**281.731.182.526**	**334.009.932.877**	**360.084.258.361**	**410.741.846.997**	**403.145.388.565**	**380.786.569.700**
Belanja Modal Tanah	800.000.000	8.850.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	7.500.000.000	6.000.000.000
Belanja Modal Peralatan Mesin	53.034.947.098	45.423.411.503	47.723.445.203	59.893.676.335	60.893.676.335	58.788.345.467
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.677.488.558	79.524.256.207	81.775.467.504	101.885.435.207	98.788.976.775	80.035.488.778
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.018.746.870	200.032.265.167	222.400.345.654	238.775.735.455	235.775.735.455	235.775.735.455
Belanja Modal Aset tetap lainnya	200.000.000	180.000.000	185.000.000	187.000.000	187.000.000	187.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.500.000.000**	**3.500.000.000**	**2.500.000.000**	**3.500.000.000**	**3.000.000.000**	**1.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	3.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**195.149.829.450**	**320.070.266.437**	**326.965.015.550**	**332.098.988.657**	**335.970.730.775**	**336.938.753.775**
Belanja Bagi Hasil	16.210.182.450	16.210.182.450	17.310.237.550	19.320.445.657	21.780.954.775	20.998.977.775
Belanja Bantuan Keuangan	178.939.647.000	179.860.083.987	185.654.778.000	188.778.543.000	190.189.776.000	191.939.776.000
Belanja Bantuan Keuangan Khusus		124.000.000.000	124.000.000.000	124.000.000.000	124.000.000.000	124.000.000.000
JUMLAH BELANJA	**1.516.770.643.000**	**1.570.682.471.724**	**1.609.206.723.694**	**1.699.043.561.900**	**1.730.353.694.014**	**1.720.074.267.776**
SURPLUS/DEFISIT	**(36.994.650.575)**	**(30.797.695.524)**	**(27.848.081.794)**	**(25.500.000.000)**	**(22.774.982.114)**	**(19.890.513.876)**
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	39.994.647.000	35.797.695.524	32.848.081.794	30.500.000.000	26.274.982.114	28.390.513.876
Pengeluaran Pembiaayaan	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	8.500.000.000
Pembiayaan Netto	**36.994.647.000**	**30.797.695.524**	**27.848.081.794**	**25.500.000.000**	**22.774.982.114**	**19.890.513.876**

Sumber : Tim Penyusun

3.3.3 Kapasitas Rill.

Setelah mendapatkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja serta Pembiayaan selama periode lima tahun kedepan, maka dilanjutkan dengan melakukan proyeksi belanja terhadap Pembiayaan wajib dan mengikat. Analisis ini dilakukan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kerangka pendanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti yang tersaji dalam tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.27
Analisis Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib Dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)2021	Tingkat pertum buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
				Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
A	**Belanja Operasi**	**619.962.664.525,00**	**2,27**	**754.150.657.531,24**	**774.432.883.311,99**	**789.606.800.874,34**	**808.444.266.097,87**	**825.033.792.539,73**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	402.541.739.208,00	3,11	411.744.055.057,24	425.032.692.867,44	436.972.315.882,38	451.836.212.725,89	465.354.362.511,80
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	15.747.078.867,00	-	15.747.078.867,00	15.747.078.867,00	15.747.078.867,00	15.747.078.867,00	15.747.078.867,00
B	**Belanja Transfer**							
4	Belanja bagi hasil	195.149.829.450,00	1,29	320.070.266.437,00	326.965.015.550,00	330.098.988.657,00	333.970.730.775,00	336.938.753.775,00
5	Biaya Penungutan Pajak dan Retribusi Daerah	6.524.017.000,00	1,50	6.589.257.170,00	6.688.096.027,55	6.788.417.467,96	6.890.243.729,98	6.993.597.385,93
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**	**29,74**	**3.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**8.500.000.000,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	29,74	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.500.000.000,00	8.500.000.000,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**622.962.664.525,00**	**2,43**	**757.150.657.531,24**	**779.432.883.311,99**	**794.606.800.874,34**	**813.944.266.097,87**	**833.533.792.539,73**

Sumber:Tim Penyusun

Pada tabel 3.25 disajikan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama kabupaten luwu timur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan tahun 2021 adalah target atau tahun dasar yang telah berjalan yang terdiri dari belanja operasi, belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk belanja Operasi, Belanja Pegawai dan Tunjangan adalah belanja wajib yang dikeluarkan untuk membiayai gaji PNS beserta tunjangannya. Begitupun Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH adalah belanja yang diperuntukkan untuk Gaji dan Tunjangan beserta biaya operasional Kepala Daerah,Wakil Kepala, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pada Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan Biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah belanja Transfer dari pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Tekhnis penyaluran dan pengguanannya.

Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di alokasikan Investasi kepada PT.Bank Sulelbar yang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Deviden.

Tabel 3.28
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan DaerahKabupaten Luwu Timur
Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1.539.884.776.200	1.581.358.641.900	1.673.543.561.900	1.707.578.711.900	1.700.183.753.900
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	35.797.695.524	32.848.081.794	30.500.000.000	26.274.982.114	28.390.513.876
	Total penerimaan	1.575.682.471.724	1.614.206.723.694	1.704.043.561.900	1.733.853.694.014	1.728.574.267.776
	Dikurangi:					

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	697.397.337.674	706.354.355.794	714.601.341.432	718.013.385.742	724.712.721.298
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**878.285.134.050**	**907.852.367.900**	**989.442.220.468**	**1.015.840.308.272**	**1.003.861.546.478**

Sumber: Tim Penyusun

Penyajian analisis Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah pada tabel 3.26 menjelaskan seberapa besar Kemampuan keuangan daerah yang akan di gunakan dalam membiayai Program Prioritas setelah belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama dengan menghitung proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Hal ini sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran dalam belanja program kegiatan untuk menunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian Visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk Tahun 2022 Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.878.285.134.050,- dan untuk tahun 2023 Rp.907.852.367.900 mengalami peningkatan sebesar Rp.29.567.233.850. untuk tahun 2024 Kapasitas Risll kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.989.442.220.468 naik sebesar Rp.81.589.852.568,-. Tingginya kenaikan pada tahun 2024 ini diharapkan pembiayaan dalam mewujudkan Program Visi misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa tercapai. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp.1.1015840.308.272 naik sebesar Rp.26.398.087.804 dan untuk tahun 2026 sebesar Rp,1.003.861.546.478 turun sebesar Rp.11.978.761.794 dibandingkan tahun 2025.

Tabel 3.29
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
RPJMD 2021-2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas riil kemampuan keuangan	878.285.134.050,00	907.852.367.900,00	989.442.220.468,00	1.015.840.308.272,00	1.003.861.546.478,00
KP 1	439.142.567.025,00	453.926.183.950,00	494.721.110.234,00	507.920.154.136,00	501.930.773.239,00
KP 2	263.485.540.215,00	272.355.710.370,00	296.832.666.140,40	304.752.092.481,60	301.158.463.943,40
KP 3	175.657.026.810,00	181.570.473.580,00	197.888.444.093,60	203.168.061.654,40	200.772.309.295,60

Sumber Data : Tim Penyusun

Tabel 3.27 diatas menyajikan data analisis rencana penggunaan Kapasitas Rill kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan pembagian Kelompok Prioritas dalam tiga kelompok.

Kelompok Prioritas Pertama di tujukan untuk pengalokasian anggaran belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan dasar . Kelompok prioritas kedua dialokasikan untuk anggaran belanja pemenuhan Program Visi Misi Kepala Daerah dan Prioritas Ketiga di alokasikan untuk anggaran belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi Kapasitas Rill kemampuan keuangan untuk ke tiga Kelompok prioritas tersebut, untuk KP 1di alokasikan 50%, KP 2 di alokasikan 30% dan KP3 di alokasikan 20%.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur lima tahun mendatang dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah

Permasalahan pembangunan untuk prioritas dan sasaran dimaksudkan dengan permasalahan yang sifatnya makro pada level daerah. Indikator yang menjadi dasar penyingkapan masalah pada level dampak. Permasalahan ini akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan. Poin-poin permasalahan ini diuraikan dalam pokok masalah, masalah dan akar masalah.

(1) Kemiskinan Dan Taraf Hidup Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur saat ini menempati peringkat keempat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 73,22 di tahun 2020. Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur di tahun 2020 tersebut juga berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 71,93 dan IPM Nasional yang mencapai 71,94. Meskipun nilai IPM tersebut sudah tergolong tinggi, namun tetap merupakan tantangan untuk mencapai tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi. Masalah terkait

peningkatan kualitas manusia adalah penguasaan pengetahuan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; peluang berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup; dan daya beli yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, Angka Rata Lama Sekolah mencapai 8,80 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,83 tahun, Angka Harapan Hidup mencapai 70,53 tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 12.814 juta/orang/tahun. Walaupun IPM Kabupaten Luwu Timur sudah di atas rata-rata perkembangan IPM Regional Sulawesi Selatan dan Nasional serta PDRB/Kapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang mencapai 70,50 juta/orang/tahun dan tergolong cukup tinggi. Namun jika dihubungkan dengan angka kemiskinan sebagai salah satu indikator taraf hidup, maka jumlah penduduk miskin masih tergolong besar yang mencapai 20,82 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,85%. Walaupun secara persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,72% dan Nasional sebesar 9,78%, namun fokus penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada persentase penduduk miskin tapi lebih pada jumlah penduduk miskinnya. Sehingga di balik derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli yang cukup tinggi, namun penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan porsinya terbilang juga masih cukup besar. Sementara berdasarkan data Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2020 sebesar 0,405, mengindikasikan masih tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibandingkan kondisi Gini Ratio Sulawesi Selatan sebesar 0.389 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0.381. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk inilah yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dimana dengan tingkat taraf hidup yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dan kemiskinan trennya terus menurun namun terjadi peningkatan gini ratio di tahun 2020.

(2) Fluktuasi Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 sebesar 1,58%, tahun 2017 sebesar 3,07%, tahun 2018 sebesar 3,39%, tahun 2019 sebesar 1,17%, dan tahun 2020 sebesar 1,46%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur di tahun 2020 tersebut masih lebih baik dibanding Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi -0,70% dan Nasional sebesar -2,07%. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar

harga konstan 2010, mencapai 16,26 triliun rupiah. Dari keseluruhan kategori, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 11,72 persen di tahun 2020. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 44,95 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang meningkat saat Pandemic Covid dibandingkan dengan Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% dan Tahun 2020 meningkat menjadi 1,46% dikarenakan laju pertumbuhan PDRB pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan dari -2,69 di tahun 2019 menjadi 1,66% di tahun 2020.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas sektor-sektor perekonomian yang umumnya berbasis sumberdaya alam, baik tambang maupun non tambang, belum terkelola dengan optimal. Aktivitas sektor pertanian dalam arti luas juga belum menghasilkan nilai tambah yang cukup untuk berkembangnya rantai pasok yang memberi nilai kepada pelaku yang lebih banyak, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dimana pada tahun 2020, pengangguran meningkat sebanyak 1.553 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat sebesar 0,65% poin menjadi 4,46%. Walaupun jika dibandingkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31% dan Nasional sebesar 7,07%. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Selain itu juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian di daerah serta pedesaan, harus menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. BUMD dapat menggerakkan perekonomian daerah atau pedesaan melalui inovasi-inovasi teknologi terbaru. Peningkatan

perhatian dari para kepala daerah dalam mendukung pengembangan BUMD dari waktu ke waktu, termasuk pemilihan direksi. Jajaran direksi kini banyak diisi oleh kalangan profesional dari perusahaan swasta.

Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala ternyata BUMD pada umumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah.

(3) Belum Optimalnya Cakupan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sebab dengan terbangunnya jalan di wilayah Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa hal ditunjang termasuk, konektivitas antar wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, memudahkan pergerakan orang dan barang dan juga mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat tahun 2016 sampai tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 0,396 dan 2020 menjadi 0,400, penurunan kondisi jalan tersebut disebabkan karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklasifikasikan jalan kerikil dan tanah dalam kategori rusak berat dan rusak ringan. Sementara data base jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur mengklasifikasikan jalan kerikil sebagai kondisi rusak berat, rusak ringan, sedang dan baik. Dari gambaran kondisi tersebut infrastruktur jalan di Kabupaten Luwu Timur masih mengalami kendala dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kualitas. Untuk Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur adalah 6.778 Ha berdasarkan lampiran Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2015 tentang kriteria dan Status Daerah Irigasi. Berdasarkan data Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu tahun 2016-2020, capaiannya mengalami peningkatan mencapai 50,72% atau 3438,2 Ha Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dari total luas irigasi 6,778 Ha. Dengan capaian tersebut, masih diperlukan upaya peningkatan jaringan irigasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menjadi potensi utama di Kabupaten Luwu Timur.

Persentase lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data Persentase

Lingkungan permukiman kumuh mengalami kenaikan selama dari tahun 2016 seluas 0,01% menjadi 0,04% di tahun 2020. Melihat peningkatan tersebut, maka diperlukan upaya penanganan yang lebih maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi persentase lingkungan permukiman kumuh. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit. Namun jika melihat data Rasio Rumah Layak Huni yang baru mencapai 0,177, maka masih diperlukan upaya yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun. Salah satu kendala peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan dukungan dari Pengembang Perumahan, Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Sementara dalam hal komunikasi dan informasi, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya mengalami peningkatan setiap tahun mencapai 53,445 di tahun 2020. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan internet adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu kerjasama yang intens antara Pemerintah Daerah dan Pihak Provider untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, terjadi penurunan yang cukup drastis pada data Jumlah Penumpang Kapal di Danau dari 135.425 orang di tahun 2019 menjadi 76.733 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penumpang tersebut, selain disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang di terapkan oleh Pemerintah akibat Pandemi Covid-19 juga diakibatkan jumlah kapal penumpang yang melayani penyeberangan danau mengalami penurunan serta konektivitas melalui jalur darat sudah sangat memadai sehingga sebagian besar penduduk melakukan perjalanan melalui alternatif jalur darat.

(4) Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Memuaskan

Permasalahan mendasar yang menyebabkan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum optimal yaitu Capaian Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Walaupun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 yang memperoleh Nilai 48,04 dengan Predikat C meningkat di tahun 2020 dengan perolehan Nilai 61,06 dengan Predikat B.

Komponen penilaian ini meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Berdasarkan data perolehan Nilai SAKIP di tahun 2020, terlihat bahwa unsur Evaluasi Internal memiliki capaian nilai yang terendah dibandingkan dengan 4 komponen lainnya dengan nilai 5,48. Sementara capaian nilai tertinggi diperoleh dari unsur Perencanaan Kinerja dengan nilai17,04. Dari lima komponen penilaian tersebut, unsur Pelaporan Kinerja mengalami penurunan dari 12,03 di tahun 2019 menjadi 11,91 di tahun 2020. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 memperoleh nilai 46,94 dengan kategori “C”. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) terdiri dari Komponen Pengungkit yang memperoleh nilai 23,68 dan Komponen Hasil yang memperoleh nilai 23,25 di tahun 2020. Berdasarkan catatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan bahwa Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu , pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.

Sementara itu capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 masih pada Level Terdefinisi (Level 3) dengan nilai 3,038. Ini berarti, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain Kapabiltas APIP di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 berada pada level 3 atau disebut

Integrated, hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai iefisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah adalah sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu motor penggerak dalam pembangunan bidang tata kelola Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Pada Tahun 2020 Nilai Merit System yang diperoleh adalah 75,0 atau kategori "Buruk", penilaian tersebut menandakan bahwa Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem merit manajemen ASN. Sementara berdasarkan penilaian Indeks ASN Profesional di tahun 2020, Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 71,0 atau kategori "Sedang"". Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pada aspek lain, penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) belum semuanya terpenuhi 100%. SPM berlaku untuk pelayanan dasar urusan wajib yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain : a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran/APBD; b. Belum validnya data sasaran penerapan SPM; c. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan; d. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.

Salah satu masalah yang juga dampak belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan adalah masih rendahnya kemandirian Desa. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 mencapai 0,6725 dengan Status IDM sebagai Kabupaten "BERKEMBANG". Dari capaian IDM tersebut, pada tahun 2021 di Kabupaten Luwu Timur sudah tidak ada Desa Sangat tertinggal, namun

masih terdapat 6 Desa Tertinggal, 89 Desa Berkembang, 22 Desa Maju dan sudah 7 Desa yang masuk dalam Status Desa Mandiri. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Terdapat 2 (dua) hal pokok penyebab masih rendahnya kemandirian Desa di Kabupaten Luwu Timur, yakni keterbatasan infrastruktur perdesaan dan belum berkembangnya secara maksimal ekonomi masyarakat perdesaan tersebut. Sementara itu, umumnya wilayah perdesaan dimaksud memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Potensi tersebut diantaranya adalah ketersediaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, potensi hutan, potensi tambang, serta obyek-obyek wisata.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun maka dilakukan inovasi yang terdiri atas inovasi bidang sumber daya manusia, inovasi bidang sumber daya lokal dan kewirausahaan dan inovasi bidang infrastruktur.

(5) Degradasi Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terjadi kenaikan besaran tutupan lahan dari 70,24 pada tahun 2018 menjadi 76,48 pada tahun 2019 dan 2020. Salah satu faktor pendukung kenaikan besaran tutupan lahan tersebut dikarenakan terdapat dukungan kebijakan untuk potensi penambahan tutupan lahan diluar hutan (Data Ruang terbuka hijau, data kebun raya dan data taman kehati) Peraturan Dirjen PPKL Nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan IKTL dan Pengelolaan Tutupan Lahan. Salah satu masalah yang bisa menjadi ancaman terjadinya degradasi tutupan lahan di akibatkan berkurangnya luas hutan karena aktivitas manusia baik karena perambahan maupun karena ekspansi kegiatan pertanian. Ancaman lain yang dapat menyebabkan kualitas lahan juga akan cenderung menurun karena praktek pertanian intensif yang menggunakan pupuk sintetis,

meskipun di daerah ini ada gerakan untuk kembali kepada pertanian organik. Akar masalah lainnya adalah semakin besarnya volume sampah dari aktivitas rumah tangga, pasar, rumah sakit, kawasan bangunan pelayanan publik, sementara sistem pengelolaan sampah belum cukup canggih untuk menanganinya. Adanya perubahan iklim, terutama pergeseran musim dan fenomena kekeringan ataupun banjir, juga menjadi akar masalah terkait degradasi lingkungan.

Selain itu, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur cenderung membaik pada tahun 2020 yakni 86,87, ini meningkat dari nilai IKLH pada tahun 2018 (58,351) dan pada tahun 2019 (70,56). Namun demikian, tetap harus diantasipasi ancaman degradasi lingkungan, karena perbaikan kualitas lingkungan pada tahun 2020 kemungkinan akan menurun yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas manusia disebabkan oleh Pandemi Covid-19

(6) Adanya Potensi Gangguan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Tren angka kriminalitas di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sebanyak 518 kasus dan menurun cukup drastis di tahun 2020 menjadi 198 kasus. Masih terjadinya kasus kriminalitas tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat atas norma hukum dan norma sosial yang belum memadai. Meskipun secara tren angka kriminalitas terjadi penurunan, namun diperlukan upaya untuk memelihara kesadaran dan pemahaman atas norma hukum dan norma sosial di seluruh kalangan masyarakat. Masalah yang juga perlu diantisipasi adalah potensi disharmoni sosial yang berpangkal pada cukup tingginya heterogenitas sosial masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat Kabupaten Luwu Timur terdiri dari berbagai kelompok sosial yang beragam, termasuk pada kawasan eks transmigrasi. Tidak kalah pentingnya dalam upaya menekan angka kriminalitas adalah menjaga kesenjangan, karena apabila kesenjangan sosial diantara mereka melebar dan itu berimpit dengan perbedaan etnis/suku maka potensi konflik sosial terbuka.

(7) Adanya Tantangan Untuk Merawat Nilai-Nilai Agama Dan Budaya

Masyarakat Luwu Timur dikenal sebagai masyarakat yang beradab. Keberadaban ini bertumpu pada kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai agama dan budaya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan keberagaman latar sosial masyarakat Luwu Timur. Daerah ini dihuni oleh berbagai pemeluk agama dan keyakinan serta nilai-nilai budaya yang beragam. Perbedaan

dan keberagaman dimaksud memiliki tantangan tersendiri, dan sekaligus menjadi potensi bagi terciptanya masyarakat yang beragam dalam kesatuan. Dalam konteks inilah, maka upaya yang berkesinambungan dalam merawat nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Luwu Timur memiliki makna yang strategis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keberagaman nilai-nilai agama dan budaya tersebut dirawat dengan baik, maka keberagaman ini menjadi kekuatan di dalam mengatasi berbagai macam permasalahan pembangunan.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan

4.1.2.1. Permasalahan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal;
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD yang hanya mencapai 46,11 persen di karenakan masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar;
- Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan walaupun secara rasio berdasarkan jumlah keseluruhan jumlah guru dan siswa masih cukup baik dengan Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 1 : 25 dan SMP/MTs sebesar 1 : 20;
- Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum memadai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 108,74 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2020, dan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 8,16 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2020;
- Masih meningkatnya kejadian balita gizi buruk pada tahun 2020 sebanyak 3 orang;
- Meningkatnya angka kematian neonatal sebesar 4.61 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020;
- Menurunnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 35,88 persen pada tahun 2020;
- Menurunnya Cakupan UCI pada tahun 2020 dengan capaian 88,98 persen (14 desa/ kelurahan tidak UCI);
- Menurunnya pelayanan kesehatan anak dan masyarakat miskin;

- Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;
- Belum terpenuhinya kebutuhan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Keterbatasan akses pelayanan kesehatan rujukan karena minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan Rujukan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum
   - Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
   - Belum lengkapnya data kondisi jalan dan jembatan;
   - Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi;
   - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku;
   - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi;
   - Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase;
   - Kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pentingnya IMB masih kurang;
   - Belum optimalnya ketersediaan fasilitas air bersih tingkat rumah tangga;
   - Sumber daya manusia pengelola sampah, limbah dan pertamanan publik serta kapasitas kelembagaan yang kurang memadai;
   - Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu;
   - Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat;
   - Terbatasnya peralatan yang dimiliki dan Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai.

b. Penataan Ruang
   - Masih terbatasnya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis;
   - Pengelolaan data tata ruang belum optimal;
   - Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
   - Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
   - Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**
   - Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
   - Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
   - Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
   - Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan PSU Perumahan Umum;
   - Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah;
   - Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
   - Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
   - Belum ditetapkannya kawasan kumuh dibawah 10 Ha, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur;
   - Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**
   - Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
   - Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
   - Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah;
   - Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun APAR;
   - Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran;
   - Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran;
   - Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
   - Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi;

- Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana;
- Penyeragaman kapasitas BPBD Kabupaten yang satu dengan yang lain.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum validnya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- Belum termanfaatkannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pihak;
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

4.1.2.5. Permasalahan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
- Rendahnya minat pencari kerja untuk meningkatkan kapasitasnya;
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
- Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
   - Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
   - Harga bahan pangan masih fluktuatif;
   - Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
   - Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
   - Masih terjadinya perselisihan sengketa pertanahan milik Negara dan masyarakat;
   - Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
   - Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
   - Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
   - Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
   - Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
   - Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
   - Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
   - Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke Tempat Pengolahan Akhir sampah;
   - Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduse and recycle);
   - Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
   - Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Luwu Timur masih belum dapat memenuhi baku mutu.
   - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
   - Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan;
   - Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka peningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang luas.
7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
   - Masih lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
   - Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
   - Belum optimalnya BUMDes yang terbentuk;
   - Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur;
   - Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa dalam memahami regulasi.
8. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
   - Masih tingginya unmet need;
   - Wilayah sasaran program KB memiliki topografi dan tingkat kesulitan yang berbeda;
   - Jumlah dan Kualitas SDM di lini lapangan masih terbatas;
   - Kasus pernikahan usia dini masih tinggi;
   - Persalinan remaja masih cukup tinggi;
   - Kasus perceraian cenderung meningkat;
   - Angka kemiskinan masih tinggi;
   - Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluarga.
9. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
   - Masih minimnya penyediaan terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah;
   - Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten;
   - Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat;
   - Belum optimalnya penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR.

10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**
    - Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan kegiatan komunikasi dan informatika;
    - Masih minimnya sumber daya manusia pengelolaan Informatika dan Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan E – Government;
    - Masih minimnya akses internet bagi masyarakat pada ruang-ruang publik di Kabupaten Luwu Timur;
    - Masih terbatasnya jangkauan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Timur.
11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**
    - Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM;
    - Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
    - Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;
    - Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
    - Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
    - Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
    - Masih minimnya regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal;
    - Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
    - Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Instansi Pemerintah dan dunia usaha;
    - Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

- Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**
    - Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
    - Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda;
    - Belum tersedianya sarana kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi kepemudaan;
    - Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
    - Masih minimnya prestasi kepemudaan dan bidang olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional.
14. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**
    - Keterbatasan SDM dan kapasitas pengelola data statistik;
    - Belum terpusatnya penyediaan data statistik sektoral;
    - Keterbatasan anggaran pengelolaan data statistik sektoral.
15. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**
    - Keterbatasan SDM;
    - Keterbatasan sarana dan prasarana;
    - Keterbatasan anggaran.
16. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**
    - Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur, hal ini dipengaruhi oleh faktor belum adanya petunjuk teknis;
    - Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya ketersediaan sarana dan prasarana budaya;
    - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pembinaan kapasitas tenaga pelatihan, pembinaan maupun pelaku budaya;
    - Masih rendahnya daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pemahaman dan keterampilan dalam mengolah dan mengembangkan budaya.
17. **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**
    - Masih kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
    - Masih terbatasnya koleksi buku di perpustakan, baik perpustakaan umum maupun desa;
    - Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan;

- Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
- Masih terbatasnya tenaga pustakawan daerah.

18. **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**
    - Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis;
    - Masih rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
    - Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

4.1.2.3. Permasalahan Urusan Pilihan

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**
    - Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
    - Masih maraknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;
    - Kurangnya kesadara nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
    - Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
    - Belum optimalnya produksi olahan ikan;
    - Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.
2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
    - Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya pada tingkat Nasional dan Internasional;
    - Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
    - Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
    - Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas;
    - Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung.;
    - Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata potensial seperti Danau Matano dan obyek wisata potensial lainnya, serta berbagai obyek wisata skala perdesaan.
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
    - Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat

padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian;
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiens usaha tani;
- Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
- Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
- Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan;
- Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target;
- Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkunganmenyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air;
- Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi;
- Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak;
- Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
- Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar;
- Masih rendahnya daya saingproduk perkebunan terhadap produk impor;
- Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan;
- Kurang tersedianya benih unggul yang bermutu;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- Keterbatasan akses permodalan bagi peternak;
- Kurangnya betina produktif (sapi), inbreeding dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer;
- Masih banyaknya pemotongan illegal di luar RPH;
- Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan belum tangguh dan mandiri;

- Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan, dan teknologi alsintan;
- Belum optimalnya infrastruktur Pertanian;
- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan;
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**
   - Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
   - Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
   - Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
   - Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**
   - Masih rendahnya produktifitas IKM;
   - Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM;
   - Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM;
   - Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku IKM.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**
   - Belum optimalnya aksesibilitas transportasi ke daerah transmigrasi;
   - Masih minimnya dukungan infrastruktur penunjang pada wilayah transmigrasi;
   - Belum sepenuhnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigransi dilaksanakan oleh para pihak;
   - Tingkat kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan.

4.1.2.6. Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Unsur Sekretariat Daerah
   - Banyaknya program dan kegiatan yang terkait Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait;
   - Masih kurangnya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
   - Belum tertibnya administrasi data usul rancangan produk hukum daerah;

- Masih lambatnya penyelarasan dan penyesuaian produk hukum daerah yang ada dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat;
- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen rancangan produk hokum daerah yang sedang diproses;
- Masih lambatnya pembentukan produk hukum daerah;
- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah akibat terbatasnya SDM di Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengelola JDIH;
- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;
- Masih lemahnya pengertian tentang bantuan hukum pada Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata;
- Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah;
- Belum ada pustakawan yang mengelola arsip dan belum ada staf yang mengikuti pendidikan dan latihan khusus JDIH;
- Evaluasi kelembagaan belum diterapkan secara berkala;
- Pola tata hubungan kerja belum terkoordinasi antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah;
- Kebijakan pelayanan publik belum diimplementasikan secara maksimal;
- Belum tersusunya peta proses bisnis (Probis);
- Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- Rencana aksi delapan area perubahan pada reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal;
- Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi lingkup pemerintah Kabupaten;
- Kematangan kelembagaan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kualitas tata kelola pelaksanaan pengedaan barang dan jasa belum optimal, dimulai dari tahap perencanaan anggaran, tahapp pemilihan penyediaan dan pelaksanaan kontrak;
- Penguatan regulasi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkup Pemerintah Kabupaten belum terwujud sesusai standar;
- Ketersediaan SDM pengelolaan P Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait kuantitas dan kualitas yang belum memadai di lingkungan pemerintah Kabupaten;

- Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan masih lambatnya pengumpulan data pendukung IKK LPPD dari tiap-tiap perangkat daerah;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam hal mengimplementasikan penyelenggaraan kerja sama;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Bina Wilayah.

b. Unsur Sekretariat DPRD
- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- Masih terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD terhadap penyusunan legal drafting;
- Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD khususnya di bidang informasi dan Tehnologi.

4.1.2.5. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Unsur Perencanaan
- Kurangnya SDM perencana;
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

b. Unsur Keuangan
- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas;
- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daeah belum tergali secara optimal;
- Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak masih rendah;
- Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
- Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang;
- Ruang pelayanan pajak kurang representatif.

c. Unsur Kepegawaian
- Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;
- Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
- Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

d. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan
- Database kediklatan yang belum memadai;
- Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;

- Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat.

e. Unsur Penelitian Dan Pengembangan
- Belum optimalnya pengembangan penelitian untuk kepentingan pembangunan;
- Belum adanya keserasian pemanfaatan hasil-hasil penelitian daerah;
- Belum tersedianya pejabat fungsional khusus peneliti.

4.1.2.6. Permasalahan Unsur Kewilayahan

- Kecamatan
  - Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas;
  - Belum sepenuhnya dilakukan pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Camat;
  - Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan luas wilayah.
  - Belum memadainya infrastruktur pada sebagian besar desa;
  - Belum termanfaatkannya potensi ekonomi perdesaan untuk kegiatan produktif.

4.1.2.7. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa dan Politik
  - Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Belum optimalnya pola koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi maupun dengan Instansi Vertikal;
  - Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
  - Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

4.1.2.8. Permasalahan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Inspektorat Daerah
  - Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa;
  - Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
  - Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian intermal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten;
  - Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodic;
  - Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun isu strategis yang berdampaklangsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian ke depan di antaranya adalah :

4.2.1. Isu Global

Dalam penyelenggaran pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembagunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun issu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

(1) Dampak Pandemik Covid-19

Dengan adanya Pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Di awal Pandemi, Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah dengan korban terpapar Covid-19 yang cukup tinggi dan masuk kategori zona merah namun perlahan-lahan semakin melandai dan di tahun 2021 termasuk sebagai daerah zona hijau.

Walaupun demikian, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,26 triliun rupiah di tahun 2020. Angka tersebut naik dari 16,02 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,17 persen. Masih positifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tersebut disebabkan Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan

Penggalian, yaitu mencapai 44,95 persen dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,66 persen atau sebesar 8,6 triliun rupiah.

Namun jika ditinjau dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dan 8 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negative akibat Pandemi Covid-19. Dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi. Tiga lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Pendidikan, Real Estate. Empat lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen yaitu Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 11,72 persen di tahun 2020.

Selain itu juga Pandemi Covid-19 berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Luwu Timur. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 1.553 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat sebesar 0,65 persen poin menjadi 4,46 persen pada Agustus 2020 dari 3,81 persen di tahun 2019. Terdapat 19.989 orang yang terdampak Covid-19 atau 9,18 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1.028 orang), BAK karena Covid-19 (637 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1.099 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (17.225 orang).

(2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs adalah wacana pembangunan global yang telah disepakati untuk berlaku pada semua negara, termasuk Indonesia. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang indikator dan target capaianya secara nasional telah ditetapkan. Hasil analisis isu

strategis untuk Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa seluruh tujuan SDGs tersebut relevan sehingga perlu menjadi perhatian dalam lima tahun kedepan, Adapun isu-isu terkait SDGs di Kabupaten Luwu Timur adalah kemiskinan, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kesehatan, pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak, air bersih dan sanitasi, energy terbarukan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja, infrastruktur tangguh dan industri inklusif serta inovasi, kesenjangan dan ketimpangan, pemukiman, produksi dan konsumsi berkelanjutan, perubahan iklim, kelautan dan perikanan, kehutanan, lahan dan keanekaragaman hayati, inklusifitas dan perdamaian, serta kerjasama pembangunan.

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya memiliki 197 target indikator yang relevan untuk dicapai. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang ditetapkan sebagai kewenangan kabupaten namun tidak terdapat di Kabupaten Luwu Timur, seperti indikator terkait jalan tol, rel kereta api, daerah tertinggal, kota metropolitan, DAS Perioritas. Selain itu terdapat beberapa indikator yang ditetapkan secara nasional lebih cocok untuk di ukur pada level provinsi. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Luwu Timur terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu :

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target;
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target;
c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
d. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 35,53% atau sebanyak 70 indikator, dari total 197 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, sebanyak 28,43% (56 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 16

indikator atau 8,12% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 27,92% atau 55 indikator belum/tidak memiliki data.

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 17 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) dan TPB 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) memiliki indikator paling banyak masingmasing 9 indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) dengan 4 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 10 Indikator. Dari total 197 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Luwu Timur, jumlah indikator yang telah dilaksanakan secara keseluruhan adalah 126 indikator, dimana TPB 3 yang paling banyak telah dilaksanakan yaitu 26 indikator.

Berdasarkan hasil analisis capaian Indikator TPB di Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2019 hanya berkisar 35,53%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 7 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 40%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 40% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari :

a. (5) Kesetaraan Gender;
b. (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
c. (10) Berkurangnya Kesenjangan;
d. (13) Penanganan Perubahan Iklim;
e. (15) Ekosistem Daratan.

Kajian status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan pada 2 indikator utama yaitu

ketersediaan air dan ketersediaan pangan. Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur sebesar 652.312.478 m^3/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 21.927.302 m^3/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 630.385.176 m^3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap Kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Towuti (120.063.362 m^3/Tahun), dan Mangkutana (101.274.038 m^3/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tomoni Timur (3.750.140 m^3/Tahun). Hal ini dikarenakan pada Kecamatan Tomoni Timur ketersediaan airnya paling kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Meski secara umum ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan airnya tidak mencukupi seperti pada beberapa grid di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan air lebih besar dari pada ketersediaan.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur sebesar 2.237.120.333.024 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 235.718.496.638 Kkal/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 2.001.401.836.386 Kkal/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Towuti (376.231.500.649 Kkal/Tahun), dan Mangkutana (332.031.508.073 Kkal/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tomoni Timur (11.722.747.000 Kkal/Tahun) dan Kecamatan Kalaena (24.921.815.222 Kkal/Tahun). Hal ini dikarenakan pada Kecamatan Tomoni Timur dan Kalaena ketersediaan pangannya paling kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Meski secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan pangannya tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan lebih besar dari pada ketersediaan. Secara total terdapat 2,27% dari total luas wilayah di Kabupaten

Luwu Timur yang status penyedia pangannya telah melampaui ambang batas. Sementara yang tidak melampaui ambang batas terdapat 99,98% dari total luas wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Wilayah yang melampaui ambang batas pangannya tidak signifikan berdampak dikarenakan pada faktanya kebutuhan pangan pada wilayah tersebut dapat disuplai oleh wilayah disekitarnya.

Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Luwu Timur, menunjukkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur resiko bencana terbesar adalah gempa bumi sekitar 576.423 Ha atau 69,90%. Kemudian diikuti dengan resiko tanah longsor sekitar 178.886 Ha atau 21,69 %. Untuk pada kajian ini lebih difokuskan pada kajian resiko gempa bumi dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil olah data penutupan lahan dominan di Kabupaten Luwu Timur berupa hutan lahan kering sekunder sebesar 28,67%, kemudian diikuti hutan lahan kering primer sebesar 25,66%, pertanian lahan kering campur sebesar 12,30%, dan badan air 11,49%. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya lahan di Kabupaten Luwu Timur umumnya berupa penggunaan untuk perkebunan dan pertanian. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan lahan di Kabupaten Luwu Timur maka dilakukan analisis perubahan penutupan lahan. Hasil analisis peta penutupan lahan antara tahun 1990 dan tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan penutupan lahan. Penutupan lahan yang mengalami pengurangan terbesar terdapat pada penutupan belukar yaitu berkurang sekitar 35.440,3 Ha dari tahun 1990 ke 2019. Sementara penutupan lahan yang mengalami penambahan terbesar terdapat pada penutupan lahan hutan lahan sekunder yaitu sekitar 161.197,5 Ha. Berdasarkan hasil analisis, neraca sumber daya lahan di Kabupaten Luwu Timur berada pada kategori positif yaitu 646,49 Ha. Hal ini menunjukkan masih efisiennya pemanfaatan lahan di Kabupaten Luwu Timur dikarenakan perubahan lebih kecil dari pada yang tetap. Kabupaten Luwu Timur memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu 346.485,53 Ha atau sekitar 50,91%% dari total luasan Kab.Luwu Timur. Sementara tutupan hutan berdasarkan data penutupan lahan tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur 431.990 Ha (63,47%). Hal ini menunjukkan masih konsistennya penggunaan lahan pada masing-masing fungsi kawasan hutan. Hal ini harus tetap dipertahankan agar efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat diwujudkan.

(3) Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan di konstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencaharaiannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau. Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah.

Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ke tiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat

dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang terluas kategori kerentanan sangat rendahnya terdapat pada Kecamatan Mangkutana (28.582,56 Ha), dan Tomoni Timur (2280,08 Ha). Hal ini menunjukkan daerah tersebut diatas tidak rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kerentanan yang sangat rendah ini dikarenakan indeks keterpaparan dan sensitivitasnya yang rendah serta juga didukung oleh kapasitas adaptifnya yang masih cukup baik. Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang terluas kategori kerentanan rendahnya terdapat pada Kecamatan Towuti (101.555,66 Ha), dan Kecamatan Nuha (791101,86 Ha). Kecamatan tersebut umumnya berada pada tingkat keterpaparan dan sensitifitas yang rendah terhadap perubahan iklim, dan tingkat kapasitas untuk beradaptasinya juga cenderung tinggi sampai rendah. Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang terluas kategori kerentanan sedangnya terdapat pada Kecamatan Kecamatan Mangkutana (108.224,20 Ha), dan Kecamatan Nuha (96230,25 Ha). Tingkat kerentanan di daerah tersebut diakibatkan tingkat keterpaparan dan sensitifitas wilayah tersebut yang tinggi, sementara di sisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah. Kapasitas adaptasi yang rendah mengindikasikan rendahnya ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut, selain itu pendidikan dan sumber mata pencaharian masyarakatnya yang terbatas. Adapun Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang terluas kategori kerentanan Tinggi terdapat pada Kecamatan Towuti (400,413 Ha). tingkat kerentanan di daerah tersebut diakibatkan tingkat keterpaparan dan sensitifitas wilayah tersebut yang tinggi, sementara disisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah.

(4) Tranformasi Digital

Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya

desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Hal tersebut selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional.

Fokus percepatan proses transformasi digital antara lain dengan digitalisasi di sektor ekonomi dan bisnis, transformasi di Pemerintahan dan dan mendorong akselerasi kompetensi SDM talenta digital, penguatan solusi ekosistem dalam mendukung inklusi digital masyarakat seperti untuk UMKM, startup, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan terkait digitalisasi, serta upaya dalam dan serta didukung kajian dan riset bidang TIK.

Dalam rangka mendorong TIK menjadi katalis yang dapat meningkatkan daya saing nasional, tentu layer yang sangat penting untuk ikut bertransformasi digital adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai individu harus mendapatkan literasi yang memadai untuk mau adopsi teknologi, menggunakan teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi untuk pendapatan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam tatanan pertumbuhan industri di era digital, masyarakat sebagai individu juga harus dapat menyesuaikan kemampuan dan kompetensi diri, agar dapat terserap pada industri yang membutuhkan. Dari sisi pemerintah, literasi masyarakat ini harus diiringi dengan kualitas internet yang sehat dan aman, dan jaminan keamanan data dan privasi bagi masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan **"Gerakan Menuju 100 Smart City"** yang telah dimulai sejak tahun 2017. Kabupaten/kota yang telah menjalankan Program Smart City diharapkan dapat menjadi teladan (role model) dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada Instansi Pemerintah dalam skala yang luas dan menjaring ke setiap daerah.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet di Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya mengalami peningkatan setiap tahun, dari 29,13 persen di tahun 2017 meningkat menjadi 53,44 persen di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan dengan peningkatan penduduk yang menggunakan HP/Telepon meskipun jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Internet persentasenya lebih kecil dibanding dengan Jumlah Penduduk yang menggunakan Hp/Telepon. Peningkatan proporsi rumah tangga yang

menggunakan akses internet dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang disediakan oleh pihak Provider maupun disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Perlu diketahui bahwa penyediaan jaringan internet oleh pihak provider cakupannya lebih luas karena jaringan yang disediakan bisa diakses masyarakat secara umum dengan biaya tertentu, sedangkan jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah hanya bisa diakses oleh kantor pemerintah dan beberapa pengguna dari masyarakat di wilayah atau area tertentu dengan cakupan yang lebih sempit. Adapun persentase Proporsi rumah tangga dengan akses internet masih didominasi oleh masyarakat yang berdomisili di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, hal ini dikarenakan akses jaringan internet di wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan cukup bagus. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan internet adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu kerjasama yang intens antara Pemerintah Daerah dan Pihak Provider untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4.2.2. Isu Nasional

(1) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kebijakan Nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

a. SPM Bidang Pendidikan;
b. SPM Bidang Kesehatan;
c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
f. SPM Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar di Kabupaten Luwu Timur, masih ada beberapa pencapaian target yang masih sangat rendah. Pada tahun 2020, hanya 2 indikator dari 12 indikator pada urusan kesehatan yang mencapai target 100 persen. Sementara terdapat 2 indikator dari 4 indikator pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang mencapai target 100 persen. Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain : a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran/APBD; b. Belum validnya data sasaran penerapan SPM; c. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan; d. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.

(2) Bonus Demografi

Pada Tahun 2030-2040, Indonesia di prediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan

dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pertama, berdasarkan data BPS (Agustus 2020) sekitar 56 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan fokus pada dua isu, yakni pendidikan dan tenaga kerja. Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas. Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global.

4.2.3 Isu Strategis Daerah

4.2.3.1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari : 1) Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan; 3) Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian; 4) Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan; 5) Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas; 6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam; 7) Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual); 8) Sulawesi Selatan sebagai poros maritim.

4.2.3.2. Isu Strategis Kabupaten Luwu Timur

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan Urusan Pemerintahan, Isu Global, Isu Nasional dan Isu Provinsi Sulawesi Selatan, maka Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dirumuskan dan disusun berdasarkan prioritisasi sebagai berikut :

(1) Penanganan Dampak Pandemic Covid-19
(2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

(3) Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(4) Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
(5) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
(6) Pemenuhan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
(7) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
(8) Pemenuhan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Publik
(9) Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
(10) Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
(11) Pemeliharaan Nilai- Nilai Budaya dan Agama
(12) Perubahan Iklim
(13) Bonus Demografi
(14) Tranformasi Digital

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai "medan magnet" bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah:

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni "berkelanjutan", "lebih maju", serta "berlandaskan nilai agama dan budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	**Berkelanjutan**	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
		dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksud-kan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuh-an generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Lebih maju	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
		yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelak-sanaan pembangunan, penyelenggaraan peme-rintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni "Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter" dan visi RPJMN 2020-204 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

5.2 Misi

Misi RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maksud perumusan misi ini adalah agar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur memiliki prioritas upaya umum untuk dijalankan secara bersama. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh**

   Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,

2. **Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas**

   Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.

3. **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas**

   Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, teruatama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keankeragaman hayati.

4. **Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**

   Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan public lainnya.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar ummat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana ditekankan dalam Permendagri 86/2017, tujuan dalam RPJMD adalah kondisi yang akan dicapai atau sesuatu yang akan diubah selama periode RPJMD. Langkah-langkah perumusan tujuan meliputi: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Menurut Permendagri 86/2017, kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan (4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah dalam merumuskan sasaran adalah: (1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok tahapan RPJPD yang relevan; dan (3) menyelaraskan

rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman di atas maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi-1 yakni "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh" adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesataran gender
2. Penjabaran tujuan pada Misi-2 yakni "Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas" adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah ; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. Penjabaran tujuan pada Misi-3 yakni "Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas" adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan" dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Penjabaran tujuan pada Misi-4 yakni "Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik" adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Penjabaran tujuan dari Misi-5 yakni "Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat" adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. Penjabaran tujuan dari Misi-6 yakni "Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya" adalah Meningkatkan toleransi dan

kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Rumusan saling keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Visi: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya											
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	**Tujuan-1:**										
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1 Angka Kemiskinan	%	6,85	6,84	6,64	6,44	6,24	6,04	5,84	5,84
		Sasaran-1:										
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,22	73,50	73,80	74,10	74,40	74,70	75,00	75,00
		Sasaran-2:										
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		Sasaran-3:										
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	89,71	89,92	89,94	90,00	90,05	91,18	92,15	92,15
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing	**Tujuan-2:**										
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	1,46	1,61-2,15	2,49-3,33	2,72-3,63	2.98-3,71	3.22-3,50	3.46-3,63	3,50-3,72
			6 Rasio Gini	Nilai	0,405	0.397	0.389	0.381	0,247	0,232	0,217	0,217

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
	dan berjaringan luas (M2)	**Sasaran-4**										
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	-0.25	1.63	1.83	1.98	2.08	2.17	2.23	2.23
		Sasaran-5:										
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,46	3.80	3.30	3.05	2.80	2.55	2.30	2.30
3	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	**Tujuan-3:**										
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9 Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	1,4830 (Sedang)	1,6281 (Sedang)	1,8150 (Sedang)	2,0666 (Sedang)	2,2638 (Sedang)	2,3230 (Sedang)	2,4101 (Sedang)	2,5101 (Tinggi)
		Sasaran-6:										
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	74,42	74,67	74,89	74,93	75,15	75,32	75,59	75,59
		Sasaran-7:										
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	86,87	87,00	87,55	88,10	88,35	88,70	88,70	88,70
			12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)
4		**Tujuan-4:**										

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
	Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	C	CC	CC	B	B	B	BB	BB
		Sasaran-8:										
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14 Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	C (Sangat Perlu Perbaikan)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)
			15 Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran-9:										
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16 IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	80,35	80,76	82,42	84,75	85,68	87,78	90	90
			17 IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	78, 73	80,15	82,21	84,31	86,23	88,10	88,32	88,32
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	**Tujuan-5:**										
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	18 Angka Kriminalitas	Point	0,000738	0,000738	0,000643	0,00056	0,000473	0,000451	0,000429	0,000429
		Sasaran-10:										
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19 Indeks Ketertiban	Nilai	76,53	76,64	76,72	76,81	77,21	77,43	77,86	77,90

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
			dan Ketentraman									
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	**Tujuan-6:**										
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	75,67	75,70	75,89	75,92	76,00	76,34	76,85	76,85
			21 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	49,82	53.77	54.27	54.77	55.27	55.77	56.27	56.27
		Sasaran-11:										
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	95	95	95	95	95	95	95
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	95	95	95	95	95	95	95

Sumber: Bapelitbangda 2021 (data Diolah)

5.4. Keterkaitan Visi / Misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Visi pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah "**Indonesia Yang Mandiri, Maju, Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Gambar. 5.3
Keterkaitan Visi RPJPN dan RPJMD

RPJMN	RPJMD
" Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong "	" Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya "
Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur mendukung pencapaian visi RPJMN dimana visi diatas menggambarkan perwujudan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan lebih maju, hal ini sejalan dengan berdaulat dan mandiri, sementara Berlandas Nilai Agama dan Budaya sejalan dengan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong.	

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai setiap sasaran. Metode perumusan strategi dilakukan melalui serangkaian *focus group discussion* dalam tim. Perumusan ini memperhatikan beberapa prinsip kelebihan yang perlu dipenuhi oleh rumusan strategi bahwa: 1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang; 2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan; 3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah; 4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi. Berdasarkan berbagai landasan pemikiran tersebut maka rumusan strategi dalam pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2022 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 **Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas**			
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)
		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
Misi 3 **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas**			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
Misi 4 **Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keungan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 **Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat**			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6 **Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya**			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai

sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan operasional pada OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Adapun arah kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan berdasarkan Sasaran Tahun 2022 -2026

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	• Perbaikan sistem belajar-mengajar dan manajemen berbasis sekolah • Pemenuhan sarana-parasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan • Pengembagan sistem ketersediaan barang pokok dan penting	• Penetapan dan penerapan kurikulum muatan lokal • Pemenuhan tenaga kesehatan secara merata dan proporsional • Peningkatan pendapatan masyarakat berdaya beli rendah	• Perbaikan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik secara proporsional • Pengembangan sistem penanganan 1.000 Hari Pertama Kelahiran • Penguatan sistem pengendalian inflasi	• Peningkatan kemampuan literasi masyarakat • Pencegahan dan penanganan stunting secara integratif • Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting	• Pengembangan kota dan desa cerdas • Pemantapan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan preventif • Penguatan daya beli masyarakat atas non bahan pokok
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	• Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa • Penguatan ketahanan ekonomi desa • Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	• Penguatan ketahanan sosial desa • Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli desa • Pengembangan kerjasama desa	• Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa • Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman desa • Penguatan ketahanan ekonomi desa	• Penguatan ketahanan ekologi desa • Pengembangan teknologi tepat guna • Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	• Pemantapan ketahanan ekonomi desa • Pemantapan ketahanan sosial desa • Pemantapan ketahanan ekologi desa
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)	• Pengarusutamaan gender dalam	• Pengendalian penduduk dan	• Peningkatan partisipasi	• Pemberdayaan perempuan dan	• Peningkatan kesejahteraan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
		perencanaan dan penganggaran daerah	peningkatan kualitas keluarga	perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya	perlindungan anak	keluarga
4.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	• Penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital level BPP, posluhdes, poktan/gapoktan • Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat • Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM	• Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan berbasis organik/semi organik dan petani milenial • Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital	• Pemenuhan sarana/prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan • Perluasan dan peningkatan skala industri manufaktur • Pengembangan daya saing pariwisata berbasis kawasan dan destinasi	• Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunanan dan perikanan • Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA • Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya.	• Penguatan sistem usahatani terpadu tanaman-ternak-ikan level kawasan maupun unit usahatani • Pengembangan industri manufaktur berbasis sumberdaya lokal • Penguatan sarana/prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor
5.	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	• Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja	• Perbaikan iklim investasi dan peluang usaha	• Peningkatan produktivitas tenaga kerja	• Perbaikan pelayanan penanaman modal	• Perbaikan hubungan industrial pekerja dan perusahan
6.	Meningkatnya daya guna dan hasil guna	• Pembangunan, peningkatan,	• Pembangunan, peningkatan,	• Pembangunan, peningkatan,	• Pembangunan, peningkatan,	• Penyadaran, edukasi dan penegakan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
	infrastruktur daerah (S6)	rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan serta perlengkapan sarana/prasarananya	rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman dan perumahan	rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air	rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut	aturan kepada pemangku kepentingan untuk kepatuhan terhadap RTRW dan rencana turunanya
6.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan Bencana (S7)	• Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara mutipihak	• Pengendalian pencemaran limbah dan bahan berbahaya serta kerusakan lingkungan hidup	• Penguatan kapasitas untuk adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim	• Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recicle	• Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta keanekaragaman hayati
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	• Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi	• Pemantapan kinerja tata kelola keuangan • Pemantapan sistem pengawasan internal	• Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik	• Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah • Modernisasi sistem pengelolaan arsip	• Harmonisasi produk hukum daerah • Modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan asset
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	• Penajaman akurasi data penerima layanan SPM • Penguatan sistem pelayanan public di Kecamatan	• Pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan berbasis SPM	• Modernisasi pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan	• Penerapan sistem reward dan punishment untuk inovasi pelayanan SPM dan non SPM

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
9.	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S11)	• Pemberdayaan masyarakat untuk ketenteraman, ketertiban dan keamanan secara swakarsa • Penegakan Perda, Perkada dan produk hukum daerah lainnya	• Deteksi dini potensi insiden terkait suku dan ras serta konflik sosial • Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pilar berbangsa lainnya	• Penyadaran dan edukasi demokrasi dan politik dalam masyarakat • Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	• Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara.	• Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial antar kelompok dalam masyarakat
10.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S12)	• Pengelolaan bina mental-spiritual • Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya • Pengembangan Islamic Center	• Penetapan legalitas/sertifikat rumah ibadah semua agama • Pengelolaan cagar budaya secara terpadu • Wisata religius petugas agama	• Penguatan kerukunan antar ummat beragama • Pengembangan kesenian tradisional berbagai etnik • Wisata religius petugas agama	• Pengelolaan cagar budaya secara terpadu • Pembinaan sejarah daerah • Pengembangan sarana/prasarana ibadah	• Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya • Pemantapan bina mental spiritual • Pengembangan kesenian tradisional berbabagi etnik

Berdasarkan prioritisasi kebijakan dalam mencapai masing-masing sasaran sebagaimana ditampilkan pada Bab 6.2, maka tema pembangunan tahunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Gambar 6.1.

GAMBAR. 6.1
MILESTONE RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR 2022-2026
BERDASARKAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN (RKPD)



6.3. Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Luwu Timur

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi-1	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**														
Tujuan-1	**Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)**	**Angka Kemiskinan ('%)**	**6.84**	**6.64**		**6.64**		**6.24**		**6.04**		**5.84**		**5.84**	
Sasaran-1	**Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**73.22**	**73.80**		**73.10**		**74.40**		**74.70**		**75.00**		**75.00**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat ('%)	98.30	100.00	166,918,631,191	100.00	171,314,074,297	100.00	175,214,274,297	100.00	169,986,474,297	100.00	164,441,674,297	100.00	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat ('%)	103.97	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun ('%)	99.10	99.20		99.25		99.30		99.35		99.40		99.40	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ('%)	67.80	68.20		68.40		68.60		68.80		69.00		69.00	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B ('%)	138.84	139.20		139.38		139.56		139.74		139.92		139.92	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun ('%)	97.70	97.80		97.85		97.90		97.95		98.00		98.00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ('%)	113.76	114.30		114.57		114.84		115.11		115.38		115.38	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ('%)	99.39	99.89		100.14		100.39		100.64		100.89		100.89	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ('%)	105.25	105.75		106.00		106.25		106.50		106.75		106.75	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	8.16	8.16	122,448,054,291	8.11	136,743,806,003	7.93	188,585,986,512	7.75	180,120,797,235	7.39	188,326,908,646	7.39	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi balita pendek (Stunting) ('%)	6.19	6.08		5.80		5.60		5.40		5.01		5.01	
		Angka kematian ibu (per 100000 KH)	108.74	107.91		105.01		103.71		92.64		90.28		90.28	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ('%)	80.45	80.86	4,746,000,000	81.66	5,504,550,000	82.41	5,853,100,000	83.13	5,853,100,000	86.86	5,853,100,000	86.86	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ('%)	67.01	68.01	650,375,700	70.01	726,457,380	71.01	799,103,118	73.01	879,013,429	73.01	893,713,140	73.01	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ('%) ('%)	100.00	100.00	70,000,000	100.00	100,000,000	100.00	150,000,000	100.00	200,000,000	100.00	250,000,000	100.00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan ('%)	22.00	24.00	15,768,014,000	24.50	25,878,123,768	25.00	24,553,644,908	25.50	25,654,644,908	25.50	21,857,444,908	25.50	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK ('%)	43.00	60.00	-	61.00	927,000,000	61.50	1,067,000,000	62.00	947,000,000	62.00	972,000,000	62.00	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial ('%)	36.52	43.78	4,000,000,000	43.93	4,000,000,000	44.14	4,000,000,000	44.29	4,000,000,000	44.30	4,000,000,000	44.30	DINAS SOSIAL, PEMBERD

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															AYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ('%)	37.65	37.67	666,546,475	37.75	670,000,000	37.79	800,000,000	37.81	680,000,000	38.16	685,000,000	38.16	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	85.00	85.00	3,561,254,000	85.00	3,615,470,600	90.00	6,391,433,900	90.00	3,674,542,400	95.00	3,702,278,460	89.00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaag (Persn)	75.00	75.00	19,846,500,000	75.00	51,935,600,000	80.00	30,476,874,000	80.00	5,529,579,000	85.00	6,074,781,700	79.00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	90.00	90.00	500,000,000	93.00	1,760,000,000	93.00	1,060,000,000	95.00	1,060,000,000	95.00	610,000,000	93.20	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender ('%)	157.53	100.00	345,255,555	100.00	819,981,746	100.00	817,849,975	100.00	839,849,975	100.00	934,431,746	100.00	DINAS PERPUSTAKAAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															DAN KEARSIPAN
Sasaran-2	**Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)**	**Indek Desa Membangun (IDM) (Status Desa)**	**Berkembang**	**Maju**		**Maju**		**Maju**		**Maju**		**Mandiri**		**Mandiri**	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penataan desa ('%)	60.00	70.00	140,000,000	75.00	141,000,000	80.00	141,500,000	85.00	142,000,000	90.00	142,500,000	80.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa ('%)	60.00	70.00	1,196,151,718	75.00	3,109,100,000	80.00	1,222,700,000	85.00	5,228,150,000	88.00	1,230,270,000	79.60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran ('%)	100.00	100.00	45,000,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000	100.00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	230.00	230.00	222,000,000	50.00	265,000,000	50.00	280,000,000	50.00	285,000,000	50.00	285,000,000	430.00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina ('%)	100.00	100.00	130,000,000	100.00	345,000,000	100.00	345,000,000	100.00	350,000,000	100.00	350,000,000	100.00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM	Persentase Capaian Kinerja													ANGKONA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	64,753,724	100.00	70,887,704	100.00	75,971,586	100.00	81,444,563	100.00	87,337,220	100.00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	21,880,527	100.00	45,464,715	100.00	47,737,949	100.00	50,124,846	100.00	52,631,096	100.00	ANGKONA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	53,053,555	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	BURAU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase)	100.00	100.00	35,991,046	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	BURAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	74,276,980	100.00	93,695,830	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase)	100.00	100.00	39,903,323	100.00	44,182,282	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100.00	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	MALILI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	MALILI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa	100.00	100.00	62,825,7	100.00	80,114,0	100.00	85,804,3	100.00	91,928,4	100.00	98,520,1	100.00	MANGKUTANA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	dan Kelurahan ('%)			86		21		80		04		41		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	25,391,980	100.00	27,711,579	100.00	29,097,158	100.00	30,552,016	100.00	32,079,616	100.00	MANGKUTANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	219,965,853	100.00	435,441,442	100.00	435,441,442	100.00	435,441,442	100.00	445,441,442	100.00	NUHA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	31,108,002	100.00	8,791,211	100.00	8,991,211	100.00	9,041,211	100.00	9,041,211	100.00	NUHA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	396,399,117	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	TOMONI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	49,652,579	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	TOMONI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah ('%)	100.00	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	15,141,000	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	102,324,915	100.00	103,449,915	100.00	106,273,915	100.00	108,723,915	100.00	107,493,915	100.00	TOWUTI

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KELURAHAN														
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	64,041,594	100.00	20,896,750	100.00	21,596,750	100.00	21,101,750	100.00	22,101,750	100.00	TOWUTI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	50,457,505	100.00	95,176,133	100.00	96,176,133	100.00	96,176,133	100.00	96,176,133	100.00	WASUPONDA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	22,658,553	100.00	15,500,000	100.00	15,500,000	100.00	18,000,000	100.00	18,000,000	100.00	WASUPONDA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100.00	100.00	60,379,384	100.00	84,710,099	100.00	102,449,915	100.00	104,449,415	100.00	104,449,415	100.00	WOTU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100.00	100.00	32,862,818	100.00	78,109,692	100.00	81,047,782	100.00	81,994,532	100.00	75,895,500	100.00	WOTU
Sasaran-3	**Meningkatnya pemberdayaan gender (S3)**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)**	**89.71**	**89.94**		**90.00**		**90.05**		**91.18**		**92.15**		**92.15**	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (persentase)	- .00	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani ('%)	39.26	43.28	1,383,35	43.43	1,235,00	43.65	1,250,00	43.79	1,260,00	43.81	1,265,00	43.81	DINAS SOSIAL,

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					9,678		0,000		0,000		0,000		0,000		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ('%)	76.02	75.25	267,597,207	74.69	647,000,000	74.65	568,000,000	74.58	608,000,000	74.47	645,000,000	74.47	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta ('%)	23.98	24.75		25.31		25.35		25.42		25.53		25.53	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu ('%)	70.00	72.73	483,226,219	81.82	570,000,000	81.82	525,000,000	81.82	635,000,000	90.91	550,000,000	90.91	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ('%)	100.00	100.00	30,046,909	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi ('%)	80.00	100.00	158,156,666	100.00	350,000,000	100.00	235,000,000	100.00	240,000,000	100.00	240,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPU

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															AN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO ('%)	80.00	- .00	-	100.00	-	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga ('%)	0.07	0.09	58,357,249	0.10	160,000,000	0.11	165,000,000	0.13	165,000,000	0.14	170,000,000	0.14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai)	4.00	4.00	416,000,000	4.00	418,500,000	4.00	889,700,000	4.00	400,500,000	4.00	408,000,000	4.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	35.41	28.16	5,372,487,343	26.76	5,369,466,441	25.60	5,389,454,800	24.63	5,437,660,000	24.63	5,443,710,000	24.63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	55.57	58.00		58.90		59.70		60.50		60.50		60.50	
		Persentase Kebutuhan ber-KB													

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		yang tidak terpenuhi (unmet need) (persen)	15.61	12.88		12.40		12.01		11.67		11.67		11.67	NA
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	33.30	37.89		39.14		40.81		41.22		41.22		41.22	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama (Nilai)	20.00	20.00	1,025,019,195	21.00	965,019,015	21.00	1,003,986,981	21.00	1,025,986,981	21.00	1,045,989,760	21.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Misi-2	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**														
Tujuan-2	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)**	**Rasio Gini (Persen)**	**0.41**	**0.39**		**0.38**		**0.25**		**0.23**		**0.22**		**0.22**	
		Pertumbuhan Ekonomi ('%)	**2,49-3,33**	**2,49-3,33**		**2,72-3,63**		**2,98-3,71**		**3,22-3,50**		**3,46-3,63**		**2,98-3,71**	
Sasaran-4	**Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**-0.25**	**1.83**		**1.98**		**2.08**		**2.17**		**2.23**		**2.06**	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok ((Ton))	25,272,882.00	24,542,600.00	207,950,000	20,577,400.00	427,320,000	20,664,000.00	427,320,000	20,750,600.00	427,320,000	20,808,300.00	527,320,000	21,468,580.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Survey Analisa Ketersediaan Pangan Utama, PPH, NBM (Jenis)	500.00	600.00	255,778,043	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan (Kelurahan)	- .00	- .00	13,660,000	3.00	200,000,000	3.00	150,000,000	3.00	210,000,000	- .00	150,000,000	1.80	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM	Jumlah Peserta Pembinaan dan													DINAS

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu (Orang/Peserta)	- .00	100.00	31,360,093	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	PERTANIAN
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas ('%)	29.12	30.82	96,007,500	32.63	100,370,000	34.44	110,370,000	36.13	115,370,000	36.13	120,000,000	36.13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat ('%)	30.02	31.25	66,854,936	32.80	81,864,800	34.34	85,958,040	35.75	88,536,781	35.75	91,192,884	35.75	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi ('%)	0.41	3.15	25,563,680	4.90	30,563,680	5.64	35,279,800	6.75	39,279,800	6.75	41,243,790	6.75	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)	35.00	40.00	178,103,694	45.00	232,215,324	50.00	251,215,324	55.00	278,503,824	60.00	284,402,749	60.00	DINAS PERINDUSTRIAN,

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)	3.36	2.27	114,461,660	3.89	114,461,660	5.19	125,461,660	6.36	130,462,660	8.16	132,462,660	8.16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	10,012.00	10,165.00	2,184,225,525	10,216.00	2,184,225,525	10,267.00	2,184,225,525	10,318.00	2,184,225,525	10,369.00	2,184,225,525	10,267.00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	315,343.00	315,565.00	4,947,000,000	315,710.00	4,500,000,000	315,855.00	4,210,000,000	316,115.00	4,220,000,000	316,365.00	4,420,000,000	315,922.00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	90.00	92.00	50,000,000	94.00	50,000,000	96.00	50,000,000	98.00	50,000,000	100.00	50,000,000	96.00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)	311.50	322.00	1,248,788,050	335.00	1,280,780,000	345.00	1,315,880,000	355.00	1,346,080,000	370.00	1,385,250,000	345.40	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	10.00	10.00	3,960,000,000	12.00	4,035,000,000	14.00	4,153,500,000	16.00	4,272,400,000	20.00	4,441,700,000	14.40	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur (Persen)	90.00	90.00	1,040,000,000	92.00	1,288,000,000	92.00	1,215,700,000	93.00	1,215,500,000	96.00	1,127,000,000	92.60	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	43.00	50.00	213,500,000	50.00	393,500,000	55.00	602,500,000	55.00	609,600,000	60.00	616,850,000	54.00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas kakao (Ton/ Ha)	0.74	0.78	7,376,404,138	0.82	9,470,900,894	0.86	8,863,695,938	0.90	9,223,330,736	0.95	9,550,641,273	0.86	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Populasi ternak Besar (ekor)	21,109.00	23,109.00		24,109.00		25,109.00		26,109.00		27,109.00		25,109.00	
		Jumlah Populasi Unggas (ekor)	849,529.00	899,529.00		949,529.00		999,529.00		1,049,529.00		1,099,529.00		999,529.00	
		Jumlah Produktivitas kelapa sawit (Ton/ Ha)	12.46	12.01		11.95		9.60		9.62		9.80		10.60	
		Jumlah Produktivitas Jagung (Ton/ Ha)	6.11	6.31		6.51		6.71		6.81		6.91		6.65	
		Jumlah Produktivitas padi (Ton/ Ha)	7.10	7.12		7.13		7.16		7.19		7.21		7.16	
		Jumlah Produktivitas lada (Ton/ Ha)	0.93	0.96		0.97		99.00		1.02		1.03		20.60	
		Jumlah Populasi ternak Kecil (ekor)	24,462.00	26,462.00		28,462.00		30,462.00		32,462.00		34,462.00		30,462.00	
		Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PENYEDIAAN	Indeks Pertanaman padi													DINAS

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertahun (kali)	1.80	1.82	7,977,895,226	1.84	12,401,377,488	1.86	12,819,573,861	1.88	13,258,680,055	1.90	13,719,741,558	1.86	PERTANIAN
		presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular ('%)	1.01	1.50	420,800,000	1.40	894,299,600	1.30	794,299,600	1.20	894,299,600	1.00	794,299,600	1.28	DINAS PERTANIAN
		presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perizinan usaha pertanian (Persen)	- .00	100.00	-	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Penyuluhan Pertanian (Persen)	100.00	100.00	2,766,304,037	100.00	3,745,441,100	100.00	4,024,504,333	100.00	4,385,939,463	100.00	4,861,817,647	100.00	DINAS PERTANIAN
		Cakupan Bina Kelompok Tani ('%)	58.15	58.26		58.57		58.67		58.75		58.80		58.61	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor ('%)	1.10	1.15	271,421,303	1.20	340,421,000	1.25	355,421,000	1.27	366,421,000	1.30	396,616,000	1.30	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)	9.00	8.50	341,873,635	8.00	362,833,635	7.80	412,873,635	7.50	441,873,635	7.50	462,873,635	7.50	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP ('%)	5.00	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan (Dokumen)	- .00	- .00	166,326,096	- .00	1,338,583,360	1.00	838,538,360	- .00	338,538,360	- .00	338,538,360	1.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran-5	**Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)**	**4.46**	**330.00**		**305.00**		**280.00**		**255.00**		**230.00**		**230.00**	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	157,500.00	158,500.00	-	158,900.00	-	159,000.00	-	159,100.00	850,000,000	159,200.00	-	159,200.00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ('%)	75.75	75.60	1,232,000,000	75.70	1,382,000,000	75.75	1,382,000,000	76.55	1,382,000,000	76.55	1,420,000,000	76.55	DINAS TRANSMIGRASI,

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TENAGA KERJA														DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan ('%)	45.87	41.98	294,356,902	42.57	544,000,000	43.07	956,000,000	43.98	756,000,000	43.98	556,000,000	43.98	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun ('%)	22.82	22.82	736,365,325	22.82	799,359,750	22.82	805,229,750	22.82	807,229,750	22.82	807,229,750	22.82	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)	9.92	10.71	93,445,354	12.18	93,445,354	14.12	93,445,354	15.61	93,445,354	15.61	93,445,354	15.61	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	30.00	35.00	480,796,460	40.00	63,260,057	45.00	245,157,859	50.00	67,112,594	55.00	69,125,972	55.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal ('%)	10.00	15.00	198,814,480	20.00	401,700,000	25.00	413,751,000	30.00	426,163,530	35.00	438,948,436	35.00	DINAS PENANAMAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ('%)	70.00	75.00	367,365,851	80.00	370,800,000	85.00	381,924,000	90.00	393,381,720	95.00	405,183,171	95.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur (Persen)	80.00	85.00	150,000,000	85.00	150,000,000	90.00	150,000,000	90.00	150,000,000	95.00	150,000,000	89.00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi ('%)	10.00	10.00	1,854,453,800	10.00	2,059,463,175	10.00	2,361,463,175	10.00	2,569,463,175	10.00	3,069,463,175	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Misi-3	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**														
Tujuan-3	**Meningkatkan kapasitas dan kualitas**	**Indeks daya saing infrastruktur daerah (Nilai)**	**1,8150**	**1,8150**		**2,0666**		**2,2638**		**2,3230**		**2,4101**		**2,4101**	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)														
Sasaran-6	**Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)**	**74.42**	**74.89**		**74.93**		**75.15**		**75.32**		**75.59**		**75.59**	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air ('%)	44.69	45.98	37,755,894,817	47.28	28,501,008,163	48.57	28,501,008,163	49.86	26,411,808,089	49.86	26,411,808,089	49.86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio jaringan irigasi (Angka)	7.98	8.41		8.84		9.28		9.71		9.71		9.71	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ('%)	58.71	59.46	8,517,102,930	60.18	11,800,000,000	60.89	18,300,000,000	61.57	12,300,000,000	63.13	12,300,000,000	63.13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun ('%)	- .00	18.75	2,083,700,000	54.16	23,105,000,000	70.33	2,255,000,000	85.41	2,255,000,000	100.00	2,255,000,000	100.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman ('%)	- .00	0.35	12,353,440,000	0.86	12,715,000,000	1.22	18,000,000,000	1.49	12,715,000,000	1.70	12,715,000,000	1.70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik ('%)	84.02	84.21	5,704,938,900	85.30	2,216,961,950	86.24	2,216,961,950	87.07	2,216,961,950	87.07	2,216,961,950	87.07	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM	Persentase Panjang Jalan Jalan													DINAS

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) ('%)	- .00	22.21	1,787,000,000	24.78	1,840,000,000	27.34	1,890,000,000	29.91	1,940,000,000	32.47	1,940,000,000	27.34	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang di bangun ('%)	- .00	50.00	35,673,416,700	100.00	41,110,734,370	- .00	5,910,734,370	- .00	2,910,734,370	- .00	2,910,734,370	- .00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten ('%)	90.75	91.14		91.57		91.92		92.15		92.15		92.15	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik ('%)	41.14	42.04	65,735,249,080	42.94	98,912,749,408	43.71	69,905,204,273	44.74	79,905,204,273	45.77	79,905,204,273	45.77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi ('%)	31.37	41.89	453,441,564	52.42	490,279,978	62.94	490,279,978	73.47	490,279,978	84.00	490,279,978	84.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tampa kecelakaan kerja ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang ('%)	75.00	78.00	1,570,139,323	80.00	2,060,350,723	82.00	2,060,350,723	85.00	2,060,350,723	87.00	2,060,350,723	82.40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas RTH publik yang ditata ('%)	0.26	0.26	111,000,000	0.26	900,000,000	0.26	1,350,000,000	0.27	550,000,000	0.27	550,000,000	0.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang ('%)	100.00	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	DINAS PERUMAHAN,

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani ('%)	- .00	24.94	3,829,080,000	18.94	3,829,080,000	18.94	3,829,080,000	16.71	3,829,080,000	20.47	3,829,080,000	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio rumah layak huni ()	17.74	18.04		18.34		18.64		18.94		19.24		19.24	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani ('%)	- .00	2.81	55,080,000	2.89	55,080,000	2.98	55,080,000	3.07	55,080,000	3.16	55,080,000	3.16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU ('%)	- .00	21.05	24,000,000,000	21.05	24,000,000,000	19.30	22,000,000,000	19.30	22,000,000,000	19.30	22,000,000,000	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda ('%)	100.00	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															MAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara ('%)	96.67	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan ('%)	100.00	100.00	28,293,795,000	100.00	17,269,795,000	100.00	8,789,795,000	100.00	4,549,795,000	100.00	4,549,795,000	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi ('%)	46.67	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat ('%)	39.65	39.85	498,732,250	40.15	498,732,250	40.35	498,732,250	40.55	498,732,250	40.85	498,732,250	40.85	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan ('%)	94.05	94.24	9,362,585,774	94.41	16,034,734,828	94.57	10,080,045,828	94.73	4,243,316,828	94.88	3,900,977,828	94.88	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan ('%)	2.06	52.46		67.37		79.90		92.31		100.00		100.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut ('%)	16.85	27.17	829,121,216	31.98	384,157,509	36.57	425,237,599	40.86	442,025,043	45.18	454,135,534	45.18	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau ('%)	- .00	25.00		43.75		68.75		87.50		100.00		100.00	
Sasaran-7	**Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)**	**Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)**	**202 (Tinggi)**	**202 (Tinggi)**		**202 (Tinggi)**		**202 (Tinggi)**		**202 (Tinggi)**		**202 (Tinggi)**		**202 (Tinggi)**	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) (Point)	86.87	87.55		88.10		88.35		88.70		88.70		88.70	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender ('%)	100.00	100.00	1,650,244,092	100.00	2,976,000,000	100.00	2,258,550,000	100.00	2,339,000,000	100.00	2,389,000,000	100.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ('%)	18.05	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ('%)	14.41	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat ('%)	100.00	100.00	295,000,000	100.00	385,000,000	100.00	395,000,000	100.00	405,000,000	100.00	415,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															UNGAN ANAK
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	- .00	100.00	115,000,000	100.00	120,750,000	100.00	126,787,500	100.00	133,126,875	100.00	139,783,219	100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1.00	1.00	484,209,407	1.00	520,536,180	1.00	560,494,208	1.00	604,542,877	1.00	653,197,479	1.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100.00	100.00	200,000,000	100.00	225,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)	100.00	100.00	130,000,000	100.00	136,000,000	100.00	142,300,000	100.00	148,915,000	100.00	155,860,750	100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50.00	50.00	95,000,000	50.00	110,000,000	50.00	120,000,000	50.00	140,000,000	50.00	150,000,000	50.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	- .00	- .00	-	- .00	-	100.00	30,000,000	100.00	35,000,000	100.00	40,000,000	60.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM	Persentase penghargaan													DINAS

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	lingkungan yang diterima (Persen)	- .00	100.00	53,145,761	100.00	55,803,049	100.00	58,593,201	100.00	61,522,861	100.00	64,599,004	100.00	LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50.00	50.00	15,000,000	50.00	20,000,000	50.00	20,000,000	50.00	25,000,000	50.00	25,000,000	50.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	70.00	70.00	4,500,000,000	72.00	4,600,000,000	74.00	4,701,600,000	76.00	4,804,832,000	78.00	4,959,728,640	74.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian ('%)	100.00	100.00	366,952,625	100.00	400,000,000	100.00	420,000,000	100.00	441,000,000	100.00	463,050,000	100.00	DINAS PERTANIAN
Misi-4	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**														
Tujuan-4	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)**	**Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Predikat)**	**CC**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**	
Sasaran-8	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)**	**Nilai SAKIP Daerah (Predikat)**	**B**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**	
		Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) (Predikat)	C (Sangat Perlu Perbaikan)	A (Baik)		A (Baik)		A (Baik)		A (Baik)		A (Baik)		A (Baik)	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen ('%))	100.00	100.00	2,457,243,254	100.00	3,195,000,000	100.00	3,605,000,000	100.00	3,965,000,000	100.00	4,330,000,000	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen ('%))	100.00	100.00	28,730,000	100.00	80,000,000	100.00	100,000,000	100.00	120,000,000	100.00	150,000,000	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ('%)	87.18	100.00	221,275,479	100.00	342,545,000	100.00	355,545,000	100.00	409,685,000	100.00	418,685,000	100.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD ('%)	100.00	100.00	2,163,259,372	100.00	1,589,800,200	100.00	1,629,244,205	100.00	1,669,675,386	100.00	1,711,116,320	100.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender ('%)	100.00	100.00	1,822,013,230	100.00	1,858,067,494	100.00	1,961,196,000	100.00	1,935,031,000	100.00	2,004,574,966	100.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96.00	96.50	325,416,592,464	96.70	356,646,150,000	97.00	356,829,200,000	97.10	357,000,600,000	97.30	357,136,100,000	97.30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik ('%)	90.00	90.00	696,316,206	91.00	773,400,000	93.00	808,700,000	95.00	824,000,000	95.00	847,900,000	95.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (Persen)	90.00	90.50	2,858,087,990	91.00	2,885,400,000	91.50	2,912,700,000	92.00	2,940,200,000	92.50	2,969,200,000	92.50	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT ('%)	95.00	95.00	2,190,307,365	95.00	2,541,261,252	95.00	2,795,695,157	95.00	3,081,934,008	95.00	3,081,934,008	95.00	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	14,682,162	100.00	34,805,848	100.00	35,850,024	100.00	36,925,525	100.00	38,033,290	100.00	ANGKONA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	24,841,348	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	BURAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	98.00	100.00	14,483,719	100.00	15,858,719	100.00	10,000,000	100.00	15,000,000	100.00	20,000,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	99.00	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	MALILI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	31,406,625	100.00	32,348,824	100.00	33,319,288	100.00	34,318,867	100.00	35,348,433	100.00	MANGKUTANA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	31,423,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	NUHA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	18,169,008	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	TOMONI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	28,500,000	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	23,073,937	100.00	36,000,000	100.00	36,000,000	100.00	37,000,000	100.00	37,000,000	100.00	WASUPONDA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAHAN UMUM														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	24,048,689	100.00	45,838,949	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	WOTU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100.00	100.00	37,856,634	100.00	37,956,634	100.00	38,156,634	100.00	38,556,634	100.00	38,856,634	100.00	TOWUTI
Sasaran-9	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**80.76**	**82.42**		**84.75**		**85.68**		**87.78**		**90.00**		**90.00**	
		IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Nilai) (Nilai)	78.73	82.21		84.31		86.23		88.10		88.32		85.83	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	98.00	100.00	30,781,957,812	100.00	29,951,539,626	100.00	31,544,790,980	100.00	31,927,878,645	100.00	31,815,328,645	100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	94.00	96.00	4,119,560,432	97.00	4,681,542,300	98.00	4,960,174,000	99.00	4,985,832,000	100.00	5,092,868,000	100.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	90.00	95.00	3,064,952,615	95.00	4,173,598,408	97.00	4,245,970,975	98.00	3,853,877,500	100.00	3,821,127,500	97.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95.00	95.00	45,569,677,267	95.30	44,780,400,000	95.50	50,402,300,000	96.20	52,845,700,000	96.50	55,706,500,000	95.70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG	Persentase penunjang urusan													BADAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	- .00	100.00	5,460,850,323	100.00	5,464,069,821	100.00	6,169,886,448	100.00	6,069,528,125	100.00	6,177,219,862	100.00	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	90.00	92.00	4,864,327,876	94.00	5,609,127,876	96.00	5,273,927,876	98.00	5,523,727,876	100.00	5,683,527,876	96.00	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	4,646,746,765	100.00	5,568,227,857	100.00	5,505,919,009	100.00	5,632,107,832	100.00	5,794,764,165	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	90.01	92.50	93,331,259,982	94.01	99,784,162,281	96.01	104,358,016,180	100.00	109,858,714,298	100.00	114,683,473,323	100.00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95.00	100.00	3,826,221,250	100.00	5,205,000,000	100.00	4,755,500,000	100.00	4,958,500,000	100.00	5,434,500,000	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	4,293,084,448	100.00	4,525,659,835	100.00	4,895,418,823	100.00	5,343,883,908	100.00	5,897,187,553	100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	5,431,515,400	100.00	6,231,476,100	100.00	5,809,817,300	100.00	6,508,776,475	100.00	6,150,175,453	100.00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															A
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	100.00	100.00	13,105,431,379	100.00	15,138,090,502	100.00	11,798,436,612	100.00	11,502,744,392	100.00	11,502,744,392	100.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,916,606,035	100.00	4,066,470,182	100.00	4,196,000,233	100.00	4,200,580,113	100.00	4,387,526,577	100.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,460,143,383		4,608,071,063		4,000,263,194		4,130,396,092		4,219,572,972		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	126,032,361,909	100.00	128,468,841,609	100.00	130,532,091,609	100.00	132,468,841,609	100.00	135,468,841,609	100.00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,982,846,384	100.00	3,801,464,884	100.00	4,057,316,851	100.00	4,227,473,418	100.00	4,439,038,739	100.00	WOTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,168,475,111	100.00	3,826,506,706	100.00	3,409,109,026	100.00	3,636,219,026	100.00	3,734,229,026	100.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															A BERENCANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95.00	95.00	3,705,056,293	95.00	4,116,573,832	97.00	4,264,654,896	98.00	4,420,236,632	100.00	4,431,812,896	97.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,423,031,405	100.00	2,776,862,641	100.00	2,991,862,641	100.00	3,181,862,641	100.00	3,211,862,641	100.00	WASUPONDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	4,125,473,411	100.00	4,021,849,282	100.00	4,405,391,549	100.00	4,873,640,930	100.00	4,467,265,279	100.00	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,842,496,649	100.00	3,983,775,492	100.00	3,885,575,142	100.00	3,892,530,192	100.00	3,886,830,192	100.00	TOWUTI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,460,416,794	100.00	5,403,186,549	100.00	4,331,286,549	100.00	4,344,366,549	100.00	4,399,886,549	100.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,505,367,140	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	TOMONI TIMUR

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KABUPATEN/KOTA														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	24,419,005,975	100.00	27,360,817,611	100.00	28,118,901,522	100.00	29,425,439,628	100.00	30,549,254,640	100.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,890,619,961	100.00	5,636,142,436	100.00	5,576,142,436	100.00	5,606,142,436	100.00	5,606,142,436	100.00	TOMONI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	7,494,083,716	100.00	7,076,140,228	100.00	8,124,730,632	100.00	7,441,182,296	100.00	7,721,864,752	100.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	- .00	100.00	3,785,128,284	100.00	3,934,450,570	100.00	3,893,400,570	100.00	3,887,900,570	100.00	4,067,750,570	100.00	NUHA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	5,822,597,750	100.00	6,844,284,363	100.00	7,289,965,038	100.00	7,603,724,292	100.00	8,501,613,266	100.00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,980,589,493	100.00	3,145,208,915	100.00	3,312,098,020	100.00	3,482,293,604	100.00	3,661,416,722	100.00	MANGKUTANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,660,682,848	100.00	3,360,682,848	100.00	3,360,682,848	100.00	3,360,682,848	100.00	3,360,682,848	100.00	MALILI

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95.00	100.00	3,398,733,729	100.00	5,227,300,000	100.00	5,636,275,000	100.00	4,881,275,000	100.00	4,914,500,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,453,189,649	100.00	3,548,375,913	100.00	3,698,650,000	100.00	3,714,250,000	100.00	3,737,450,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	4,456,035,000	100.00	5,608,000,000	100.00	5,533,500,000	100.00	4,959,000,000	100.00	5,151,500,000	100.00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,184,842,002	100.00	3,710,103,167	100.00	3,764,903,167	100.00	3,714,903,167	100.00	3,764,903,167	100.00	BURAU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	2,850,028,379	100.00	3,104,921,557	100.00	3,422,233,207	100.00	3,641,093,795	100.00	3,926,475,595	100.00	ANGKONA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	22,874,844,430	100.00	25,809,397,723	100.00	30,236,113,609	100.00	29,886,785,398	100.00	29,848,704,497	100.00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENUNJANG	Persentase penunjang urusan													INSPEKTO

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	8,515,953,849	100.00	8,342,448,478	100.00	8,425,561,970	100.00	8,581,480,172	100.00	8,581,480,172	100.00	RAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ('%)	90.00	95.00	2,758,693,241	95.00	3,549,538,822	97.00	3,019,935,543	97.00	3,339,065,932	97.00	3,256,163,330	97.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	116,470,822,342	100.00	128,201,272,556	100.00	133,425,160,022	100.00	138,655,531,604	100.00	141,968,866,278	100.00	RSUD I LAGALIGO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100.00	100.00	3,157,476,425	100.00	3,345,574,000	100.00	3,724,914,690	100.00	4,367,294,802	100.00	5,016,822,009	100.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	- .00	95.00	9,409,715,126	95.50	9,550,600,000	96.00	9,579,600,000	96.50	9,810,000,000	97.00	9,942,500,000	96.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) ('%)	100.00	100.00	65,910,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ('%)	99.71	99.76	435,651,995	99.83	468,653,500	99.85	490,086,175	99.87	493,890,485	99.90	500,049,795	99.90	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran ('%)	95.54	96.05	367,429,324	96.55	428,637,500	97.05	434,819,375	97.42	441,310,343	98.02	448,125,860	98.02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ('%)	65.00	65.00	75,419,175	75.00	90,000,000	80.00	200,000,000	85.00	110,000,000	95.00	120,000,000	95.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang resposif gender ('%)	100.00	100.00	358,607,001	100.00	360,000,000	100.00	365,000,000	100.00	370,000,000	100.00	375,000,000	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase data kependudukan yang disediakan (persentase)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen ('%))	100.00	100.00	2,123,884,366	100.00	2,510,000,000	100.00	2,710,000,000	100.00	2,880,000,000	100.00	2,980,000,000	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender (persen ('%))	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam ('%)	1.44	6.00	20,000,000	9.85	30,923,680	12.65	35,923,680	14.72	37,923,680	14.72	38,923,680	14.72	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal ('%)	100.00	100.00	320,191,107	100.00	365,650,000	100.00	376,619,500	100.00	387,918,085	100.00	399,555,627	100.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	1.00	1.00	29,999,850	1.00	36,713,966	1.00	37,815,385	1.00	38,949,846	1.00	40,118,342	1.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen ('%))	100.00	90.00	54,384,474	100.00	650,000,000	100.00	700,000,000	100.00	800,000,000	100.00	950,000,000	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan ('%)	- .00	100.00	40,522,006	100.00	41,787,006	100.00	41,000,000	100.00	41,000,000	100.00	46,000,000	100.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup ('%)	- .00	25.00	22,000,000	25.00	25,000,000	25.00	25,000,000	25.00	28,000,000	25.00	28,000,000	25.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang	90.00	- .00	-	90.90	40,000,0	91.66	45,000,0	92.30	50,000,0	92.30	50,000,0	92.30	DINAS PERINDUS

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	terkendali ('%)					00		00		00		00		TRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar ('%)	4.00	5.00	51,018,510	7.00	101,018,510	10.00	101,018,510	15.00	101,018,510	37.00	101,018,510	37.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi ('%)	80.00	100.00	28,926,678,322	100.00	32,015,454,560	100.00	32,436,952,765	100.00	34,430,752,481	100.00	34,512,201,143	100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian ('%)	80.00	100.00	1,697,201,319	100.00	1,924,034,110	100.00	1,733,812,473	100.00	1,876,560,583	100.00	2,007,267,892	100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi Yang DI Fasilitasi (%) ('%)	90.00	90.00	10,219,725,470	90.00	13,058,783,606	90.00	13,612,450,892	90.00	13,790,852,204	90.00	13,298,303,339	90.00	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat (%) (Persentase)	95.00	96.00	4,894,347,703	97.00	5,404,244,000	98.00	3,455,000,000	99.00	3,350,000,000	100.00	3,975,000,000	100.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM	Persentase ASN yang telah													BADAN

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun (Persen)	7.41	10.00	1,690,825,915	10.00	2,460,700,000	10.00	2,643,480,000	10.00	2,834,617,000	10.00	2,199,097,000	50.00	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah ('%)	10.26	15.38	791,884,646	20.51	615,000,000	20.51	650,000,000	25.64	820,000,000	25.64	655,000,000	25.64	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase implementasi rencana kelitbangan ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina ('%)	95.00	95.00	679,416,992	95.00	747,358,691	95.00	822,094,560	95.00	904,304,016	95.00	904,304,016	95.00	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	92.73	100.00	12,275,585	100.00	53,500,000	100.00	56,000,000	100.00	59,700,000	100.00	62,000,000	100.00	ANGKONA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	8,168,856	100.00	25,529,631	100.00	27,000,000	100.00	27,000,000	100.00	27,000,000	100.00	BURAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	98.00	100.00	14,532,410	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik ('%)	99.10	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	MALILI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100.00	100.00	4,098,916	100.00	5,000,000	100.00	6,000,000	100.00	7,000,000	100.00	8,000,000	100.00	MANGKUTANA

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PELAYANAN PUBLIK	publik ('%)													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	2,675,750	100.00	63,701,870	100.00	63,702,220	100.00	64,702,120	100.00	65,702,120	100.00	NUHA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	2,749,885	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	TOMONI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	TOMONI TIMUR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100.00	100.00	7,500,000	100.00	50,000,000	100.00	61,000,000	100.00	62,000,000	100.00	54,000,000	100.00	WASUPONDA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	9,985,000	100.00	70,243,012	100.00	75,282,258	100.00	78,500,258	100.00	82,282,258	100.00	WOTU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100.00	100.00	16,223,032	100.00	16,582,258	100.00	16,982,258	100.00	17,282,258	100.00	17,772,258	100.00	TOWUTI
Misi-5	**Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat(M5)**														
Tujuan-5	**Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)**	**Angka kriminalitas (Persen)**	**0,000738**	**0,000643**		**0,00056**		**0,000473**		**0,000451**		**0,000429**		**0,000429**	
Sasaran-10	**Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)**	**Indeks Ketertiban dan Ketentraman (Nilai)**	**76.53**	**76.72**		**76.81**		**77.21**		**77.43**		**77.86**		**77.86**	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persen)	100.00	100.00	6,740,636,796	100.00	9,284,025,050	100.00	9,944,081,650	100.00	10,091,362,980	100.00	10,352,242,800	100.00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	PRAJA
		Persentase Penegakan Perda (Persen)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	- .00	- .00	17,037,850	100.00	61,250,000	100.00	64,275,000	100.00	67,452,000	100.00	70,788,765	100.00	ANGKONA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100.00	100.00	12,249,043	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	BURAU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	98.00	100.00	15,349,619	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	KALAENA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	99.00	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	MALILI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	- .00	100.00	12,000,000	100.00	8,000,000	100.00	8,490,000	100.00	9,004,700	100.00	8,545,379	100.00	MANGKUTANA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100.00	100.00	7,841,945	100.00	32,336,000	100.00	38,622,000	100.00	38,622,000	100.00	40,367,000	100.00	NUHA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100.00	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	TOMONI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100.00	100.00	23,220,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	TOMONI TIMUR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	- .00	100.00	16,500,000	100.00	17,000,000	100.00	20,000,000	100.00	19,000,000	100.00	19,000,000	100.00	WASUPONDA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100.00	100.00	12,250,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	WOTU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman	- .00	100.00	42,116,7	100.00	42,675,2	100.00	42,789,2	100.00	44,212,0	100.00	44,530,0	100.00	TOWUTI

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KETERTIBAN UMUM	dan ketertiban umum ('%)			41		00		50		00		00		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan ('%)	95.00	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik ('%)	95.00	95.00	853,007,315	95.00	1,075,000,000	95.00	1,210,000,000	95.00	945,000,000	95.00	980,000,000	95.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi ('%)	100.00	100.00	40,150,000	100.00	60,000,000	100.00	70,000,000	100.00	80,000,000	100.00	90,000,000	100.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial ('%)	95.00	95.00	440,000,000	95.00	465,000,000	95.00	500,000,000	95.00	535,000,000	95.00	570,000,000	95.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Misi-6	**Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya(M6)**														
Tujuan-6	**Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)**	**Indeks kerukunan umat beragama (Persen)**	**75.67**	**75.89**		**75.92**		**76.00**		**76.34**		**76.85**		**76.85**	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	49.82	54.27		54.77		55.27		55.77		56.27		55.27	
Sasaran-11	**Meningkatnya penerapan nilai-nilai**	**Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat ('%)**	**95.00**	**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
			2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)														
		Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat ('%)	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3.00	3.00	113,221,280	3.00	118,882,343	3.00	124,826,460	3.00	131,067,783	3.00	137,621,173	3.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna ('%)	55.00	60.00	1,224,827,427	65.00	1,294,961,393	75.00	1,318,875,848	80.00	1,298,895,848	85.00	1,338,910,848	73.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan daerah ('%)	80.00	80.00	169,994,800	85.00	750,000,000	85.00	750,000,000	90.00	950,000,000	95.00	950,000,000	95.00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan Kesenian tradisional ('%)	80.00	100.00	29,999,600	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina ('%)	80.00	100.00	92,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	90.00	100.00	108,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	750,000,000	100.00	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ('%)	95.00	95.00	150,000,000	95.00	160,000,000	95.00	170,000,000	95.00	180,000,000	95.00	190,000,000	95.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: //bappeddaluwutimur.eplanning7.com 2021

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi Pedapatan dan belanja daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026. Untuk mengetahui kapasitas kemampuan riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah, serta kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, hal lain yang sangat mempengaruhi adalah mempertimbangkann kondisi ekonomi dua tahun terakhir yang sedikit terganggu dikarenakan adanya pandemic Covid-19, dan di perkirakan masih akan berlangsung dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan kemudian dilakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan sebagaimana disajikan pada tabel 7.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2021-2026 yang akan datang diharapkan meningkat secara konsisten, dari Rp 718 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 783 milyar pada tahun 2026. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan Asli Daerah, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target

pendapatan dan dari kebijakan optimalisasi Pendapatan daerah, Optimalisasi Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah serta inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026
Kabupaten Luwu Timur

NO	KAPASITAS RIIL BELANJA DAERAH	TARGET CAPAIAN 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,037,389,631,024**	**913,102,272,410**	**919,657,449,783**	**952,702,726,246**	**988,237,574,674**	**1,001,348,944,301**
5.1.01	Belanja Pegawai	478,867,337,150	498,327,071,237	498,389,340,244	501,502,352,775	502,542,654,967	503,273,967,523
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478,380,377,881	355,951,756,173	359,842,655,775	383,774,919,707	420,994,919,707	430,874,976,778
5.1.03	Belanja Subsidi	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
5.1.04	Belanja Hibah	61,728,475,723	40,000,000,000	40,500,000,000	43,500,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	18,213,440,270	18,623,445,000	20,725,453,764	23,725,453,764	24,500,000,000	25,000,000,000
5.2	**BELANJA MODAL**	**281,731,182,526**	**334,009,932,877**	**360,084,258,361**	**410,741,846,997**	**403,145,388,565**	**380,786,569,700**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800,000,000	8,850,000,000	8,000,000,000	10,000,000,000	7,500,000,000	6,000,000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	53,034,947,098	45,423,411,503	47,723,445,203	59,893,676,335	60,893,676,335	58,788,345,467
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,677,488,558	79,524,256,207	81,775,467,504	101,885,435,207	98,788,976,775	80,035,488,778
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132,018,746,870	200,032,265,167	222,400,345,654	238,775,735,455	235,775,735,455	235,775,735,455
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	200,000,000	180,000,000	185,000,000	187,000,000	187,000,000	187,000,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	3,500,000,000	2,500,000,000	3,500,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	3,500,000,000	2,500,000,000	3,500,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**195,149,829,450**	**320,070,266,437**	**326,965,015,550**	**332,098,988,657**	**335,970,730,775**	**336,938,753,775**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa	16,210,182,450	16,210,182,450	17,310,237,550	19,320,445,657	21,780,954,775	20,998,977,775
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	178,939,647,000	179,860,083,987	185,654,778,000	188,778,543,000	190,189,776,000	191,939,776,000

	dan Pemerintahan Desa						
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa		124,000,000,000	124,000,000,000	124,000,000,000	124,000,000,000	124,000,000,000
	JUMLAH BELANJA	**1,516,770,643,000**	**1,570,682,471,724**	**1,609,206,723,694**	**1,699,043,561,900**	**1,730,353,694,014**	**1,720,074,267,776**

Sumber: Data Proyeksi BPKD Luwu Timur 2021

Sebagaimana yang telah disajikan pada bab.III Gambaran Umum keuangan Daerah bahwa Peningkatan Proyeksi kemampuan kapasitas riil keuangan daerah ini didorong oleh rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, seiring dengan membaiknya proyeksi ekonomi Nasional dan provinsi di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19. Selain itu diharapkan dapat tercapai pelampauan target pendapatan melalui optimalisasi penerimaan PAD, selain itu upaya melalui upaya menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif dalam mengalokasikan belanja daerah yang terukur serta secara nyata mampu menciptakan sumber -sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan keterbatasan pendanaan pembangunan daerah perlu dioptimalkan upaya sumber-sumber pendanaan lainnya melalui dana APBN, APBD Provinsi melalui Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah antar level Pemerintahan.

Pengalokasian Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diatas, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam 3 (tiga) kategori prioritas (KP). Yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar khususnya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

7.2. Program Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, dijabarkan kedalam program perangkat daerah dalam rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan urusan/fungsi yang diampuh. Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
2. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.
3. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.

4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan pelaksanaan dari urusan / penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah yang akan dioperasionalkan oleh Perangkat daerah. Adapun Nomenklatur Program berpedoman pada kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD.Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan pada RENSTRA-PD. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah

(RENSTRA-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen operasional dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Adapun pagu yang ditetapkan merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif untuk penyusunan program tahunan Perangkat daerah. Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan pada akhirnya akan dituangkan dalam APBD setiap tahunnya.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program perangkat daerah dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terdapat 145 Program Perangkat Daerah selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 7.2 :

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Grand Total					**1,570,682,471,724**		**1,609,206,723,694**		**1,699,043,561,900**		**1,730,353,694,014**		**1,720,074,267,776**		**8,329,360,719,108**	
0	0		**Semua Bidang**																
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	'%	100.00	100.00	528,751,639,023	100.00	394,612,271,029	100.00	537,672,125,304	100.00	616,629,116,223	100.00	608,998,880,538	100.00	2,686,664,032,117	Semua Perangkat Daerah
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**																
1	1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	'%	98.30	100.00	166,918,631,191	100.00	171,314,074,297	100.00	175,214,274,297	100.00	169,986,474,297	100.00	164,441,674,297	100.00	847,875,128,379	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat	'%	103.97	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	'%	99.10	99.20		99.25		99.30		99.35		99.40		99.40		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	'%	67.80	68.20		68.40		68.60		68.80		69.00		69.00		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	'%	138.84	139.20		139.38		139.56		139.74		139.92		139.92		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	'%	97.70	97.80		97.85		97.90		97.95		98.00		98.00		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	113.76	114.30		114.57		114.84		115.11		115.38		115.38		

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	'%	99.39	99.89		100.14		100.39		100.64		100.89		100.89		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	105.25	105.75		106.00		106.25		106.50		106.75		106.75		
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Bayi	per 1000 KH	8.16	8.16	122,448,054,291	8.11	136,743,806,003	7.93	188,585,986,512	7.75	180,120,797,235	7.39	188,326,908,646	7.39	816,225,552,687	DINAS KESEHATAN
				Prevalensi balita pendek (Stunting)	'%	6.19	6.08		5.80		5.60		5.40		5.01		5.01		
				Angka kematian ibu	per 100000 KH	108.74	107.91		105.01		103.71		92.64		90.28		90.28		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	'%	80.45	80.86	4,746,000,000	81.66	5,504,550,000	82.41	5,853,100,000	83.13	5,853,100,000	86.86	5,853,100,000	86.86	27,809,850,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	'%	67.01	68.01	650,375,700	70.01	726,457,380	71.01	799,103,118	73.01	879,013,429	73.01	893,713,140	73.01	3,948,662,767	DINAS KESEHATAN
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ('%)	'%	100.00	100.00	70,000,000	100.00	100,000,000	100.00	150,000,000	100.00	200,000,000	100.00	250,000,000	100.00	770,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK	'%	43.00	60.00	0	61.00	927,000,000	61.50	1,067,000,000	62.00	947,000,000	62.00	972,000,000	62.00	3,913,000,000	RSUD I LAGALIGO
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	'%	22.00	24.00	15,768,014,000	24.50	25,878,123,768	25.00	24,553,644,908	25.50	25,654,644,908	25.50	21,857,444,908	25.50	113,711,872,492	RSUD I LAGALIGO

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas RTH publik yang ditata	'%	0.26	0.26	111,000,000	0.26	900,000,000	0.26	1,350,000,000	0.27	550,000,000	0.27	550,000,000	0.26	3,461,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air	'%	44.69	45.98	37,755,894,817	47.28	28,501,008,163	48.57	28,501,008,163	49.86	26,411,808,089	49.86	26,411,808,089	49.86	147,581,527,321	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio jaringan irigasi	Angka	7.98	8.41		8.84		9.28		9.71		9.71		9.71		
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang	'%	75.00	78.00	1,570,139,323	80.00	2,060,350,723	82.00	2,060,350,723	85.00	2,060,350,723	87.00	2,060,350,723	82.40	9,811,542,215	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	'%	58.71	59.46	8,517,102,930	60.18	11,800,000,000	60.89	18,300,000,000	61.57	12,300,000,000	63.13	12,300,000,000	63.13	63,217,102,930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	'%	31.37	41.89	453,441,564	52.42	490,279,978	62.94	490,279,978	73.47	490,279,978	84.00	490,279,978	84.00	2,414,561,476	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tampa kecelakaan kerja	'%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	'%	41.14	42.04	65,735,249,080	42.94	98,912,749,408	43.71	69,905,204,273	44.74	79,905,204,273	45.77	79,905,204,273	45.77	394,363,611,307	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	'%	- .00	18.75	2,083,700,000	54.16	23,105,000,000	70.33	2,255,000,000	85.41	2,255,000,000	100.00	2,255,000,000	100.00	31,953,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang di bangun	'%	- .00	50.00	35,673,416,700	100.00	41,110,734,370	- .00	5,910,734,370	- .00	2,910,734,370	- .00	2,910,734,370	- .00	88,516,354,180	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio kepatuhan IMB kabupaten	'%	90.75	91.14		91.57		91.92		92.15		92.15		92.15		
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU)	'%	- .00	22.21	1,787,000,000	24.78	1,840,000,000	27.34	1,890,000,000	29.91	1,940,000,000	32.47	1,940,000,000	27.34	9,397,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	'%	84.02	84.21	5,704,938,900	85.30	2,216,961,950	86.24	2,216,961,950	87.07	2,216,961,950	87.07	2,216,961,950	87.07	14,572,786,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman	'%	- .00	0.35	12,353,440,000	0.86	12,715,000,000	1.22	18,000,000,000	1.49	12,715,000,000	1.70	12,715,000,000	1.70	68,498,440,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	4		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	'%	- .00	24.94	3,829,080,000	18.94	3,829,080,000	18.94	3,829,080,000	16.71	3,829,080,000	20.47	3,829,080,000	100.00	19,145,400,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Rasio rumah layak huni		17.74	18.04		18.34		18.64		18.94		19.24		19.24		
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	'%	100.00	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	1,447,610,000	100.00	7,238,050,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang	'%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				memperoleh rumah layak huni															
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	'%	- .00	2.81	55,080,000	2.89	55,080,000	2.98	55,080,000	3.07	55,080,000	3.16	55,080,000	3.16	275,400,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	'%	- .00	21.05	24,000,000,000	21.05	24,000,000,000	19.30	22,000,000,000	19.30	22,000,000,000	19.30	22,000,000,000	100.00	114,000,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	'%	100.00	100.00	1,650,244,092	100.00	2,976,000,000	100.00	2,258,550,000	100.00	2,339,000,000	100.00	2,389,000,000	100.00	11,612,794,092	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	'%	18.05	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	'%	14.41	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100.00	100.00	6,740,636,796	100.00	9,284,025,050	100.00	9,944,081,650	100.00	10,091,362,980	100.00	10,352,242,800	100.00	46,412,349,276	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase Penegakan Perda	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	'%	37.65	37.67	666,546,475	37.75	670,000,000	37.79	800,000,000	37.81	680,000,000	38.16	685,000,000	38.16	3,501,546,475	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial	'%	36.52	43.78	4,000,000,000	43.93	4,000,000,000	44.14	4,000,000,000	44.29	4,000,000,000	44.30	4,000,000,000	44.30	20,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase	- .00	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	750,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	'%	100.00	100.00	65,910,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	365,910,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani	'%	39.26	43.28	1,383,359,678	43.43	1,235,000,000	43.65	1,250,000,000	43.79	1,260,000,000	43.81	1,265,000,000	43.81	6,393,359,678	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	'%	100.00	100.00	295,000,000	100.00	385,000,000	100.00	395,000,000	100.00	405,000,000	100.00	415,000,000	100.00	1,895,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Orang	157,500.00	158,500.00	0	158,900.00	0	159,000.00	0	159,100.00	850,000,000	159,200.00	0	159,200.00	850,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	'%	75.75	75.60	1,232,000,000	75.70	1,382,000,000	75.75	1,382,000,000	76.55	1,382,000,000	76.55	1,420,000,000	76.55	6,798,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	pelatihan berbasis kompetensi															
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	'%	45.87	41.98	294,356,902	42.57	544,000,000	43.07	956,000,000	43.98	756,000,000	43.98	556,000,000	43.98	3,106,356,902	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	'%	22.82	22.82	736,365,325	22.82	799,359,750	22.82	805,229,750	22.82	807,229,750	22.82	807,229,750	22.82	3,955,414,325	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	'%	76.02	75.25	267,597,207	74.69	647,000,000	74.65	568,000,000	74.58	608,000,000	74.47	645,000,000	74.47	2,735,597,207	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	'%	23.98	24.75		25.31		25.35		25.42		25.53		25.53		
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	'%	70.00	72.73	483,226,219	81.82	570,000,000	81.82	525,000,000	81.82	635,000,000	90.91	550,000,000	90.91	2,763,226,219	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	'%	100.00	100.00	30,046,909	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	170,046,909	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	'%	80.00	100.00	158,156,666	100.00	350,000,000	100.00	235,000,000	100.00	240,000,000	100.00	240,000,000	100.00	1,223,156,666	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO	'%	80.00	- .00	0	100.00	0	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	100.00	315,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga	'%	0.07	0.09	58,357,249	0.10	160,000,000	0.11	165,000,000	0.13	165,000,000	0.14	170,000,000	0.14	718,357,249	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	9		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok	(Ton)	25,272,882.00	########	207,950,000	########	427,320,000	20,664,000.00	427,320,000	########	427,320,000	########	527,320,000	########	2,017,230,000	DINAS PERTANIAN
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Survey Analisa Ketersediaan Pangan Utama, PPH, NBM	Jenis	500.00	600.00	255,778,043	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	249,577,883	600.00	1,254,089,575	DINAS PERTANIAN
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan	Kelurahan	- .00	- .00	13,660,000	3.00	200,000,000	3.00	150,000,000	3.00	210,000,000	- .00	150,000,000	1.80	723,660,000	DINAS PERTANIAN
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu	Orang/Peserta	- .00	100.00	31,360,093	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	131,360,093	DINAS PERTANIAN
2	10		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	'%	96.67	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	52,444,400	100.00	262,222,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	'%	100.00	100.00	28,293,795,000	100.00	17,269,795,000	100.00	8,789,795,000	100.00	4,549,795,000	100.00	4,549,795,000	100.00	63,452,975,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																DAN PERTANAHAN
2	10	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	'%	46.67	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	37,105,135	100.00	185,525,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	'%	39.65	39.85	498,732,250	40.15	498,732,250	40.35	498,732,250	40.55	498,732,250	40.85	498,732,250	40.85	2,493,661,250	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	'%	100.00	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	164,545,135	100.00	822,725,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	Persen	- .00	100.00	53,145,761	100.00	55,803,049	100.00	58,593,201	100.00	61,522,861	100.00	64,599,004	100.00	293,663,876	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan	Persen	50.00	50.00	15,000,000	50.00	20,000,000	50.00	20,000,000	50.00	25,000,000	50.00	25,000,000	50.00	105,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Persen	- .00	100.00	115,000,000	100.00	120,750,000	100.00	126,787,500	100.00	133,126,875	100.00	139,783,219	100.00	635,447,594	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	70.00	70.00	4,500,000,000	72.00	4,600,000,000	74.00	4,701,600,000	76.00	4,804,832,000	78.00	4,959,728,640	74.00	23,566,160,640	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Persen	1.00	1.00	484,209,407	1.00	520,536,180	1.00	560,494,208	1.00	604,542,877	1.00	653,197,479	1.00	2,822,980,151	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM	Persentase RTH yang tertangani dengan baik	Persen	100.00	100.00	200,000,000	100.00	225,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	1,225,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			AN HAYATI (KEHATI)																
2	1 1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi	Persen	100.00	100.00	130,000,000	100.00	136,000,000	100.00	142,300,000	100.00	148,915,000	100.00	155,860,750	100.00	713,075,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA	3.00	3.00	113,221,280	3.00	118,882,343	3.00	124,826,460	3.00	131,067,783	3.00	137,621,173	3.00	625,619,039	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	Persen	50.00	50.00	95,000,000	50.00	110,000,000	50.00	120,000,000	50.00	140,000,000	50.00	150,000,000	50.00	615,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina	Persen	- .00	- .00	0	- .00	0	100.00	30,000,000	100.00	35,000,000	100.00	40,000,000	60.00	105,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	'%	95.54	96.05	367,429,324	96.55	428,637,500	97.05	434,819,375	97.42	441,310,343	98.02	448,125,860	98.02	2,120,322,402	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	'%	99.71	99.76	435,651,995	99.83	468,653,500	99.85	490,086,175	99.87	493,890,485	99.90	500,049,795	99.90	2,388,331,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang resposif gender	'%	100.00	100.00	358,607,001	100.00	360,000,000	100.00	365,000,000	100.00	370,000,000	100.00	375,000,000	100.00	1,828,607,001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase data kependudukan yang disediakan	persentase	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	'%	65.00	65.00	75,419,175	75.00	90,000,000	80.00	200,000,000	85.00	110,000,000	95.00	120,000,000	95.00	595,419,175	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	'%	60.00	70.00	1,196,151,718	75.00	3,109,100,000	80.00	1,222,700,000	85.00	5,228,150,000	88.00	1,230,270,000	79.60	11,986,371,718	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penataan desa	'%	60.00	70.00	140,000,000	75.00	141,000,000	80.00	141,500,000	85.00	142,000,000	90.00	142,500,000	80.00	707,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	'%	55.00	60.00	1,224,827,427	65.00	1,294,961,393	75.00	1,318,875,848	80.00	1,298,895,848	85.00	1,338,910,848	73.00	6,476,471,364	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan	Nilai	4.00	4.00	416,000,000	4.00	418,500,000	4.00	889,700,000	4.00	400,500,000	4.00	408,000,000	4.00	2,532,700,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD)															DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	persen	35.41	28.16	5,372,487,343	26.76	5,369,466,441	25.60	5,389,454,800	24.63	5,437,660,000	24.63	5,443,710,000	24.63	27,012,778,584	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	persen	55.57	58.00		58.90		59.70		60.50		60.50		60.50		
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	15.61	12.88		12.40		12.01		11.67		11.67		11.67		
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	33.30	37.89		39.14		40.81		41.22		41.22		41.22		
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama	Nilai	20.00	20.00	1,025,019,195	21.00	965,019,015	21.00	1,003,986,981	21.00	1,025,986,981	21.00	1,045,989,760	21.00	5,066,001,932	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan	'%	94.05	94.24	9,362,585,774	94.41	16,034,734,828	94.57	10,080,045,828	94.73	4,243,316,828	94.88	3,900,977,828	94.88	43,621,661,086	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	'%	2.06	52.46		67.37		79.90		92.31		100.00		100.00		

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	'%	16.85	27.17	829,121,216	31.98	384,157,509	36.57	425,237,599	40.86	442,025,043	45.18	454,135,534	45.18	2,534,676,901	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Kapal yang laik berlayar di danau	'%	- .00	25.00		43.75		68.75		87.50		100.00		100.00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	persen ('%)	100.00	100.00	2,123,884,366	100.00	2,510,000,000	100.00	2,710,000,000	100.00	2,880,000,000	100.00	2,980,000,000	100.00	13,203,884,366	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	persen ('%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	persen ('%)	100.00	100.00	2,457,243,254	100.00	3,195,000,000	100.00	3,605,000,000	100.00	3,965,000,000	100.00	4,330,000,000	100.00	17,552,243,254	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	'%	29.12	30.82	96,007,500	32.63	100,370,000	34.44	110,370,000	36.13	115,370,000	36.13	120,000,000	36.13	542,117,500	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	'%	9.92	10.71	93,445,354	12.18	93,445,354	14.12	93,445,354	15.61	93,445,354	15.61	93,445,354	15.61	467,226,770	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	'%	35.00	40.00	178,103,694	45.00	232,215,324	50.00	251,215,324	55.00	278,503,824	60.00	284,402,749	60.00	1,224,440,915	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			DAN MENENGAH
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	'%	30.02	31.25	66,854,936	32.80	81,864,800	34.34	85,958,040	35.75	88,536,781	35.75	91,192,884	35.75	414,407,441	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	'%	3.36	2.27	114,461,660	3.89	114,461,660	5.19	125,461,660	6.36	130,462,660	8.16	132,462,660	8.16	617,310,300	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	'%	0.41	3.15	25,563,680	4.90	30,563,680	5.64	35,279,800	6.75	39,279,800	6.75	41,243,790	6.75	171,930,750	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	'%	1.44	6.00	20,000,000	9.85	30,923,680	12.65	35,923,680	14.72	37,923,680	14.72	38,923,680	14.72	163,694,720	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	Angka	30.00	35.00	480,796,460	40.00	63,260,057	45.00	245,157,859	50.00	67,112,594	55.00	69,125,972	55.00	925,452,942	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal	'%	10.00	15.00	198,814,480	20.00	401,700,000	25.00	413,751,000	30.00	426,163,530	35.00	438,948,436	35.00	1,879,377,446	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	'%	70.00	75.00	367,365,851	80.00	370,800,000	85.00	381,924,000	90.00	393,381,720	95.00	405,183,171	95.00	1,918,654,742	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal	'%	100.00	100.00	320,191,107	100.00	365,650,000	100.00	376,619,500	100.00	387,918,085	100.00	399,555,627	100.00	1,849,934,319	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	Angka	1.00	1.00	29,999,850	1.00	36,713,966	1.00	37,815,385	1.00	38,949,846	1.00	40,118,342	1.00	183,597,389	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif	persen	90.00	90.00	500,000,000	93.00	1,760,000,000	93.00	1,060,000,000	95.00	1,060,000,000	95.00	610,000,000	93.20	4,990,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persen	85.00	85.00	3,561,254,000	85.00	3,615,470,600	90.00	6,391,433,900	90.00	3,674,542,400	95.00	3,702,278,460	89.00	20,944,979,360	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaag	Persn	75.00	75.00	19,846,500,000	75.00	51,935,600,000	80.00	30,476,874,000	80.00	5,529,579,000	85.00	6,074,781,700	79.00	113,863,334,700	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan	persen ('%)	100.00	90.00	54,384,474	100.00	650,000,000	100.00	700,000,000	100.00	800,000,000	100.00	950,000,000	100.00	3,154,384,474	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				pembangunan daerah															
2	21		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	persen ('%)	100.00	100.00	28,730,000	100.00	80,000,000	100.00	100,000,000	100.00	120,000,000	100.00	150,000,000	100.00	478,730,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan Kesenian tradisional	'%	80.00	100.00	29,999,600	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	1,229,999,600	DINAS PENDIDIKAN
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina	'%	80.00	100.00	92,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	1,192,000,000	DINAS PENDIDIKAN
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	90.00	100.00	108,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	750,000,000	100.00	2,958,000,000	DINAS PENDIDIKAN
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan daerah	'%	80.00	80.00	169,994,800	85.00	750,000,000	85.00	750,000,000	90.00	950,000,000	95.00	950,000,000	95.00	3,569,994,800	DINAS PENDIDIKAN
2	23		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	'%	157.53	100.00	345,255,555	100.00	819,981,746	100.00	817,849,975	100.00	839,849,975	100.00	934,431,746	100.00	3,757,368,997	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	'%	- .00	100.00	40,522,006	100.00	41,787,006	100.00	41,000,000	100.00	41,000,000	100.00	46,000,000	100.00	210,309,012	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata	'%	87.18	100.00	221,275,479	100.00	342,545,000	100.00	355,545,000	100.00	409,685,000	100.00	418,685,000	100.00	1,747,735,479	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku															
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	'%	- .00	25.00	22,000,000	25.00	25,000,000	25.00	25,000,000	25.00	28,000,000	25.00	28,000,000	25.00	128,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			**URUSAN PILIHAN**																
3	25		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Ton	10,012.00	10,165.00	2,184,225,525	10,216.00	2,184,225,525	10,267.00	2,184,225,525	10,318.00	2,184,225,525	10,369.00	2,184,225,525	10,267.00	10,921,127,625	DINAS PERIKANAN
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	315,343.00	315,565.00	4,947,000,000	315,710.00	4,500,000,000	315,855.00	4,210,000,000	316,115.00	4,220,000,000	316,365.00	4,420,000,000	315,922.00	22,297,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	Persen	90.00	92.00	50,000,000	94.00	50,000,000	96.00	50,000,000	98.00	50,000,000	100.00	50,000,000	96.00	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan	Ton	311.50	322.00	1,248,788,050	335.00	1,280,780,000	345.00	1,315,880,000	355.00	1,346,080,000	370.00	1,385,250,000	345.40	6,576,778,050	DINAS PERIKANAN
3	26		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	Persen	10.00	10.00	3,960,000,000	12.00	4,035,000,000	14.00	4,153,500,000	16.00	4,272,400,000	20.00	4,441,700,000	14.40	20,862,600,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur	Persen	90.00	90.00	1,040,000,000	92.00	1,288,000,000	92.00	1,215,700,000	93.00	1,215,500,000	96.00	1,127,000,000	92.60	5,886,200,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber	Orang	43.00	50.00	213,500,000	50.00	393,500,000	55.00	602,500,000	55.00	609,600,000	60.00	616,850,000	54.00	2,435,950,000	DINAS PARIWISATA,

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur	Persen	80.00	85.00	150,000,000	85.00	150,000,000	90.00	150,000,000	90.00	150,000,000	95.00	150,000,000	89.00	750,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	27		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	'%	1.01	1.50	420,800,000	1.40	894,299,600	1.30	794,299,600	1.20	894,299,600	1.00	794,299,600	1.28	3,797,998,400	DINAS PERTANIAN
				presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	'%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas kakao	Ton/ Ha	0.74	0.78	7,376,404,138	0.82	9,470,900,894	0.86	8,863,695,938	0.90	9,223,330,736	0.95	9,550,641,273	0.86	44,484,972,979	DINAS PERTANIAN
				Jumlah Populasi ternak Besar	ekor	21,109.00	23,109.00		24,109.00		25,109.00		26,109.00		27,109.00		25,109.00		
				Jumlah Populasi Unggas	ekor	849,529.00	899,529.00		949,529.00		999,529.00		########		########		999,529.00		
				Jumlah Produktivitas kelapa sawit	Ton/ Ha	12.46	12.01		11.95		9.60		9.62		9.80		10.60		
				Jumlah Produktivitas Jagung	Ton/ Ha	6.11	6.31		6.51		6.71		6.81		6.91		6.65		
				Jumlah Produktivitas padi	Ton/ Ha	7.10	7.12		7.13		7.16		7.19		7.21		7.16		
				Jumlah Produktivitas lada	Ton/ Ha	0.93	0.96		0.97		99.00		1.02		1.03		20.60		

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Populasi ternak Kecil	ekor	24,462.00	26,462.00		28,462.00		30,462.00		32,462.00		34,462.00		30,462.00		
				Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman padi Pertahun	kali	1.80	1.82	7,977,895,226	1.84	12,401,377,488	1.86	12,819,573,861	1.88	13,258,680,055	1.90	13,719,741,558	1.86	60,177,268,188	DINAS PERTANIAN
				presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perizinan usaha pertanian	Persen	- .00	100.00	0	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Penyuluhan Pertanian	Persen	100.00	100.00	2,766,304,037	100.00	3,745,441,100	100.00	4,024,504,333	100.00	4,385,939,463	100.00	4,861,817,647	100.00	19,784,006,580	DINAS PERTANIAN
				Cakupan Bina Kelompok Tani	'%	58.15	58.26		58.57		58.67		58.75		58.80		58.61		
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian	'%	100.00	100.00	366,952,625	100.00	400,000,000	100.00	420,000,000	100.00	441,000,000	100.00	463,050,000	100.00	2,091,002,625	DINAS PERTANIAN
3	30		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	'%	9.00	8.50	341,873,635	8.00	362,833,635	7.80	412,873,635	7.50	441,873,635	7.50	462,873,635	7.50	2,022,328,175	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	'%	5.00	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	188,857,100	5.00	944,285,500	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			DAN MENENGAH
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	'%	10.00	10.00	1,854,453,800	10.00	2,059,463,175	10.00	2,361,463,175	10.00	2,569,463,175	10.00	3,069,463,175	10.00	11,914,306,500	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	'%	1.10	1.15	271,421,303	1.20	340,421,000	1.25	355,421,000	1.27	366,421,000	1.30	396,616,000	1.30	1,730,300,303	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Dokumen	- .00	- .00	166,326,096	- .00	1,338,583,360	1.00	838,538,360	- .00	338,538,360	- .00	338,538,360	1.00	3,020,524,536	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	'%	90.00	- .00	0	90.90	40,000,000	91.66	45,000,000	92.30	50,000,000	92.30	50,000,000	92.30	185,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar	'%	4.00	5.00	51,018,510	7.00	101,018,510	10.00	101,018,510	15.00	101,018,510	37.00	101,018,510	37.00	455,092,550	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	32		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Penetapan	'%	100.00	100.00	45,000,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000	100.00	300,000,000	DINAS TRANSMIGRASI,

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigran															DAN TENAGA KERJA
3	3 2	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Ha	230.00	230.00	222,000,000	50.00	265,000,000	50.00	280,000,000	50.00	285,000,000	50.00	285,000,000	430.00	1,337,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
3	3 2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	'%	100.00	100.00	130,000,000	100.00	345,000,000	100.00	345,000,000	100.00	350,000,000	100.00	350,000,000	100.00	1,520,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
4			**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	1		**SEKRETARIAT DAERAH**																
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	'%	80.00	100.00	28,926,678,322	100.00	32,015,454,560	100.00	32,436,952,765	100.00	34,430,752,481	100.00	34,512,201,143	100.00	162,322,039,271	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian	'%	80.00	100.00	1,697,201,319	100.00	1,924,034,110	100.00	1,733,812,473	100.00	1,876,560,583	100.00	2,007,267,892	100.00	9,238,876,377	SEKRETARIAT DAERAH
4	2		**SEKRETARIAT DPRD**																
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi Yang DI Fasilitasi (%)	'%	90.00	90.00	10,219,725,470	90.00	13,058,783,606	90.00	13,612,450,892	90.00	13,790,852,204	90.00	13,298,303,339	90.00	63,980,115,511	SEKRETARIAT DPRD
5	1		**PERENCANAAN**																
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	'%	100.00	100.00	2,163,259,372	100.00	1,589,800,200	100.00	1,629,244,205	100.00	1,669,675,386	100.00	1,711,116,320	100.00	8,763,095,483	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	'%	100.00	100.00	1,822,013,230	100.00	1,858,067,494	100.00	1,961,196,000	100.00	1,935,031,000	100.00	2,004,574,966	100.00	9,580,882,690	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	'%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
5	2		**KEUANGAN**																

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persen	96.00	96.50	325,416,592,464	96.70	356,646,150,000	97.00	356,829,200,000	97.10	357,000,600,000	97.30	357,136,100,000	97.30	1,753,028,642,464	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	'%	90.00	90.00	696,316,206	91.00	773,400,000	93.00	808,700,000	95.00	824,000,000	95.00	847,900,000	95.00	3,950,316,206	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Persen	90.00	90.50	2,858,087,990	91.00	2,885,400,000	91.50	2,912,700,000	92.00	2,940,200,000	92.50	2,969,200,000	92.50	14,565,587,990	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	3		**KEPEGAWAIAN**																
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat (%)	Persentase	95.00	96.00	4,894,347,703	97.00	5,404,244,000	98.00	3,455,000,000	99.00	3,350,000,000	100.00	3,975,000,000	100.00	21,078,591,703	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Persen	7.41	10.00	1,690,825,915	10.00	2,460,700,000	10.00	2,643,480,000	10.00	2,834,617,000	10.00	2,199,097,000	50.00	11,828,719,915	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	5		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	'%	10.26	15.38	791,884,646	20.51	615,000,000	20.51	650,000,000	25.64	820,000,000	25.64	655,000,000	25.64	3,531,884,646	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase implementasi rencana kelitbangan	'%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
6	1		**INSPEKTORAT DAERAH**																
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	'%	95.00	95.00	2,190,307,365	95.00	2,541,261,252	95.00	2,795,695,157	95.00	3,081,934,008	95.00	3,081,934,008	95.00	13,691,131,790	INSPEKTORAT
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	'%	95.00	95.00	679,416,992	95.00	747,358,691	95.00	822,094,560	95.00	904,304,016	95.00	904,304,016	95.00	4,057,478,275	INSPEKTORAT

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1		KECAMATAN																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	60,379,384	100.00	84,710,099	100.00	102,449,915	100.00	104,449,415	100.00	104,449,415	100.00	456,438,228	WOTU
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	64,753,724	100.00	70,887,704	100.00	75,971,586	100.00	81,444,563	100.00	87,337,220	100.00	380,394,797	ANGKONA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	21,880,527	100.00	45,464,715	100.00	47,737,949	100.00	50,124,846	100.00	52,631,096	100.00	217,839,133	ANGKONA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	16,223,032	100.00	16,582,258	100.00	16,982,258	100.00	17,282,258	100.00	17,772,258	100.00	84,842,064	TOWUTI
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	396,399,117	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	736,039,074	100.00	3,340,555,413	TOMONI
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	92.73	100.00	12,275,585	100.00	53,500,000	100.00	56,000,000	100.00	59,700,000	100.00	62,000,000	100.00	243,475,585	ANGKONA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	49,652,579	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	86,317,546	100.00	394,922,763	TOMONI

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	14,682,162	100.00	34,805,848	100.00	35,850,024	100.00	36,925,525	100.00	38,033,290	100.00	160,296,849	ANGKONA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	37,856,634	100.00	37,956,634	100.00	38,156,634	100.00	38,556,634	100.00	38,856,634	100.00	191,383,170	TOWUTI
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	2,675,750	100.00	63,701,870	100.00	63,702,220	100.00	64,702,120	100.00	65,702,120	100.00	260,484,080	NUHA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	31,423,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	31,418,166	100.00	157,095,830	NUHA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	9,985,000	100.00	70,243,012	100.00	75,282,258	100.00	78,500,258	100.00	82,282,258	100.00	316,292,786	WOTU
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	24,048,689	100.00	45,838,949	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	177,457,540	WOTU
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	74,276,980	100.00	93,695,830	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	467,972,810	KALAENA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase	100.00	100.00	7,500,000	100.00	50,000,000	100.00	61,000,000	100.00	62,000,000	100.00	54,000,000	100.00	234,500,000	WASUPONDA
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan	'%	- .00	- .00	17,037,850	100.00	61,250,000	100.00	64,275,000	100.00	67,452,000	100.00	70,788,765	100.00	280,803,615	ANGKONA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan ketertiban umum															
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	- .00	100.00	42,116,741	100.00	42,675,200	100.00	42,789,250	100.00	44,212,000	100.00	44,530,000	100.00	216,323,191	TOWUTI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase	100.00	100.00	39,903,323	100.00	44,182,282	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	309,085,605	KALAENA
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	'%	100.00	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	274,523,850	TOMONI TIMUR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	23,073,937	100.00	36,000,000	100.00	36,000,000	100.00	37,000,000	100.00	37,000,000	100.00	169,073,937	WASUPONDA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	28,500,000	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	171,926,536	TOMONI TIMUR
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	15,141,000	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	98,645,260	TOMONI TIMUR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan	'%	100.00	100.00	7,841,945	100.00	32,336,000	100.00	38,622,000	100.00	38,622,000	100.00	40,367,000	100.00	157,788,945	NUHA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan ketertiban umum															
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	100.00	100.00	12,250,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	36,500,000	100.00	158,250,000	WOTU
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	100.00	100.00	23,220,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	126,580,000	TOMONI TIMUR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	- .00	100.00	16,500,000	100.00	17,000,000	100.00	20,000,000	100.00	19,000,000	100.00	19,000,000	100.00	91,500,000	WASUPONDA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	26,190,340	100.00	130,951,700	TOMONI TIMUR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	- .00	100.00	12,000,000	100.00	8,000,000	100.00	8,490,000	100.00	9,004,700	100.00	8,545,379	100.00	46,040,079	MANGKUTANA
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	99.00	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	375,000,000	MALILI
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	100.00	100.00	12,249,043	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	33,000,000	100.00	144,249,043	BURAU
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	102,324,915	100.00	103,449,915	100.00	106,273,915	100.00	108,723,915	100.00	107,493,915	100.00	528,266,575	TOWUTI
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	'%	100.00	100.00	2,749,885	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	3,024,874	100.00	14,849,381	TOMONI

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			DAN PELAYANAN PUBLIK	dan pelayanan publik															
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	'%	98.00	100.00	15,349,619	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	215,349,619	KALAENA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	64,041,594	100.00	20,896,750	100.00	21,596,750	100.00	21,101,750	100.00	22,101,750	100.00	149,738,594	TOWUTI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	18,169,008	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	19,985,909	100.00	98,112,644	TOMONI
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	'%	100.00	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	328,080,720	100.00	1,640,403,600	MALILI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	94,496,780	100.00	472,483,900	MALILI
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	4,098,916	100.00	5,000,000	100.00	6,000,000	100.00	7,000,000	100.00	8,000,000	100.00	30,098,916	MANGKUTANA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA	Persentase Capaian Kinerja	'%	100.00	100.00	31,406,625	100.00	32,348,824	100.00	33,319,288	100.00	34,318,867	100.00	35,348,433	100.00	166,742,037	MANGKUTANA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan															
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	32,862,818	100.00	78,109,692	100.00	81,047,782	100.00	81,994,532	100.00	75,895,500	100.00	349,910,324	WOTU
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik	'%	99.10	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	89,691,000	100.00	448,455,000	MALILI
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	53,053,555	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	66,345,881	100.00	318,437,079	BURAU
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	62,825,786	100.00	80,114,021	100.00	85,804,380	100.00	91,928,404	100.00	98,520,141	100.00	419,192,732	MANGKUTANA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	99.00	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	56,066,149	100.00	280,330,745	MALILI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	'%	100.00	100.00	31,108,002	100.00	8,791,211	100.00	8,991,211	100.00	9,041,211	100.00	9,041,211	100.00	66,972,846	NUHA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan	'%	100.00	100.00	25,391,980	100.00	27,711,579	100.00	29,097,158	100.00	30,552,016	100.00	32,079,616	100.00	144,832,349	MANGKUTANA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				perundangan yang berlaku															
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	100.00	100.00	8,168,856	100.00	25,529,631	100.00	27,000,000	100.00	27,000,000	100.00	27,000,000	100.00	114,698,487	BURAU
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase	100.00	100.00	35,991,046	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	65,806,230	100.00	299,215,966	BURAU
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	100.00	100.00	24,841,348	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	35,000,000	100.00	164,841,348	BURAU
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	219,965,853	100.00	435,441,442	100.00	435,441,442	100.00	435,441,442	100.00	445,441,442	100.00	1,971,731,621	NUHA
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	'%	100.00	100.00	50,457,505	100.00	95,176,133	100.00	96,176,133	100.00	96,176,133	100.00	96,176,133	100.00	434,162,037	WASUPONDA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	'%	98.00	100.00	14,532,410	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	174,532,410	KALAENA
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	'%	100.00	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	45,000,000	TOMONI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang	'%	100.00	100.00	22,658,553	100.00	15,500,000	100.00	15,500,000	100.00	18,000,000	100.00	18,000,000	100.00	89,658,553	WASUPONDA

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PEMERINTAHAN DESA	berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku															
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	'%	98.00	100.00	14,483,719	100.00	15,858,719	100.00	10,000,000	100.00	15,000,000	100.00	20,000,000	100.00	75,342,438	KALAENA
8	1		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	'%	95.00	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	1,197,868,175	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	'%	95.00	95.00	853,007,315	95.00	1,075,000,000	95.00	1,210,000,000	95.00	945,000,000	95.00	980,000,000	95.00	5,063,007,315	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	'%	100.00	100.00	40,150,000	100.00	60,000,000	100.00	70,000,000	100.00	80,000,000	100.00	90,000,000	100.00	340,150,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	'%	95.00	95.00	440,000,000	95.00	465,000,000	95.00	500,000,000	95.00	535,000,000	95.00	570,000,000	95.00	2,510,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase jumlah pembinaan dan	'%	95.00	95.00	150,000,000	95.00	160,000,000	95.00	170,000,000	95.00	180,000,000	95.00	190,000,000	95.00	850,000,000	KANTOR KESATUAN

Kode Rek			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya															BANGSA DAN POLITIK

Sumber : //bappedaluwutimur.eplanning7.com 2021

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut. Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 8.1
Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Indikator Mkaro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Asumsi Capaian 2021	Target Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	Nilai	73,22	73,50	73,80	74,10	74,40	74,70	75,00	75,00
2	Angka Kemiskinan (%)	%	6,85	6,84	6,64	6,44	6,24	6,04	5,84	5,84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,46	3.80	3.30	3.05	2.80	2.55	2.30	2.30
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	1,46	1,61-2,15	2,49-3,33	2,72-3,63	2.98-3,71	3.22-3,50	3.46-3,63	3,50-3,72

No	Indikator Mkaro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Asumsi Capaian 2021	Target Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
5	Pdrb Perkapita ADHB	Juta Rp	70,49	70,90	71,45	72,00	72,55	73,10	73,65	73,65
6	Gini Ratio	Nilai	0,405	0.397	0.389	0.381	0,247	0,232	0,217	0,217

Sumber: Data Proyeksi Bappelitbangda

8.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur dalam memberikan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Visi: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya												
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	**Tujuan-1:**											
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1	Angka Kemiskinan	%	6,85	6,84	6,64	6,44	6,24	6,04	5,84	5,84
		Sasaran-1:											
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,22	73,50	73,80	74,10	74,40	74,70	75,00	75,00
		Sasaran-2:											
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		Sasaran-3:											
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,76	55,09	55,65	57,34	60,82	63,45	65,00	65,00
2	Mengembangkan perekonomian	**Tujuan-2:**											
		Meningkatkan pertumbuhan	5	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,46	1,61-2,15	2,49-3,33	2,72-3,63	2.98-3,71	3.22-3,50	3.46-3,63	3,50-3,72

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
								2022	2023	2024	2025	2026	
	daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)	ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	6	Rasio Gini	Nilai	0,405	0.397	0.389	0.381	0,247	0,232	0,217	0,217
		Sasaran-4											
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	-0.25	1.63	1.83	1.98	2.08	2.17	2.23	2.23
		Sasaran-5:											
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8	Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT)	%	4,46	3.80	3.30	3.05	2.80	2.55	2.30	2.30
3	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	**Tujuan-3:**											
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9	Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	1,4830 (Sedang)	1,6281 (Sedang)	1,8150 (Sedang)	2,0666 (Sedang)	2,2638 (Sedang)	2,3230 (Sedang)	2,4101 (Sedang)	2,5101 (Tinggi)
		Sasaran-6:											
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	74,42	74,67	74,89	74,93	75,15	75,32	75,59	75,59
		Sasaran-7:											
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	86,87	87,00	87,55	88,10	88,35	88,70	88,70	88,70

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
								2022	2023	2024	2025	2026	
			12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)
4	Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	**Tujuan-4:**											
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	C	CC	CC	B	B	B	BB	BB
		Sasaran-8:											
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	C (Sangat Perlu Perbaikan)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)
			15	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran-9:											
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	80,35	80,76	82,42	84,75	85,68	87,78	90	90
			17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	78, 73	80,15	82,21	84,31	86,23	88,10	88,32	88,32
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga	**Tujuan-5:**											
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban	18	Angka Kriminalitas	Point	0,000738	0,000738	0,000643	0,00056	0,000473	0,000451	0,000429	0,000429

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2020	Asumsi Realisasi 2021	Target Kinerja Tahun -					Kondisi Akhir Periode RPJMD
								2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat (M5)	dan ketentraman (T5)											
		Sasaran-10:											
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	76,53	76,64	76,72	76,81	77,21	77,43	77,86	77,90
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	**Tujuan-6:**											
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	75,67	75,70	75,89	75,92	76,00	76,34	76,85	76,85
			21	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	49,82	53.77	54.27	54.77	55.27	55.77	56.27	56.27
		Sasaran-11:											
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22	Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	95	95	95	95	95	95	95
			23	Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	95	95	95	95	95	95	95

Sumber: Bappelitbangda Kab. Luwu Timur

8.1.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3(tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,46	1,50	2,50	2,74	2,98	3,22	3,46	3,46
	Laju inflasi	%	1,21	1,21	1,20	1,19	1,18	1,16	1,15	1,15
	PDRB per kapita Berlaku	Juta	70,49	70,90	71,45	72,00	72,55	73,10	73,65	73,65
	PDRB per kapita Konstan	Juta	53,23	53,25	53,27	53,30	53,45	53,75	54,00	54,00
	Rasio Gini	Angka	0,405	0.397	0.389	0.381	0,247	0,232	0,217	0,217
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,15	93,16	93,36	93,56	93,76	93,96	94,16	94,16
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,22	73,50	73,80	74,10	74,40	74,70	75,00	75,00
	Angka melek huruf	%	95,50	95,60	95,70	95,80	95,90	96,00	96,10	96,10
	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,80	9,00	9,20	9,40	9,60	9,80	10,00	10,00
	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,53	70,43	70,63	70,83	71,00	71,23	71,23	71,23
	Persentase balita gizi buruk	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,02	2,02	2,01	2,00	1,98	1,97	1,96	1,96
	Cakupan desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	157.5	158.5	150	152.7	153	150.8	158.7	158.7

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,36	70,48	70,98	71,10	67,50	72,38	72,38	72,38
	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,46	3,80	3,30	3,05	2,80	2,55	2,30	2,30
	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,54	95,61	95,92	96,45	96,95	97,05	97,05	97,05
	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	%	0,0180	0,0179	0,0184	0,0187	0,0190	0,0193	0,0197	0,0197
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	0,60	0,60	0,65	0,69	0,72	0,89	0,89	0,89
	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	3,39	1,99	2,01	2,02	2,02	2,18	2,18	2,18
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I	%	17.829	17.8	17.75	17.7	17.65	17.6	17.6	17.6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,31	83,21	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00
	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	22,76	21,49	22,48	23,50	24,52	25,53	25,53	25,53
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai/Skor	92	90	92	94	95	95	95	95
	Penguatan cadangan pangan	Kg	3	8	3	3	3	3	3	3
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	48,03	65,66	77,23	82,91	88,57	94,27	95,00	95,00
	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	0,34	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,50	1,50
	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija)terhadap PDRB	%	5,81	5,83	5,85	5,91	5,96	6,22	6,25	6,25
	Produksi Sektor Pertanian									
	Padi									
	Jagung									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kontribusi Sektor Perkebunan(Tanaman Keras)Terhadap PDRB	%	12,46	12,50	12.52	12,60	12,68	12,75	12,95	12,95
	Produksi sektor perkebunan	ton								
	Kakao		0,74	0,85	0,97	1,10	1,24	1,35	1,45	1,45
	Kelapa Sawit		12,46	12,50	12,52	12,60	12,68	12,75	12,95	12,95
	Lada		0,93	0,96	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,05
	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	44,95	44,95	44,94	44,80	44,75	44,60	44,20	43,00
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	N/A	N/A	2,81	2,71	2,57	2,68	2,76	2,76
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1,06	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,11
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,10	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,10
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,67	3,82	3,85	3,90	3,91	3,95	3,98	3,98
	Pertumbuhan Industri	%	-	4,40	4,70	4,85	5,12	5,25	5,45	5,45
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita	Rupiah	9.135.975	9.200.000	9.500.000	9.600.000	9.750.000	9.850.000	10.000.000	10.000.000
	Nilai Tukar Petani	%		97,50	97,52	97,54	97,56	97,60	97,60	97,60
	Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita	%	61.14	61,24	61,45	61,53	61,76	61,84	61,92	61,92
	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa	%	1,6	2,42	2,42	4,03	5,65	5,65	9,68	9,68
	angka kriminalitas yang Tertangani	Kasus	7,89	7,38	6,43	5,60	4,73	4,50	4,29	4,29
	ASPEK PELAYANAN UMUM									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
	Pendidikan									
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%								
	Angka Partisipasi Kasar	%	67,80	68,00	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00	69,00
	Angka Pendidikan yang ditamatkan									
	APT SD/sederajat	%	26,39	26,37	26,35	26,33	26,31	26,29	26,27	26,27
	APT SMP/sederajat	%	16,04	16,02	16,00	15,98	15,96	15,94	15,92	15,92
	Angka Partisipasi Murni									
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	%	102,45	102,50	102,55	102,60	102,65	102,70	102,75	102,75
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	%	107,63	107,68	107,73	107,78	107,83	107,88	107,93	107,93
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	62,73	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	89,11	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	86,38	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belaum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,98	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	99,35	99,40	99,40
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	97,70	97,75	97,80	97,85	97,90	97,95	98,00	98,00
	Angka Putus Sekolah :									
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,25
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,85
	AngkaKelulusan:									
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,75	99,76	99,77	99,78	99,79	99,8	99,81	99,81
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,50	99,51	99,52	99,53	99,54	99,55	99,56	99,56
	Angka Melanjutkan (AM)									
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,35	93,40	93,45	93,50	93,55	93,60	93,65	93,65
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	92,87	92,89	93,01	93,03	93,05	93,07	93,09	93,09
	Fasilitas Pendidikan:									
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	72,27	72,67	73,07	73,47	73,87	74,27	74,77	74,77
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	78,51	80,01	81,51	83,01	84,51	86,01	86,51	86,51
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	59,93	59,94	59,95	59.96	59.97	59.98	59.98	59.98
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	691.32	693.82	696.32	698.82	701.32	703.82	706.32	706.32
	Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	%	48.14	50.11	52.46	54.81	57.16	59.51	61.49	61.49
	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata	%	648.12	648.82	649.52	650.22	650.92	651.62	652.32	652.32

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	91.71	92.01	92.31	92.61	92.93	93.25	93.42	93.42
	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perepmpuan dan laki-laki	%	99.32	99.37	99.42	99.47	99.52	99.57	99.62	99.62
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96.94	96.99	97.04	97.09	97.14	97.19	97.24	97.24
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88.98	89.48	89.98	90.48	90.98	91.48	91.98	91.98
	Kesehatan									
	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0.89	0.89	0.88	0.86	1.15	1.13	1.26	1.26
	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	88,34	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,76	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	96,23	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	69,31	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang	%	59,57	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar									
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	71,84	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	8,16	8,16	8,11	7,93	7,75	7,57	7,39	7,39
	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	91,85	0,9918	0,9919	0,9921	0,9923	0,9924	0,9926	0,9926
	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	0,72	0,90	0,82	0,76	0,72	0,66	0,54	0,54

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	4,61	5,59	5,40	5,22	5,04	4,85	4,67	4,67
	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	108,74	108,74	126,17	108,14	100,64	92,64	90,12	90,12
	Rasio posyandu per satuan balita	1/1000	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1/100000	0,33	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1/100000	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,009	0,009	0,009
	Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah	14,24	14,23	14,89	16,22	17,54	19,53	21,52	21,52
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1/100000	33,16	24,50	26,81	29,46	32,44	35,42	39,06	39,06
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jiwa	35,88	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangn yang memiliki kompetensi kebidanan	Jiwa	92,76	92%	93%	93,5%	94,0%	94,5%	95,0%	95,0%
	Cakupan desa/keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	Jiwa	88,98	90%	91%	92%	93%	93%	93%	93%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jiwa	96,85	94	95	96	97	97	97	97
	Non polio AFP rate per 100,000 penduduk		4,45	2	2	2	2	2	2	2
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jiwa	7,64	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00011	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	67,09	472 org	472 org	472 org	504 org	504 org	504 org	504 org
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Kasus	97,74	95	95	95	95	95	95	95
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani	Jiwa	99,79	100	100	100	100	100	100	100
	Angka kejadian Malaria	Jiwa	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	<0,013	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komrehensif tentang HIV/AIDS	Orang	0	600 Org	600 Org	600 Org	600 Org	600 Org	600 Org	600 Org
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	0,19	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
	Cakupan kunjungan bayi	%	88,52	90	91	92	93	94	95	95
	Cakupan puskesmas	%	154,55	164	164	164	164	164	164	164
	Cakupan pembantu puskesmas	%	57,48	105	105	105	105	105	105	105
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	88,34	90	91	92	93	94	95	95
	Cakupan pelayanan nifas	%	92,71	92	93	93,5	94,0	94,5	95	95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan anjang dengan komplikasi yang ditangani	%	46,78	45	46	47	48	49	50	50
	Cakupan pelayanan anak balita	%	66,39	75	76	77	78	79	80	80
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	1/100	39,4	41	43	45	47	49	50	50
	Cakupan penjaringan anjangn siswa SD dan setingkat	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan anjangn dasar masyarakat miskin	%	74,30	106,763	106,763	106,763	106,763	106,763	106,763	106,763
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangn (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	95	95	95	95	95	95	95
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pekerjaan Umum									
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	40,00	41,143	42,043	42,943	43,71	44,742	44,742	44,742
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,72	51,39	52,12	52,86	53,6	54,33	54,33	54,33
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,4000	0,41143	0,42043	0,42943	0,4371	0,44742	0,44742	0,44742

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,00626	0,00623	0.00613	0,00604	0,00595	0,00587	0,00587	0,00587
	Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40,00	41,14	42,04	42,94	43,71	44,74	44,74	44,74
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
	Persentase Sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bagunan rumah liar	%	0,0154028	0,01606	0,01673	0,01739	0,01805	0,01871	0,01871	0,01871
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,37	973,807	973,896	973,976	974,059	974,152	974,152	974,152
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	2,318,362	231,836	231,836	231,836	231,836	231,836	231,836	231,836
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,61	84,02	84,21	85,3	86,24	87,07	87,07	87,07
	Tidak terjadi genangan 2 kali satahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	72,2
	Persentase Pembangunan Turap diwilayah Jalan penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	37,50	41,53	44,76	47,98	51,21	54,44	54,44	54,44
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	55,59
	Rasio Jaringan Irigasi	Angka	7,482	7,977	8,41	8,843	9,276	9,71	9,71	9,71

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	59,51	61,03	62,50	63,94	65,33	65,33	65,33
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,17	595,099	610,296	62,50	63,94	65,33	65,33	65,33
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan	Unit	16	0	8	7	8	8	7	7
	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	%								
			0,2407	0,2394	0,2383	0,2371	0,2360	0,2350	0,2354	0,2354
	Penataan Ruang:									
	Rasio Ruangan terbuka hijau per satuan luas wilaya ber HPL / HGB	Angka	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	0,0027
	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	%	0,256	0,256	0,261	0,262	0,264	0,266	0,266	0,266
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	0,13	0,1415	0,142	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	0,1432
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	37,73	39,4	42,72	49,24	57,35	60,97	60,97	60,97
	Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan Hasil Pemotretan citra satelit dan survai foto udara terhadap luas daratan	%	76,48	70,44	70,74	71,00	71,10	21,25	71,25	71,25
	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43	91,43
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani	%	2,24	2,24	2,19	2,14	2,09	2,04	1,99	1,99
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	21,05	21,05	19,30	19,30	19,30	19,30
	Rasio rumah layak huni	%	0,175	0,177	0,180	0,183	0,186	0,189	0,192	0,192
	Rasio permukiman layak huni	%	0,757	0,757	0,760	0,763	0,766	0,769	0,772	0,772
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,65	86,65	87,35	88,05	88,75	89,45	90,15	90,15
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	58,12	58,12	59,62	61,12	62,62	64,12	65,62	65,62
	Persentase pemukiman yang tertata	%	75,74	75,74	76,04	76,34	76,64	76,94	77,24	77,24
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	2,24	2,24	2,19	2,14	2,09	2,04	1,99	1,99
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	13,35	13,35	13,20	13,05	12,90	12,75	12,60	12,60
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	67,72	0,00	21,05	42,10	61,40	80,70	100,00	100,00
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaiakn	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	84,61	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	91,18	92,77	93,97	95,18	96,38	97,59	98,79	98,79
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	9,13	9,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	22,89	40,69	45,21	49,73	54,25	58,78	63,30	63,30
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	91,18	92,77	93,97	95,18	96,38	97,59	98,79	98,79
	Persentase Penegakan PERDA	%	84,61	100	100	100	100	100	100	100
	Sosial									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	40,78	41,23	44,93	45,27	45,71	46,07	46,07	46,07
	Persentase PMKS yang tertangani	%	36,52	36,52	40,23	40,36	40,56	40,69	40,69	40,69
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40,13	40,13	42,88	43,18	43,25	43,29	43,29	43,29
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	70	70	70	80	90	100	100	100
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	70	70	70	80	90	100	100	100
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social									
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjt usia terlatar,dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
	Tenaga Kerja									
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	75,75	75,75	75,60	75,70	75,75	76,55	76,55	76,55
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	22,51	9,93	9,93	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	8,82	13,33	13,33	14,29	14,29	15,38	15,38	15,38
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,87	41,87	41,98	42,57	43,07	43,98	43,98	43,98
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75	75,75	75,60	75,70	75,75	76,55	76,55	76,55
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	483,81	488,81	498,76	500,23	510,23	510,23	510,23	510,23
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	85,71	95	95	95	95	95	95	95
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	39,36	40	41	41,5	41,75	42	42,5	42,5
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartip,Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	90	91	92	92,75	93,25	93,75	95	95
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layananan antar kerja dalam wilayah kabupaten /kota	%	45,8	41,87	41,98	42,57	43,07	43,98	43,98	43,98
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	76,02	76,02	75,25	74,69	74,65	74,58	74,58	74,58
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,60	10	10	10	17,14	17,14	17,14	17,14
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	23,98	23,98	24,75	25,31	25,35	25,42	25,42	25,42
	Rasio KDRT	%	0,03	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Persentase jumlah tenaga Kerja di bawah Umur	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	12,23	12,21	12,34	12,51	12,66	12,72	12,72	12,72
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan PPT / PKT di rumah Sakit	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	10	20	20	30	30	30	30
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pangan									
	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	69,61	70	70	70	70	70	70	70
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gram/perkapita/ hari	3.258,86	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	70	71	72	73	74	74	74
	Pertanahan									
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	39,65	39,65	39,85	40,15	40,35	40,55	40,85	40,85
	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup									
	Indeks kulitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai/Skor	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		0	1	1	1	1	1	1	1
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		0	60	80	90	100	0	0	0
	Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah provinsi		0	1	1	1	1	1	1	1
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		0	27,00	27,50	28,00	28,20	28,50	28,50	28,50
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		0	29,50	29,55	29,60	29,65	29,70	29,70	29,70
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		0	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		0	50	50	50	50	50	50	50
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) diKabupaten/Kota		0	1	1	1	1	1	1	1
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	0	3	3	3	3	3	3	3
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		3	3	3	3	3	3	3	3

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		3	1	1	1	1	1	1	1
	Penetapan hak MHA	MHA	0	1	1	1	1	1	1	1
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	11	11	11	11	11	11	11
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		0	11	11	11	11	11	11	11
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		0	1	1	1	1	1	1	1
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		0	5	5	5	5	5	5	5
	Timbulan sampah yang ditangani		22.535,10	32,339	32,558	32,850	33,032	33,397	33,397	33,397
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	5,34	25,68	26,33	27,35	28,32	30,89	30,89	30,89
	Persentase cakupan area pelayanan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	51,51	74,06	73,10	72,31	71,29	70,66	70,66	70,66
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		0	1	1	1	1	1	1	1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Siipil									
	Perekaman KTP elektronik	%	99,71	99,76	99,83	99,85	99,87	99,90	99,94	99,94
	Kepemilikan akta kelahiran	%	84.61	87.14	89,59	91,76	93,32	95,53	97,38	97,38
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasrkan perjanjian kerja	%	2,56	7,69	12,82	15,38	17,95	17,95	46,15	46,15
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,41	0,44	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,53
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,71	99,76	99,83	99,85	99,87	99,90	99,94	99,94
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,54	96,05	96,55	97,05	97,42	98,02	98,62	98,62
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,52	30	45	60	75	90	100	100
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	%	2,56	7,69	12,82	15,38	17,95	17,95	46,15	46,15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama									
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	93	97,5	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,6	10,4	14,5	17,7	21,7	25,8	32,2	32,2
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	123	125	125	125	125	125	125	125
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	135	135	135	135	135	135	135	135
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	365	365	365	370	370	370	370	370
	Persentase LSM Aktif	%	0	0,4	0,4	00,4	00,4	0,04	0,04	0,04
	Persentase LPM Berprestasi	%	2	10	10	20	20	20	20	20
	Persentase PKK aktif	%	139	140	140	140	140	140	140	140
	Persentase Posyandu aktif	%	273	274	274	274	274	274	274	274
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,99	1,88	1,79	1,70	1,63	1,57	1,57	1,57
	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,66	2,60	2,53	2,47	2,40	2,40	2,40

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dok	0	0	1	0	0	0	0	0
	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	%	0	61,53	69,23	76,92	84,61	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	56,25	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/perkada	1	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan	Kerjasama	1	1	3	4	4	4	4	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	informal yang melakukan pendidikan kependudukan									
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	72,47	57,20	58,00	58,90	59,70	60,50	60,50	60,50
	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 pereempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	67,70	29,91	28,16	26,76	25,60	24,63	24,63	24,63
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	%	0	2,99	2,98	2,97	2,96	2,95	2,95	2,95
	Ratio Akseptor KB	%	72,47	57,20	58,00	58,90	59,70	60,50	60,50	60,50
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,61	13,46	12,88	12,40	12,01	11,67	11,67	11,67
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,98	36,64	37,89	39,14	40,81	41,22	41,22	41,22
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	37,98	37,60	37,50	37,40	37,00	36,80	36,80	36,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,90	79,95	79,98	80,06	81,02	81,05	81,05	81,05
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85,33	85,36	85,46	85,53	85,67	85,80	85,80	85,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,19	81,22	81,38	81,45	81,52	81,63	81,63	81,63
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	436,36	436,40	437,00	437,30	437,50	438,00	438,00	438,00
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0,86	0,90	0,95	1,00	1,10	1,19	1,19	1,19
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	113,76	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	0	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	71,13	71,18	72,22	72,46	72,60	72,62	72,62	72,62
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	21,10	21,80	21,85	21,90	21,95	22,00	22,00	22,00
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	19	20	20	21	21	21	21	21
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0058	0,0059	0,0061	0,0061	0,0062	0,0063	0,0063	0,0063
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	72,47	57,20	58,00	58,90	59,70	60,50	60,50	60,50
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	15,61	13,46	12,88	12,40	12,01	11,67	11,67	11,67
	Perhubungan									
	jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	290.241	258.809	263.985	269.265	274.65	280.143	280.143	280.143
	Rasio ijin trayek	%	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	2640	2981,35	3561	4260	5102	6116	6116	6116
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	15	15	15	15	15	15	15	15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Layanan angkutan darat	%	0,183	0,143	0,151	0,162	0,176	0,194	0,194	0,194
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	5,95	0,37	0,44	0,52	0,62	0,74	0,74	0,74
	Pemasangaan Rambu –rambu	%	100	0	30,20	60,10	80,20	100,00	100,00	100,00
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	67,31	46,20	38,70	32,40	27,10	22,60	22,60	22,60
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Org,brg	544.037	400.612	408.624	416.797	425.133	433.635	433.635	433.635
	jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	Org,brg	392.819	400.612	408.624	416.797	425.132	280.143	433.635	433.635
	Komunikasi dan Informatika									
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	0	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan Telekomunikasi	Desa/kelurahan	0	79,55	86,24	90,88	91,74	95,10	95,10	95,10
	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	85,14	86,25	87,30	89,21	93,27	95,28	85,28	85,28
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	53,44	54,67	60,17	72,80	85,13	90,11	90,11	90,11
	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	85,14	85,17	85,20	85,23	85,30	86,19	86,19	86,19
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Koperasi aktif	%	75,75	53,41	53,92	55,15	56,41	57,53	57,53	57,53
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	94,56	94,86	95,22	95,45	95,75	95,75	95,75
	persentase BPR/LKM aktif	%	100	95,76	95,85	96,15	96,86	97,14	97,14	97,14
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	95,28	95,71	99,18	99,05	98,78	98,25	98,25	98,25
	Penanaman Modal									
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	26	26	30	35	40	45	45	45
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rupiah	3.822.080.000.000	3.000.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	278,9	160,01	170,01	180,01	190,01	200,01	200,01	200,01
	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN(Milyar rupiah)	Rupiah	1.511.201.000.000	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	100.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000
	Kepemudaan dan Olahraga									
	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah	74	74	74	74	74	74	74	74
	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	%	40,54	33,71	39,33	44,94	50,56	56,18	61,80	61,80
	persentase wirausaha muda	%	19	32,36	35,60	37,22	38,83	40,45	42,07	42,07
	Cakupan pembinaan olaraga	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	40	43,71	55,71	67,14	78,57	90,00	100	100
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86
	Jumlah atlet berprestasi		30	10	10	15	15	20	20	20
	Jumlah Prestasi Olahraga		0	3	4	5	6	7	7	7
	Statistik									
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	**%**	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah									
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**%**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Persandian									
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kebudayaan									
	Terlestarikannya Cagar Budaya	**%**	45	50	55	60	65	70	75	80
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kali	0	1	1	2	2	2	2	2
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	15	3	4	4	5	5	5	5
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	47	75	75	80	80	85	85	85
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	2	3	3	3	4	4	4
	Perpustakaan									
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	53,62	53.83	54.33	54.83	55.33	55.83	56.33	56.83
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	158	121	123	126	151	163	163	163

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,39	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,11	1,10	1,10	1,09	1,08	1,07	1,09	1,09
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	11.962	12.02	12.205	12.51	15.01	16,200	162.2	162.2
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.946	10.742	11.415	12.121	12.863	13,642	13.642	13.642
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kearsipan									
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	87,18	20,51	12,82	25,64	25,64	12,82	25,64	25,64
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		4	8	104	104	105	110	110	110
	Layanan Urusan Pilihan									
	Pariwisata									
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%			2,81	2,71	2,57	2,68	2,76	2,76
	Konstribusi sector pariwisata terhadap PAD		0,41	1,27	1,12	1,18	1,31	1,44	1,44	1,44
	Kunjungan wisata		32.457	10	12	25	27	30	32	32
	Lama kunjungan wisata		3	3	3	4	5	7	7	7
	PAD sektor pariwisata		0,41	1,27	1,12	1,18	1,31	1,44	1,44	1,44
	Pertanian									
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun									
	Padi									
	Jagung									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular									
	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB	%	7,10	7,10	7,13	7,16	7,19	7,21	7,22	7,22
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB									
	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0,74	0,85	0,97	1,10	1,24	1,35	1,45	1,45
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB									
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		7,10	7,10	7,13	7,16	7,19	7,21	7,22	7,22
	Cakupan bina kelompok petani		58,15	58,26	58,57	58,67	58,75	58,80	58,87	58,87
	Perdagangan									
	Ekspor Bersih Perdagangan		773.511.973,67	600.000.000	750.000.000	800.000.000	810.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		29,02	10	15	17	19	22	22	22
	Perindustrian									
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	7,04	5,56	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	50	50	50	50	50	50	50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	50	50	50	50	50	50	50	50
	Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industry(IPUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUK) dan izin perluasan Kawasan industry(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Ada/Tida ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Kelautan dan Perikanan									
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)									
	Produksi perikanan		101	100	100	100	100	100	100	100
	Konsumsi ikan		100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan bina kelompok nelayan		12,68	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Produksi perikanan kelompok nelayan		37,58	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,31
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Nilai Tukar Nelayan		105,05	105,15	106,01	106,87	107,73	108,59	109,45	109,45
	Penunjang Urusan									
	Perencanaan Pembangunan									
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	97,61	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	97,29	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	93,15	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai/tidak sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
	Keuangan									
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%								
	Rasio PAD	%								
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA	%		3	3	3	3	3	3	3
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,72	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20,54	21	21	21	21	21	21	21
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,71	15	15	15	15	15	15	15
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.									
	a. Belanja Operasi terhadap total Belanja	%		68,39	59,50	61,10	60,64	60,52	60,19	60,19
	b. Belanja Modal terhadap Total Belanja	%		18,57	19,57	16,89	17,62	17,78	18,20	18,20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	c. Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja	%		0,16	0,13	0,17	0,13	0,06	0,06	0,06
	d. Belanja Transfer terhadap Total Belanja	%		12,87	20,80	21,84	21,61	21,64	21,55	21,55
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		17.262.101.969	16.210.182.450	16.210.182.450	17.310.237.550	18.320.445.657	19.780.954.775	19.780.954.775	19.780.954.775
	Penetapan APBD		Tepat waktu (perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	82,61	3,26	13,23	20,49	27,73	34,88	35,00	35,00
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,07	4,07	10,55	24,74	38,82	52,66	53,00	53,00
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		27 Orang	33 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35Orang
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		787 Orang	787 Orang	750 Orang	700 Orang	700 Orang	600 Orang	500 Orang	500 Orang
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2572 Orang	2800 Orang	3300 Orang	3450 Orang	3600 Orang	3750 Orang	3900 Orang	3900 Orang
	Penelitian dan Pengembangan									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase hasil peneltian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan	%	48,71	50	50	50	50	60	70	70
	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	%	48,71	50	50	50	50	60	70	70
	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	48,71	50	50	50	50	60	70	70
	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	%	48,71	50	50	50	50	60	70	70
	Pengawasan									
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase tindak lanjut temuan	%	23.16	88	90	92	94	95	95	95
	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah temuan BPK	%	8	25	22	20	15	8	8	8
	Sekretariat Dewan									
	Tersediahnya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD									
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : *Data Proyeksi Bapelitbangda 2021*

8.2. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan .
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 8.4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

NO	Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional (%)	Target (%)					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**Pendidikan**							
1.1	Pendidikan Dasar							
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan							
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Jumkah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	%	100	100	100	100	100	100
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini							
1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	%	100	100	100	100	100	100
2	**KESEHATAN**							
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional (%)	Target (%)					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
1.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	100
1.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	100
1.9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus	%	100	100	100	100	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	%	100	100	100	100	100	100
1.1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang denga Resiko Teninfeksi HIV	%	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1.1	Persentase Penyediaan kebutuhan pokok Air minum	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Penyediaan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	Persentase Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1.1	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**							

NO	Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional (%)	Target (%)					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100

8.3 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 8.5
MATRIKS BAGIAN 1 : TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs (TPB/SDGs)
KABUPATEN LUWU TIMURTAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN										
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN										
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	6.85	6.84	6.64	6.44	6.24	6.04	5.84
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	97.00	97.00	97.01	98.01	99.01	100.00	100.00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan	Dinas Sosial & P3A	%	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.									
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial & P3A	Orang	7,253	7,253	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	92.76	92.00	93.00	93.50	94.00	94.50	95.00
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	88.98	78.00	80.00	85.00	90.00	91.00	92.00
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	72.47	72.47	72.48	72.49	72.50	72.51	72.51

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03	62.50	63.94	65.33	65.33
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03	62.50	63.94	65.33	65.33
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	92.54	105.50	105.75	106.00	106.25	106.50	106.75
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	95.99	99.64	99.89	100.14	100.39	100.64	100.89
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	81.53	87.14	89.59	91.76	93.32	95.53	97.38
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan Bukan PLN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	43.45	43.45	41.28	39.21	37.25	35.39	33.62
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.61	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.5.1.(a)	Jumlah Lokasi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	3	0	4	4	4	4	4
1..5.1.(e)	Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	202	202	202	202	202	202	202
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	1,007,901,000	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) Tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1	2	0	0	0
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN										
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN										
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	2.02	3.00	2.80	2.60	2.40	2.20	2.00
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	6.2	7.00	6.80	6.50	6.30	6.00	5.50
2.2.1.(a)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	%	8.00	8.00	7.70	7.50	7.30	7.00	6.50
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	2.50	2.50	2.30	2.10	1.90	1.70	1.50
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	12.00	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.00
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	65.00	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	108.74	108.74	126.17	108.14	100.64	92.64	90.12

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	92.76	93.00	93.50	94.00	94.50	95.00	96.00
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	92.76	92.00	93.00	93.50	94.00	94.50	95.00
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	0.72	0.90	0.82	0.76	0.72	0.66	0.54
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	4.61	5.59	5.40	5.22	5.04	4.85	4.67
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per 1000 kelahiran hidup	8.16	8.16	8.11	7.93	7.75	7.57	7.39
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	88.98	80.00	83.00	85.00	88.00	90.00	92.00
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0.013	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	100	157.3	157.3	157.3	168	168	168
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	11	11	11	11	11	11	11
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis Yang terabaikan	Dinas Kesehatan	orang	20	20	20	19	17	15	12
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	NA	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	NA	28.00	27.50	27.00	26.00	25.00	24.30
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	NA	19.00	18.00	17.00	16.00	15.00	14.00
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	%	NA	0	0	0	0	0	0
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Perkapita) Oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.	Dinas Kesehatan	liter per kapita	NA	0	0	0	0	0	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	NA	72.47	72.48	72.49	72.50	72.51	72.51
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	Dinas Pengendalian Penduduk dan	%	NA	57.20	58.00	58.90	59.70	60.50	60.50

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Keluarga Berencana								
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	24.98	36.64	37.89	39.14	40.81	41.22	41.22
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	67.70	29.91	28.16	26.76	25.60	24.63	24.63
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2.21	2.66	2.60	2.53	2.47	2.40	2.40
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	96.00	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%		2.98	3.28	3.61	3.97	4.37	4.81
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	%	96.25	96.25	96.28	96.31	96.34	96.37	96.40
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	68.72	74.59	82.16	85.94	88.64	89.18	89.72
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	63.08	76.81	82.60	84.05	88.40	89.85	91.30

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.13	114.03	114.30	114.57	114.84	115.11	115.38
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.56	139.02	139.20	139.38	139.56	139.74	139.92
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	8.8	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	46.11	68.00	68.20	68.40	68.60	68.80	69.00
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan / Laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTS/ Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Dinas Pendidikan	%	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100	RAPM SD : 100, RAPM SMP :100
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentasi Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Pendidikan	%	96.99	96.99	97.04	97.09	97.14	97.19	97.24

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.6.1.(b)	persentasi angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	%	PAMH 15-24 : 99.45 PAMH 15-59: 95.98	PAMH 15-24 : 99.45 PAMH 15-59: 95.98	PAMH 15-24 : 99.50 PAMH 15-59: 96.3	PAMH 15-24 :99.55 PAMH 15-59: 96.62	PAMH 15-24: 99.60 PAMH 15-59: 96.94	PAMH 15-24: 99.65 PAMH 15-59: 97.26	PAMH 15-24: 99.70 PAMH 15-59: 97.58
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi Sekolah Dengan Akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tjuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) insfrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Dinas Pendidikan	%	PSDAF(a): 97.56 PSDAF(b): 53.65 PSDAF(c):39.02 PSDAF(d):1.21 PSDAF(f):95.12 PSDAF(g):79.26 PSDAF(h): 97.56	PSDAF(a): 97.56 PSDAF(b): 53.65 PSDAF(c):39.02 PSDAF(d):1.21 PSDAF(f):95.12 PSDAF(g):79.26 PSDAF(h): 97.56	PSDAF(a): 97.58 PSDAF(b): 53.67 PSDAF(c):39.04 PSDAF(d):1.23 PSDAF(f):95.14 PSDAF(g):79.28 PSDAF(h): 97.58	PSDAF(a): 97.60 PSDAF(b): 53.69 PSDAF(c):39.06 PSDAF(d):1.25 PSDAF(f):95.16 PSDAF(g):79.30 PSDAF(h): 97.60	PSDAF(a): 97.62 PSDAF(b): 53.71 PSDAF(c):39.08 PSDAF(d):1.27 PSDAF(f):95.18 PSDAF(g):79.32 PSDAF(h): 97.62	PSDAF(a): 97.64 PSDAF(b): 53.73 PSDAF(c):39.10 PSDAF(d):1.29 PSDAF(f):95.20 PSDAF(g):79.34 PSDAF(h): 97.64	PSDAF(a): 97.66 PSDAF(b): 53.75 PSDAF(c): 39.12 PSDAF(d): 1.31 PSDAF(f): 95.22 PSDAF(g): 79.36 PSDAF(h): 97.66
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	%	TK : 73.33 SD : 65.30 SMP: 67.47	TK : 73.33 SD : 65.30 SMP: 67.47	TK : 73.38 SD: 65.35 SMP: 67.52	TK : 73.43 SD : 65.40 SMP : 67.57	TK : 73.48 SD : 65.45 SMP: 67.62	TK : 73.53 SD: 65.50 SMP: 67.67	TK : 73.58 SD: 65.55 SMP: 67.72
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER										
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	14.00	14.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00
5.2.2.*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-	Dinas Sosial, Pemberday	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	aan Perempuan dan Perlindungan Anak								
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	15.61	13.46	12.88	12.40	12.01	11.67	11.67

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	65.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03	62.50	63.94	65.33	65.33
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	57.17	59.51	61.03	62.50	63.94	65.33	65.33
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	67.71	67.71	70.86	74.01	77.16	80.31	83.46
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	Dinas Pekerjaan Umum dan	%	97.37	97.38	97.39	97.4	97.41	97.42	97.42

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	layanan sanitasi layak.	Penataan Ruang								
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	86	127	128	128	128	128	128
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127	127	128	128	128	128	128
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	0	0	0.0405749	0.1199359	0.1969993	0.2718666	0.2718666
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
6.3.1. (b)	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	0	0	0.0405749	0.1199359	0.1969993	0.2718666	0.2718666
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup								
	1. Towuti		IKA	-	87.78	87.80	87.82	87.84	87.86	87.88
			Pij	-	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	2. Mahalona		IKA	-	90.15	90.17	90.19	90.21	90.23	90.25
			Pij	-	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
6.3.2.(b)	Kualitas Air sungai sebagai Sumber Air Baku	Dinas Lingkungan Hidup								
	1. Sungai Angkona		IKA		81.31	81.33	81.35	81.37	81.39	81.41
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	2. Sungai Kalaena		IKA		81.36	81.38	81.40	81.42	81.44	81.46
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	3. Sungai Lagego		IKA		81.10	81.12	81.14	81.16	81.18	81.20
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	4. Sungai Malili		IKA		83.40	83.42	83.44	83.46	83.48	83.50

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	5. Sungai Tomoni		IKA		81.70	81.72	81.74	81.76	81.78	81.80
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
	6. Sungai Wasuponda		IKA		85.50	85.52	85.54	85.56	85.58	85.60
			Pij		0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5	0-≤5
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	RPJMD	%	1.46	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	RPJMD	Juta Rupiah	70.50	70.90	71,45	72.00	72.55	73.10	73.65
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	42.51	42.51	42.33	42.45	42.60	42.60	43.12
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan	Rupiah	20,000	20,000	20,400	20,800	21,200	21,400	21,800

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Perindustrian								
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	4.46	4.39	4.28	4.17	3.92	3.05	2.95
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	10.00	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	10,000	10,000	12,000	25,000	27,000	30,000	32,000
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00
8.9.1. (c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Dinas pariwisata, Kebudayaan	%	1.27	1.27	1.12	1.18	1.31	1.44	1.44

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kepemudaan dan Olahraga								
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 penduduk Dewasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak lembaga keuangan (BANK umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Km	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.10.1.(b)	Proporsi Kredit UMKM terhadap total Kredit	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%							
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	8	8	8	8	8	8	8
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2.1*	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan perkapita.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	3.82	3.82	3.85	3.90	3.91	3.95	3.98
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	4.40	4.40	4.70	4.85	5.12	5.25	5.45
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	16.80	16.80	17.25	15.95	16.85	17.52	17.10
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	29.83	29.83	29.85	30.31	30.25	31.23	32.01
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	21.50	21.50	21.80	22.01	22.30	22.37	22.45

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mengusai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	85.14	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM	PM	PM	PM	PM
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN										
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	%	0.405	0.377	0.277	0.262	0.247	0.232	0.217
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	BPS	%	6.85	6.84	6.64	6.44	6.24	6.04	5.84
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	13	13	6	4	2	1	0

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	3	3	3	5	7	7	7
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Proporsi PesertaProgram jaminan Sosial Bidang Ketenaga Kerjaan	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100	100	100	100	100
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	88.80	88.80	87.39	88.70	90.01	91.32	92.64
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah Korban meninggal, Hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	8,61	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Badan Penanggulangan	Nilai	202	202	202	202	202	202	202

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Bencana Daerah								
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	2	0	1	0	1	0	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	1,007,901,000	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%							
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1	2	0	0	0
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	1,500	1,500	1,550	1,600	1,650	1,700	1,750
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	3,000	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1	2	0	0	0
13.1.2*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena dampak Bencana per 100.000 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	2,32	PM	PM	PM	PM	PM	PM
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN										
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polres	Kasus	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik pe 100.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	0	0	0	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	95.95	95.95	96.25	96.50	97.20	97.50	97.85

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Skor	61.06 (B)	65.00 (B)	71.00 (BB)	76.85 (BB)	81.25 (A)	84.82 (A)	87.45 (A)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	34.43	55.00	60.00	75.00	80.00	90.00	100.00
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Kab	100	100	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	6.67	6.67	6.67	6.67	16.66	16.66	16.66
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	13.79	17.24	17.24	25.00	25.00	25.00	30.00
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	96.05	96.05	96.55	97.05	97.42	98.02	98.62

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87.14	87.14	89.59	91.76	93.32	95.53	97.38
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87.14	87.14	89.59	91.76	93.32	95.53	97.38
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(c)	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat pengelolah informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	NA	5	5	5	10	10	10
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PDB menurut sumbernya.									
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%							
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	53.44	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	89.00	89.00	89.50	90.00	91.00	91.00	91.50

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	87.00	87.00	87.50	88.00	88.50	89.00	89.50
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Unit	6	6	6	6	6	6	6
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	75.00
Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	9,745	11,166	11,500	11,550	11,600	11,650	11,700

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target Pencapaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	81.00	81.00	81.50	82.00	82.50	83.00	83.50

Sumber: Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda 2021

BAB IX
PENUTUP

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen kerangka kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Tahun Kedepan. Pada Tahun 2026 mendatang merupakan masa transisi Pemerintahan Bupati Luwu Timur H. Budiman. guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah diperlukan pedoman transisi guna menjembatani proses perencanaan pada periode RPJMD selanjutnya 2026-2031. Selain itu Dalam rangka mengisi kekosongan Pedoman Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 setelah RPJMD berakhir, dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) yang selanjutnya akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja RPJMD Periode selanjutnya (2026-2031).

Pedoman transisi dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 masih menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama (2026) dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil

pemilukada pada periode berikutnya. RPJMD merupakan dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahap Terakhir Periode ke 5 (lima) RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025, diharapkan Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Luwu Timur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Luwu Timur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur;
3. Bapelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD;
4. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Luwu Timur;
5. RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD Tahun 2021-2026;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta berkewajiban menjamin konsistensi

antara RPJMD dengan Renstra SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;

7. Dalam rangka perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta penyusunan dokumen penganggaran Daerah Setiap Tahunnya mulai dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Baik Pokok maupun Perubahan;
8. Diharapkan kepada Seluruh komponen , baik unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, DPRD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, wajib mempedomani program-program yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya serta bersinergi dalam melaksanakan Program – Program Pembangunan Daerah sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat dioptimalkan;
9. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
10. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD, dan pada akhir masa jabatan Bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
11. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)

serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD dan seluruh stake Holders Pembangunan daerah harus bersungguh-sungguh memperhatikan serta bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan dalam kerangka mewujudkan visi daerah yakni ***"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA "***.

BUPATI LUWU TIMUR

BUDIMAN